



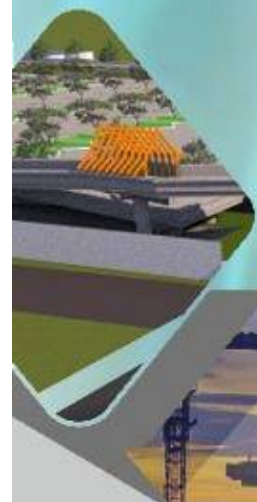
**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 34 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
( RKPD )  
KOTA MADIUN  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020**





**WALIKOTA MADIUN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 34 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA MADIUN TAHUN 2021**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan bahan pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran dan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2021.**

**Pasal 1**

Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Sinkronisasi Kegiatan sesuai RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 beserta Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 yang dilaksanakan bersama *stakeholders*.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 Juli 2020

  
**WALIKOTA MADIUN,**  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 Juli 2020

  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 34/2

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	7
1.3.1 Hierarki Perencanaan Pembangunan Daerah	7
1.3.2 Keterkaitan Dengan Evaluasi Hasil RKPD Tahun Lalu	9
1.3.3 Keterkaitan Dengan Penganggaran	10
1.3.4 Keterkaitan Dengan RTRW dan Dokumen KLHS	10
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Sistem Dokumen RKPD	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>15</b>
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	15
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	16
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	30
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	66
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD	74
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	154
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	154
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN</b>	<b>196</b>
3.1 Arak Kebijakan Ekonomi Daerah	197
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	203
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	203
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	207
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>221</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	221
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021	227
4.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun 2021	234
4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021	247

<b>BAB V SASARAN KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b> .....	<b>260</b>
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>328</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>342</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang Dijabarkan ke Dalam Tema RKPD Kota Madiun 2021.....	9
Tabel II.1	Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019.....	19
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2019.....	19
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2015-2019.....	20
Tabel II.4	Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	20
Tabel II.5	Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS-III Plus Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	21
Tabel II.6	Indikator Kinerja Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2019.....	24
Tabel II.7	Angka Kematian Ibu di Kota Madiun Tahun 2016-2019.....	25
Tabel II.8	Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun.....	27
Tabel II.9	Balita Gizi Buruk di Kota Madiun .....	28
Tabel II.10	Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	29
Tabel II.11	Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	31
Tabel II.12	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2019 .....	31
Tabel II.13	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2018-2019.....	33
Tabel II.14	Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	36
Tabel II.15	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019.....	38
Tabel II.16	Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019.....	38
Tabel II.17	Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019.....	38
Tabel II.18	Jumlah Kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2019.....	39
Tabel II.19	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standart di Kota Madiun Tahun 2016-2019.....	40
Tabel II.20	Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2019.....	41
Tabel II.21	Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun Tahun 2016-2019.....	41
Tabel II.22	Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Di Kota Madiun Tahun 2014-2018.....	42
Tabel II.23	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan .....	43

Tabel II.24	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2018-2019.....	44
Tabel II.25	Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018-2019.....	46
Tabel II.26	Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2019.....	48
Tabel II.27	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2019.....	49
Tabel II.28	Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	55
Tabel II.29	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	57
Tabel II.30	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan Dan Olahraga di Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	58
Tabel II.31	Jumlah Organisasi Olahraga Di Kota Madiun Tahun 2019.....	60
Tabel II.32	Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	62
Tabel II.33	Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2019.....	65
Tabel II.34	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.....	67
Tabel II.35	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019.....	68
Tabel II.36	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019.....	69
Tabel II.37	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019.....	70
Tabel II.38	PDRB Per Kapital Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2015-2019.....	70
Tabel II.39	Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	74
Tabel II.40	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2019 Kota Madiun.....	76
Tabel II.41	Permasalahan Daerah.....	158
Tabel II.42	Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	160
Tabel III.1	Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2019.....	201
Tabel III.2	Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2019-2022.....	203
Tabel III.3	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pendapatan Daerah kota Madiun Tahun 2021.....	205
Tabel III.4	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2021.....	206
Tabel III.5	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyek/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021.....	214
Tabel III.6	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021.....	216

Tabel III.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2021.....	219
Tabel III.8	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2021.....	220
Tabel IV.1	Tema Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota Madiun.....	229
Tabel IV.2	Prioritas Nasional/Prioritas Provinsi/Prioritas Kota/Program Prioritas.....	229
Tabel IV.3	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun.....	235
Tabel IV.4	Hubungan Tujuan/Sasaran dengan Strategi/Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun.....	236
Tabel IV.5	Prioritas Pembangunan berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	248
Tabel IV.6	Matriks Program Pembangunan Daerah Kota Madiun 2021.....	253
Tabel V.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Per Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021.....	261
Tabel VI.1	Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah Kota Madiun IKU dan IKK Tahun 2021.....	328

## DAFTAR TABEL

Gambar I.1	Keterkaitan Antara Perencanaan dengan Penganggaran dan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	8
Gambar II.1	Wilayah Administrasi Kota Madiun .....	16
Gambar II.2	Jumlah PMKS dan Presentase PMKS Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	22
Gambar II.3	Jumlah Penanganan PMKS dan Presentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2015-2019 .....	22
Gambar II.4	Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	23
Gambar II.5	Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun 2016-2019.....	26
Gambar II.6	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2015-2019 .....	32
Gambar II.7	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun 2015-2019 .....	39
Gambar II.8	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Madiun .....	64
Gambar II.9	Rasio Petugas Pol PP Per 10.000 Penduduk di Kota Madiun.....	64
Gambar II.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2015-2019 .....	67
Gambar II.11	Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	71
Gambar II.12	Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun.....	72
Gambar II.13	Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	73
Gambar II.14	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2015-2020.....	73
Gambar III.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun.....	200

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah (provinsi dan kota) tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam melaksanakan pembangunan daerah selama ini Pemerintah Daerah dihadapkan pada satu permasalahan yang mendasar, yaitu keterbatasan anggaran, disandingkan dengan kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, agar pelaksanaan pembangunan dapat direncanakan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja yang optimal, maka pembangunan yang akan dilaksanakan perlu direncanakan terlebih dahulu dengan matang, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya dan aspek ketersediaan sumber daya alam serta kemampuan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.

Mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup menjadi suatu yang amat penting karena hal ini merupakan salah satu upaya setiap Pemerintah Daerah agar tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang semakin terbatas, dihadapkan pada kegiatan pembangunan yang semakin berkembang yang tentunya membutuhkan dukungan tersediaan sumber daya alam yang semakin banyak dan beragam. Faktor tersebut dapat saja menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan cara pandang antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk menghindari perbedaan cara pandang tersebut, maka pemerintah pusat mengupayakan adanya persamaan persepsi antara semua daerah otonom sehingga perencanaan pembangunan daerah selaras dan terintegrasi serta sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional.

Berkaitan dengan upaya agar ada keselarasan, sinergitas dan konsistensi antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, maka pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diamanatkan pula, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud terdiri dari :

- (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam konteks ini yang akan disusun lebih lanjut adalah dokumen RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan tahapan tersebut semua daerah otonom memiliki tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang sama. Proses penyusunan Rancangan dokumen RKPD pada dasarnya dilakukan dengan mensinergikan dan menyelaraskan antara materi pokok kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Nasional/Provinsi pada tahun perencanaan berkenaan. Dengan demikian, dapat diartikan, bahwa dalam penyusunan kebijakan pembangunannya, pemerintah Kota Madiun wajib melakukan proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritasnya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Dengan metode seperti ini, bahwa dokumen RKPD Kota Madiun merupakan bagian dari RKPD Provinsi Jawa Timur maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. Sementara itu, untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan daerah tahun 2021, maka Pemerintah Daerah menyusun dokumen RKPD tahun 2021. Proses penyusunannya telah dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penyusunan draft Rancangan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, dan Forum Perangkat Daerah (PD).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dalam penyusunan Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 melalui beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, hingga tingkat pusat/nasional.

Selain itu, dalam penyusunan Rancangan RKPD kota Madiun Tahun 2021 juga mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain yakni :

- a. Bappeda, bertanggung jawab mengkoordinir penyusunan, mulai dari persiapan penyusunan draft sampai dengan tersusunnya rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021;
- b. Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan dokumen Rencana Kerja PD (Renja PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta mengacu pada Rencana Strategis PD (RENSTRA PD), sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Akhir dokumen RKPD;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memantau, dan memberikan saran pertimbangan, serta masukan sesuai dengan aspirasi yang diperoleh dari masyarakat; dan
- d. Seluruh pemangku kepentingan, antara lain para tokoh masyarakat/agama, para pakar/akademisi, LSM, kalangan dunia usaha, organisasi perempuan dan organisasi kemasyarakatan lainnya juga memberikan saran dan masukan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2020;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

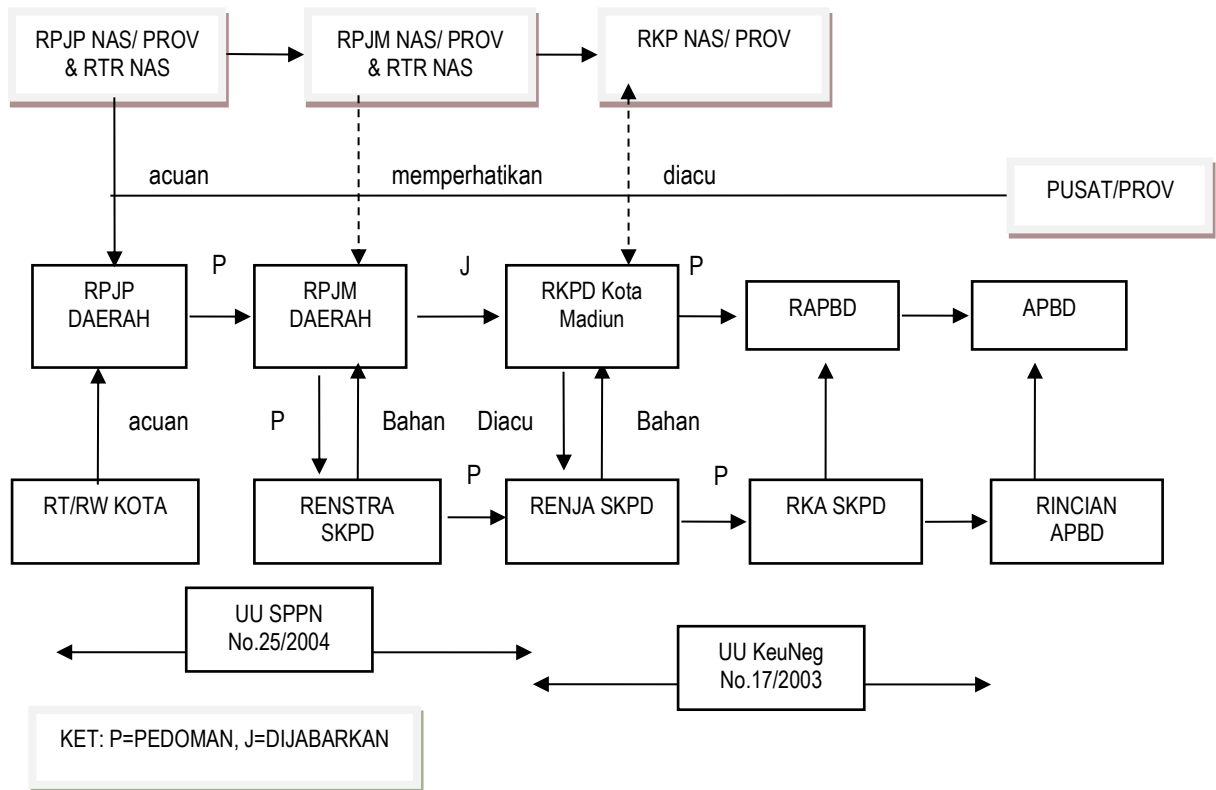
### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

#### **1.3.1. Hierarki Perencanaan Pembangunan Daerah**

Penyusunan Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 telah terintegrasi dengan antara lain dokumen RKP Tahun 2021, dengan Rancangan dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, dengan dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, dengan dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2012-2032, dan juga memperhatikan dokumen RKPD Kabupaten/Kota tetangga terdekat.

Oleh karena itu, Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota terdekat lainnya. Sehingga Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 telah sinkron, selaras dan bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran keterkaitan antara Perencanaan dengan Penganggaran dan antara Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dapat disajikan sebagaimana bagan alur yang terdapat pada gambar dibawah ini.



**Gambar I.1**  
**Keterkaitan Antara Perencanaan dengan Penganggaran dan Antara Dokumen RKPd dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Dari bagan alur yang terdapat pada gambar 1.1 diatas dapat diketahui, bahwa keterkaitan yang erat antara proses perencanaan dengan tahapan penganggaran. Demikian juga antara Rancangan dokumen RKPd dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, terlihat ada korelasi yang sangat kuat. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota. Oleh karena itu, substansi RKPd Kota Madiun Tahun 2021 harus selaras antara dokumen perencanaan tingkat Pusat, Provinsi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan antara Nasional, Provinsi dan Kota.

**Tabel I.1**  
**Tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam**  
**Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2021**

<b>Tema Pemerintah Pusat</b>	<b>Tema Pemerintah Provinsi</b>	<b>Tema Pemerintah Kota Madiun</b>
<i>Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan InvestasiPenguatan Sistem Kesehatan Nasional</i>	<i>Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan dan Infrastruktur di Jawa Timur</i>	<i>Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Infrastruktur di Kota Madiun</i>

### **1.3.2. Keterkaitan Dengan Evaluasi Hasil RKPD Tahun Lalu**

Untuk menjamin adanya kesinambungan dalam perumusan kebijakan Rancangan RKPD Kota Madiun Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan memuat visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih, mengacu pada RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, maka perumusan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Rancangan RKPD ini, juga telah mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Madiun Tahun 2019. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Madiun tahun yang lalu dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam perumusan kebijakan yang tertuang kedalam Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021.

Hal ini penting, mengingat dengan mengacu pada data dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu akan diketahui :

- 1) Capaian realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RKPD, dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Renja Perangkat Daerah dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RKPD dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP;
- 2) Untuk mengetahui dan memastikan, bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, dan pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi; dan

- 3) Untuk mengetahui berbagai kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKPD yang lalu dan sekaligus merumuskan berbagai alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan RKPD tahun-tahun mendatang.

### **1.3.3. Keterkaitan Dengan Penganggaran.**

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tegas telah diamanatkan, bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sementara itu, program prioritas daerah dan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021, merupakan program/kegiatan dan anggaran yang masih bersifat indikatif dan untuk dapat dioperasional setiap tahunnya, maka dokumen RKPD setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. KUA dan PPAS selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Madiun Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

### **1.3.4. Keterkaitan Dengan Dokumen RTRW dan Dokumen KLHS.**

#### **1. Keterkaitan Dengan Dokumen RTRW.**

Prinsip perencanaan pembangunan adalah terintegrasinya antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan dokumen RKPD harus berpedoman pada dokumen RTRW. Mengintegrasikan dokumen RTRW kedalam dokumen perencanaan dilakukan melalui analisis dan telaah terhadap dokumen RTRW. Hal ini penting untuk memastikan dan menjamin agar arah kebijakan yang dituangkan kedalam Rancangan dokumen RKPD konsisten, selaras, bersinergi dan harmonis dengan arah kebijakan yang telah dituangkan kedalam dokumen RTRW.

Komponen yang ditelaah dalam dokumen RTRW, meliputi antara lain :

- a. Rencana struktur ruang, yaitu susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaah dimaksud meliputi, antara lain:
  - 1) Peta rencana struktur ruang;
  - 2) Rencana sistem perkotaan;
  - 3) Rencana jaringan transportasi;
  - 4) Rencana jaringan energi;
  - 5) Rencana jaringan telekomunikasi; dan
  - 6) Rencana sistem jaringan sumber daya air.
- b. Rencana pola ruang, yaitu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaah dimaksud meliputi antara lain :
  - 1) Rencana kawasan lindung; dan
  - 2) Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.
- c. Telaah indikasi program terkait dengan pemanfaatan ruang, yaitu program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program dan kegiatan sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Telaah dimaksud meliputi antara lain :
  - 1) Program pembangunan sektoral wilayah kota;
  - 2) Program pengembangan wilayah kota;
  - 3) Program pengembangan kawasan perkotaan; dan
  - 5) Program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota.

## **2. Keterkaitan Dengan KLHS.**

Mengacu pada hasil kajian lingkungan hidup strategis, dimaksudkan agar ada kepastian dan jaminan, bahwa dalam mengimplementasikan dokumen RKPD dapat sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampungnya, maka disinergikan dengan data dan informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung dan daya tampung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (*development sustainable*), sehingga perumusannya sejalan dengan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDG's).

### **1.4. Maksud dan Tujuan.**

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2021, antara lain adalah :

1. menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras, terintegrasi dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2021; dan
2. menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2021;
4. memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.



Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021, antara lain sebagai berikut :

1. menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021;
2. menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun Rancangan dokumen Renja 2021;
3. meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi perencanaan pembangunan antar stakeholder, sehingga dokumen perencanaan Tahun 2021 memuat kebijakan publik untuk dapat dijadikan acuan seluruh komponen masyarakat Kota Madiun dalam melaksanakan perannya;
4. menyediakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah dan menginformasikan arah pelaksanaan pembangunan tahun 2021;
5. mewujudkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD.**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu, sistematika penyusunan Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
- 1.4. Maksud dan Tujuan.
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah.

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat.
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan.
  - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
  - 2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
- 3.2. Arak Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah,

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n).

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII Penutup.

## **BAB II**

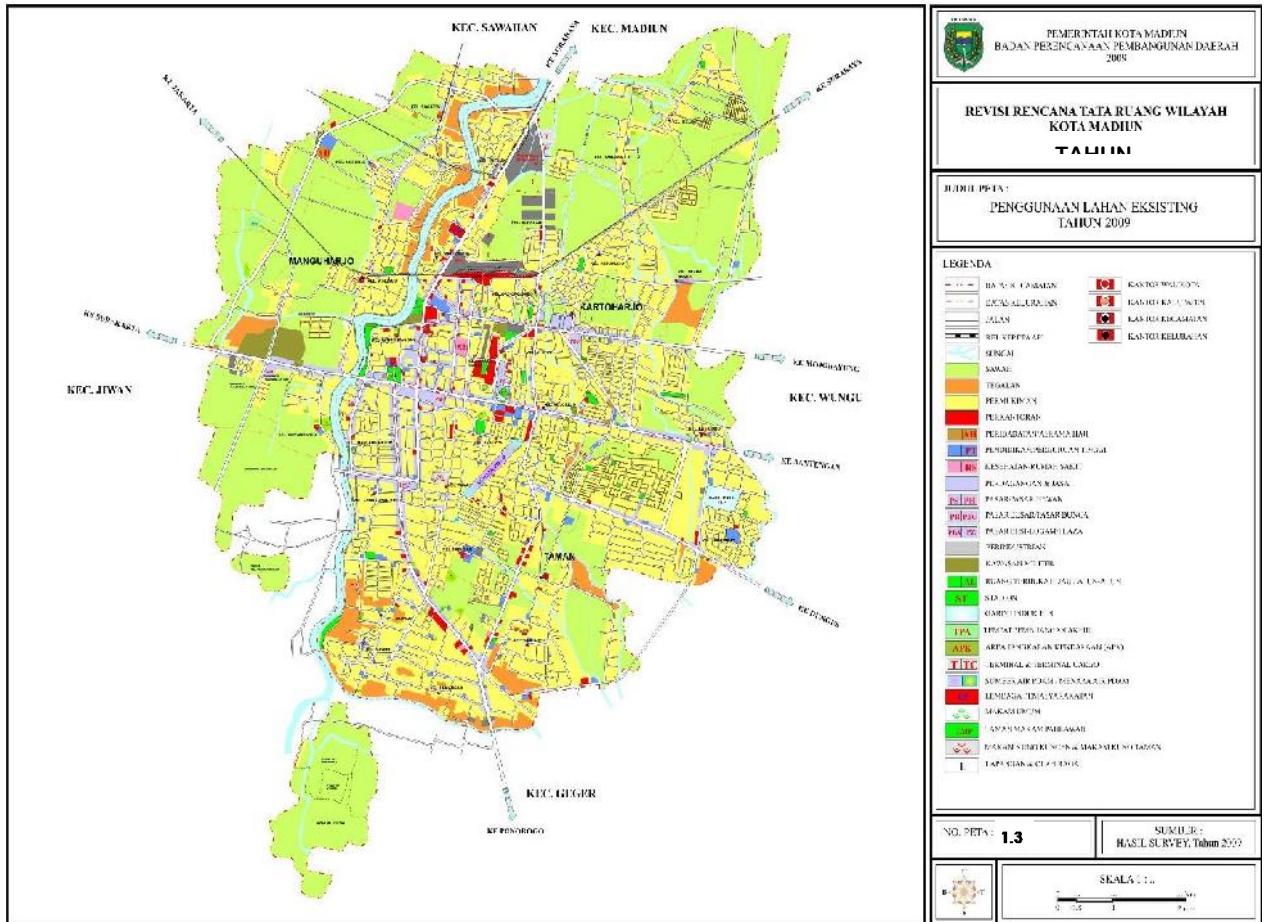
### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.**

Pemerintah Kota Madiun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa, merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang secara administrasi wilayah masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km<sup>2</sup>, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km<sup>2</sup>. Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Secara geografi Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:

1. Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, disebelah utara;
2. Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, disebelah selatan;
3. Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, disebelah timur; dan
4. Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, disebelah barat.

Untuk mengetahui letak dan luas wilayah Pemerintah Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada gambar 2.1 dibawah ini



Sumber : RTRW Kota Madiun

**Gambar II.1**  
**Wilayah Administrasi Kota Madiun**

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.

#### 1. Geografi.

##### a. Posisi Astronomis.

Secara astronomis Kota Madiun terletak pada 111 BT-112 BT dan 7 LS-8 LS. Posisi strategis tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi antara lain Pusat Pelayanan Pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.

##### b. Kondisi geografis.

Berdasarkan aspek geografis, Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara di Kota Madiun antara 20°C hingga 35°C.

**c. Kondisi Topografi.**

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak dilembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Keadaan topografi di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m diatas permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan dibagian tengah ketinggiannya 63 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

**d. Kondisi Geologi.**

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

**e. Kondisi Hidrologi.**

Secara Hidrologi Kota Madiun terdiri dari air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah selain dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu : Sungai Sono dan Sungai Piring yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun

#### **f. Kondisi Klimatologi.**

Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedangkan kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan November. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101–300 mm/bulan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

#### **g. Penggunaan lahan**

Pola penggunaan lahan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya seluas 19,82 km<sup>2</sup> atau 59,64% dari luas kota. Sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang seluas 13,41 km<sup>2</sup> atau 40,36% dari luas kota. Madiun merupakan daerah urban, sehingga dominasi penggunaan lahannya adalah untuk kawasan terbangun yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan Manguharjo.

### **2. Demografi.**

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 210.115 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 57.748 jiwa, Kecamatan Manguharjo 63.017 jiwa, dan Kecamatan Taman 89.350 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan**  
**Tahun 2015-2019**

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kartoharjo	57.777	58.147	57.985	57.927	57.748
2	Manguharjo	62.276	62.877	62.879	62.801	63.017
3	Taman	88.195	89.013	88.945	89.069	89.350
	<b>Total</b>	<b>208.248</b>	<b>210.037</b>	<b>209.809</b>	<b>209.797</b>	<b>210.115</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020*

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir Tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 73.045 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 498 jiwa; D-III 5.761 jiwa; S-1 20.071 jiwa; S-2 1.391 jiwa, dan S-3 35 jiwa. Secara lengkap jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel II. 2.**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2015 s/d 2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	30.989	31.740	32.430	31.258	31.374
Tidak Tamat SD;	18.575	18.695	18.755	19.575	19.887
Tamat SD;	32.950	32.318	30.919	30.169	29.266
Tamat SLTP;	30.155	30.342	29.836	29.487	28.787
Tamat SLTA;	69.799	70.756	71.494	72.405	73.045
Tamat D-I/II;	440	439	452	468	498
Tamat D-III;	5.507	5.557	5.566	5.639	5.761
Tamat S-1;	18.608	18.929	19.065	19.431	20.071
Tamat S-2;	1.205	1.238	1.268	1.334	1.391
Tamat S-3.	20	23	24	31	35

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020*

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 3.**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan**  
**Tahun 2015 s/d 2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
a. Belum/Tidak Bekerja	38.404	35.539	38.358	36.721	36.390
b. Mengurus Rumah Tangga	34.603	35.328	34.773	34.965	34.412
c. Pelajar/Mahasiswa	43.581	45.352	44.032	45.119	44.940
d. Pensiunan	6.374	6.399	6.270	6.237	6.095
e. PNS	7.379	7.396	7.204	6.992	6.826
f. TNI	1.850	1.942	1.830	1.806	1.771
g. POLRI	1.048	1.057	1.039	1.040	1.027
h. Jasa	8.608	9.105	8.951	8.449	8.449
i. Karyawan	42.126	43.735	43.557	44.679	46.311
j. Buruh	5.082	4.690	4.578	4.489	4.390
k. Wiraswasta	18.727	19.060	18.826	18.945	18.994
l. Lain-lain	466	434	391	355	510

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada Tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 4.**  
**Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019 (Rp. Milyar)**

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2015	10.192,08	8.455,44	6,15
2016	11.184,10	8.954,69	5,90
2017	12.111,90	9.486,12	5,93
2018	13.129,87	10.051,71	5,96
2019*	14.108,33	10.623,82	5,69

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2020

\*) angka sementara

### b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi kedalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.



**Tabel II. 5.**  
**Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus**  
**Kota Madiun Tahun 2015 – 2019**

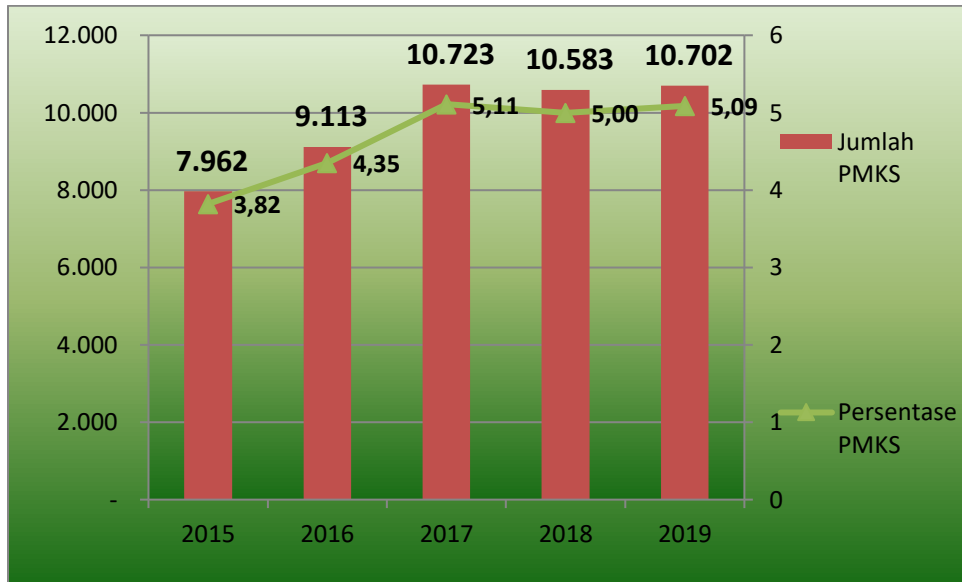
KATEGORI	TAHUN									
	2015		2016		2017		2018		2019	
PRA KS	332	0,63%	198	0,37%	190	0,36%	120	0,23%	88	0,17%
KS-I	7.643	14,52%	7.710	14,57%	5.328	10,11%	6.806	12,99%	6.115	11,63%
KS-II	17.759	33,73%	20.121	38,03%	24.502	46,47%	21.322	40,70%	22.001	41,84%
KS-III	23.815	45,24%	21.692	41,00%	18.162	34,45%	19.122	36,50%	19.231	36,57%
KS-III Plus	3.096	5,88%	3.183	6,02%	4.541	8,61%	5.021	9,58%	5151	9,80%
<b>JUMLAH</b>	<b>52.645</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.904</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.723</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.391</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.586</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber :Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2020*

Prosentase Pra KS dan KS-1 ada perubahan Tahun 2018 sebesar 13,22 % atau jumlahnya 6.926 keluarga, sedangkan tahun 2019 jumlahnya 6.203 keluarga mengalami penurunan 723 keluarga atau 1,42% hal ini menunjukkan perubahan ada kenaikan sedikit dalam kesejahteraan. Prosentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus mengalami kenaikan 1,43% (918 KK) yaitu tahun 2018 jumlahnya 45.465 menjadi 46.383 pada tahun 2019, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan sedikit.

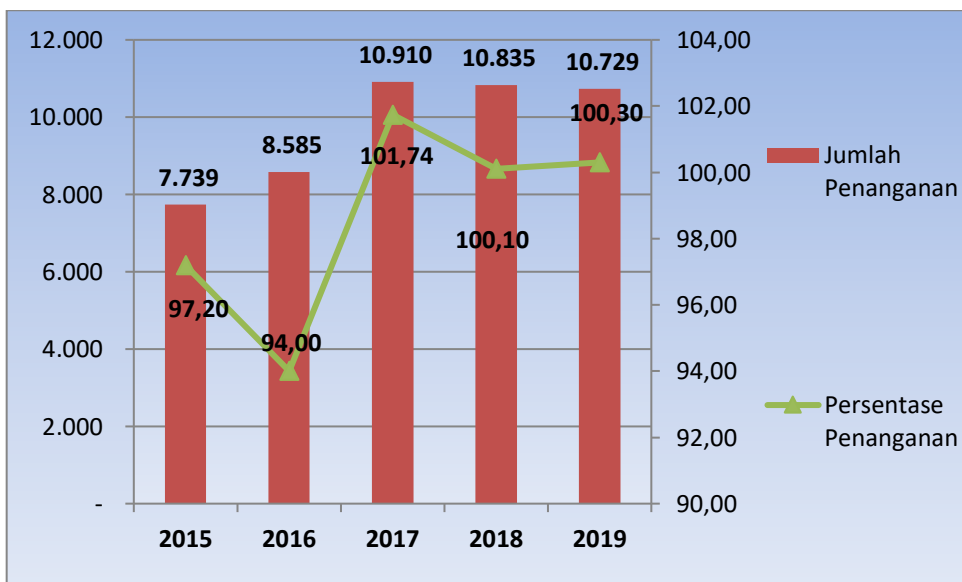
Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang sangat baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III serta III Plus sebanyak 46.383 keluarga atau 88,20% dari jumlah KK 52.586, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 86,78% dari jumlah KK 52.391.

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2020

**Gambar II.2.**  
**Jumlah PMKS dan Persentase PMKS Kota Madiun**  
**Tahun 2015 – 2019**



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2020

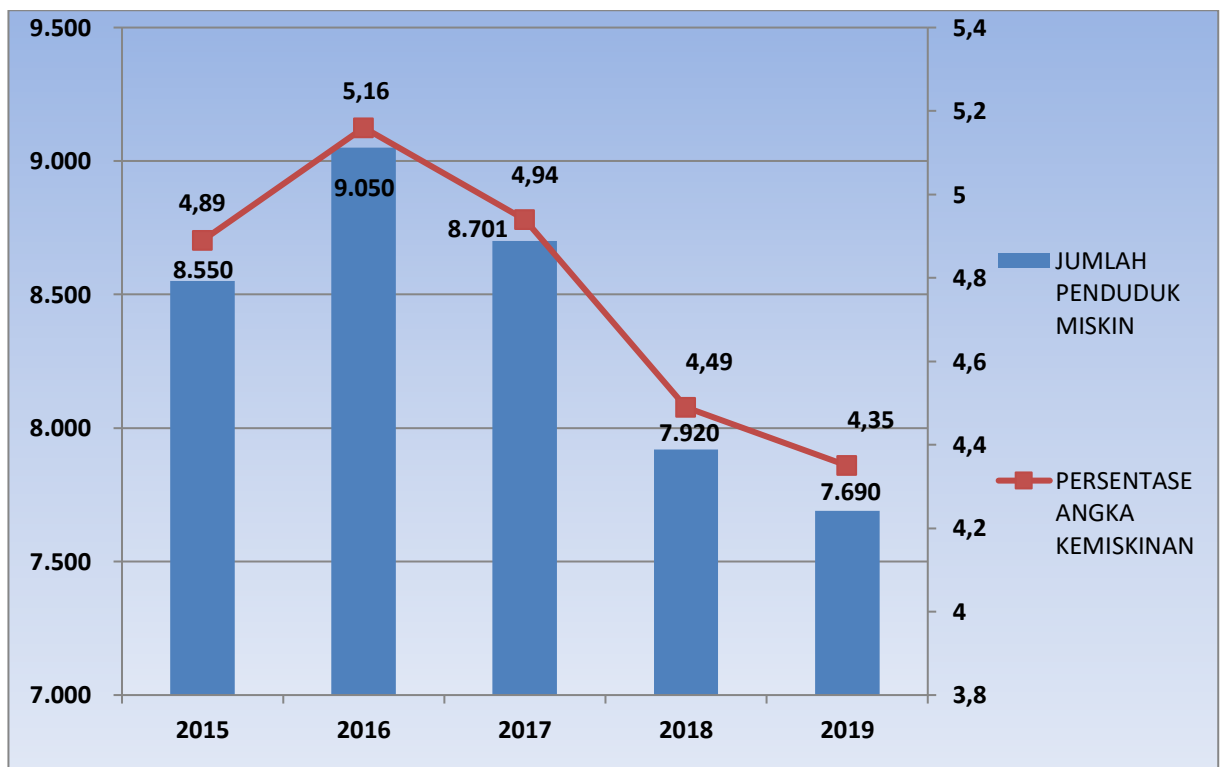
**Gambar II.3.**  
**Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun**  
**Tahun 2015 – 2019**

Jumlah PMKS mengalami sedikit penurunan dari Tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan PMKS, yang mana jumlah jenis PMKS yang sebelumnya hanya sebanyak 22 jenis, bertambah menjadi 26 jenis PMKS.

Sesuai dengan instruksi pada Peraturan Menteri Sosial tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan dan pengelompokan kembali jenis-jenis PMKS, untuk diupdate data jumlah PMKS secara keseluruhan. Sehingga pada tabel di atas terlihat ada kenaikan jumlah PMKS.

Pada tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 jumlah PMKS yang terdata mengalami penambahan sebanyak 3.171 orang atau sebesar 5,11% dari jumlah penduduk, akan tetapi jumlah PMKS yang meningkat tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah yang tertangani secara signifikan, dengan capaian 101,74% dengan intervensi program dan kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

Berkaitan dengan Tingkat Kemiskinan Kota Madiun mengalami tren yang fluktuatif karena Tahun 2015 sampai dengan 2016 terus mengalami kenaikan, pada Tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yang signifikan bahkan sampai dengan 2019 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan program-program pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan sudah berjalan walaupun belum maksimal yang tentu memerlukan penyempurnaan lagi.



Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2020

**Gambar II.4.**  
**Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015 sampai dengan 2019**

**c. Fokus Pendidikan**

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat pada Fokus Kesejahteraan Sosial, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

**Tabel II. 6.**  
**Indikator Kinerja Pendidikan**  
**Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 - 2019**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>		
<b>A</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>		
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>		
1.1	Angka Melek Huruf	100	100
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,1	11,13
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	145,18	143,28
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	171,14	170,76
1.5	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	134,84	135,45
1.6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	136,19	131,33
1.7	Pendidikan yang ditamatkan :		
1.8	Pendidikan Dasar	28,44	27,65
1.9	Angka Harapan Lama Sekolah	14,2	14,39

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata – rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal.

Angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 adalah 11,11. Tahun 2019 untuk rata-rata lama sekolah yaitu 11,13.

Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,13 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun telah menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerinah Pusat.

## 2. Angka Harapan Lama Sekolah

Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2018 adalah 14,20, sedangkan capaian harapan lama sekolah pada tahun 2019 adalah 14,39.

Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kota Madiun sudah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa.

## 3. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional)

Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, tahun 2018 sudah mencapai 100% demikian juga pada tahun 2019 angka melek huruf sudah 100%

### d. Fokus Kesehatan

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

#### 1. Angka Kematian Ibu (AKI)

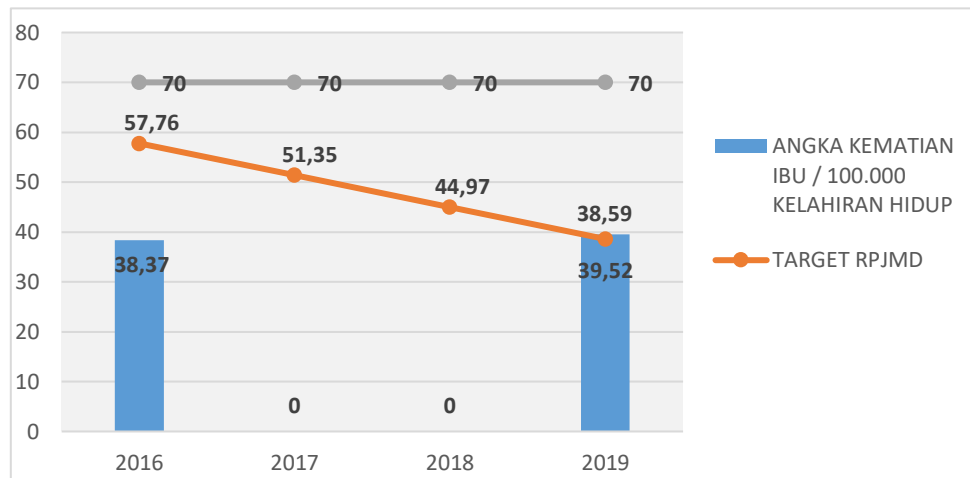
Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 7.**  
**Angka Kematian Ibu Di Kota Madiun Tahun 2016 – 2019**

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Lahir Hidup	2.602	2.583	2.561	2.530
2	Jumlah Kematian Ibu	1	0	0	1
3	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	38,43	0	0	39,53
4	Target RPJMD Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	57,76	51,35	44,97	38,59

Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2019 sebesar 39,53, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang ibu. Kematian tersebut disebabkan adanya penyakit penyerta berat yaitu Kanker pada Hati (Ca Hepar) yang ditemukan pada saat pelaksanaan operasi kelahiran di Rumah Sakit.

Perhitungan Angka Kematian Ibu dipengaruhi jumlah kelahiran hidup. Pada Tahun 2019 perkiraan kelahiran hidup sebanyak 2.530, lebih rendah dari Tahun 2018 yang menyebabkan jika terdapat 1 kematian ibu maka Angka Kematian Ibu sebesar 39,53. Adapun tren Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, 2019

**Gambar II. 5.**  
**Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun Tahun 2016 –2019**

Dari tabel di atas terlihat bahwa AKI di Tahun 2019 masih dibawah target RPJMD tetapi masih dibawah target SDG'S yaitu sebesar 70 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal.
- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi.
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas.
- d. Memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC terpadu yaitu 10 T plus skrining Diabetes Militus (DM), Hipertensi, jantung, hepatitis dan HIV/AIDS di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.
- e. Menjalin kerjasama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan pada ibu hamil.

- f. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan.

## 2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 8.**  
**Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun**

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Bayi Lahir Hidup	2606	2583	2561	2530
2	Jumlah Kematian Bayi	19	19	17	16
3	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup	7.29	7.36	6.64	6.32

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Tahun 2019 sebesar 6,32 artinya terdapat 6 kematian bayi dari 1.000 Kelahiran Hidup. Jika secara absolut jumlah kematian sebanyak 16 bayi. Hal tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2018 yaitu sebesar 6,64 dengan jumlah absolut sebanyak 17 kematian bayi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- a. PMT bagi ibu hamil untuk mencegah bayi BBLR.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (edukasi kontrol sesuai jadwal).
- c. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal.
- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi.
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas.
- d. Berkoordinasi dengan Dokter Spesialis Anak terkait pelayanan rujukan bayi dengan kelainan.

e. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran masing-masing.

### 3. Prosentase Balita Gizi Buruk

Prosentase balita gizi buruk pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 9.**  
**Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun**

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Balita	12.443	12.271	12.117	11.956
2	Jumlah Balita Yang Ditimbang	10.716	10.594	10.497	10.471
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	12	5	4	4
4	Prosentase Balita Gizi Buruk (%)	0,112	0,047	0,038	0,038

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa prosentase Balita Gizi Buruk di Tahun 2019 sebesar 0,038% dengan jumlah absolut sebanyak 4 balita gizi buruk. Angka tersebut masih sama dengan prosentase balita gizi buruk di Tahun 2018. Penyebab terjadinya Balita gizi buruk dikarenakan adanya bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang kurang dari 2500 gram sehingga balita tersebut berpotensi tidak maksimal dalam penyerapan nutrisi makanan yang menyebabkan berat badan tidak naik secara signifikan. Selain itu masih adanya pola asuh dan pola makan yang kurang tepat pada keluarga.

Langkah yang dilakukan untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk adalah:

1. Penimbangan balita di Posyandu setiap bulan sebagai deteksi dini terjadinya penyimpangan pertumbuhan sehingga lebih mudah dalam intervensi sebelum menjadi balita gizi buruk.
2. Pelaksanaan kelas ibu balita.
3. Edukasi kepada masyarakat tentang BBLR dan upaya perbaikan gizi keluarga.



4. Pelatihan cara Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) untuk petugas Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat.
5. Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin bagi balita BGM dan 2T sampai tuntas.
6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil mulai ditemukan KEK sampai dengan masa nifas untuk mencegah kelahiran bayi BBLR.

**e. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional, jumlah event/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional Tahun 2019 di bidang olahraga meningkat signifikan dibandingkan tahun 2018, yaitu 50 prestasi di bidang olahraga sedangkan pada tahun 2018 prestasinya 33 sedangkan di bidang kebudayaan terjadi peningkatan juga pada tahun 2018 sebanyak 12 even sedangkan tahun 2019 sebanyak 8 even.

**Tabel II. 10.**  
**Prestasi Olahraga dan Kebudayaan**  
**Kota Madiun Tahun 2015 – 2019**

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019
PRESTASI KEOLAHRAGAAN	6	7	8	33	50
PRESTASIKEBUDAYAAN	6	2	10	12	8

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KotaMadiun, Tahun 2020

Dengan rincian untuk prestasi olahraga sebagai berikut :

Prestasi Olahraga selama Tahun 2019 meraih sebanyak 50 medali diantaranya :

Kejuaraan PORPROV JATIM :

- a. 2 medali perunggu cabang olahraga angkat besi
- b. 1 medali perunggu cabang olahraga atletik (lompat jauh)
- c. 1 medali perunggu cabang olahraga billiard
- d. 1 medali emas cabang olahraga gulat
- e. 2 medali perunggu cabang olahraga gulat
- f. 4 medali perunggu cabang olahraga judo
- g. 1 medali perunggu cabang olahraga karate
- h. 1 medali perak cabang olahraga karate
- i. 4 medali perunggu cabang olahraga muathay
- j. 1 medali perak cabang olahraga muathay
- k. 2 medali emas cabang olahraga muathay

- l. 1 medali perak cabang olahraga renang
- m. 1 medali perunggu cabang olahraga senam
- n. 3 medali perunggu cabang olahraga taekwondo
- o. 2 medali perak cabang olahraga tenis meja
- p. 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja
- q. 1 medali perak cabang olahraga tinju
- r. 7 medali emas cabang olahraga jujitsu
- s. 2 medali perak cabang olahraga jujitsu
- t. 5 medali perunggu cabang olahraga jujitsu
- u. 1 medali perak cabang olahraga judo beregu
- v. 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja beregu

Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019:

- a. 2 medali emas cabang olahraga atletik
- b. 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw
- c. 1 medali emas cabang olahraga pencak silat

Prestasi Seni Budaya selama Tahun 2019 sebanyak 8 kejuaraan

- a. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
- b. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
- c. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- d. Juara Penyaji Sabet Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- e. Juara Penyaji Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- f. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- g. Juara 3 Lomba Baca Puisi Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur
- h. Juara 3 Lomba Teater Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan umum daerah adalah kemampuan daerah agar terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. aspek pelayanan daerah terdiri dari pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan perizinan.

**a. Palayanan Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggarannya sudah diamanatkan dalam Undang-undang sebesar 20 persen dari APBD, dalam penerimaan sekolah pada tahun 2021 ini sistem zonasi sesuai domisili merupakan pilihan yang diambil untuk menyeimbangkan tingkat pendidikan setiap zonasi agar tidak adanya perspektif sekolah unggulan dan sekolah favorit, untuk mendukung program zonasi tersebut kota madiun sudah memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik yang dapat di lihat sebagaimana tabel 2.13 dan tabel 2.14 dibawah.

**Tabel II. 11.**  
**Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan, Tahun 2019**

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
<b>PAUD</b>				
1.	Bangunan PAUD (unit)	26	21	29
2.	Peserta PAUD	646	595	730
3.	Tenaga Pendidik	120	116	139
<b>TK</b>				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1.603	1.498	2.123
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	32	24	38

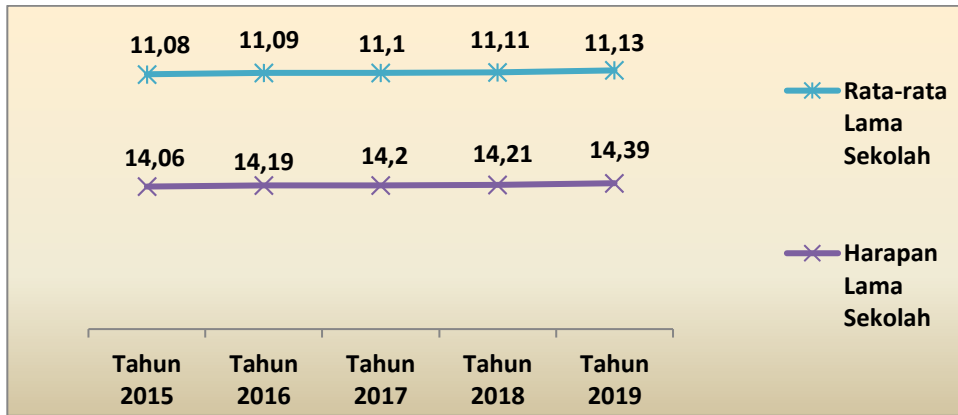
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2020

**Tabel II. 12.**  
**Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2019**

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Mangunharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	20	25	23	68
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7	6	3	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	9	3	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	2	1	4

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun , 2020

Meningkatnya angka HLS dan RLS yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun. Sebagaimana dilihat pada Gambar II.10, selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah meningkat dari 14,06 tahun (2015) menjadi 14,39 tahun (2019) atau naik sebesar 0,33 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,08 (tahun 2015) menjadi 11,13 tahun (2019) atau naik 0,05 tahun.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2020

**Gambar II. 6.**  
**Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun 2015-2019 (tahun)**

Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 6,6 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2019, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah mencapai 14,39 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3.

Pada periode yang sama, rata-rata lama sekolah di Kota Madiun tumbuh 1 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

RLS Kota Madiun tahun 2019 mencapai 11,13 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2).

Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

**Tabel II. 13.**  
**Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan**  
**Tahun 2018 – 2019**

<b>No.</b>	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>TAHUN 2018</b>	<b>TAHUN 2019</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>		
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>		
<b>1.1</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>		
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	140,16	135,75
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	01:39	1:52
1.1.3	Rasio guru/murid	01:16	1:16
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	01:22	1:28
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	134,78	133,39
<b>1.2</b>	<b>Fasilitas Pendidikan</b>		
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	96,95	95,24
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	96,36	98,68
<b>1.3</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	106,66	109
<b>1.4</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>		
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0	0
<b>1.5</b>	<b>Angka Kelulusan</b>		
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	128,52	111,35
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	98,02	96,1
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100
<b>1.6</b>	<b>Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>		
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	1250	1.427

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)**

Digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs.

Untuk usia sekolah dasar yaitu usia 7-12 tahun capaiannya pada tahun 2018 adalah sebesar 134,97% sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 135,75%. Dibandingkan dengan tahun 2018 ada kenaikan sebesar 0,78%. Jumlah penduduk usia sekolah Menengah Pertama usia 13-15 di Kota Madiun sebanyak 6.428 orang, sedangkan jumlah siswa sekolah Menengah Pertama usia 13-15 adalah sejumlah 8.442 orang. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Sekolah dasar di Kota Madiun sebanyak 14.534 orang, sedangkan jumlah jumlah siswa Sekolah Dasar usia 7-12 tahun adalah sejumlah 19.687 orang.

Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun. Banyaknya jumlah siswa usia 7-12 dan usia 13-15 tahun karena ada siswa dari luar Kota Madiun yang sekolah di Kota Madiun.

2. **Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar**

Adalah untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan.

Rasio ini adalah merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk tahun 2018 capaiannya adalah sebesar 39, sedangkan pada tahun 2019 capainnya adalah sebesar 52. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 52 siswa per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi.

3. **Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar**

Capaian pada tahun 2018 adalah 1:20, artinya bahwa satu orang guru menangani 20 siswa, sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah 1:16. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik.

4. **Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun 2018 adalah 1:22 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 22 siswa. Untuk tahun 2019 capainnya adalah 1:28. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

Dibandingkan dengan tahun 2018 rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata ada peningkatan yaitu kalau tahun 2018 1 (satu) orang guru menangani 22 anak tetapi pada tahun 2019 satu orang guru menangani 28 anak, hal ini dikarenakan adanya perekrutan guru CPNS guru di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tahun 2011 tentang penataan guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu minimal 20 peserta didik/kelas.

5. **Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik**

Capaian kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik tahun 2018 96,36%, sedangkan capaian tahun 2019 adalah sebesar 96,88%. Dibandingkan dengan tahun 2018 maka capaian tahun 2019 ada kenaikan sebesar 0,52%. Hal ini karena ada perhatian dari Pemerintah Kota Madiun untuk rehab dan pembangunan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan maupun penambahan ruang sekolah.

6. **APK Pendidikan anak usia dini (PAUD) disini adalah APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.**

Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2018 capainnya adalah 106,66%. Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2019 adalah sebesar 109%, sehingga ada kenaikan sebesar 2,34%. Jumlah penduduk usia 4-6 tahun pada tahun 2019 sebanyak 5.306 dan jumlah siswa TK/RA usia 4-6 tahun adalah 5.766.

7. **Angka putus sekolah pendidikan dasar**

Angka putus sekolah pendidikan dasar pada tahun 2018 adalah 0. Angka Putus sekolah pada tahun 2019 adalah 0, atau dengan kata lain bahwa di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat.

8. **Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) adalah** persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2018 capainnya adalah 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2019 capaiannya adalah 100%.

Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi siswa SD dan SMP baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota.

9. **Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**

Capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2018 adalah 98,02, sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah 98,07%. Dengan jumlah total guru TK, SD dan SMP sebanyak 1.972 guru.

**Tabel II. 14.**  
**Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Kualifikasi	Tahun 2018	Tahun 2019
1	SMA	11	11
2	D1	1	4
3	D2	15	17
4	D3	1	6
5	DIV/S1	1.277	1.818
6	S2	109	116

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun

10. **Pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK**

Capaian pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada tahun 2018 adalah 100%. Dan pada tahun 2019 capaiannya adalah 100%.

Pengelolaan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai informasi pendidikan tingkat Kota yang dapat dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru serta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Mulai tahun 2015 hingga saat ini Data Pokok Pendidikan menjadi dsatu-satunya basis data bagi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di update terus menerus.



Data tersebut harus di perbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan server Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan di upload secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis web dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.

**11. Sekolah Semua Jenjang Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan NBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari :

- a. Sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- b. Sekolah menyusun Rencana Kerja tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- c. Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Di Kota Madiun semua sekolah sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap tahun anggaran dan tahun ajaran.

**12. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional**

Capaian pada tahun 2018 adalah 1.250 guru, sedangkan pada tahun capaian 2019 adalah sebanyak 1.472 guru telah sesuai dengan target RPJMD. Hal ini disebabkan adanya guru CPNS tahun 2019 sejumlah 76 orang guru.

**b. Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 2.15, 2.16 dan 2.17 dibawah ini.

**Tabel II. 15.**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019**

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
2015	0,12
2016	0,11
2017	0,11
2018	0,11
2019*	0,11

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2020

**Tabel II.16.**  
**Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019**

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2015	112,85	770,72
2016	103,32	719,87
2017	151,09	996,14
2018	136,40	907,13
2019	138,02	1.043,71

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2020

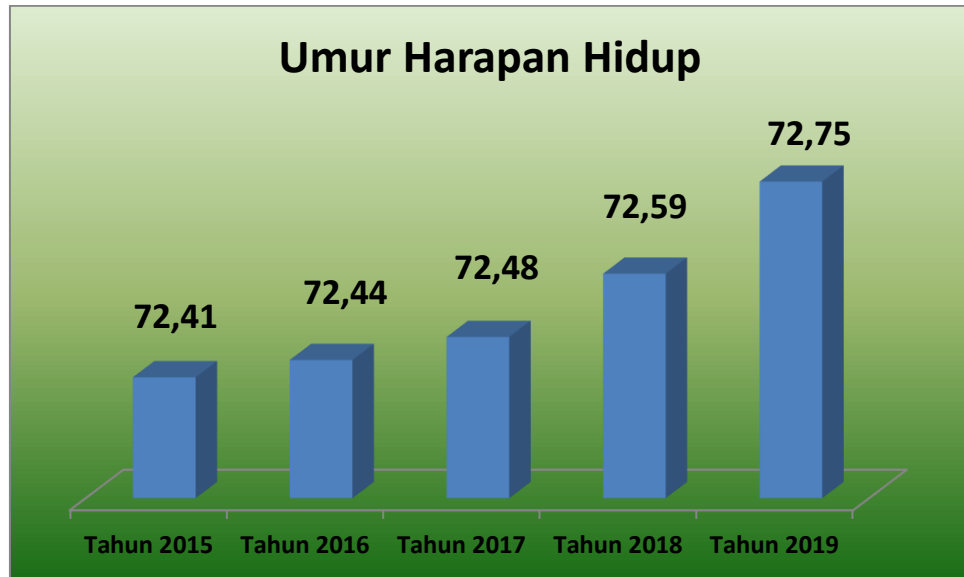
**Tabel II.17.**  
**Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019**

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2015	8	208.248	0,0384
2016	8	210.037	0,0381
2017	8	209.809	0,0383
2018	8	209.672	0,0383
2019*	8	210.115	0,0383

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun , 2020

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh umur harapan hidup saat lahir di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Gambar II.11, selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,41 tahun (2015) menjadi 72,75 tahun (2019) atau naik sebesar 0,34 tahun.

Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 6,8 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kota Madiun. Masyarakat semakin menikmati pembangunan dibidang kesehatan.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2020

**Gambar II. 7.**  
**Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun 2015-2019 (tahun)**

Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2019 sebanyak 9 kasus yang terjadi pada 7 kelurahan di Kota Madiun. Dapat terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II.18**  
**Jumlah Kasus KLB Di Kota Madiun Tahun 2019**

No	Jenis Kasus KLB	Kelurahan Tempat Kejadian	Waktu Kejadian Diketahui
1	Suspek Difteri	Kelurahan Mojorejo	4 Januari 2019
2	Suspek Difteri	Kelurahan Kelun	1 Februari 2019
3	DSS	Kelurahan Manisrejo	13 Februari 2019
4	AFP	Kelurahan Kelun	26 April 2019
5	DBD	Kelurahan Ngegong	13 Mei 2019
6	Suspek Difteri	Kelurahan Pangongangan	27 Juni 2019
7	Keracunan Makanan	Kelurahan Ngegong	30 Juli 2019
8	AFP	Kelurahan Manisrejo	9 Agustus 2019
9	AFP	Kelurahan Sukosari	4 November 2019

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Jumlah Kasus KLB di Tahun 2019 sebanyak 9 kasus, mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2018, penurunan kasus KLB ini terutama banyak terjadi pada kasus-kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), menunjukkan sebagai salah satu keberhasilan dari pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) difteri tahun 2018 dimana kekebalan kelompok meningkat sehingga kasus difteri ditahun 2019 menurun. Dari 9 kasus KLB keseluruhan telah ditanggulangi dalam waktu  $\leq$  24 Jam. Kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat adalah:

1. meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun;
2. meningkatkan KIE kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi;
3. meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon.

Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.19.**  
**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Di Kota Madiun**  
**Tahun 2016 - Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Ibu Hamil	2.739	2.706	2.676	2.643
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.739	2.694	2.676	2.643
3	Prosentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	100	99,6	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian prosentase pelayanan bumil sesuai standar di Tahun 2019 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standart sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun. Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah:

- a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
- b. optimalisasi kelas ibu hamil di puskesmas;
- c. terjalin kerjasama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu;
- d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;
- e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.

Kelurahan siaga aktif berstrata puri pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II. 20.**  
**Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun**  
**Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Desa Siaga	27	27	27	27
2	Jumlah Desa Siaga Puri	17	21	22	24
3	Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	62,96	77,78	81,48	88,89

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di Tahun 2019 bahwa 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2019 sebesar 88,89% yaitu sebanyak 24 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya peningkatan 2 kelurahan dibandingkan Tahun 2018. Capaian tersebut dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;
2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI;
3. kerjasama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 21.**  
**Puskesmas Dan Pustu Di Kota Madiun**  
**Tahun 2016 - Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6
2	Jumlah Pustu	18	18	18	18
3	Jumlah Penduduk	210.037	209.809	209.797	210.115
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per 1.000 Penduduk	0,11	0,11	0,11	0,11

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per 1.000 penduduk pada Tahun 2018 dengan rasio di Tahun 2019 masih sama disebabkan jumlah dari Puskesmas dan Pustu masih sama. Di setiap Kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan Rumah Sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Dimana terdapat 8 RS yaitu 2 RS Umum milik pemerintah, 1 RS Paru milik pemerintah, 1 RS Umum milik TNI AD, 1 RS Bersalin milik swasta serta 3 RS Umum milik swasta, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi.

1. Jumlah Puskesmas Poned

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) terdapat 1 Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo, dan sampai sekarang masih belum ada penambahan.

2. Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk

Pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, jumlah Rumah Sakit di Kota Madiun masih sama yaitu sebanyak 8 Rumah Sakit. Rasio Rumah Sakit di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini :

**Tabel II. 22.**  
**Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Kota Madiun**  
**Tahun 2014 -Tahun 2018**

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	8
7	Jumlah Penduduk	210.037	209.809	209.797	210.115
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0381	0,0383	0,0381	0,0381

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio jumlah Rumah Sakit terhadap 1.000 penduduk pada Tahun 2019 sebesar 0,0381. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 masih sama dikarenakan secara absolute jumlah RS masih sama yaitu 8 RS.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II. 23.**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	2	3	4
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>		
<b>1</b>	<b>Kesehatan</b>		
2.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	0,11	0,11
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1
2.3	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,0381	0,0381
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	136,32	138,02
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	906,59	818,12
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0
2.7	SOP Pelayanan	444	457
2.8	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100
2.10	Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS	65,19	68,21
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100
2.12	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100
2.13	angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	39,53
2.14	Prosentase Rumah Tangga Sehat	65,19	68,21
2.15	Prosentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Pra Bayar	100	100
2.16	Jumlah Kasus KLB	14	9
2.17	Prosentase Penanganan Penyakit	100	87,5
2.18	Prosentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	44,4	59,26
2.19	Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	81,32	81,84
2.21	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	2	3	4
2.22	Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi Syarat	84,01	85,12
2.23	Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standart	100	100
2.24	Prosentase Penduduk yang di skrining Faktor Resiko PTM	94,84	104,67
2.25	Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI	81,48	88,89
2.26	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	369	200
2.27	Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart	100	100
2.28	Prosentase TTU dan TPM sehat	84,12	85,61
2.29	Prosentase Kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya (sesuai Permenkes 75/2014)	60,8	69,79
2.30	Prosentase Kematian Akibat Penyakit Potensial Wabah	0	0,82
2.31	Angka Kematian Bayi	6,64	6,32

### c. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II. 24.**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah**  
**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2019**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	2	3	4
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>		
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		
4.1	Rasio rumah layak huni	99,65	99,95
4.2	Rasio permukiman layak huni	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut :



### 1. Rasio rumah layak huni

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2019 didapatkan sebanyak 132 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{42.849}{42.869} \times 100\% = 99,95\%$$

### 2. Rasio permukiman layak huni

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan serta Perda Kota Madiun No.6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Mengacu pada point 6 diatas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan tahun 2019 sudah tertangani semua sehingga ditingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100 = \frac{2758,67}{2758,67} \times 100\% = 100\%$$

**d. Pelayanan Sosial**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Tabel II. 25**  
**Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum**  
**Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018- 2019**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	2	3	4
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>		
<b>6</b>	<b>Sosial</b>		
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	12936	10.612
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	10594	10.573
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100.1	100,30%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12936	10.612
6.6	Angka Kemiskinan	4,49	4,35
6.7	Indeks Gini	0,34	0,33

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Terdapat 15 Panti Asuhan dan 1 Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan hanya 8 lembaga. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh, total anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.148.700.000.

2. Jumlah Penerima Bantuan Penerima bantuan lebih sedikit dari tahun sebelumnya karena ada bantuan yang pada tahun 2018 ada untuk tahun 2019 bantuan tersebut tidak ada lagi yaitu bantuan beras subsidi (TUAN RASIDI) dari Provinsi Jawa Timur. Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pusat, sehingga bantuan yang diterima jumlahnya dibawah pagu. Untuk Bansos Lansia non potensial, bantuan tidak tersalurkan karena penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris. Lansia nonpotensial penerima bansos yang meninggal sejumlah 35 orang.
3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang dahulu disebut dengan PMKS. Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

#### 4. PMKS yang tertangani

Pada tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%, hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan social asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian : 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/ orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang Anak jalanan dan 5 orang pemulung.

#### 5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

**Tabel II. 26**  
**Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2019**

JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH	BANTUAN
1. Lanjut Usia Terlantar/ Non potensial	orang	<b>101</b>	Berupa bantuan uang @ Rp 2.000.000,-
2. Anak Terlantar	orang	<b>365</b>	Berupa bantuan permakanan @ Rp 300.000,-
3. Fakir Miskin dengan rincian :	orang	<b>10.146</b>	
- Fakir Miskin KPM BPNT		4.833	APBN
- Fakir Miskin KPM PKH		3.269	APBN
- Fakir Miskin KPM BPNTD		2.044	APBD II
Jumlah		<b>10.612</b>	

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

#### 6. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Sesuai release BPS “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019”, angka kemiskinan Kota Madiun sebesar 4,35% atau sekitar 7.690 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp. 478,304,-/jiwa/bln). Angka tersebut merupakan rangking ketiga di Jawa Timur, Kabupaten/kota dengan angka kemiskinan terendah setelah Kota Batu (3,81%) dan Kota Malang (4.07%).

Capaian tersebut meningkat 0,14 poin dari tahun sebelumnya, dengan berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat, sangat efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

#### 7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2019 tercatat pada angka 0,33 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang.

#### e. Pelayanan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 27.**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah**  
**Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 -2019**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>		
<b>7</b>	<b>Tenaga Kerja</b>		
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	100	100
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	64.4%	66.7%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	99.1	85,52
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	3.85 %	4.01%
7.5	Keselamatan dan perlindungan	13968	15.976
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2019 yang terdaftar sejumlah 27 pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100% (27 pengaduan dapat terselesaikan). Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama.

Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara tahun 2019 dan 2018 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan ditahun 2019 sebanyak 27 kasus sedangkan ditahun 2018 sebanyak 33 kasus.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Apabila dibandingkan dengan hasil survey di tingkat kelurahan tahun 2018, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 89,89% menjadi 66,7%. Namun Berdasarkan data BPS Kota Madiun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 adalah 66.73%, sehingga TPAK tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,32% apabila dibandingkan dengan TPAK tahun 2018 yang sebesar 64,41%.

Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 66,73 % dengan capaian kinerja 78.47%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu tahun 2018 sampai dengan 2019 cenderung mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan ketrampilan serta menciptakan wirausaha baru.

### 3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Gambaran mengenai penempatan tenaga kerja di Kota Madiun, dapat diuraikan sebagai berikut, dari target 79 % di tahun 2019 terealisasi 85,52%. Untuk menghitung besaran pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara prosentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Dengan perhitungan jumlah pencari kerja yang tahun 2019 ditempatkan sebanyak 721 orang sedangkan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 843 orang.

#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 berdasarkan hasil survey di tingkat kelurahan sebesar 0,81 % dengan jumlah pengangguran sebanyak 1394 orang. Namun Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun adalah sebesar 3,85 % dengan jumlah pengangguran sebanyak 3.483 orang, sehingga ada ketidaksinkronan data Tingkat Pengangguran Terbuka dari hasil survey dengan Data dari BPS Kota Madiun.

Menindaklanjuti Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap LKPJ tahun 2018, maka Pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun tahun 2019 adalah sebesar 4,01 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 3.776 orang dengan angkatan kerja sebesar 94.105 orang.



Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,16% dari TPT tahun 2018 yaitu sebesar 3,85% atau 3.483 orang, dengan kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 293 orang. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 732 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 3.747 orang, 293 orang diantaranya belum tertampung dalam lapangan kerja dan yang 3.454 orang sudah tertampung (bekerja).

Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2019 sebesar 5,08%, realisasi TPT tahun 2019 sebesar 4,01% maka capaian kinerja adalah sebesar 121,06%. Namun apabila Capaian Kinerja TPT lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.

#### 5. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pekerja dilingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), UU NO 21 tahun 2000, KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB).

Meskipun sudah adanya PB yang disepakati anatar pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2019 yang terdaftar sejumlah 27 pengaduan dapat terselesaikan semua.

**f. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusuteraan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

**Tabel II. 28.**  
**Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun**  
**Tahun 2018 – 2019**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>		
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
8.1	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	13.32	12,78
8.2	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	86.67	86,95
8.3	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0.02	0,017
8.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	89.75	93,81
8.5	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100
8.6	Indeks Pemberdayaan Gender	82,28	82,59
8.7	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan Swasta	99.99	99,73
8.8	Indeks pembangunan Gender	93,47	94,05

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  
Jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi tahun 2018 sebesar 13,32% sedangkan tahun 2019 sebesar 12,78 %.
2. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta  
Jumlah partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami kenaikan/peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 realisasi sebesar 86,67 sedangkan tahun 2019 sebesar 86,95.
3. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  
Realisasi untuk tahun 2019 sebesar 0,017, lebih kecil dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang melapor di pusat pelayanan terpadu pada tahun 2019 lebih sedikit yaitu sebanyak 12 kasus.

4. Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami kenaikan/peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi capaian tahun 2017 sebesar 88,08% untuk tahun 2018 sebesar 89,75% sedangkan untuk tahun 2019 sampai bulan oktober sebesar 93,81%, dengan perhitungan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding jumlah angkatan kerja perempuan.

5. Jumlah Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak didata dan ditangani semuanya, sehingga capaiannya 100%.

6. Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender

Nilai indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, untuk tahun 2015 sebesar 81,48%, tahun 2016 sebesar 82,43%, tahun 2017 sebesar 82,19% sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 82,28 % dan sebesar 82,59 untuk Tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

7. Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan swasta

Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta mengalami penurunan sedikit yaitu sebesar 99,73% dan di tahun 2018 sebesar 99,99%.

8. Jumlah Indeks Pembangunan Gender

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,95 dan ada peningkatan di tahun berikutnya sebesar 93,44. di tahun 2017 sebesar 93,66, sedangkan 2018 mengalami penurunan menjadi 93,47 tetapi nilai tersebut masih lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur yang sebesar 90,77. Dan di tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi 94,05. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil.

**g. Pelayanan Perhubungan**

Adapun untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel II. 29.**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2018 – 2019**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN	
		2018	2019
1	2	3	4
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>		
<b>14</b>	<b>Perhubungan</b>		
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	95%	104%
14.2	Prosentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	91	100
14.3	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	78.08	85,08

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun

Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja pada tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu

Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2019 tercapai realisasi 104 %, sedangkan target tahun 2019 adalah 100%. Adapun realisasi ini diperoleh dari :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah rambu yang terpasang tahun 2019}}{\text{Jumlah Kebutuhan Rambu}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{2245}{2163} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 104 \%$$

Tercapainya realisasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai 104% melebihi kebutuhan yang telah direncanakan dikarenakan adanya beberapa lokasi atau objek baru yang sangat dinamis seperti pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, dll yang membutuhkan pemasangan rambu baru diluar kebutuhan yang telah direncanakan.

2. Prosentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik

Rasio sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik pada tahun 2018 adalah 91 %, sedangkan target pada tahun 2018 adalah 80 %. Adapun rinciannya adalh sebagai berikut :

NO	NAMA	2018			2019		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	29	27	93%	29	29	100%
2	HALTE	11	10	91%	11	11	100%
3	CCTV	10	9	90%	10	10	100%
JUMLAH		50	46	91%	50	50	100%

Adapun perhitungan persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah sarfas LLAJ tahun 2019}}{\text{Total Sarana dan Fasilitas LLAJ}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{50}{50} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 100 \%$$

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2017 tercapai 89% dan meningkat pada tahun 2018 mencapai 91%.

### 3. IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM (Indek kepuasan Masyarakat ) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2019 target 80 dan terealisasi 85,08.

### h. Pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasaraannya berikut:

**Tabel II. 30.**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun Tahun 2018- 2019**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN	
		2018	2019
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>		
<b>18</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>		
18.1	Jumlah organisasi pemuda	3	6
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3
18.3	Jumlah kegiatan olahraga	8	18
18.4	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3
18.5	Lapangan olahraga	83	83
18.6	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28
18.7	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	11	7
18.8	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	34	52
18.9	Jumlah Peserta Olah Raga	20.394	19.266
18.10	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut adalah :

1. Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun Tahun 2019 sama dengan kondisi Tahun 2018, antara lain :

- a. Front Pemuda Kerakyatan;
- b. Organisasi Generasi Muda (Pribumi);
- c. Organisasi Generasi Muda Pecinta Alam (Eskanda);
- d. Paguyuban Pakandayu;
- e. Purna Paskibraka Indonesia (PPI);
- f. Pramuka.

2. Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 3 kegiatan, antara lain :

1. Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka;
2. Lomba Gerak Jalan;
3. Pembinaan putra putri berprestasi (kerjasama dengan TNI dan POLRI)

3. Jumlah kegiatan Olah raga

Jumlah kegiatan olahraga di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 18 kegiatan, antara lain :

1. Lomba Bola voli kelurahan ;
2. Lomba bola voli pelajar SD, SMP ;
3. Lomba single event panahan pelajar SD, SMP ;
4. Lomba single event catur pelajar SD, SMP ;
5. Lomba single event renang pelajar SD, SMP ;
6. Lomba single event bulu angkis pelajar SD, SMP ;
7. Lomba single event sepak takraw pelajar SD, SMP ;
8. Lomba single event tenis meja pelajar SD, SMP ;
9. Lomba single event atletik pelajar SD, SMP ;
10. Lomba single event pencak silat pelajar SD, SMP ;
11. Lomba single event taekwondo pelajar SD, SMP ;
12. Lomba single event senam pelajar SD, SMP ;
13. Lomba single event tenis lapangan pelajar SD, SMP ;
14. Lomba single event karate pelajar SD, SMP ;
15. Lomba single event bola basket pelajar SD, SMP ;
16. Festival Seni Pencak Silat Nusantara ;
17. Lomba Bola Voli PKK ;
18. Charismatic 10K Run.

4. Gelanggang/ balai remaja

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun Tahun 2019 masih sama dengan di Tahun 2018 sebanyak 3, antara lain :

1. GOR Parikesit;
2. GOR SMAN 1 Kota Madiun;
3. GOR SMAN 3 Kota Madiun.

5. Lapangan olah raga

Lapangan olahraga di Kota Madiun Tahun 2019 masih sama dengan Tahun 2018 sebanyak 83

6. Jumlah organisasi olahraga

Pada Tahun 2019 sebanyak 28 dengan jumlah yang tetap sama dengan kondisi pada Tahun 2018.

**Tabel II. 31.**  
**Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 klub	15	Angkat Besi	3 klub
2	Tenis Lapangan	10 klub	16	Taekwondo	4 klub
3	Renang	2 klub	17	Panjat Tebing	2 klub
4	Atletik	1 klub	18	Judo	1 klub
5	Wushu	1 klub	19	Senam	4 klub
6	Pencak Silat	11 klub	20	Balap sepeda	1 klub
7	Catur	1 klub	21	Tinju	1 klub
8	Tenis Meja	1 klub	22	Menembak	1 klub
9	Panahan	1 klub	23	Karate	2 klub
10	Basket	2 klub	24	Sepatu Roda	5 klub
11	Bola Volly	2 klub	25	Drumband	42 klub
12	Sepak Bola	23 klub	26	Bilyard	5 klub
13	Sepak Takraw	10 klub	27	Sepak Bola Futsal	12 klub
14	Gulat	1 klub	28	KONI	1 klub

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

7. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional

Sejak Januari 2019, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah memberangkatkan para atlit berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat provinsi maupun nasional diantaranya cabang olahraga bola basket, pencak silat, Taekwondo dan masih banyak lagi cabang olahraga lainnya. Adapun Prestasi olahraga untuk Tahun 2019 di tingkat Nasional sebanyak 7 (tujuh) kejuaraan yaitu :



1. Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019:
  - a. 2 medali emas cabang olahraga atletik;
  - b. 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw;
  - c. 1 medali emas cabang olahraga pencak silat;
  - d. 1 medali perunggu cabang olahraga pencak silat;
  - e. 1 medali perunggu cabang olahraga catur.
8. Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional  
Prestasi olahraga untuk Tahun 2019 di tingkat Nasional dan regional sebanyak 50 (lima puluh)

**i. Pelayanan Pangan**

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun menetapkan tujuan dalam rencana strategis yaitu “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian”, dan menetapkan sasaran strategis “meningkatkan kesetersediaan pangan dan stabilnya produksi hasil pertanian dan perikanan”.

Dengan demikian, penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran “meningkatkan ketersediaan pangan”. Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein.

Adapun perkembangan indikator kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel II. 32.**  
**Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun**  
**Tahun 2018-2019**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>		
<b>9</b>	<b>Pangan</b>		
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	183.38	154,44
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138.61	138,63

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun.
- b. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 520-401.204/23/2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
- c. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;
- d. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 188-401.2014/27/2015 tentang Pembentukan Tim Bina Kegiatan Rumah Pangan Lestari;

e. Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor 060-401.204/001/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama yaitu 154,44 Kg/kapita/tahun yang diperoleh dari pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 210.115 jiwa. Adapun penurunan ketersediaan ketersediaan pangan utama dari tahun 2018-2019 sekitar 15,7%, Namun ketersediaan pangan utama Tahun 2019 masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th.

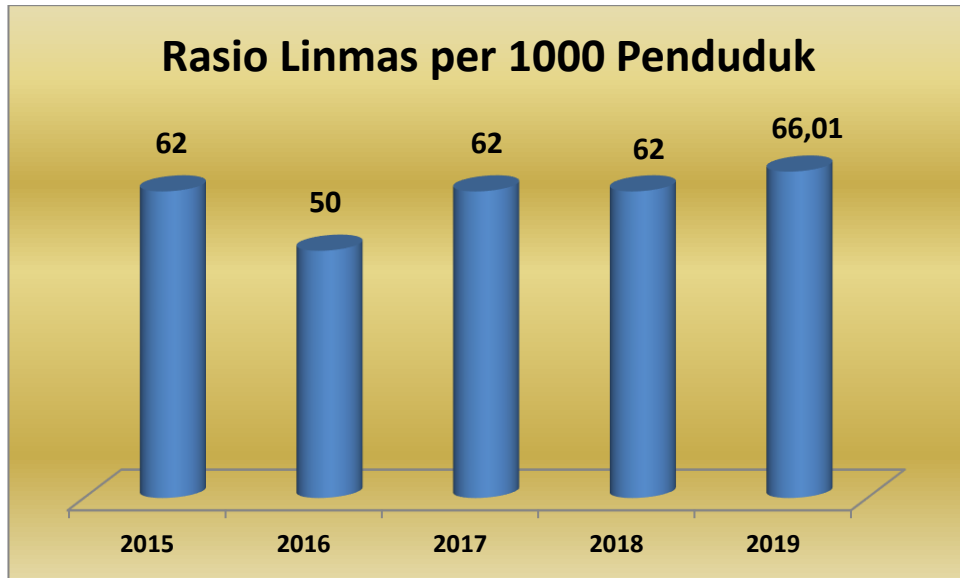
3. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2019 adalah 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini adalah WNPG X tahun 2012., yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari. Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan energi per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (129,42%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%). Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk tahun 2019 mengalami kenaikan 0,01% dari ketersediaan energi dan protein tahun 2018.

**j. Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

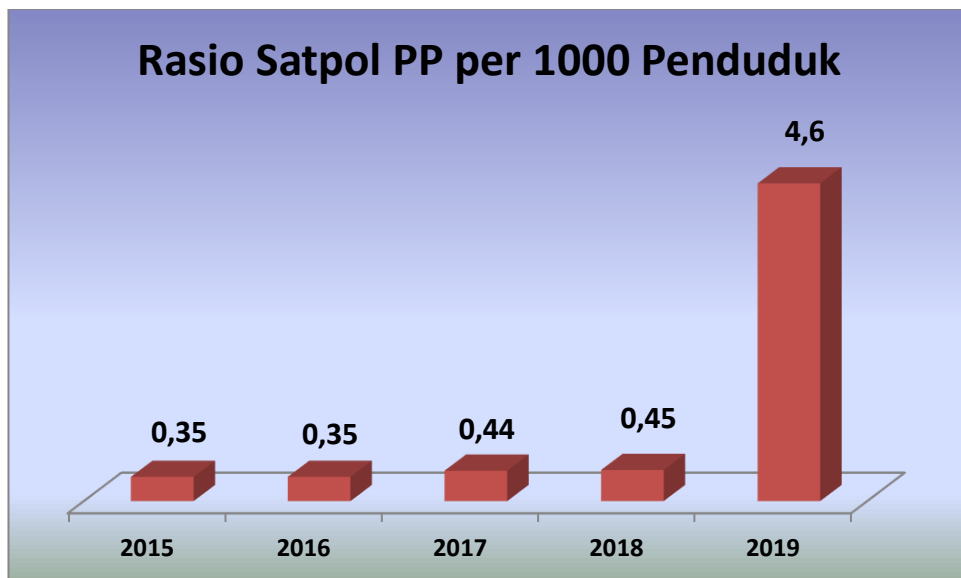
Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang di amanatkan dalam undang-undang, cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tentram dalam masyarakat, saat ini pemerintah kota madiun akan mamperkecil rasio petugas dan

jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satpol PP per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas tahun 2019 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar 2.10 dan 2.11 di bawah ini.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2020

**Gambar II. 8.**  
**Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun,**



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2020

**Gambar II. 9.**  
**Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kota Madiun,**

### k. Pelayanan Perizinan

Tahun 2019 lama pengurusan perizinan sudah sangat efektif dan tidak berbelit-belit, hal ini dapat dilihat sesuai tabel dibawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan.

**Tabel II. 33.**  
**Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2019**

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
1	Izin Reklame Permanen	5 (lima)	6 (enam)	Tidak Ada
2	Izin Reklame Insidentil	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
3	Izin Operasional Puskesmas	5 (lima)	9 (sembilan)	Tidak Ada
4	Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
5	Izin Apotik	Perizinan diproses melalui sistem nasional (oss.go.id)		
6	Izin Operasional Klinik			
7	Izin Operasional Lab Klinik			
8	Izin Unit Transfusi Darah/ Bank Darah	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
9	Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
10	Izin Praktik Perawat (SIPP)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
11	Izin Kerja Perawat (SIKP)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
12	Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
13	Izin Praktik Bidan (SIPB/SIKB)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
14	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
15	Izin Kerja Refraksi Optisien (SIKRO)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
16	Izin Praktik Radiografer ( SIPRad )	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
17	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
18	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian ( SIPTTK)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
19	Izin Praktik Terapis Wicara ( SIPTW )	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
20	Izin Kerja Terapis Wicara	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
21	Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
22	Izin Kerja Okupasi Terapis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
23	Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIPTS)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
24	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
25	Izin Praktik Akupunturis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
26	Izin Kerja Akupunturis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
27	Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
28	Izin Kerja Teknisi Kardiovaskuler	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
29	Izin Kerja Optometris	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
30	Izin Kerja Teknisi Gigi	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
31	Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIK ATLM)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
32	Izin Praktik Elektromedis (SIP E)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
33	Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
34	Izin Praktik Ortosis Prostetis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
35	Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
36	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
37	Izin Tukang Gigi	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
38	Izin Praktik Dokter Hewan	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
39	Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
40	Izin Klinik Hewan	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
41	Izin Rumah Sakit Hewan	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
42	Izin Rumah Sakit Hewan Khusus	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
43	Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner	5 (lima)	7 (tujuh)	Tidak Ada
44	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing	5 (lima)	7 (tujuh)	Tidak Ada
45	Izin Penempatan Pedagang Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
46	Izin Promosi Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
47	Izin Reklame Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
48	Izin Pengelolaan Parkir Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
49	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
50	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Perizinan diproses melalui sistem nasional (oss.go.id)		
51	Izin Operasional Rumah Sakit			
52	Izin Toko Obat			
53	Izin Toko Alat Kesehatan			
54	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
55	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT			
56	Izin Lingkungan Amdal	5 (lima)	10 (sepuluh)	Tidak Ada
57	Izin Lingkungan UKL UPL	5 (lima)	10 (sepuluh)	Tidak Ada
58	Izin TPS Limbah B3	5 (lima)	7 (tujuh)	Tidak Ada
59	Izin Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah (Aset)	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
60	Izin Sewa Wales	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
61	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk terop di jalan golongan A dan B	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
62	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan dan industri	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
63	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk penimbunan barang, bahan bangunan dan bekas bongkaran di jalan golongan A dan B	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
64	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk usaha atau industri beserta halamannya di jalan golongan A, B dan C	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
65	Izin Pemakaian Lahan Sumber Umis	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
66	Izin Sewa Jasa Pemakaian GOR, Stadion Wilis dan Wisma Haji	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
67	Izin Sewa Kios Ex Bengkok Kelurahan Pilangbango	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada

Sumber: DPMPSTSPKUM, 2020

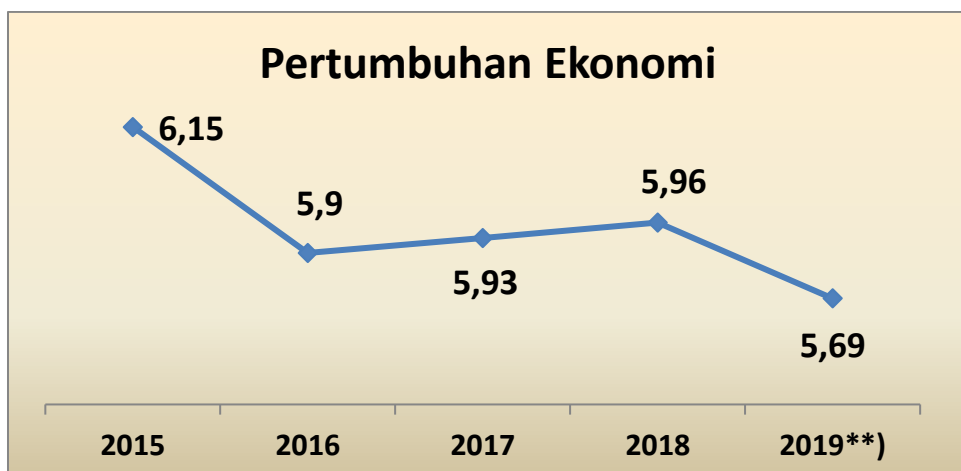
#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut.

**a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK).



Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2020

\*) angka sementara

**Gambar II. 10.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun**  
**Tahun 2015 s/d 2019 (%)**

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada Tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut.

**Tabel II. 34.**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)**  
**Tahun 2015 s/d 2019**

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,58	1,31	-1,78	1,78	-0,94
2	Pertambangan dan Penggalian	1,98	1,91	2,31	1,07	2,41
3	Industri Pengolahan	6,51	7,21	8,00	7,01	4,64
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,73	3,86	4,91	5,45	6,69
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	2,58	3,82	6,84	4,44	4,52
6	Konstruksi	5,48	4,44	5,57	2,03	4,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	4,48	5,11	5,83	7,54	6,20

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
8	Transportasi dan Pergudangan	6,78	7,13	8,18	8,48	9,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,28	7,30	7,47	9,23	8,86
10	Informasi dan Komuniasi	8,13	6,64	6,77	5,34	4,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,52	7,11	3,88	4,08	4,79
12	Real Estate	6,76	5,64	4,22	3,57	5,96
13	Jasa Perusahaan	8,41	5,94	6,34	5,31	6,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,05	2,46	4,48	3,85
15	Jasa Pendidikan	6,30	5,14	4,50	4,21	7,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	5,85	5,93	7,38	7,52
17	Jasa Lainnya	4,28	4,17	4,14	5,74	6,92
<b>PDRB</b>		<b>6,15</b>	<b>5,90</b>	<b>5,93</b>	<b>5,96</b>	<b>5,69</b>

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

\*\*) angka sangat sementara

PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 35.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2019**  
**(Milyar Rupiah)**

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	98,02	102,29	100,96	105,68	106,81
2	Pertambangan dan Penggalian	2,48	2,62	2,73	2,91	3,05
3	Industri Pengolahan	1.637,08	1.807,90	1.983,44	2.143,80	2.290,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,78	8,39	9,52	10,35	11,22
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	22,65	24,46	26,74	28,51	29,04
6	Konstruksi	664,08	718,12	767,94	805,27	834,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.529,95	2.791,97	3.031,46	3.371,83	3.658,65
8	Transportasi dan Pergudangan	321,17	360,09	407,73	449,97	498,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464,84	523,63	574,36	636,99	705,63
10	Informasi dan Komuniasi	1.393,96	1.524,59	1.660,03	1.752,67	1.851,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.056,63	1.177,74	1.259,76	1.355,51	1.432,48
12	Real Estate	274,01	297,82	318,81	344,40	374,20
13	Jasa Perusahaan	69,26	75,73	82,45	90,30	98,17



No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329,41	350,21	366,76	401,37	438,16
15	Jasa Pendidikan	803,00	862,99	923,49	978,13	1.067,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131,10	141,94	155,98	172,62	189,69
17	Jasa Lainnya	386,66	413,64	439,72	479,56	518,48
<b>PDRB</b>		<b>10.192,08</b>	<b>11.184,10</b>	<b>12.111,90</b>	<b>13.129,87</b>	<b>14.108,33</b>

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

\*\*) angka sementara

PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 36.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 s/d 2019**  
**(Milyar Rupiah)**

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75,38	76,37	75,01	76,35	75,63
2	Pertambangan dan Penggalian	2,04	2,08	2,13	2,15	2,20
3	Industri Pengolahan	1.448,90	1.553,36	1.677,59	1.795,20	1.878,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,02	7,30	7,65	8,07	8,61
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	18,38	19,08	20,39	21,29	22,26
6	Konstruksi	548,47	572,82	604,75	616,99	647,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.979,78	2.080,95	2.202,18	2.368,25	2.515,13
8	Transportasi dan Pergudangan	242,76	260,07	281,35	305,21	330,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	407,81	437,59	470,29	513,72	559,24
10	Informasi dan Komunikasi	1.332,55	1.421,03	1.517,25	1.598,22	1.671,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	780,75	836,28	868,72	904,19	947,54
12	Real Estate	217,68	229,96	239,67	248,22	263,02
13	Jasa Perusahaan	61,46	65,10	69,23	72,91	77,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281,38	289,96	297,09	310,42	322,38
15	Jasa Pendidikan	623,55	655,60	685,13	714,00	768,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,79	114,10	120,87	129,79	139,55
17	Jasa Lainnya	319,71	333,04	346,82	366,73	392,10
<b>PDRB</b>		<b>8.455,44</b>	<b>8.954,69</b>	<b>9.486,12</b>	<b>10.051,71</b>	<b>10.623,82</b>

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

\*\*) Angka Sementara

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

**Tabel II. 37.**  
**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2019 (%)**

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,96	0,91	0,83	0,80	0,76
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	16,06	16,16	16,35	16,25	16,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21
6	Konstruksi	6,52	6,42	6,34	6,13	5,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	24,82	24,96	25,03	25,68	25,93
8	Transportasi dan Pergudangan	3,15	3,22	3,37	3,43	3,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,56	4,68	4,74	4,85	4,98
10	Informasi dan Komuniasi	13,68	13,63	13,71	13,35	13,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,37	10,53	10,40	10,32	10,15
12	Real Estate	2,69	2,66	2,63	2,62	2,65
13	Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,68	0,69	0,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,23	3,13	3,03	3,06	3,11
15	Jasa Pendidikan	7,88	7,72	7,62	7,45	7,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,27	1,29	1,31	1,34
17	Jasa Lainnya	3,79	3,70	3,63	3,65	3,68
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

\*\* ) angkasementara

PDRB perkapita menurut lapangan usaha sebagai berikut :

**Tabel II. 38.**  
**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2015 s/d 2019**

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.56	0,58	0,57	0,60	0,60
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	9,35	10,29	11,31	12,11	12,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0,05	0,06	0,06	0,06

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
6	Konstruksi	3,79	4,09	4,36	4,55	4,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	14,46	18,90	17,33	19,05	20,67
8	Transportasi dan Pergudangan	1,84	2,05	2,32	2,54	2,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,66	2,98	3,26	3,60	3,99
10	Informasi dan Komunikasi	7,97	8,68	9,43	9,90	10,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,04	6,71	7,15	7,66	8,09
12	Real Estate	1,57	1,70	1,81	1,95	2,11
13	Jasa Perusahaan	0,40	0,43	0,47	0,51	0,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,88	1,99	2,08	2,27	2,48
15	Jasa Pendidikan	4,59	4,91	5,24	5,53	6,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,81	0,89	0,98	1,07
17	Jasa Lainnya	2,21	2,36	2,50	2,71	2,93
<b>PDRB Per Kapita</b>		<b>58,24</b>	<b>63,69</b>	<b>68,89</b>	<b>74,54</b>	<b>79,70</b>

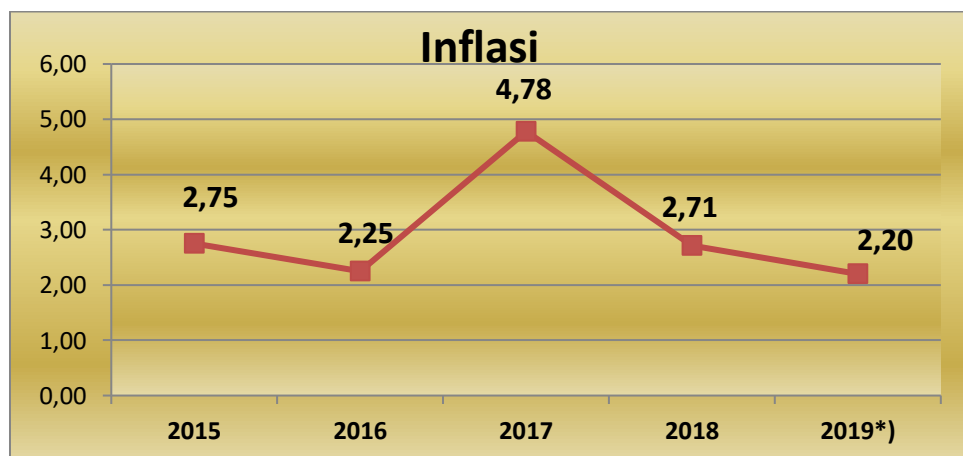
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2019

\*\*) angka sementara

Rincian PDRB untuk Tahun 2018 dan 2019 belum risil

Di Kota Madiun lapangan usaha yang dominan diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran yang menduduki tingkat pertama sebesar 20,67 poin dalam PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha seperti terlihat pada tabel diatas.

Di Kota Madiun tingkat inflasi cenderung stabil. Lebih detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut.

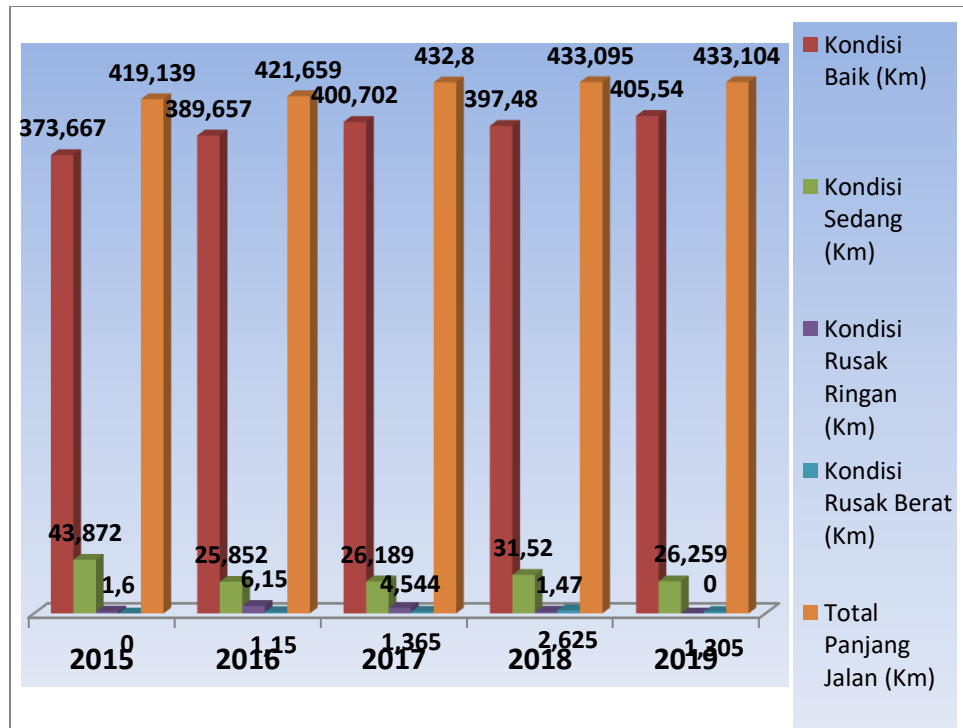


Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

**Gambar II. 11.**  
**Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019 (%)**

**b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2020

**Gambar II. 12.**  
**Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun**

Kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama tahun 2015 hingga tahun 2019 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah sepanjang 373,66 km dan setiap tahunnya meningkat menjadi sepanjang 405,54 km pada tahun 2019. Di satu sisi panjang jalan yang baik bertambah, namun pada tahun 2018 masih terdapat jalan yang rusak yaitu sepanjang 1,47 km. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan, secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

**c. Fokus Iklim Berinvestasi**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan perindustrian dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota madiun saat ini masih berada dalam Dinas Penanaman Modal, PTSP dan KUMKM. Perkembangan jumlah realisasi investasi di kota Madiun mulai 2014 – 2019 sebagai berikut.

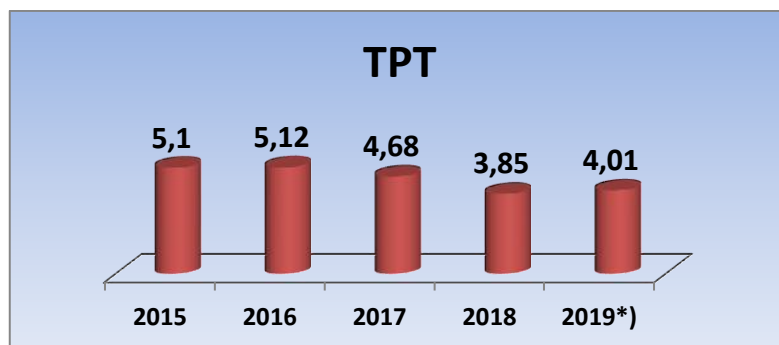


Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan KUMKM, Tahun 2020

**Gambar II. 13.**  
**Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2015 – 2019**

**d. Fokus Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

**Gambar II. 14.**  
**Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2015 – 2020**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

**Tabel II. 39.**  
**Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019**

<b>Indeks</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
IPM	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Umur Harapan Hidup	72,41	72,44	72,48	72,59	72,75
Indeks Pengetahuan	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77
Harapan Lama Sekolah	14,06	14,19	14,20	14,21	14,39
Rata-rata Lama Sekolah	11,08	11,09	11,10	11,11	11,13
Indeks Pengeluaran	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	14.723	15,300	15.415	15,616	16,040

Sumber: BPS KotaMadiun, Tahun 2020

IPM Kota Madiun pada Tahun 2019 mencapai 80,88 atau naik sebesar 0,55 poin dibanding Tahun 2018 yang mencapai 80,33. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan. Tabel 2.12 menampilkan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah Kota Madiun sebagai berikut:

**Tabel II. 40.**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2019**  
**Kota Madiun**

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN																													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																													
1	1	Pendidikan.																											
1	1	10101	16	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional	guru/kasek/ lembaga																			Dinas Pendidikan				
							8.895	6.858.643	7.131	1.609.478	1.847	1.765.138	0	-	663	376.791	674	286.463	182	387.033	1519	1.050.287	21%	65,26%	8.650	2.659.765	97,25%	38,78%	
1			1	Kegiatan Sertifikasi Guru	jumlah guru	guru	120	365.361	96	151.976	24	213.385	0	-	14	59.674	10	46.323	10	37.342	34	143.340	142%	67%	130	295.316	108%	81%	Dinas Pendidikan
			2	Kegiatan Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional guru	jumlah guru	guru	1500	293.711	1200	156.211	300	137.500	0	-	100	15.300	100	21.344	100	53.253	300	89.897	100%	65%	1.500	246.108	100%	84%	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan	jumlah Lembaga	lembaga	670	500.349	536	308.815	134	100.349	0	-	0	-	34	37.871	0	-	34	37.871	25%	38%	570	346.686	85%	69%	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Seleksi guru berprestasi, kepala sekolah, pengawas sekolah berprestasi Dan OSN	jumlah guru	guru	3315	780.077	2652	479.840	663	300.237	0	-	319	179.109	319	26.339	0	31.620	638	237.068	96%	79%	3.290	716.908	99%	92%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	jumlah guru	guru	85	125.810	85	70.810	85	55.000	0	-	0	0	72				72	-	85%	0,00%	72	70.810	85%	56,28%	Dinas Pendidikan
			6	Kegiatan Bantuan Pendidikan S1/ S2/ S3/ PGSD	jumlah guru	guru	45	704.495	34	158.669	9	140.899	0	-	0	9	49.300	0	26.715	9	76.015	100%	54%	43	234.685	96%	33%	Dinas Pendidikan	
			7	Kegiatan peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah guru	guru	3160	4.088.840	2528	283.157	632	817.768	0	-	230	122.708	202	105.285	0	238.103	432	466.096	68%	57%	2.960	749.253	94%	18%	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
1	10101	17		Program pendidikan dasar	Angka Partisipasi Murid SD/ SMP	lembaga/gugus/ siswa	100%	68.983.454	100%	39.543.206		#####	56	#####	354	3.214.476	320	10.915.078	539	#####	1269	34.123.520	126926%	86,29%	1270	73.666.726	#####	106,79%	Dinas Pendidikan
1			1	Kegiatan penerimaan peserta didik baru	Jumlah Lembaga	Lembaga	213	497.720	142	268.868	71	228.852	0	3.250	71	28.433	71	74.999	0	66.085	71	172.766	100%	75%	213	441.634	100%	89%	Dinas Pendidikan
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMP terbuca	Jumlah Lembaga	Lembaga	5	318.968	4	244.153	1	74.815	0	8.240		15.157		13200	1	-	1	36.597	25%	14,99%	5	280.750	100%	88%	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 1	Jumlah Lembaga	Lembaga			100%	99.276	100%	1.756.773	53							53	-	5300%	0,00%	54	99.276	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			4	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 2	Jumlah Gugus sekolah	Gugus			100%	137.733	100%	1.233.756	0%							0	-	0%	0,00%	1	137.733	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			5	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 3	Jumlah Siswa	Siswa			100%	195.320	100%	845.385	13%							0	-	13%	0,00%	1	195.320	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			6	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 4	Jumlah Sekolah	Sekolah			100%	91.050	100%	1.355.013	0%							0	-	0%	0,00%	1	91.050	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			7	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 5	Jumlah Lembaga	Lembaga			100%	53.180		671.077	0							0	-	0%	0,00%	1	53.180	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			8	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 6	Jumlah Lembaga	Lembaga			100%	319.492	100%	987.103	0%							0	-	0%	0,00%	1	319.492	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			9	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 7	Jumlah Lembaga	Lembaga			100%	350.055	100%	1.430.232	37%							0	-	37%	0,00%	1	350.055	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			10	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 8	Jumlah Orang	Orang			100%	191.934		1.167.081	0,00%							0	-	0%	0,00%	1	191.934	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	



PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN																										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8		9		10		9		10=8÷9		11=10/7x100%		12=6÷10		13=12/5x100%					
							K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	
11	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 9	Jumlah Lembaga	Lembaga		100%	208.250	100%	944.358	0%								0	-	0%	0,00%	1	208.250	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
12	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 10	Jumlah Lembaga	Lembaga		100%	84.500		1.426.697	0,00%								0	-	0%	0,00%	1	84.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
13	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 11	Jumlah Lembaga	Lembaga		100%	263.798	100%	835.536	16%								0	-	16%	0,00%	1	263.798	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
14	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 12	Jumlah Lembaga	Lembaga		100%	580.000	100%	1.151.394	72,49%								1	-	72%	0,00%	2	580.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
15	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 13	Jumlah Siswa	Siswa		100%	269.067	100%	840.259	29%								0	-	29%	0,00%	1	269.067	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
16	Kegiatan penyelenggaraan SMPN 14	Jumlah Siswa	Siswa		100%	91.978	100%	753.011	58,94%								1	-	59%	0,00%	2	91.978	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
17	Kegiatan pembangunan gedung sekolah	Jumlah Lembaga	Lembaga	30	19.834.593	24	7.068.943	7	12.765.650	0	-	1	1.170.285	2	4.879.456	3	6.200.009	6	12.249.750	86%	96%	30	19.318.693	100%	97%	Dinas Pendidikan
18	Kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah	Jumlah Lembaga	Lembaga	70	38.688.408	56	19.465.404	14	19.223.004	0	-	14	871.115	0	4.916.425	0	11.334.882	14	17.122.422	100%	89%	70	36.587.826	100%	95%	Dinas Pendidikan
19	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	Jumlah Lembaga	Lembaga	530	930.957	424	-	106	930.957	0	-	20	21.150	40	102.919	30	594.970	90	719.038	85%	77%	514	719.038	97%	77%	Dinas Pendidikan
20	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajaran	Jumlah Lembaga	Lembaga	93	867.362	0	-	93	867.362	0	-	0	-	95	10.800	0	506.083	95	516.883	102%	60%	95	516.883	102%	60%	Dinas Pendidikan
21	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	Lembaga		100%	165.284	100%	471.431	0,00%								0	-	0%	0,00%	1	165.284	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
22	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	Lembaga		100%	100.000		166.082	0,00%								0	-	0%	0,00%	1	100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
23	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	Lembaga		100%	5.430.569		158.695	0,00%								0	-	0%	0,00%	1	5.430.569	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
24	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kligen	Jumlah Lembaga	Lembaga	5	4.365.313	4	3.864.353	1	500.960	0	69.597	0	118.528	0	110.843	1	226.274	1	525.243	25%	13,59%	5	4.389.596	100%	101%	Dinas Pendidikan
25	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kligen	Jumlah Lembaga / Siswa	Lembaga / Siswa					242.720	0,00%								0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN																														
Kode	Usaha/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		9		10=8÷0		11=10/ 7x 100%		12=6÷0		13=12/ 5x 100%			14			
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP		
26	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen	jumlah paket	Paket					100%	495.590	0,00%							0		-	-	-	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan		
27	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen	jumlah paket	Paket					100%	202.240	0,00%							0		-	-	-	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan		
28	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo								414.544																		#DIV/0!			
29	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo								173.109																			#DIV/0!		
30	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo								136.842																			#DIV/0!		
31	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro								205.984																			#DIV/0!		
32	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga	lembaga	5	271.629	4	-	1	271.629	0	49.932	0	70.168	0	71.347	1	92.569	1	284.015	100%	105%	5	284.015	100%	105%	5	284.015	100%	105%	
33	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro								260.521																			#DIV/0!		
34	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari								113.187								0		#DIV/0!	0%	0	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!			
35	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Piliangbango								323.741																			#DIV/0!		
36	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo								237.920																			#DIV/0!		
37	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo								198.357																			#DIV/0!		
38	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun	jumlah lembaga	lembaga	5	250.320	4	-	1	250.230	0	59.940	0	19.825	0	59.559	1	137.729	1	277.054	100%	111%	5	277.054	100%	111%	5	277.054	100%	111%	
39	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo								474.210																			#DIV/0!		
40	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor								411.947																			#DIV/0!		
41	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor								200.330																			#DIV/0!		
42	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor								236.689																			#DIV/0!		











PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																				
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+0		11=10/7x100%			12=6+0		13=12/5x100%											
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP		K	RP	K	RP										
	137	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5						505.863																												
	138	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6						727.820																												
	139	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7						913.329																												
	140	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8						551.917																												
	141	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9						628.042																												
	142	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10						703.713																												
	143	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11						663.889																												
	144	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12						941.148																												
	145	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13						871.730																												
	146	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14						475.448																												
	147	Kegiatan pelaksanaan Uji coba, USBN dan UN SD dan SMP	Jumlah lembaga dan siswa (Lembaga)	Lembaga	93	1.006.230	0	-	93	1.006.230	0	-	0	693.352	112	138.736	0	23.186	112	855.274	120%	85%	112	855.274	120%	85%	Dinas Pendidikan									
	148	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	Jumlah gugus lembaga	lembaga	106	471.724	0	-	106	471.724	1	21.760	1	2.475	0	71.797	77	268.095	79	364.127	75%	77%	79	364.127	75%	77%	Dinas Pendidikan									
	149	Kegiatan OSN dan Cer das Cer mat SD, SMP	Jumlah Siswa	Siswa	247	322.192	0	-	247	322.192	0	-	247	127.286	0	18.915	0	146.858	247	293.059	100%	91%	247	293.059	100%	91%	Dinas Pendidikan									
	150	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival lomba seni siswa nasional SD dan SMP	Jumlah lembaga	siswa	309	1.158.040	0	-	309	1.158.040	0	-	0	76.704	0	446.082	425	184.507	425	707.292	138%	61%	425	707.292	138%	61%										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																				
Pr edikat Kinerja																																				
1	10101	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	lembaga/ wajib belajar/ orang/ paket	3.388	3.125.561	2.599	1.485.711	789	1.639.850	94	32.381	142	194.740	265	275.181	180	590.258	681	1.092.559	26%	73,54%	68100%	2.578.270	96,21%	80,43%	Dinas Pendidikan								
1			kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C	Angka Melek Huruf	orang	600	349.288	480	199.288	120	150.000	0	-	0	0	16.015	150	59.550	150	75.565	125%	50%	630	274.853	105%	79%	Dinas Pendidikan									
			kegiatan akreditasi pendidikan non formal dan PAUD	Jumlah Wajib Belajar	WB	250	351.014	200	188.714	50	162.300	0	-	0	30	4.100	0	77.799	30	81.899	60%	50%	230	270.613	92%	77%	Dinas Pendidikan									
			kegiatan workshop peningkatan pengelolaan perustakaan sekolah	Jumlah Lembaga	Lembaga	94	251.350	0	-	94	251.350	94	32.381	0	85.616	0	2.897	0	67.604	94	188.498	100%	75%	94	188.498	100%	75%	Dinas Pendidikan								
			kegiatan bimbingan teknis ekstra kurikuler pembina pramuka	Jumlah Lembaga	Lembaga	1315	1.302.993	1052	724.543	263	578.450	0	-	0	235	215.100	0	192.353	235	407.453	89%	70%	1.287	1.131.996	98%	87%	Dinas Pendidikan									



PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																													
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																			
				5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12=6+0		13=12/5x100%																									
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K (%)	RP																						
	5	kegiatan pembinaan lembaga non formal, kursus dan pendidikan masyarakat	Jumlah Lembaga	Lembaga	450	249.096	360	119.096	90	130.000	0	-	50	17.000	0	0	0	42.270	50	59.270	56%	46%	410	178.365	91%	72%	Dinas Pendidikan																		
	6	kegiatan gebyar PNF dalam rangka hari aksara internasional (HAI)	Jumlah Lembaga	Lembaga	400	182.413	320	52.613	80	129.800	0	-	0	0	0	30	110.226	30	110.226	38%	85%	350	162.839	88%	89%	Dinas Pendidikan																			
	7	kegiatan workshop penyusunan bahan ajar modul bahasa daerah	Jumlah Lembaga	Lembaga	279	439.407	187	201.457	92	237.950	0	-	92	92.124	0	37.069	0	40.457	92	169.649	100%	71%	279	371.106	100%	84%	Dinas Pendidikan																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
1	10101	19	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	lembaga/ guru/ siswa/ paket	100%	3.277.074	1.337	1.360.068	355	1.574.905	0	788	97	149.754	1	699.689	2.390	526.954	2488	1.377.185	186%	101,26%	2488	2.737.253	208,83%	83,71%																		
1			kegiatan bantuan BOP PAUD	Jumlah Lembaga	Lembaga	375	311.738	300	144.938	75	166.800	0	-	0	27.516	0	7.650	180	72.794	180	107.960	240%	65%	480	252.898	128%	81%	Dinas Pendidikan																	
			kegiatan seleksi dan pembinaan apr esiasi PTK PAUDNI berprestasi	Jumlah Lembaga	Lembaga	485	587.073	388	243.873	97	171.600	0	-	97	76.520	0	22.369			97	98.889	100%	58%	485	342.762	100%	58%	Dinas Pendidikan																	
			kegiatan pusat kegiatan gugus PAUD terpadu kota madium	Jumlah Lembaga	Lembaga	20	665.788	0	220.287	20	275.000	0	-	0	18.425	0	49.450	22	118.822	22	186.697	110%	68%	22	406.984	110%	61%	Dinas Pendidikan																	
			kegiatan workshop kurikulum PAUD	Jumlah Lembaga	Lembaga	485	368.681	388	168.481	97	200.200	0	-	0	49.813	180	84.461	180	134.274	186%	67%	568	302.755	117%	82%	Dinas Pendidikan																			
			kegiatan penyelenggaraan TK pembina	Jumlah Guru	Guru	2	461.628	1	267.923	1	193.705	0	788	0	27.294	1	95.667	0	161.890	1	285.639	100%	147%	2	553.562	100%	120%	Dinas Pendidikan																	
			kegiatan pagelaran Hari Anak Nasional	Angka Partisipasi Kasar PAUD	siswa	325	882.165	260	314.565	65	567.600	0	-	0	-	0	474.740	2008	88.987	2.008	563.727	3089%	99%	2.268	878.292	698%	100%	Dinas Pendidikan																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
1	10101	20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	lembaga/ dok/ or ang/ siswa	2.595	1.040.671	2.076	605.690	100	434.981	98	10.490	98	-	49	68.263	422	327.083	667	405.835	125%	92,01%	76	1.001.035	104,91%	96,55%	Dinas Pendidikan																	
1			kegiatan operasional BOS tingkat kota	jumlah lembaga	lembaga	710	267.329	568	187.338	142	79.991	98	-	98	-	0	10.490	0	68.931	196	79.421	138%	99%	764	266.759	108%	100%	Dinas Pendidikan																	
			kegiatan pengembangan dan implementasi informasi pendidikan berbasis IT	jumlah lembaga	lembaga	710	333.323	568	133.323	142	200.000	0	-	0	0	21.078	200	151.693	200	172.771	141%	86%	768	306.094	108%	92%	Dinas Pendidikan																		
			kegiatan operasional BOS madrasah diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	jumlah dokumen	dokumen	245	226.110	196	126.119	49	99.991	0	-	0	49	16.795	0	78.451	49	95.246	100%	95%	245	221.365	100%	98%	Dinas Pendidikan																		
			kegiatan BOP bantuan beasiswa mahasiswa (BBM)	jumlah lembaga	mahasiswa	930	213.910	744	158.910	186	55.000	0	-	0	-	0	19.900	222	28.007	222	47.907	119%	87%	966	206.817	104%	97%	Dinas Pendidikan																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																																													
2	17		Perustakaan.										0	-						0	-																								

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K (%)	RP	K (%)	RP							
										K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.															
2	17	21701	15	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	1562	1.866.422	1543	1.035.652	1528	1.228.465	0	#####	0	97.174	7	98.519	1510	328.077	1517	663.065	71%	56,92%	76	1.698.716	130,41%	95,53%				
2				Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Frekuensi (kali)	Kali	26	551.732	7	178.829	26	551.732	0	55.339	-	71.254	6	6.540	10	78.824	16	211.957	62%	38%	23	390.786	88%	71%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
				Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	Paket	36	379.732	36	218.866	2	379.732	-	18.120	0	25.920	1	28.373	-	193.882	1	266.294	50%	70%	37	485.160	103%	128%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
				Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah sosialisasi & promosi	eksemplar	1500	934.957	1500	637.957	1.500	297.000	0	65.836	0	-	0	63.606	1.500	55.372	1.500	184.813	100%	62%	3.000	822.770	200%	88%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															
																	Predikat Kinerja															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN																																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																																
1	2	10201	15	Kesehatan.	Persentase upaya kesehatan masyarakat	%	4507	38.845.261	3.602	21.885.778	1832	#####	180	#####	95	3.068.155	30	3.932.766	606	5.028.202	911,22	13.036.292	25%	59,57%	4.514	34.922.070	100%	89,90%				
				1 Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga	Per sentase SD/ MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV	%	100	216.063	-	93.925	100	122.138	11	19.300	8	43.707	10	20.426	7	35.059	36	118.492	36%	97%	36	212.417	36%	98%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana			
				2 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu	Per sentase kunjungan ibu hamil paripurna	%	100	1.094.946	100	567.396	100	527.550	9	39.695	9	17.804	9	346.279	8	28.321	35	432.099	35%	82%	135	999.495	135%	91%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana			
				3 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita	Cakupan kunjungan balita paripurna	%	98	1.052.069	99	647.674	97	404.395	9	75.156	-	30.607	1	212.529	8	48.463	18	366.755	18%	91%	117	1.014.429	119%	96%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana			
				4 Kegiatan peningkatan upaya kesehatan sekolah	Per sentase sekolah sehat	%	100	720.660	84	637.706	91	82.954	-	-	-	-	-	8	63.940	8	63.940	9%	77%	92	701.645	92%	97%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana				
				5 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase kelurahan yang mendapatkan promosi kesehatan minimal 18 kali	%	80	3.676.575	75	2.554.004	75	1.122.571	28	51.417	-	167.955	-	211.468	-	611.122	28	1.041.962	37%	93%	103	3.595.966	128%	98%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana			
				6 Kegiatan penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Per sentase TTU dan TPM sehat	%	85	573.348	66	452.258	19	121.090	19	1.775	16	18.256	6	10.825	6	80.406	47	111.262	247%	92%	113	563.520	133%	98%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana			
				7 Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	Per sentase kelurahan yang menerapkan 3 tatanan kota sehat	%	67	1.613.322	22	1.231.831	44	381.491	2	18.260	4	50.375	4	123.351	7	94.785	17	286.772	38%	75%	39	1.518.603	59%	94%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana			
				8 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo	Per sentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	%	455	887.208	364	121.842	91	887.208	-	-	-	198.478	-	156.990	90	331.797	90	687.264	99%	77%	454	809.106	100%	91%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana			

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN																										
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/ d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/ d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/ d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		9		10=840		11=10/ 7 x 100%		12=640		13=12/ 5 x 100%		
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	
7	Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	Per sentase kelurahan yang menerapkan 3 tatanan kota sehat	%	67	1.613.322	22	1.231.831	44	381.491	2	18.260	4	50.375	4	123.351	7	94.785	17	286.772	38%	75%	39	1.518.603	59%	94%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
8	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo	Per sentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai tar get	%	455	887.208	364	121.842	91	887.208	-	-	-	198.478	-	156.990	90	331.797	90	687.264	99%	77%	454	809.106	100%	91%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
9	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan	Per sentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai tar get	%	460	2.048.373	368	1.090.614	92	957.759	-	-	-	202.270	-	158.176	92	423.212	92	783.659	100%	82%	460	1.874.272	100%	92%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
10	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan	Per sentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai tar get	%	465	1.748.520	372	1.020.240	93	728.280	-	-	-	157.744	-	126.759	92	265.455	92	549.958	99%	76%	464	1.570.197	100%	90%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
11	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjar ejo	Per sentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai tar get	%	455	2.179.843	364	1.199.731	91	980.112	-	-	-	199.841	-	159.172	92	347.163	92	706.175	101%	72%	456	1.905.906	100%	87%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
12	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Or-o-or Ombo	Per sentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai tar get	%	453	2.129.915	362	1.183.235	91	946.680	-	-	-	184.636	-	145.686	95	330.510	95	660.832	105%	70%	457	1.844.067	101%	87%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
13	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo	Per sentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai tar get	%	470	2.133.453	376	1.174.677	94	958.776	-	-	-	202.993	-	155.642	94	354.374	94	713.009	100%	74%	470	1.887.686	100%	88%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
14	Kegiatan upaya kesehatan lansia	Per sentase masyarakat berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skr ening kesehatan	%	300	1.445.689	240	1.332.889	60	112.800	-	7.120	-	25.032	-	63.932	1	150	1	96.235	2%	85%	241	1.429.124	80%	99%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
15	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Ber sumber Masyarakat	Per sentase kelurahan siaga aktif ber str ata PURI	%	75	6.940.941	78	2.184.450	71	3.794.764	-	447.503	-	557.022	-	995.622	-	790.596	0	2.790.743	0%	74%	78	4.975.192	104%	72%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
16	kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manguharjo (DAK)	Per sentase capaian indikator SPM mencapai tar get	%	100	1.346.444	83	831.444	79	515.000	-	49.280	-	127.056	-	130.385	6	203.903	6	510.624	8%	99%	89	1.342.067	89%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
17	kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patihan(DAK)	Per sentase capaian indikator SPM mencapai tar get	%	100	1.424.364	83	996.364	83	428.000	33	34.538	-	120.038	-	179.889	-	73.445	33,3	407.909	40%	95%	117	1.404.273	117%	99%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
18	kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Demangan (DAK)	Per sentase capaian indikator SPM mencapai tar get	%	100	1.368.683	75	836.683	82	532.000	8	64.738	33	135.461	-	99.851	-	99.851	41,33	399.901	50%	75%	116	1.236.584	116%	90%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
19	kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banjar ejo (DAK)	Per sentase capaian indikator SPM mencapai tar get	%	100	1.425.634	92	904.634	68	521.000	3	79.739	8	136.100	-	127.799	-	176.005	11	519.642	16%	100%	103	1.424.276	103%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
20	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Or-o-Or o Ombo (DAK)	Per sentase capaian indikator SPM mencapai tar get	%	100	1.344.284	83	833.284	95	511.000	-	53.671	-	131.790	-	127.974	-	184.587	0	498.020	0%	97%	83	1.331.304	83%	99%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
21	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tawangrejo (DAK)	Per sentase capaian indikator SPM mencapai tar get	%	100	1.295.273	92	811.273	90	484.000	-	-	8	195.801	-	125.777	-	153.107	8	474.685	9%	98%	100	1.285.958	100%	99%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
22	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	Per sentase capaian indikator SPM mencapai tar get	%	100	1.898.707	83	1.074.707	83	824.000	58	46.354	8	149.990	-	165.914	-	293.070	66	655.327	79%	80%	149	1.730.035	149%	91%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN																													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+9		11=10/7x100%		12=4+10		13=12/5x100%					
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP				
	23	Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (BK.PROV)	Pr osentase posyandu PURI menjadi taman posyandu	%	44	280.948	41	104.919	43	176.029	-	18.625	-	15.200	-	88.321	-	38.883	0	161.028	0%	91%	41	285.947	94%	95%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
1	2	10201	16	Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase penurunan kasus KLB	%	635	4.780.846	1.626	3.128.068	515	1.693.867	153	76.159	26	547.828	-	442.306	235	433.742	414	1.500.035	25%	47,95%	2.040	4.628.103	321%	96,81%	
	1			Kegiatan Pencegahan Gangguan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa melalui UKJBM di bagi jumlah seluruh puskesmas dikalikan 100%	%	100	109.515	0	51.134	90	99.470	0	0	0	32.665	0	12.275	100	18.270	100	63.210	111%	64%	100	114.344	100%	104%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2			Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	Angka kesakitan DBD (Incidence Rate DBD)	per 100.000 penduduk	100	1.531.935	25,55	1.068.790	50	463.145	38,00	38.654	6	133.219	0	255.557	17	23.304	61	450.733	122%	97%	87	1.519.523	87%	99%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	3			Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuber kolosis)	Persentase kenaikan Case Notification Rate pada TB	%	25	247.150	20	166.483	5	80.667	0,00	-	0	57.407	0	13.163	3	600	3	71.170	60%	88%	23	237.652	92%	96%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	4			Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS	Persentase penemuan Kasus HIV	%	20	827.969	16	525.692	4	302.277	1	15.230	1	37.675	0	32.290	2	183.542	4	268.737	100%	89%	20	794.429	100%	96%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	5			Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Persentase respon sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) kurang dari 24 jam	%	100	210.691	100	146.059	100	64.632	100	1.350	0	28.421	0	7.211	0	15.075	100	52.057	100%	81%	100	198.116	100%	94%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	6			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)	Persentase Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur	%	90	93.311	75	61.047	80	32.264	3,82	2.425	1,94	50	0	6.271	8	6.624	14	15.370	17%	48%	89	76.416	99%	82%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	7			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita	Persentase kelurahan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	100	615.100	100	458.735	96	156.365	0	-	11,1	13.724	0	91.092	100	25.818	100	130.634	100%	84%	100	589.370	100%	96%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	8			Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Persentase penduduk usia > 15th diskrining faktor resiko PTM	%	100	1.145.175	80,3	650.128	90	495.047	10,16	18.500	5,5	244.667	0	24.448	5	160.510	21	448.124	23%	91%	101	1.098.253	101%	96%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
1	2	10201	17	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	%	1233	96.572.514	605	55.405.835	522	*****	98	*****	42	5.793.086	6	7.038.772	43	*****	189	28.992.144	31%	52,33%	793	84.397.979	64%	87,39%	
	1			Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Persentase puskesmas dan klinik terakreditasi	%	71	1.959.092	30	857.835	42	828.203	0	11.900	20	124.346	0	52.668	0	98.506	20	287.420	48%	35%	50	1.145.254	70%	58%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2			Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Persentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan pr abayar	%	100	77.902.287	81,6	51.769.931	85	26.132.356	14	5.969.137	0	5.359.798	0	5.352.576	0	1.837.005	14	18.518.517	16%	71%	96	70.288.447	96%	90%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	3			Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai per undangan	Sarana	800	761.352	300	437.704	200	323.648	13	6.280	17	93.799	0	12.142	37	100.453	67	212.674	34%	66%	367	650.378	46%	85%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN																																													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																			
				5		6		7		8		9		10		9		10=84		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%																					
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP																				
	4	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Presentase puskesmas dan puskesmas pembantu yang telah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	276.844	50	160.245	75	116.599	50	32.790	0	48.366	0	62.506	0	203.437	50	347.098	67%	298%	100	507.343	100%	183%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana																		
	5	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Pr-ov)	Jumlah tenaga dokter tambahan di puskesmas rawat inap	Orang	1	90.000	1	60.000	1	30.000	0	5.000	0	7.500	0	7.400	0	10.000	0	29.900	0%	100%	1	89.900	100%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana																		
	6	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional	Jumlah sarana pelayanan kesehatan tradisional yang dibangun	Sarana	20	134.706	14	79.256	6	56.525	3	-	1	37.795	2	1.600	0	0	6	39.395	100%	70%	20	118.651	100%	88%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana																		
	7	Kegiatan peningkatan Upaya Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Presentase obat kadaluarsa	%	5	566.297	4	314.099	1	252.198	0	16.578	0	46.177	0	38.563	1	179.799	1	281.118	100%	111%	5	595.217	100%	105%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana																		
	8	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Presentase pengelolaan obat sesuai standar	%	100	103.560	100	72.510	100	31.050	18	-	3,89	9.483	0	11.856	0	6.230	22	27.569	22%	89%	122	100.079	122%	97%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana																		
	9	Rehabilitasi Puskesmas puskesmas pembantu dan rumah dinas medis dan paramedis	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Buah	25	1.434.309	20	232.986	5	1.201.323	0	33.825	0	30.675	2	111.031	0	967.055	2	1.142.587	40%	95%	22	1.375.573	88%	96%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana																		
	10	Kegiatan Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya (DBH-CHT)	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan	Kegiatan	5	9.202.090	0	817.674	5	8.384.416	0	1.575	0	35.148	0	568.116	3	4.547.627	3	5.152.466	60%	61%	3	5.970.140	60%	65%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana																		
	11	Kegiatan Pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas (DAK)	Presentase kecukupan alat kesehatan di puskesmas, laboratorium kesehatan dan jaringannya	paket	6	4.141.978	4	603.596	2	3.538.382	0	-	0	-	2	820.314	2	2.133.087	4	2.953.401	200%	83%	8	3.556.997	133%	86%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
1	2	10201	18	Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum daerah	Persentase penanganan pengaduan masyarakat																																							
						812	340.010.123	738	263.186.413	582	#####	635	#####	23	29.259.303	2	23.985.618	609	#####	1.269	97.592.768	172%	37,08%	2.007	360.779.181	247%	106,11%																		
				1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarajo	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	4.719.619	100	2.776.421	90	1.943.198	100	205.080	0	286.566	0	425.706	100	856.035	100	1.773.387	100%	91%	100	4.549.808	100%	96%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana															
				2	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	4.727.325	80	2.712.733	90	2.014.592	100	153.121	0	442.948	0	333.162	100	970.901	100	1.900.132	100%	94%	100	4.612.866	100%	98%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana															
				3	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	5.138.771	100	3.153.756	90	1.985.015	100	164.043	0	321.857	0	382.319	100	1.061.666	100	1.929.885	100%	97%	100	5.083.641	100%	99%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana															

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN																																		
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%														
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K (%)	RP													
4	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Or-orombo	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	4.366.696	100	2.666.696	90	1.700.000	100	218.202	0	278.230	0	305.006	100	708.178	100	1.509.617	100%	89%	100	4.176.312	100%	96%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana								
5	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	2.925.367	100	1.806.367	90	1.119.000	100	157.009	0	244.853	0	232.385	100	432.724	100	1.066.972	100%	95,35%	100	1.066.972	100%	36,47%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana								
6	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	1.512.371	89	2.550.557	90	1.512.371	100	212.228	0	332.695	0	286.053	100	575.508	100	1.406.485	100%	93,00%	100	1.406.485	100%	93,00%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana								
7	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD RSUD	Jenis barang dan jasa yang disediakan	jenis	212	316.619.974	169	247.519.883	42	71.688.512	35	*****	23	27.352.153	2	22.020.988	9	24.828.473	69	88.006.291	164,29	122,76	238	335.526.174	112,26	105,97	RSUD								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
1	2	10202	20	Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru / rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	%																												
							357	139.761.472	283	81.590.826	74	*****	0	-	0	23.000	26	-	48	*****	74	15.669.960	26%	19,21%	357	97.260.785	100%	69,59%						
1				Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	jenis	176	67.899.647	129	40.609.150	47	6.592.150	0	-	0	-	25	-	23	11.922.395	48	11.922.395	102	181	177	52.531.545	100,57	77,37	RSUD					
2				Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	paket	4	2.114.583	3	1.486.604	1	347.050	0	-	0	23.000	0	-	0	308.677	0	331.677	0	96	3	1.818.281	75,00	85,99	RSUD					
3				Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit	Jumlah Gedung yang dibangun	Unit	1	1.847.595	0	-	1	2.075.757	0	-	0	-	0	-	1	1.957.219	1	1.957.219	100	94	1	1.957.219	100,00	105,93	RSUD					
4				Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	jenis	176	67.899.647	151	39.495.072	25	1.538.800	0	-	0	-	1	-	24	1.458.668	25	1.458.668	100	95	176	40.953.740	100,00	60,32	RSUD					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																																		
2	8			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																														
2	8	10201	20	Program keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase peserta KB aktif	%	230	4.277.720	51	1.950.783	216	2.904.390	3	95.565	17	470.453	0	335.462	0	-	20	901.480	39%	46,21%	71	2.852.263	31%	66,68%						
1				Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga sejahtera	Persentase keluarga tribina yang ber KB	%	75	654.858	0	326.263	74	328.595	0	11.900	0	124.347	0	52.668	0	0	0	188.914	0%	57%	0	515.177	0%	79%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana					
2				Kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga Berencana	Persentase laporan yang lengkap dan tepat waktu	%	100	444.358	0	315650,244	87	282.310	0	6.280	12	93.549	0	12.392	0	0	12	112.221	14%	40%	12	427.871	12%	96%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana					
3				Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling	Persentase Peserta KB Baru MKJP	%	39	788.676	48,15	370.828	39	623.989	3	35.740	5	45.416	0	62.506	0	0	8	143.662	21%	23%	56	514.489	144%	65%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana					
4				Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kesehatan reproduksi	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	3,5	278.873	0	146.597	3,5	271.484	0	5.795	0	26.874	0	13.125	0	0	0	45.794	0%	17%	0	192.390	0%	69%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana					

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN																																												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/ d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/ d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/ d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
				5		6		7		8		9		10		9		10=8e		11=10/ 7 x 100%		12=e+0		13=12/ 5 x 100%																				
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP																
	5	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tribina	Jumlah Kejuaraan yang diperoleh	Juara	4	407.209	0	114.667	4	371.045	0	1.400	0	66.305	0	37.237	0	0	0	104.942	0%	28%	0	219.609	0%	54%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana																	
	6	Kegiatan Bantuan Operasional Keluar ga Berencana (KB) (DAK)	Jumlah Balai Keluar ga Berencana memperoleh bantuan operasional	Balai	3	1.402.022	3	676.779	3	725.243	0	34.449	0	113.963	0	157.536	0	0	0	305.948	0%	42%	3	982.727	100%	70%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana																	
	7	kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan keluar ga berencana (DAK)	Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan KB yang diadakan	Jenis	5	301.724			5	301.724	0	-	0	-	0	-			0		0%						Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Pr edikat Kinerja																																												
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>																																												

**PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH**

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																													
2	1	Tenaga Kerja.																											
2	1	20101	15	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	%	531	6.357.997	6,5	3.508.755	502	3.077.654	10	17.305	325	551.169	1	822.774	46	243.727	382	1.634.975	5877%	46,60%	388,5	5.143.730	73%	80,90%	
	1			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pendidikan dan pelatihan ketrampilan	Org	35	1.193.484	100%	228.412	79	1.193.484	10	10.570	35	18.724	0	-	0	-	35	29.294	44%	2%	36	257.707	103%	22%	Dinas Tenaga Kerja
	2			Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTT Tingkat Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Keg	2	639.955	50%	387.134	2	252.822	600	0	-	1	173.701	1	17.331	2	191.632	100%	76%	3	578.766	125%	90%	Dinas Tenaga Kerja	
	3			Kegiatan Optimalisasi Inf or masi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Inf or masi Pasar Kerja (IPK)	Ter sedianya dokumen IPK sesuai kebutuhan kerja	Dok	1	184.395	100%	128.840	79	55.555	0	5.100	0	7.138	0	14.063	1	27.356	1	53.656	1%	97%	2	182.496	200%	99%	Dinas Tenaga Kerja
	4			Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH-CHT)	Jumlah pelatihan	Org	200	3.074.809	100%	2.354.942	79	719.867	0	-	120	283.130	0	225.633	0	198.741	120	707.503	152%	98%	121	3.062.445	61%	100%	Dinas Tenaga Kerja
	5			Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewir ausahaan	Jumlah wir ausaha baru	Org	40	322.548	100%	188.219	40	134.329	0	-	0	33.639	0	117.068	40	-	40	150.707	100%	112%	41	338.926	103%	105%	Dinas Tenaga Kerja
	6			Kegiatan Penyebar luasan Inf or masi Bur sa Tenaga Kerja	Jumlah penyuluhan motivasi kerja	Lokasi	12	193.476	100%	130.230	79	63.246	0	-	10	141.064	0	2.257	3	-	13	143.321	16%	227%	14	273.551	117%	141%	Dinas Tenaga Kerja
	7			Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah pengiriman tenaga kerja siap pakai	Org	160	133.788	100%	90.978	79	42.810	10	1.035	139	24.003	0	7.065	0	300	149	32.403	189%	76%	150	123.381	94%	92%	Dinas Tenaga Kerja
	8			Kegiatan Updating data Pengangguran Tenaga Kerja	Ter sedianya data ketenagakerjaan	Dokumen	1	250.541			1	250.541	0	-	0	21.570	0	17520.897	1	0	1	39.091	100%	16%	1	39.091	100%	16%	Dinas Tenaga Kerja

PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH																																												
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP																			
										K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																											
	8	Kegiatan Updating data Pengangguran Tenaga Kerja	Ter sedianya data ketenagakerjaan	Dokumen	1	250.541			1	250.541	0	-	0	21.570	0	17520.897	1	0	1	39.091	100%	16%	1	39.091	100%	16%	Dinas Tenaga Kerja																	
	9	kegiatan fasilitas pemberdayaan IKM/ IRT oleh dekr anasda	Jumlah Kegiatan Dekranasda	Kegiatan	20	300.000			4	300.000	-	1	21.900	0	163.658			1	185.558	25%	62%	1	185.558	5%	62%	Dinas Tenaga Kerja																		
	10	kegiatan pengembangan industri kreatif	Jumlah peserta pelatihan pengembangan industri kreatif	orang	60	65.000			60	65.000	0	-	20	-	0	101.809	0	-	20	101.809	33%	157%	20	101.809	33%	157%	Dinas Tenaga Kerja																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
2	1	20101	16	Program Perlindungan dan Pengembangan kelembagaan Ketenagakerjaan	Persentase Pekerja yang mendapat jaminan sosial	%	3565	1.673.241	3402	1.164.681	293	508.560	1	56.992	280	190.436	0	50.871	11	124.301	292	422.599	9%	36,28%	3694	1.587.280	104%	94,86%																
	1			Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Persepsi Hubungan Industrial	Jumlah penyelesaian persepsi hubungan perusahaan dengan pekerja	Kahsus	50	100.871	40	45.871	10	55.000	5.700	4	26.339	-	11.779,14	10	9.081	14	52.899	140%	96%	54	98.770	108%	98%	Dinas Tenaga Kerja																
	2			Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah pembinaan hubungan industrial dan jamaostek	Paket/ Perusahaan	500	245.113	400	147.216	100	97.897	26.552	150	4.114	-	11.575,50	0	28.604	150	70.845	150%	72%	550	218.061	110%	89%	Dinas Tenaga Kerja																
	3			Kegiatan Pendataan Wajib Lapoer Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja	Jumlah bimbingan teknis norma kerja	Perusahaan/ Dok	500	180.226	400	132.441	95	47.785	0	-	100	26.730	0	1.624	0	17.431	100	45.785	105%	96%	500	178.226	100%	99%	Dinas Tenaga Kerja															
	4			Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja dan pemborongan	Jumlah bimbingan teknis penyedia jasa dan pemborongan	Perusahaan/ Dog	5	108.769	4	74.481	1	34.288	-	1	-	0	15.815	0	12.311	1	28.126	100%	82%	5	102.606	100%	94%	Dinas Tenaga Kerja																
	5			Kegiatan Peningkatan Pengawasan Per lindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah bimbingan teknis per lindungan tenaga kerja	Keg/ Per sh	2500	276.565	2550	241.490	85	35.075	0	23.790	25	-	0	-	7.593	25	31.383	29%	89%	2.575	272.873	103%	99%	Dinas Tenaga Kerja																
	6			Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah pembahasan masalah ketenagakerjaan	Paket	5	567.910	4	378.910	1	189.000	1	950	0	133.253	0	6.006	8.250	1	148.459	100%	78%	5	527.369	100%	93%	Dinas Tenaga Kerja																
	7			Kegiatan Sosialisasi Per aturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMK	Jumlah sosialisasi per aturan ketenagakerjaan dan pembahasan UMK	Paket	5	193.788	4	144.273	1	49.515	0	-	0	-	4.071,67	1	41.030	1	45.102	100%	91%	5	189.375	100%	98%	Dinas Tenaga Kerja																
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
2	10	21001	15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Prosentase Informasi Publik yang di Publikasikan	%	2692	9.957.462	2147	4.561.913	2589	5.395.549	632	#####	640	1.306.439	779	1.888.994	301	2.363.274	2352	5.984.394	110%	131,18%	4499	10.546.307	167%	105,91%																
	1			Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara Madiun	Jumlah jamsiaran	jam/ hari	32	685.581	18	227.450	18	458.131	0	31.375	0	78.377	0	134.526	18	178.352	18	422.630	100%	92%	36	650.080	113%	95%	Dinas Komunikasi dan Informatika															
	2			Kegiatan Penyebar lusan Inf or masi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah media massa	media	100	4.900.000	50	2.300.000	50	2.600.000	0	268.983	0	823.512	0	1.074.679	50	703.004	50	2.870.177	100%	110%	100	5.170.177	100%	106%	Dinas Komunikasi dan Informatika															
	3			Kegiatan Pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan	Jumlah pertemuan	per pertemuan	24	775.000	12	375.000	12	400.000	3	50.975	3	98.124	3	76.934	3	272.164	12	498.197	100%	125%	24	873.197	100%	113%	Dinas Komunikasi dan Informatika															





PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH																																												
Kode	Urusan/Instansi/Unit Kerja/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
				5		6		7		8		9		10		9		10=80		11=10/7x100%		12=610		13=12/5x100%																				
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP																
2	11	21101	16	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	% Jumlah Koperasi Aktif.	%	2506	1.722.802	486	319.001	421	632.764	0	55.653	80	237.405	250	142.762	280	195.008	610	630.828	126%	197,75%	1096	949.829	44%	55,13%																
				1 Nama Kegiatan Peningkatan Koperasi.	Jumlah Koperasi yang diikuti	Kop.	500	669.955	480	196.969	20	256.323	0	-	80	78.021	100	92.734	30	66.767	210	237.522	1050%	93%	690	434.491	138%	65%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro															
				2 Nama Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi.	Jumlah pelaksanaan penilaian Kop. Berprestasi	Kali	6	835.000	6	122.032	1	158.594	0	44.851							0	44.851	0%	28%	6	166.883	100%	20%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro															
				3 Kegiatan pelatihan dan sosialisasi kebijakan per koperasi	Jumlah peserta pelatihan & sosialisasi	orang	1500	158.594		300	158.594	0	10.802	0	36.250	150	0	150	124.741	300	171.793	100%	108%	300	171.793	20%	108%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro																
				4 kegiatan pelatihan manajemen pengelola koperasi/ KUD	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	Jumlah koperasi	500	59.253	0	-	100	59.253	0	-	0	123.134	0	50.029	100	3.500	100	176.662	100%	298%	100	176.662	20%	298%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro															
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
2	11	21101	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	% Penumbuhan Jumlah Usaha Mikro	%	600	1.464.184	180	359.022	120	1.189.196	0	-	164	73.685	0	155.525	20	164163,4	184	393.373	102%	109,57%	364	752.395	61%	51,39%																
				1 Nama Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun.	Jumlah data dan Jenis Pemberdayaan	Kali	100	1.165.446	80	304.219	20	1.165.446	0	-	0	53.978	0	155.525	20	164.163	20	373.666	100%	32%	100	677.885	100%	58%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro															
				2 Kegiatan Sosialisasi Dukungan Penyediaan Permodalan bagi KUMKM	Jumlah peserta Sosialisasi	Kop & UM	500	298.738	100	54.804	100	23.750	0	-	164	19.707	0	0		164	19.707	164%	83%	264	74.511	53%	25%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro																
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
2	12			Penanaman Modal.																																								
2	12	21101	15	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah nilai investasi PMDN/ PMA Non Fasilitas.	M	30	2.094.616	2	815.103	11	969.231	0	55.566	0	102.914	2	269.164	4	-	6	427.643	300%	52,46%	8	1.242.746	27%	59,33%																

PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH																																															
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																									
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+0		11=10/7x100%			12=6+10		13=12/5x100%																						
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP		K	RP	K (%)	RP																					
		1	Nama Kegiatan Promosi Investasi	Jumlah Pameran Investasi.	Kali	10	1.375.000	1	638.511	6	449.872	0	52.378	0	1.600	1	156.525	1	0	2	210.502	33%	47%	3	849.014	30%	62%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro																			
		2	Nama Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi.	Jumlah Dokumen Investasi	Dok.	10	285.000	1	176.591	3	84.743	0	1.201	0	16.677	1	32.739	1	0	2	50.617	67%	60%	3	227.208	30%	80%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro																			
		3	kegiatan kerjasama investasi	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	kali	5	339.744			1	339.744	0	1.988	0	64.202	0	61.266	1	0	1	127.455	100%	38%	1	127.455	20%	38%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro																			
		4	kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)	Jumlah dokumen	dokumen	5	94.872	0	-	1	94.872	0	-	0	20.435	0	18.634	1	0	1	39.069	100%	41%	1	39.069	20%	41%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro																			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																															
Predikat Kinerja																																															
2	12	21101	16	Program peningkatan pelayanan perizinan	Rasio izin yang diterbitkan	%	460	1.159.377	2	379.257	112	459.814	0	10.802	1	172.584	50	98.629	0	-	51	282.014	2550%	74,36%	53	661.271	12%	57,04%																			
		1	Kegiatan Surveillance ISO 9001:2008	Jumlah sertifikat manajemen ISO 9001:2008	Keg.	5	160.000	1	97.122	1	14.450	0	0	1	13.200	0	0			1	13.200	100%	91%	2	110.322	40%	69%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro																			
		2	Kegiatan Suevey Kepuasan Masyarakat.	Jumlah dokumen yang disusun.	Dok.	5	185.000	1	77.576	1	31.450	0	0	0						0	-	0%	0%	1	77.576	20%	42%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro																			
		3	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SM Perizinan	Jumlah SIM yg diproses.	Izin	100	451.913	0	153.153	40	51.450	0	0	0	-	20	48.600			20	48.600	50%	94%	20	201.753	20%	45%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro																			

PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH																													
Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		9		10=8÷4		11=10/7x100%		12=6÷10		13=12/5x100%					
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP				
		4	Kegiatan Pelaksanaan TimKoor dinasi Pelayanan Perizinan.	Jumlah jenis izinyang dilayani	200	181.232	0	51.406	40	181.232	0	10.802	0	36.250	0	-	0	47.052	0%	26%	0	98.458	0%	54%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro				
		5	Sosialisasi Tentang Proses Perizinan	Jumlah peserta Sosialisasi	150	181.232	0	-	30	181.232	0	0	0	123.134	30	50.029	30	173.162	100%	96%	30	173.162	20%	96%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
2	14		Statistik.																										
2	14	21001	15	Program pengembangan data / informasi / statistik daerah	Dokumen statistik daerah yang tersusun	dokumen	2	784.959	2	395.972	2	388.987	0	5.700	0	52.505	2	145.221	0	-	2	203.426	100%	51,37%	4	599.398	200%	76,36%	
		1	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	2	784.959	2	395.972	2	388.987	0	5.700	0	52.505	2	145.221	2	203.426	100%	52%	4	599.398	200%	76%	Dinas Komunikasi dan Inf ormatika			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
2	15		Persandian.																										
2	15	21001	15	Program Pengembangan Tata Kelola Persandian	Jumlah OPD yang menggunakan persandian	OPD	34	302.230	40	152.230	34	150.000	0	-	0	16.027	5	32.702	5	48.729	13%	32,01%	45	200.959	132%	66,49%			
		1	Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Persandian	Jumlah OPD peserta ta pelatihan per sandian	OPD	34	302.230	40	152.230	34	150.000	0	-	0	16.027	5	32.702	5	48.729	15%	32%	45	200.959	132%	66%	Dinas Komunikasi dan Inf ormatika			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
3	6			Perdagangan.																									
3	6	30601	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan ekspor perdagangan	%	47093	2.256.353	37677	1.395.313	9386	947.275	100	58.306	5302	103.247	3570	329.616	0	89.836	8972	581.005	24%	41,64%	46649	1.976.319	99%	87,59%	
		1	Kegiatan Pamer an Dagang	Jumlah Keikutsertaan Pameran	jenis	13	350.000	13	300.300	162.860	0									0	#DIV/0!	0%	13	300.300	100%	86%	Dinas Perdagangan		
		2	Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk	Jumlah Partisipasi Dalam Pameran Perdagangan	kota	15	628.865	12	305.415	3	323.450	0	10.834	2	25.209	0	198.462	2	234.505	67%	73%	14	539.920	93%	86%	Dinas Perdagangan			
		3	Kegiatan Pengumpulan Inf or masi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau dilekati Pita Cukai Palsu di Per edaran atau Tempat Penjualan Ecer an	Jumlah Pengumpulan Inf or masi Yang Dilaksanakan	inf or masi	300	102.564	240	37.564	30	41.289	0	-	0	1.090	20	26.208	20	27.298	67%	66%	260	64.862	87%	63%	Dinas Perdagangan			
		4	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilaksanakan	pasar	15	109.026	12	63.717	3	45.310	-	0	1.942	0	20.654	0	22.596	0%	50%	12	86.313	80%	79%	Dinas Perdagangan				



PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH																															
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+0		11=10/7x100%		12=6+0		13=12/5x100%							
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP			
Predikat Kinerja																															
3	7	20101	15	Perindustrian.																											
3	7	20101	15	Program Pengembangan industri kecil menengah	Jumlah IKM dan IRT																										
						440	262.444.690	700	259.668.503	1660	787.354	25	13.350	40	211.299	25	338.425	20	-	110	563.074	16%	0,22%	810	260.231.576	184%	99,16%				
				1	Kegiatan Sosialisasi Penerapan Standart Produk Industri Manufaktur	Org	100	125.012	100%	49.262	100	75.750	0	-	0	-	0	52.740		0	52.740	0%	70%	1	102.002	1%	82%	Dinas Tenaga Kerja			
				2	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat lokal dan nasional	kali	5	1.114.705	100%	145.401	5	165.000	0	-	0	33.639	5	117.068	0	-	5	150.707	100%	91%	6	296.107	120%	27%	Dinas Tenaga Kerja		
				3	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Tingkat Nasional (INACRAFT)	Jumlah keikutsertaan dalam pameran	Lkali	5	259.102.147	100%	258.943.382	295	158.765	0	-	0	141.064	0	2.257	0	-	0	143.321	0%	90%	1	259.086.703	20%	100%	Dinas Tenaga Kerja	
				4	Kegiatan pelatihan peningkatan Ketrampilan Teknik Per bengkelan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Kali/ Org	80	242.168	100%	143.685	295	98.483	0	-	10	-	0	75.520	0	-	10	75.520	3%	77%	11	219.205	14%	91%	Dinas Tenaga Kerja	
				5	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Org	100	593.260	100%	76.936	295	46.702	0	-	10	21.570	0	-	-	0	-	10	21.570	3%	46%	11	98.506	11%	17%	Dinas Tenaga Kerja
				6	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT melalui pelatihan peningkatan Produk Souvenir	Jumlah IKM/IRT yang mengikuti pelatihan	Org	50	668.198	100%	153.481	295	58.654	0	-	0	-	20	26.795	0	-	20	26.795	7%	46%	21	180.276	42%	27%	Dinas Tenaga Kerja	
				7	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good manufacturing practices DBH-CHT	Frekuensi pemeriksaan kadar tar dan nikotin dalam 1 tahun	Kali	20	515.199	100%	156.356	295	100.000	25	13.350	Rp -	15.026	0	22.967	20	-	45	51.343	15%	51%	46	207.699	230%	40%	Dinas Tenaga Kerja	
				8	kegiatan sosialisasi dan fasilitasi uji nilai gizi produk makanan olahan	Jumlah peserta Sosialisasi	Orang	80	84.000			80	84.000	0	-	20	-	0	41.078	0	-	20	41.078	25%	49%	20	41.078	25%	49%	Dinas Tenaga Kerja	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															
Predikat Kinerja																															
3	8	20101	15	Transmigrasi.																											
3	8	20101	15	Program ketransmigrasian	Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja																										
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Ketransmigrasian	Jumlah program ketransmigrasian	kali	3	84.428	100%	54.663	3	29.764	1	10.570	0	18.724	0	-	0	-	1	29.294	1000%	53,59%	1,1	83.958	37%	99,44%	Dinas Tenaga Kerja	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															
Predikat Kinerja																															
FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN																															
4	5	40506	22	Unsur Staf.																											
4	5	40506	22	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	Kegiatan	1120	3.268.353	866	1.619.508	224	1.169.000	7	#####	11	217.960	0	137.340	0	351.648	18	859.492	2%	53,07%	884	2.479.000	79%	75,85%			

PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH																											
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		9		10=8/0		11=10/7x100%			12=6/0		13=12/5x100%		
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP		K	RP	K (%)	RP	
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Infasi Daerah (TPID)	Jenis Kegiatan TPID	Jenis	15	268.353	12	118.353	3	150.000	1	13.908	2	41.778	0	27.815	0	37.448	3	120.948	100%	81%	15	239.301	100%	89%	Bagian Administrasi Per ekonomin dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD	BUMD	15	640.000	3	193.874	3	150.000	0	-	3	45.229	0	40.967	0	20.967	3	107.163	100%	71%	6	301.036	40%	47%	Bagian Administrasi Per ekonomin dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	3	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	Kali	60	150.000	48	-	12	150.000	3	12.737	3	9.840	0	16.240	0	34.827	6	73.643	50%	49%	54	73.643	90%	49%	Bagian Administrasi Per ekonomin dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	4	Kegiatan Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai (DBH-CHT)	Jumlah Informasi yang disampaikan	macam	15	1.800.000	3	1.307.282	3	350.000	3	125.900	3	38.500	0	34.500	0	125.800	6	324.700	200%	93%	9	1.631.982	60%	91%	Bagian Administrasi Per ekonomin dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	5	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan	Kegiatan	15	350.000			3	309.000	0		0	82.614	0	0	0	99.996	0	182.609	0%	59%	0	182.609	0%	52%	Bagian Administrasi Per ekonomin dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	6	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang Lembaga Keuangan	Jumlah lembaga keuangan (LK) yang sesuai OJK	badan hukum	1000	60.000	800		200	60.000	0		0	-	0	17.818	0	32.611	0	50.429	0%	84%	800	50.429	80%	84%	Bagian Administrasi Per ekonomin dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														
													Predikat Kinerja														
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN																											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																										
1	6	Sosial.																									

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN																																				
Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				5		6		7		8		9		10		9		10=8/9		11=10/7 x 100%		12=6/10			13=12/5 x 100%											
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP										
1	6	10601	15		508	3.585.269	184	16	124	4.806.263	52	#####	54	971.267	28	780.047			134	2.138.539	73%	1365868%	318	2.138.555	63%	59,65%										
				%																																
				1	60	150.000	58	-	12	150.000	3	-	3	-	0	-	0	37.483	6	37.483	50%	25%	64	37.483	107%	25%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
				2	61	150.001	47	1	13	150.001	4	15.400	6	113.650	1	300	3	26.397	14	155.747	108%	104%	61	155.748	100%	104%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
				3	62	150.002	2	2	14	1.370.996	5	-	5	75.191	2	14.423	0	39.300	12	128.914	86%	9%	14	128.916	23%	86%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
				4	63	1.370.996	3	-	15	1.370.996	6	224.587	6	305.860	3	400.981	0	422.096	15	1.353.524	100%	99%	18	1.353.524	29%	99%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
				5	64	624.846	56	-	16	624.846	7	61.151	7	86.833	4	76.916	0	144.188	18	369.087	113%	59%	74	369.087	116%	59%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
				6	65	335.494	5	-	17	335.494	8	34.858	8	154.340	5	106.800	0	199.542	21	495.540	124%	148%	26	495.540	40%	148%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
				7	66	150.006	6	6	18	150.006	9	-	9	105.654	6	-	0	-	24	105.654	133%	70%	30	105.660	45%	70%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
				8	67	653.924	7	7	19	653.924	10	51.230	10	129.740	7	180.627	0	204.565	27	566.161	142%	87%	34	566.168	51%	87%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	
																			Predikat Kinerja																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																																				
2	3			Pangan.							0	-							0	-																
2	3	20301	15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Per sentase ketersediaan energi dan protein	%													982	1.111.470	738%	4%	1115	27.135.635	24%	94,06%										
				1	Jumlah peserta pelatihan dan dokumen laporan	orang dan dokumen					1000	550.000	-	133.770	200	136.918	-	14.750	200	33.600	0	27.284	0	79.706	200	155.340	100%	113%	200	289.110	20%	53%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
				2	Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah dokumen laporan	Dokumen				5	550.000	-	86.342	1	89.380	-	25.429	1	59.896	0	42.734	0	49.734	1	177.793	100%	199%	1	264.135	20%	48%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			



PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN																																			
Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				5		6		7		8		9		10		9		10=8/0		11=10/7x100%		12=6/0		13=12/5x100%											
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP							
	3	Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan	Jumlah Pameran yang diikuti	kali	10	500.000	-	121.059	2	152.700	-	1.920	-	9.540	1	9.995	2	81.827	3	103.282	150%	68%	3	224.340	30%	45%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	4	Kegiatan Survei Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Pedagang Grosir dan Eceran	Jumlah dokumen laporan	Dokumen	5	24.007.144	-	23.982.880	1	24.264	-	24.534	1	37.502	2	54.772	1	171.579	4	288.387	400%	1189%	4	24.271.267	80%	101%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	5	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL), Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Karang Kitri	Jumlah kelurahan atau kelompok KRPI yang dimonev dan dibina	Kelurahan	135	330.000	122	65.652	27	70.894	0	-	27	42.619	0	183,40	0	37.740	27	80.543	100%	114%	149	146.195	110%	44%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	6	Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pemilihan Duta Keamanan Pangan	Jumlah peserta sosialisasi dan dokumen laporan	orang dan dokumen	3500	425.188	-	224.060	700	201.128	-	981	50	80.967	700	577.742	0	2.453.762	750	3.113.453	107%	1548%	750	3.337.513	21%	785%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	7	Kegiatan Survei Pola Pangan Harapan	Jumlah dokumen laporan	Dokumen	2	55.000	-	22.582	1	22.657	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	22.582	0%	41%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	8	Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen yang dikoordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Dokumen	5	503.000	3	238.006	1	29.997	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0%	0%	3	238.006	60%	47%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	9	Kegiatan Lomba Cipta Menu	Jumlah kegiatan lomba cipta menu	Lomba/ Pameran	10	1.928.000	8	1.149.813	2	146.688	0	-	0	-	0	67.021	2	75.490	2	142.511	100%	97%	10	1.292.324	100%	67%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																			
Predikat Kinerja																																			
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																																			
3	1																																		
3	1	20301	15	Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan/ Pemas- aran Hasil Perikanan	Produksi Budidaya Perikanan dan Ragam Produksi Olahan yang bernilai tambah	Ton	1375110	3.156.215	294066	832.489	225022,1	#####	####	59.026	66005	111.636	44015	146.274	230907	316.937	79%	38,07%	524.973	1.149.426	38%	36,42%									
	1			Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan	jumlah pelatihan	kali penyuluhan/ studi bandung	10	509.000	9/ 4	229.494	2	41.875.360	0	-	2	38.262	-	-	-	2	38.262	100%	0%	43.932	267.757	439320%	53%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
	2			Kegiatan Pembenihan Ikan	jumlah benih ikan yang dihasilkan BBI	ekor	1.375.000	422.765	294050	213.350	225000	115.034	120886	18.546	66.000	35.279	44000	3.840	-	-	230.886	57.665	103%	50%	524.936	271.016	38%	64%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
	3			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan	Jumlah sarpras rantai dingin dan jumlah bimbingan teknis	paket dan kali	5	100.000	-	34.617	1	36.238	1	29.216	-	10.189	-	-	-	1	39.405	100%	109%	1	74.021	20%	74%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
	4			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional	Jumlah sarpras pengolahan dan jumlah peserta pelatihan pengolahan perikanan	paket dan orang	15	400.000	-	40.711	3	44.497	-	-	2	-	0	8.161	1	-	3	8.161	100%	18%	3	48.872	20%	12%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN																													
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/ d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/ d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/ d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				5		6		7		8		9		10		11=10/ 7x100%		12=6+10		13=12/ 5x100%									
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K (%)	RP								
5	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budi daya	Jumlah petani budi daya ikan	kali	5	1.199.450	1	136.510	1	41.106	-	-	1	16.642	0	8.002	-	-	1	24.643	100%	60%	2	161.153	40%	13%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
6	Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan	kg/ kapita/ tahun	75	525.000	14,8	177.806	15,1	79.876	-	11.264	-	11.264	15	126.272	-	-	15	148.800	99%	186%	30	326.607	40%	62%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
7	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat (pembudidayaan ikan) DAK																												
8	Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan DAK																												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
3	3	20301	15	Pertanian.						0	-							0	-										
3	3	20301	15	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi tanaman pangan (padi) per satuan luas (ton/ ha)	Ton/ Hektar	170	38.487.822	67	22.917.982	31	#####	0	77.168	3	254.571	4	102.810	0	-	7	434.549	10%	1,90%	74	23.352.531	44%	60,68%	
1				Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Lokasi per contohan SRI	jumlah	30	441.151	9	260.151	6	181.000	-	15.950	2	32.400	1	27.284	-	-	3	75.634	50%	42%	12	335.785	40%	76%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2				Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah GAPOKTAN penerima PUAP	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	15	386.004	10	188.604	3	197.400	-	33.229	-	52.096	3	42.734,00	-	-	3	128.059	100%	65%	13	316.663	87%	82%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3				Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis	Jumlah GAPOKTAN Kota Madiun	Gapoktan	75	1.337.280	15	714.423	15	120.963	-	1.920	-	9.540	-	2.980,00	-	-	0	14.440	0%	12%	15	728.863	20%	55%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4				Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian	paket	20	3.582.650	7	1.217.795	1	305.238	-	24.534	-	37.502	-	27.296	-	-	0	89.332	0%	29%	7	1.307.127	35%	36%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5				Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Lokasi Pembuatan Pupuk Organik	Lokasi	18	760.800	15	429.035	3	90.773	-	-	1	42.619	-	-	-	-	1	42.619	33%	47%	16	471.654	89%	62%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6				Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	Jumlah infrastruktur pendukung pertanian	Paket	12	31.979.937	11	20.107.974	3	11.871.963	-	1.535	-	80.413	-	2.517	-	-	0	84.465	0%	1%	11	20.192.439	92%	63%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7				Kegiatan Pembangunan/ perbaikan sumber-sumber air (jaringan irigasi tersier) DAK																									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
3	3	20301	16	Program peningkatan produksi hasil peternakan dan pelayanan kesehatan hewan	Jumlah Produksi Daging dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan	Ton/ Kasus	11496	3.593.534	11159	1.193.346	2421	#####	573	#####	627	158.748	566	717.835	546	-	2312	1.011.823	21%	84,79%	13.471	2.205.169	117%	61,36%	

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN																													
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13									
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP				
1	1	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan	Jumlah hewan peliharaan yang mendapat pengobatan/pemeriksaan kesehatan	Ekor	750	115.000	153	47.617	250	49.335.920	-	-	-	-	2	20.839	258	-	260	20.839	104%	0%	413	68.456	55%	60%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	2	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan daging	Hari	1.096	433.264	731	210.336	365	222.928	90	28.111	91	17.358	62	55.384	93	-	336	100.853	92%	45%	1.067	311.189	97%	72%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	Jumlah penernak pemanfaat teknologi pakan/ jumlah pengawasan mutu pakan/ jumlah peserta pelatihan	orang/ kali	1500	554.500	600	93.150	6	125.000	75,00	67.248	75,00	11.507	75,00	9.796	75	-	300	88.552	5000%	71%	900	181.702	60%	33%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	4	Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produk PETERNAKAN	Jumlah pemasar produk penernak/ jumlah studi banding/ pameran produksi penernak	orang	1500	741.250	250,00	293.865	300	137.000	-	-	130	42.943	180	57	120	-	430	43.000	143%	31%	680	336.865	45%	45%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	5	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi PETERNAKAN Tepat Guna	jumlah penyuluhan, jumlah demplot/ per contoh budi daya penernak	Kali/ unit	1500	1.112.000	10	157.649	300	97.300	150	24.775	75	28.703	75	618.976	-	-	300	672.454	100%	691%	310	830.103	21%	75%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	6	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak yang mendapat pengobatan/pemeriksaan kesehatan	Ekor	5.150	637.520	9415	390.730	1.200	162.464	258	15.105	256	58.237	172	12.783	-	-	686	86.126	57%	53%	10.101	476.856	196%	75%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>																													
PERINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																													
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																													
1	5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	orang																									
1	5	10501	15	Program Pemberdayaan Satuan polisi pamong praja dalam Pelaksanaan Tugas	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	orang	6193	1.429.260	6184	874.584	101	616.916	38	52.380	1639	181.825	1	37.437	0	151.182	1678	422.825	27%	48,35%	7.862	1.297.408	127%	90,77%	
	1			Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP	Jumlah Peserta Diklat/ Bimtek yang diikuti	orang	46	478.100	40	268.671	46	209.429	38	48.640	0	-	1	30.550	0	122.364	39	201.554	85%	96%	79	470.225	172%	98%	Satuan Polisi Pamong Praja
	2			Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Jumlah Peserta HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	orang	6123	866.160	6123	499.673	6	366.487	-	3.740	1639	181.825	0	6.887	0	2.518	1.639	194.970	27317%	53%	7.762	694.643	127%	80%	Satuan Polisi Pamong Praja
	3			Kegiatan Jambore Satpol PP se Jawa Timur	Jumlah Peserta Jambore Satpol PP	orang	24	85.000	21	106.240	49	41.000	-	-	0	0	0	0	26.300	0	26.300	0%	64%	21	132.540	88%	156%	Satuan Polisi Pamong Praja	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
1	5	10501	16	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Cakupan Patroli petugas Satpol PP per hari	kali	2329	2.338.007	2850	1.286.454	2268	1.539.626	1368	82.607	1294	327.618	1474	210.207	0	656.481	4136	1.276.913	145%	99,26%	6.966	2.563.367	300%	109,64%	
	1			Kegiatan Penerbitan umum dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	pelanggar	1430	899.315	1471	488.073	1420	899.315	933	39.026	940	40.540	1087	71.857	0	386.179	2.960	537.601	208%	60%	4.431	1.025.674	310%	114%	Satuan Polisi Pamong Praja

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																																	
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																							
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%																									
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP																								
			2	Kegiatan Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah instansi yang terlibat dalam koordinasi	pelanggan	770	380.184	630	230.184	650	150.000	273	24.163	115	42.450	120	35.820	0	56.878	508	159.310	78%	106%	1.138	389.494	148%	102%	Satuan Polisi Pamong Praja																				
			3	Kegiatan Patroli wilayah Satpol PP	Jumlah patroli per hari	kali	9	547.906	6	294.464	6	253.442	9	-	179.731	0	24.371	0	39.543	9	243.644	150%	96%	15	538.109	167%	98%	Satuan Polisi Pamong Praja																					
			4	Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan kegiatan Pemerintah	Jumlah Giat Pemerintah Pengamanan	kali	120	510.602	743	273.733	192	236.869	153	19.419	239	64.897	267	78.160	0	173.882	659	336.357	343%	142%	1.402	610.090	1168%	119%	Satuan Polisi Pamong Praja																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
1	5	10501	18	Program peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	%	596	1.197.958	200	563.669	596	1.006.872	306	80.683	6	152.480	217	185.286	48	260.147	577	678.596	289%	120,39%	777	1.242.265	130%	103,70%																					
			1	Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peserta Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	orang	200	297.812	200	297.812	200	198.388	0	9	65.655	200	85.498	0	16.137	200	167.299	100%	84%	400	465.112	200%	156%	Satuan Polisi Pamong Praja																					
			2	Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan Swasta	Jumlah Peserta Kegiatan Inspeksi	lokasi	48	91.859	0	77.662	48	91.859	0	-	0	-	0	4.197	48	73.380	48	77.577	100%	84%	48	155.239	100%	169%	Satuan Polisi Pamong Praja																				
			3	Kegiatan Operasi Pemadam Kebakaran	Jumlah Pemadam Kebakaran	lokasi	48	630.670	0	96.534	48	630.670	6	51.566	6	86.825	17	91393	0	135.801	29	365.585	60%	58%	29	462.119	60%	73%	Satuan Polisi Pamong Praja																				
			4	Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peserta Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	orang	300	177.616	0	91.661	300	85.955	300	29.108	0	-	0	4197,6	0	34.829	300	68.135	100%	79%	300	159.796	100%	90%	Satuan Polisi Pamong Praja																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
1	5	10501	19	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	orang setiap RT	3729	2.320.966	2071	1.107.114	1998	1.213.852	1603	#####	55	351.500	400	144.681	0	420.667	2058	1.117.297	99%	100,92%	4.129	2.224.411	111%	95,84%																					
			1	Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	peserta	801	302.280	801	203.885	330	98.395	331	-	0	-	0	94.300	0	0	331	94.300	100%	96%	1.132	298.185	141%	99%	Satuan Polisi Pamong Praja																				
			2	Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pos Kamling	pos kamling	830	1.105.722	815	740.702	825	365.020	0	-	0	-	0	-	0	368.352	0	368.352	0%	101%	815	1.109.054	98%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja																				

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																										
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																				
				5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12=6/10		13=12/5x100%																						
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP																		
		3	orang	868	204.356	455	94.356	192	110.000	0	-	55	5.500	400	50.381	32.879	455	88.759	237%	81%	910	183.116	105%	90%	Satuan Polisi Pamong Praja																	
		4	orang	1200	248.170	0	68.170	621	180.000	1242	144.450	0	-	0	-	0	19.436	1.242	163.886	200%	91%	1.242	232.056	104%	94%	Satuan Polisi Pamong Praja																
		5	alat peraga	30	460.437	0	-	30	460.437	30	56.000	0	346.000	0	-	0	-	30	402.000	100%	87%	30	402.000	100%	87%	Satuan Polisi Pamong Praja																
		6							41.320		-																															
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																										
Predikat Kinerja																																										
1	5	10502	20	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%	9829	4.112.859	2884	1.825.438	1599	936.028	180	#####	932	290.643	304	269.003	184	208.103	1600	902.749	55%	49,45%	4.484	2.728.187	46%	66,33%														
				Kegiatan Pemantauan Dan Penyebar Luasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga	shift	5475	2.722.859	1095	1.278.199	1095	630.353	180	135.000	182	210.393	184	142.031	184	142.031	730	629.455	67%	100%	1.825	1.907.654	33%	70%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
				Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam	orang	3694	580.000	1639	247.633	390	152.175	0	-	750	80.250	0	40.253	0	13.942	750	134.445	192%	88%	2.389	382.079	65%	66%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
				Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan SAR	orang	660	810.000	150	299.605	114	153.500	0	-	0	-	120	86.719	0	52.130	120	138.849	105%	90%	270	438.455	41%	54%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																										
Predikat Kinerja																																										
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																																						
2	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.																																						
2	2	10601	16	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	4598	2.849.176	2448	1.396.642	855	1.862.857	34	#####	0	620.093	0	233.087	0	-	34	1.092.195	1%	78,20%	2482	2.488.837	54%	87,35%														

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																										
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/ d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/ d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/ d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14																				
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP																	
		1	Kegiatan Evaluasi 10 Pro gram Pokok PKK	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	35	817.761	7	411.334	406.426	0	18.100	0	110.950	0	129.050	0	0	258.100	0%	64%	7	669.434	20%	82%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
		2	Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Jumlah peserta kegiatan	3.000	259.577	2.400	118.277	600	141.300	0	0	75.191	0	104.037	0	0	179.228	0%	127%	2.400	297.505	80%	115%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
		3	Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Perempuan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan dokumen pelaporan	30		6	591.306	0	0	47.900	0	88.519				0	136.419	#DIV/0!	#DIV/0!	6	727.725	20%	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
		4	Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	178	709.627	35	275.725	38	433.903	34	61.151	0	86.833	0	268815,3		34	416.798	89%	96%	69	692.523	39%	98%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
		5	Kegiatan pemantapan kelembagaan PUG	Jumlah peserta pelatihan, monitoring dan evaluasi	950	322.290	0	0	190	322.290	0	77.006	0	104.061	0	342.648		0	523.715	0%	162%	0	523.715	0%	162%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
		6	Pembinaan dan Pelatihan Keluarga TKW/TKI	Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan	270	79.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
		7	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba, pencanangan, pembinaan serta pameran	135	660.262	0	0	27	558.937	0	34.858	0	154.540	0	397.898		0	587.295	0%	105%	0	587.295	0%	89%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																										
Predikat Kinerja																																										
2	2	10601	17	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak	Prosentase penanganan KDRT terhadap perempuan dan anak	%	4058	2.346.929	1264	1.412.792	656	934.138	0	#####	0	228.682	0	187.466	0	0	796.923	0%	56,41%	1.264	2.209.715	31%	94,15%															
		1	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah tenaga/ relawan	85	473.712	8,17	277.972	8	195.740	0	327.770	0	48.886	0	117.456		0	494.113	0%	252%	8	772.085	10%	163%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
		2	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta sosialisasi	2310	412.558	730	318.899	420	93.659	0	0	32.414	0	32414		0	64.828	0%	69%	730	383.727	32%	93%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
		3	Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, dan Konvensi Hak Anak	Jumlah peserta sosialisasi	1650	243.732	500	168.120	220	75.611	0	0	0	0	37.596		0	37.596	0%	50%	500	205.716	30%	84%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																																	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																							
				5		6		7		8		9		10		9		10=8÷9		11=10/ 7 x 100%		12=6÷10		13=12/ 5 x 100%																									
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP																					
2	6	20601	17	Program pelayanan dan penataan administrasi kependudukan	Prosentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%		30	956.430	31	620.532	31	335.898	5	-	0	55.811	0	73.882	20	165.825	25	295.518	81%	47,62%	56	916.050	187%	95,78%																				
				1 Kegiatan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk	kelurahan		27	330.164	27	175.856	27	154.308	5	-	0	24.650	0	34.944	20	66.814	25	126.407	93%	82%	52	302.264	193%	92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
				2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan	Jumlah Penduduk	kecamatan		3	626.266	4	444.676	4	181.590	0	-	-	31.161	-	38.938		99.011	0	169.111	0%	93%	4	613.787	133%	98%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
2	13			Kepemudaan dan Olah Raga.																																													
2	13	21301	17	Program pembinaan pemuda dan olah raga	Jumlah perlombaan olah raga yang diselenggarakan	paket		3		3	1.056.323	3	3.659.350	3	343.797							3	#REF!	3	80	3	#REF!	1	#REF!																				
					Jumlah kegiatan peningkatan kesegaran jasmani	paket		4			19.186.619.000	0		4								4		4		4																							
					Jumlah kegiatan kepemudaan	paket		3				2		3									3		3		3																						
					Jumlah sarana prasarana olah raga yang diadakan	paket		3				0		3									3		3		3																						
				1 Kegiatan Latihan dasar kepemimpinan	Jumlah siswa yang berpartisipasi	810 siswa		810	1.542.474	400	583.124	810	959.350	575	89.565	0	41.975	0	573.445	0	212.241	575	917.226	71%	96%	975	1.500.350	120%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga																			
				2 Kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah peserta yang berpartisipasi	orang		2000	2.773.199	1500	273.199	500	2.500.000	0	56.050	0	76.584	210	922.060	297	1.353.874	507	2.408.567	101%	96%	2.007	2.681.767	100%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga																			



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																															
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				5		6		7		8		9		10		10=8+0		11=10/7x100%		12=6+0		13=12/5x100%									
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP					
				3	Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah sarana olahraga yang disediakan	3 paket	15	400.000	12	200.000	3	200.000	0	-	0	-	2	66.500	3	129.843	5	196.343	167%	98%	17	396.343	113%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															
Predikat Kinerja																															
2	16				<b>Kebudayaan.</b>																										
2	16	21301	15		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	Jumlah kesenian yang dilombakan	paket	4		4	#REF!	4	5.334.913	4	1.561.398							4	#REF!	4	97	4	#REF!	1	#REF!		
						Jumlah festival seni yang diselenggarakan	paket	13	14.649.168.000	11		13		14								14		14		14					
						Jumlah fasilitasi keragaman budaya	paket	3		1		3		4								4		4		4					
				1	Kegiatan Festival seni	Jumlah Paket	paket	8	1.180.000	2	168.273	2	1.080.000	0	-	0	143.040	2	375.618	1	-	3	518.658	150%	48%	5	686.931	63%	58%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
				2	Kegiatan Revitalisasi benda cagar budaya	Jumlah Paket	peket	2	2.500.000	2	587.824	2	250.000	-	-	-	187.350	-	-	2	-	2	187.350	100%	75%	4	775.174	200%	31%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
				3	Kegiatan Fasilitasi per kembangan keragaman budaya	Jumlah pergelaran seni yang dilaksanakan	jenis	30	4.459.913	18	3.502.087	18	4.004.913	3	365.467	11	1.034.322	0	-	7	-	21	1.399.789	117%	35%	39	4.901.876	130%	110%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															
Predikat Kinerja																															
2	18				<b>Kearifan.</b>																										
2	18	21701	16		<b>Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah</b>	Jumlah berkas arsip yang dikelola	Jumlah Berkas Arsip In Aktif yang Dikelola	1034	1.038.221	202	451.962	234	423.647	2	-	0	-	202	622.186	0	-	204	622.186	101%	137,66%	406	1.074.149	39%	103,46%		
				1	Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip	Jumlah unit kearsipan	unit	34	478.221	2	262.648	34	215.573	2	-	-	-	2	394.240	-	-	4	394.240	12%	183%	6	656.888	18%	137%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				2	Kegiatan Sosialisasi & Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta	Jumlah peserta Sosialisasi Pengelola Kearsipan	org	1.000	560.000	200	189.314	200	208.073	0	-	0	-	200	227.947	0	0	200	227.947	100%	110%	400	417.261	40%	75%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															
Predikat Kinerja																															
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																										
3	2				<b>Pariwisata.</b>																										
3	2	21301	16		<b>Program pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata</b>	Jumlah event dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	kegiatan	1705	3.974.507	241	2.180.970	241	2.062.902	120	58.107	3	213.250	134	613.559	3	-	260	884.916	108%	40,57%	501	3.065.886	29%	77,14%		

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																													
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%									
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K (%)	RP						
		1	Kegiatan Fasilitasi pengembangan kemitraan di bidang pariwisata	Jumlah Peserta	orang	1.000	310.000	100	209.078	100	310.000	100	19.795	-	20.561	-	-	-	100	40.355	100%	13%	200	249.434	20%	80%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga		
		2	Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam negeri (hari jadi provinsi)	Jumlah keikutsertaan dalam pameran	kali	10	1.595.392	2	712.490	2	882.902	-	6.000	1	98.889	3	415.323	1	-	5	520.211	250%	59%	7	1.232.701	70%	77%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		3	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pariwisata	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi	dokumen	10	100.000	2	60.287	2	100.000	-	-	-	-	10.331	2	-	2	10.331	100%	10%	4	70.617	40%	71%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga		
		4	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas	Jumlah festival	jumlah festival	10	598.847	2	358.847	2	240.000	-	-	2	91.300	1	47.575	0	-	3	138.875	150%	58%	5	497.722	50%	83%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		5	Kegiatan Pemberdayaan generasi muda bidang kepariwisataan	Jumlah Peserta	orang	675	1.370.268	135	840.268	135	530.000	20	32.313	-	2.500	130	140.331	0	-	150	175.143	111%	33%	285	1.015.411	42%	74%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										
																			Predikat Kinerja										
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																													
4	1		Unsur Staf																										
4	1	40502	15	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah MOU	dokumen	124	4.459.515	95	3.772.470	128	251.515	17	82.076	10	42.872	6	49.328	0	71.976	33	246.252	35%	6,53%	128	4.018.722	103%	90,12%	
			1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan MOU	Jumlah MOU	dok	15	170.313	10	65.665	5	20.313	1	-	2	-	4	-	-	19.758	7	19.758	140%	97%	17	85.423	113%	50%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
			2	Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)	Raker nas Apeksi, Muskomwil Apeksi dan JKPI	kali	15	2.679.813	12	2.620.000	3	59.813	0	25.000	2	15.926	1	18.302	-	-	3	59.228	100%	99%	15	2.679.228	100%	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
			3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik	Rakor Pawitan DIROGO	kali	5	833.163	4	807.000	100	26.163	0	-	1	-	-	23.726	-	-	1	23.726	1%	91%	5	830.726	100%	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
			4	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja di Negara/ Depar temen/ Lembaga Pemerintah Non Depar temen/ Luar Negeri	Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja di Kota Madiun	kali	89	776.226	69	279.805	20	145.226	16	57.076	5	26.946	1	7.300	0	52.218	22	143.540	110%	99%	91	423.345	102%	55%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										
																			Predikat Kinerja										

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		9		10=8÷0		11=10/ 7x 100%		12=6÷0		13=12/ 5x 100%					
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP	
4	1	40502	16	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Dokumen Kinerja Pemerintahan	dok	945	8.766.483	822	6.794.596	121	1.419.721	7	79.554	3	180180	2	285200	106	787953	118	1.332.888	14%	19,62%	940	8.127.484	99%	92,71%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				1 Kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah	Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah	kali	5	285.500	4	256.075	1	29.425	0	-	1	17.001	-	12.090	-	-	1	29.091	100%	99%	5	285.166	100%	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				2 kegiatan Bintek Administrasi Kelurahan		orang	750	909.000	650	240.204	100	116.630	0	0	-	-	3.000	100	107.612	100	110.612	100%	95%	750	350.816	100%	39%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	
				3 Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Jenis kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	jenis	11	440.000	10	381.467	1	58.533	0	0	-	-	300	1	56.254	1	56.554	100%	97%	11	438.021	100%	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	
				4 Kegiatan Rapat Kordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Jumlah Rapat Kordinasi pejabat pemerintahan daerah	kali	36	1.233.223	30	1.024.250	6	208.973	1	22.719	1	25.950	1	45.950	2	101.972	5	196.592	83%	94%	35	1.220.842	97%	99%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				5 Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil	Lomba Kelurahan Berhasil tingkat Kota, Prov dan Nasional	kali	9	1.075.520	4	875.000	3	200.520	3	-	1	103.516	-	82.582	-	-	4	186.098	133%	93%	8	1.061.098	89%	99%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				6 Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inpeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Walikota ke Kelurahan	kali	114	3.442.840	108	2.765.000	6	677.840	0	-	-	-	1	140.082	3	450.233	4	590.314	67%	87%	112	3.355.314	98%	97%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				7 Kegiatan Kordinasi Penyusunan LKPJ Walikota	Buku LKPJ Walikota Madiun	Dokumen	5	678.200	4	611.600	1	66.600	1	35.335	-	28.513	-	1.197	-	-	1	65.044	100%	98%	5	676.644	100%	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
				8 Kegiatan Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	Buku LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	Dokumen	15	702.200	12	641.000	3	61.200	2	21.500	-	5.200	-	-	-	-	2	71.882	67%	161%	14	739.582	93%	105%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+9		11=10/Tx100%		12=6+10		13=12/Sx100%					
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP				
	9	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan	Dokumen	1	15.000	-	-	1	15.000	0	-	1	1.250	-	6.033	-	7.315	1	14.599	100%	97%	1	14.599	100%	97%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
4	1	40503	17	Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase tingkat kelengkapan administrasi per kantor an	%	684	3.976.498	362	2.055.831	314	597.580	1	38.657	151	99.500	0	107.395	152	422.350	304	667.901	84%	32,49%	666	2.723.732	97%	68,50%	
	1			Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah personil SKPD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/ jasa	Orang	300	1.015.582	150	500.745	150	140.752	0	35.907	75	14.473	0	55.696	75	25.948	150	132.024	100%	94%	300	632.769	100%	62%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah
	2			Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan & Standar Kegiatan Konstruksi	Jumlah dokumen	Dokumen	6	711.585	1	500.099	1	211.486	0	-	0	0	0	1	198.096	1	198.096	100%	94%	2	698.195	33%	98%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah	
	3			Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	Jumlah dokumen	Dokumen	6	209.644	1	154.460	1	55.184	0	-	0	0	0	1	44.454	1	44.454	100%	81%	2	198.915	33%	95%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah	
	4			Kegiatan Operasional ULP	Jumlah paket pengadaan barang/ jasa yang dilelang	Paket	300	920.408	150	527.309	150	72.255	0	-	75	46.536	0	19.267	75	110.822	150	176.625	100%	244%	300	703.933	100%	76%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah
	5			Kegiatan Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen/ Laporan	Dokumen	72	1.119.279	60	373.218	12	117.903	1	2.750	1	38.490	0	32.433	0	43.029	2	116.702	17%	99%	62	489.920	86%	44%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
4	1	40504	18	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase per da yang ditetapkan	%	46	11.895.430	37	11.043.599	10	851.831	1	#####	2	153.985	0	132.888	6	529.932	9	917.782	24%	8,31%	46	11.961.381	100%	100,55%	
	1			Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah raper da/ per da, dokumen kompilasi, sosialisasi, bintek	jenis	15	1.870.140	12	1.621.793	3	248.346	0	-	1	14.400	0	78.132	2	120.083	3	212.614	100%	86%	15	1.834.408	100%	98%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%													
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K (%)	RP										
	2	Kegiatan Legislasi Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	1	98.764	1	98.764	1	-	0	0					0	-	0%	#DIV/0!	1	98.764	100%	100%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah								
	3	Kegiatan kordinasi kerjasama per masalah per aturan per undang-undangan	Jumlah pembinaan kadar kum, penyuluhan hukum, penyelesaian sengketa hukum	jenis	15	9.163.927	12	8.715.632	3	448.295	0	8.436	0	105.976	0	54.756	3	221.796	100%	87%	15	9.106.596	100%	99%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah								
	4	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah himp. Lemb. Daerah, jdih, lemb. Lepas per da, buku per at. Per undang-undangan	jenis	15	762.600	12	607.410	3	155.189	1	92.542	1	33.609	0	-	1	188.053	100%	202%	15	921.614	100%	121%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
4	1	40505	19	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	kali	2910	125.175.192	494	5.140.806	582	3.365.212	78	1.350	136	258.257	172	2.285.580	0	602.049	386	3.147.236	78%	61,22%	880	8.288.042	30%	6,62%					
	1			Kegiatan keprotokolanan Pemerintah Kota Madun	Jumlah pelaksanaan kesegaran jasmani	kali	2685	117.000.000	449	4.832.602	537	3.140.428	68	-	124	257.057	161	2.284.223	0	357.203	353	2.898.484	66%	92%	802	7.731.085	30%	7%	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
	2			Kegiatan peningkatan kesegaran jasmani Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan pemerintah kota	kali	225	8.175.192	45	308.204	45	224.783	10	1.350	12	1.200	11	1.357	0	244.846	33	248.752	73%	111%	78	556.956	35%	7%	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
4	1	40501	20	Program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	Persentase Peringkat Daerah yang Tertib Administrasi Ketatalaksanaan	%	227	1.049.709	184	325.865	43	655.246	28	89.427	0	165.106	2	68.945	1	377.406	31	700.884	17%	215,08%	215	1.026.749	95%	97,81%	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
	1			Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelayanan publik	dokumen	70	436.423	56	68.335	14	288.123	0	-	0	-	2	2.579	0	268.934	2	271.514	14%	94%	58	339.849	83%	78%	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
	2			Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	jumlah dokumen	dokumen	1	66.071	-	-	1	77.438	-	29.209	-	14.510	-	29.671	1	47.384	1	120.774	100%	156%	1	120.774	100%	183%	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
	3			Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Publik	orang	156	547.215	128	257.530	28	289.685	28	60.218	-	150.596	-	36.695	0	61.088	28	308.597	100%	107%	156	566.127	100%	103%	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
4	1	40501	21	Program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	Prosentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik	%	1064	2.453.069	825	747.699	239	1.024.657	214	#####	3	78.934	4	166.644	0	492.732	221	867.658	27%	116,04%	1.046	1.615.357	98%	65,85%					
	1			Kegiatan Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	dokumen	15	694.367	12	384.367	3	310.000	1	38.955	0	11.118	1	90.363	0	51.155	2	191.591	67%	62%	14	575.958	93%	83%	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
	2			Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	Jumlah aparatur yang dibina, jumlah risalah yang disusun serta jumlah risalah yang dikirim ke kompetisi	orang/risalah	1.015	1.101.902	812	309.732	203	200.000	203	55.218	0	-	0	49.960	-	76.287	203	181.465	100%	91%	1.015	491.197	100%	45%	Bagian Umum Sekretariat Daerah				

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																												
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/ d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/ d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/ d Tahun 2019 (Akhir s/ tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14																						
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K (%)	RP																			
	3	Kegiatan Pelaksanaan Refor masi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	dokumen	2	256.800	1	53.600	1	114.657	-	-	1	2.700	-	-	-	107.688	1	110.388	100%	96%	2	163.988	100%	64%	Bagian Umum Sekretariat Daerah																	
	4	Kegiatan Penataan susunan Organisasi dan tatakerja (SOTK) Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Madiun	Jumlah rancangan per da/ per wal SOTK yang disusun	dokumen	4	200.000	0	-	4	200.000	0	3.400	2	59.716	1	23.554	0	108.281	3	194.950	75%	97%	3	194.950	75%	97%																		
	5	Kegiatan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen yang disusun	dokumen	28	200.000	0	-	28	200.000	10	31.775	0	5.400	2	2767,5	0	149.321	12	189.264	43%	95%	12	189.264	43%	95%																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
4	1	40506	23	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	Kali	1335	19.676.650	215	4.603.305	254	4.080.000	3	#####	6	797.564	0	1.098.336	0	1.341.488	9	3.352.088	4%	72,82%	224	7.955.393	17%	40,43%																
	1			Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah Jamaah Haji	orang	1.250	798.000	193	371.575	230	250.000	0	-	0	-	0	164.538	0	3.312	0	167.850	0%	67%	193	539.425	15%	68%	Bagian Administrasi Per ekonoman dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah															
	2			Kegiatan Peningkatan fasilitas per ingatan hari besar keagamaan	Jumlah Per ingatan Kegiatan	Kegiatan	75	17.948.650	12	4.011.717	14	3.580.000	3	114.700	6	797.564	0	933.798	0	1.173.612	9	3.019.674	64%	84%	21	7.031.391	28%	39%	Bagian Administrasi Per ekonoman dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah															
	3			Kegiatan Pengiriman Kal ilah MTQ	Jumlah Peserta Yang Dikirim	Orang	10	930.000	10	220.013	10	250.000	0	-	0	-	0	164.564	0	164.564	0%	66%	10	384.577	100%	41%	Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
4	2			Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.																																								
4	2	40601	15	Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Per da yang disahkan tepat waktu	%	1446	55.919.835	1131	38.823.498	315	#####	71	#####	134	3.035.538	35	2.448.067	9	5.054.309	249	12.601.932	22%	32,46%	1.380	51.425.430	95%	91,96%																
	1			Kegiatan Fraksi	Jumlah Pemandangan Umum dan Pemandangan Akhir Fraksi	kali	57	103.942	35	54.608	22	49.334	5	-	3	8.743	0	7.575	5	30.639	13	46.956	59%	95%	48	101.564	84%	98%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah															



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																																	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																									
				7		8		9		10		9		10=8÷9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%																													
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP																							
4	3	40701	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase entitas yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik	Persen	310	3.455.713	248	2.327.216	62	450.653	2	39.145	3	48.100	8	147.706	6	207.923	19	442.874	8%	19,03%	267	2.770.090	86%	80,16%																					
				1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah entitas yang telah diperiksa	Obrik	270	2.860.197	216	1.938.200	54	244.153	0	-	2	48.100	6	67.691	6	127.088	14	242.879	26%	99%	230	2.181.080	85%	76%	Inspektorat																				
				2 Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil reviu	dokumen	40	595.516	32	389.016	8	206.500	2	39.145	1	-	2	80.015	0	80.835	5	199.995	63%	97%	37	589.010	93%	99%	Inspektorat																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
4	3	40701	16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	%	100	928.400	80	517.507	20	410.893	0	66.725	4	56.935	9	123.552	0	135.161	13	382.373	16%	73,89%	93	899.880	93%	96,93%																					
				1 Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti bimtek	org/kali	100	928.400	80	517.507	20	410.893	0	66.725	4	56.935	9	123.552	0	135.161	13	382.373	65%	93%	93	899.880	93%	97%	Inspektorat																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
4	3	40701	17	Program Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	862	1.846.410	625	1.027.662	296	172.281	132	4.091	0	-	0	-	-	-	132	4.091	21%	0,40%	757	1.031.753	88%	55,88%																					
				1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan sistim dan prosedur pengawasan yang telah dipenuhi dan ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur pengawasan yang telah dipenuhi dan ditetapkan	dokumen	11	45.000	5,00	41.770	2	30.207	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	5	41.770	45%	93%	Inspektorat																				
				2 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase temuan pereriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti	Persen	94	684.800	93,46	372.708	93	30.100	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	93	372.708	99%	54%	Inspektorat																				
				3 Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jml dokumen LHP Reguler dan Riksus	dokumen	640	308.410	427	187.393	110	18.583	132	2.401	-	-	-	-	-	-	132	2.401	120%	13%	559	189.794	87%	62%	Inspektorat																				
				4 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase temuan pereriksaan ekster nal (BPK-RI) yang telah ditindaklanjuti	Persen	84	298.000	81,66	171.754	83	43.070	0	523	-	-	-	-	-	-	0	523	0%	1%	82	172.277	97%	58%	Inspektorat																				



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/ d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/ d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/ d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP					
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
				5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen laporan hasil monev	dokumen	33	510.200	18	254.037	8	50.321	0	1.167					0	1.167	0%	2%	18	255.203	55%	50%	Inspektorat		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
4	3	40701	18		Program Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase SKPD yang telah melakukan SAKIP	%	59	1.809.492	54	980.528	39	860.164	0	#####	1	188.865	2	192.049	2	325.730	5	834.734	9%	85,13%	59	1.815.262	100%	100,32%	
				1	Kegiatan Evaluasi SAKIP PD	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SAKIP nya	OPD	34	414.037	34	332.747	34	81.290	0	27.640	0	48.990	0	4.200	0	-	0	80.830	0%	99%	34	413.577	100%	100%	Inspektorat
				2	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Dokumen Pengendalian Gratifikasi Saber Pungli	dokumen	5	718.681	4	647.781	1	70.900	0	-	0	4.500	0	-	1	56.072	1	60.572	100%	85%	5	708.352	100%	99%	Inspektorat
				3	Kegiatan Verifikasi pelaksanaan reformasi dan birokrasi	Jumlah dokumen hasil penilaian, verifikasi dan evaluasi	dokumen	15	190.974	12	-	3	190.974	0	-	1	37.530	1	38.749	1	108.574	3	184.852	100%	97%	15	184.852	100%	97%	Inspektorat
				4	Kegiatan Optimalisasi Saber Pungli	Jumlah dokumen laporan kegiatan saber pungli	dokumen	5	485.800	4	-	1	517.000	0	100.450	0	97.845	1	149.100	0	161.085	1	508.480	100%	98%	5	508.480	100%	105%	Inspektorat
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
4	4				Perencanaan.																									
4	4	40101	15		Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	dokumen	2	120.276	-	-	2	120.276	-	-	-	8.887	-	13.343	-	48.972	0	71.203	#DIV/0!	#DIV/0!	-	71.203	0%	59,20%	
				1	Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	120.276	0	-	2	120.276	0%	-	0%	8.887	-	13.343	-	48.972	0	71.203	0%	59%	0	71.203	0%	59%	BAPPEDA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
4	4	40101	16		Program perencanaan pembangunan ekonomi	jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi	dokumen	1	-	-	-	1	135.718	-	-	-	5.304	-	24.646	1	89.868	1	119.818	#DIV/0!	#DIV/0!	1	119.818	100%	#DIV/0!	
				1	Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	-	-	-	1	135.718	0%	-	0	5.304	-	24.646	1	89.868	1	119.818	100%	88%	1	119.818	100%	#DIV/0!	BAPPEDA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
4	4	40101	17		Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah	dokumen	5	-	-	-	1	220.110	-	-	-	23.238	-	111.708	-	74.995	0	209.942	#DIV/0!	#DIV/0!	-	209.942	0%	#DIV/0!	
				1	Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen	dokumen	5	-	0	-	1	220.110	-	-	-	23.238	-	111.708	-	74.995	0	209.942	0%	95%	0	209.942	0%	#DIV/0!	BAPPEDA
				2	Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan	jumlah dokumen	dokumen	10	-	0	-	2	118.422	0%	1.000	0	27.677	-	23.834	2	22.834	2	75.344	100%	64%	2	75.344	20%	#DIV/0!	BAPPEDA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
4	4	40101	18		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pembangunan daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat	dokumen	57	21.202.781	45	19.687.296	12	1.515.484	1	#####	4	246.853	1	231.896	5	581.347	11	1.293.435	24%	6,57%	56	20.980.732	98%	98,95%	

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																														
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+0		11=10/7x100%		12=6+0			13=12/5x100%					
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP				
				1				1	135.718	0%	-	0	5.304	-	24.646	1	89.868	1	119.818	100%	88%	1	119.818	100%	#DIV/0!	BAPPEDA				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
4	4	40101	17	Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	jumlah dokumen	dokumen	5	-	-	1	220.110	-	-	-	23.238	-	111.708	-	74.995	0	209.942	#DIV/0!	#DIV/0!	-	209.942	0%	#DIV/0!	BAPPEDA		
				1	Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen	dokumen	5	-	0	-	1	220.110	-	-	23.238	-	111.708	-	74.995	0	209.942	0%	95%	0	209.942	0%	#DIV/0!	BAPPEDA	
				2	Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan	jumlah dokumen	dokumen	10	-	0	-	2	118.422	0%	1.000	0	27.677	-	23.834	2	22.834	2	75.344	100%	64%	2	75.344	20%	#DIV/0!	BAPPEDA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
4	4	40101	18	Program Perencanaan pembangunan Daerah	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengkomodir kepentingan masyarakat	dokumen	57	21.202.781	45	19.687.296	12	1.515.484	1	#####	4	246.853	1	231.896	5	581.347	11	1.293.435	24%	6,57%	56	20.980.732	98%	98,95%	BAPPEDA	
				1	Kegiatan Perencanaan Pemerintah Umum	Jumlah Dokumen	dokumen	32	10.601.390	25	9.205.000	7	1.396.390	0	233.340	2	213.568	0	213.568	5	581.347	7	1.241.823	100%	89%	32	10.446.823	100%	99%	BAPPEDA
				2	Kegiatan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi dan pembangunan Kerja	Jumlah dokumen	dokumen	25	10.601.390	20	10.482.296	5	119.094	1	-	2	33.285	1	18.328	2	50.019	6	101.631	120%	85%	26	10.583.928	104%	100%	BAPPEDA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
4	5	40201	15	Keuangan. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum	%	622	2.567.200	351	1.377.200	442	1.190.000	14	98.300	16	265.376	19	245.117	4	80.847	53	689.640	15%	50,08%	404	2.066.840	65%	80,51%	BAPPEDA	
				1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	dokumen	11	299.137	7	189.137	4	110.000	0	-	0	6.750	0	11.374	4	80.847	4	98.971	100%	90%	11	288.108	100%	96%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah produk hukum	produk hukum	2	717.040	2	440.640	2	276.400	0	13.100	0	130.826	0	105.943	0	22.178	0	272.047	0%	98%	2	712.687	100%	99%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semester dan prognosis	buku	10	101.629	8	67.129	2	34.500	0	-	0	-	0	-	1	26.717	1	26.717	50%	77%	9	93.846	90%	92%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				4	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah peserta bimtek	orang	500	690.615	300	467.615	400	223.000	0	-	0	-	-	-	0	167.598	0	167.598	0%	75%	300	635.213	60%	92%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				5	Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengguna aplikasi yang di dampingi	kali	99	758.779	34	212.679	34	546.100	14	85.200	16	127.800	19	127.800	13	170.400	62	511.200	182%	94%	96	723.879	97%	95%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																										
Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%																		
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP														
4	5	40201	16	Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	Persentase pelayanan per bendaharaan sesuai dengan landasan hukum	%	186	557.523	133	324.117	53	233.406	0	-	28	58.143	24	57.361	1	40.553	53	156.058	40%	48,15%	186	480.174	100%	86,13%														
				1 Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D	Jumlah dokumen pengeluaran kas	dokumen	15	314.192	12	206.886	3	107.306	0	-	0	33.246	1	33.204	1	40.553	2	107.003	67%	100%	14	313.890	93%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
				2 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji	Jumlah dokumen administrasi gaji	dokumen	171	243.331	121	117.231	50	126.100	0	-	28	24.897	23	24.157	25	75.825	76	124.880	152%	99%	197	242.110	115%	99%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																										
Predikat Kinerja																																										
4	5	40201	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah	%	107	10.233.133	84	5.712.483	23	3.654.350	3	5.688	4	44.580	5	129.691	2	2.674.952	14	2.854.910	17%	49,98%	98	8.567.393	92%	83,72%														
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Aset Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	jenis	10	8.308.764	8	5.308.764	2	3.000.000	0	-	0	-	0	8.073	2	2.674.952	2	2.683.025	100%	88%	10	7.991.789	100%	96%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
				2 Rekonsiliasi Pencatatan Aset Milik Daerah dengan Realisasi Belanja Modal	Laporan rekonsiliasi aset daerah dan belanja modal daerah	buku	90	213.763	72	180.363	18	33.400	3	-	4	-	5	-	6	27.171	18	27.171	100%	81%	90	207.534	100%	97%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
				3 Optimalisasi, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis dokumen kajian	dokumen	5	623.356	4	223.356	1	400.000	0	5.688	0	19.870	0	97.560	2	237.058	2	360.176	200%	90%	6	583.532	120%	94%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
				4 Perencanaan dan Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	dokumen	2	1.087.250	0	-	2	220.950	0	-	0	24.710	0	24.058	2	12.244	2	61.012	100%	28%	2	61.012	100%	6%														
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																										
Predikat Kinerja																																										
4	5	40201	18	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase pengesahan dokumen penganggaran tepat waktu	%	35	2.106.596	27	1.384.377	10	717.693	13	90.998	0	98.307	1	224.353	13	10.690	27	424.348	100%	30,65%	54	1.808.725	154%	85,86%														
				1 Penyusunan DPA dan DPPA	jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran	dokumen	10	200.000	8	150.373	2	45.100	0	11.098	0	28.541	1	-	0	10.690	1	50.329	50%	112%	9	200.702	90%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
				2 Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Jumlah produk hukum	produk hukum	10	720.945	8	491.018	2	229.928	0	63.600	0	9.992	0	-	2	139.818	2	213.410	100%	93%	10	704.428	100%	98%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																															
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14									
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP						
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	
														Predikat Kinerja																	
4	6			Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.																											
4	6	40301	15	Program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian	Persentase penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan	%	565	798.580	183	340.167	200	159.716	111	2.942	138	35.047	131	43.727	20	104.721	400	186.436	200%	117%	583	526.604	103%	66%			
			1	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Inf or masi Kepegawaian dan SAPK	Persentase Database		100	406.092	100	202.622	100	81.218	26	1.500	28	23.137	20	23.145	20	104.721	94	152.502	94%	188%	194	355.124	194%	87%	Badan Kepegawaian Daerah		
			2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian		465	392.488	83	137.545	100	78.498	85	1.442	110	11.910	111	20.582	111	4.500	417	38.434	417%	49%	500	175.979	108%	45%	Badan Kepegawaian Daerah		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	
														Predikat Kinerja																	
4	6	40301	16	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Realisasi Pengembangan dan pembinaan aparatur	%	35750	5.238.596	28196	#REF!	7262	956.479	7	13.258	13	94.720	118	47.371	-	18.954	138	174.303	0%	#REF!	28.334	#REF!	79%	#REF!			
			1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah PNS	or ang	500	307.824	130	79.111	200	61.565	0	-	0	17.715	107	15.415	0	18.954	107	52.084	54%	85%	237	131.195	47%	43%	Badan Kepegawaian Daerah		
			2	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Jumlah Permasalahan Kepegawaian Tertangani	or ang	250	46.900	66	37.520	62	9.380	7	378	13	11.000	11	1.139	3	5.723	34	18.240	55%	194%	100	55.760	40%	119%	Badan Kepegawaian Daerah		
			3	Kegiatan Pengadaan CPNS	Jumlah Peserta	or ang	35000	4.883.872	28000	#REF!	7000	885.534	0	12.880	0	66.006	0	30.817	4.426	153.631	4.426	263.334	63%	30%	32.426	#REF!	93%	#REF!	Badan Kepegawaian Daerah		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	
														Predikat Kinerja																	
4	6	40301	17	Program penataan aparatur	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	%	3.300	1.822.446	453	749.958	660	364.489	270	7.034	31	60.921	74	62.049	357	121.606	732	251.610	162%	33,55%	1.185	1.001.568	36%	54,96%			
			1	Kegiatan Penempatan Pegawai	Jml pegawai	or ang	3.300	1.822.446	453	749.958	660	364.489	270	7.034	31	60.921	74	62.049	357	121.606	732	251.610	111%	69%	1.185	1.001.568	36%	55%	Badan Kepegawaian Daerah		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	
														Predikat Kinerja																	
4	6	40301	18	Program fasilitasi kesejahteraan PNS	Jumlah SK Terkait Kesejahteraan PNS		9855	503.322	2456	418.682	2394	84.640	1051	37.435	608	970	201	37.972	50	1.650	1910	78.027	78%	18,64%	4.366	496.709	44%	98,69%			
			1	Kegiatan Pemberhentian PNS yang pensiun	Jumlah SK	or ang	705	223.727	170	184.567	166	39.160	45	18.010	50	320	56	17.892	50	1.650	201	37.872	121%	97%	371	222.439	53%	99%	Badan Kepegawaian Daerah		
			2	Kegiatan Penataan administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala PNS	Jumlah SK	or ang	9150	279.595	2.286	234.115	2228	45.480	1.006	19.425	558	650	145	20.080	354	1.313	2.063	41.468	93%	91%	4.349	275.583	48%	99%	Badan Kepegawaian Daerah		

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																				
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14														
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																				
Predikat Kinerja																																				
4	6	40301	19	Program peningkatan kapasitas SDM aparatur	Persentase Kelulusan Pendidikan aparatur	%	4195	14.687.195	236	3.749.850	671	5.317.057	285	#####	253	785.130	207	1.838.173	24	119.846	769	2.998.984	326%	79,98%	1.005	6.748.834	24%	45,95%								
				1 Kegiatan Assessment Pegawai	Jumlah Peserta	or ang	30	1.946.345	0	1.531.445	27	414.900	5	-	0	-	0	0	24	119.846	29	119.846	107%	29%	29	1.651.291	97%	85%	Badan Kepegawaian Daerah							
				2 Kegiatan Bimtek/ Sosialisasi/ Workshop Pengembangan Aparatur	Jumlah Peserta	or ang	650	307.500	0	52.077	130	61.500	65	-	0	16.849	0	0	171	20.892	236	37.741	182%	61%	236	89.817	36%	29%	Badan Kepegawaian Daerah							
				3 Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. III	Jumlah PNS	or ang	25	963.400	2	398.047	5	192.680	0	-	0	-	5	63.360	0	125.600	5	188.960	100%	98%	7	587.007	28%	61%	Badan Kepegawaian Daerah							
				4 Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Jumlah PNS	or ang	150	1.713.783	53	206.160	5	571.261	28	155.353	0	344.921	0	-	0	23.503	28	523.777	560%	92%	81	729.937	54%	43%	Badan Kepegawaian Daerah							
				5 Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta	or ang	1350	6.508.301	181	1.508.659	106	1.301.660	14	100.481	47	241.498	66	371.561	174	528.925	301	1.242.465	284%	95%	482	2.751.124	36%	42%	Badan Kepegawaian Daerah							
				6 Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. II	Jumlah PNS	or ang	10	503.550	0	46.932	2	100.710	2	-	0	34.860	0	60.000	0	-	2	94.860	100%	94%	2	141.792	20%	28%	Badan Kepegawaian Daerah							
				7 Kegiatan Diklat Pra Jabatan CPNS	Jumlah PNS	or ang	990	2.701.750	0	6.530	198	2.631.750	0	-	35	140.000	136	1.315.132	0	901.514	171	2.356.646	86%	90%	171	2.363.176	17%	87%	Badan Kepegawaian Daerah							
				8 Kegiatan Pembekalan CPNS	Jumlah PNS	or ang	990	42.566			198	42.596	171	-	171	7.003	0	28.120	0	-	342	35.123	173%	82%	342	35.123	35%	83%	Badan Kepegawaian Daerah							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																				
Predikat Kinerja																																				
4	7			Penelitian dan Pengembangan.	jumlah kajian	dokumen	10	2.000.000	2	1.497.870	3	861.396	0	-	0	44.758	2	51.211	-	-	2	95.969	100%	6,41%	4	1.593.839	40%	79,69%								
				1 Kegiatan Kajian/ Penelitian Bidang Eksohub dan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen yang disusun	dokumen	5	1.000.000	1	603.328	1	309.920	0	-	0	25.505	1	25.505	0	-	1	51.010	100%	16%	2	654.338	40%	65%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
				2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang disusun	dokumen	5	1.000.000	1	894.542	2	551.476	0	-	0	19.253	1	25.706	0	0	1	44.959	50%	8%	2	939.501	40%	94%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																				
Predikat Kinerja																																				
4	8			Kesatuan Bangsa dan Politik.	Konflik horizontal di dalam masyarakat	%	24350	978.835	4870	777.258	880	205.818	180	29.200	163	-	0	39.216	0	128.738	343	197.154	7%	25,37%	5.213	974.412	21%	99,55%								
				1 Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	or ang	21.350	935.912	4270	777.017	680	158.895	180	29.200	163	-	0	39.216	0	86.152	343	154.568	50%	97%	4.613	931.585	22%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
				2 Kegiatan Pemantapan Ideologi dan HAM	Jumlah peserta sosialisasi	or ang	3.000	42.923	600	241	200	46.923	0	-	0	-	0	0	0	42.585	0	42.585	0%	91%	600	42.827	20%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																													
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13									
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K (%)	RP						
4	8	40801	16	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	Jumlah	8490	5.314.996	6837	1.950.701	1203	663.727	0	-	0	63.539	777	101.407	-	253.527	777	418.472	11%	21,45%	7.614	2.369.173	90%	44,58%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				1 Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah peserta pembinaan	orang	4.500	3.426.300	4100	838.138	400	353.996	0	-	0	32.523	300	52.745	0	253.527	300	338.794	75%	96%	4.400	1.176.932	98%	34%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta sarasehan	orang	800	671.300	175	140.563	175	64.425	0	-	0	-	0	-	0	56.129	0	56.129	0%	87%	175	196.692	22%	29%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				3 Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pertemuan FKUB	kali	15	386.460	12	322.387	3	64.073	0	-	0	-	2	8.855	0	12.397	2	21.252	67%	33%	14	343.639	93%	89%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				4 Kegiatan Fasilitasi Forum Pembaruan Kebangsaan	Jumlah peserta sarasehan	orang	800	246.075	650	180.114	150	65.961	0	-	0	-	0	17.434	0	41.103	0	58.536	0%	89%	650	238.650	81%	97%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				5 Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkuat NKRI dengan penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Jumlah peserta	orang	1.500	413.467	1200	342.843	300	70.624	0	-	0	-	300	13.950	0	38.289	300	52.239	100%	74%	1.500	395.082	100%	96%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				6 Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah peserta sarasehan	orang	875	171.393	700	126.656	175	44.647	0	-	0	31.016	175	8.423			175	39.439	100%	88%	875	166.095	100%	97%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
4	8	40801	17	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase parpol dan Orkemas yang memahami regulasi	%	12655	2.747.406	10124	1.220.691	2176	833.136	0	#####	100	290.601	800	75.391	0	18.667	900	745.861	9%	61,10%	11.024	1.966.552	87%	71,58%	
				1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah peserta pengelolaan keuangan parpol	parpol	80	188.000	64	69.956	16	24.382	0	-	0	-	0	500		18.667	0	19.167	0%	79%	64	89.123	80%	47%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2 Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat	Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat	orang	6.500	1.150.000	5200	477.480	1300	199.364	0	172.290	0	19.083	700	0	0	0	700	191.373	54%	96%	5.900	668.853	91%	58%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				3 Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/ LSM	Jumlah pengurus Ormas/ LSM yg memperoleh pembinaan	orang	1.000	455.000	800	114.922	200	45.015	0	-	0	-	0	33.030	0	10.228	0	43.258	0%	96%	800	158.180	80%	35%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				4 Kegiatan Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas/ LSM dan Pemuda	Jumlah peserta sarasehan	orang	1.500	433.000	1200	125.720	300	42.969	0	-	100	10.360	100	0	0	30.366	200	40.726	67%	95%	1.400	166.446	93%	38%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																														
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+9		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%						
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP					
	5	Kegiatan Posko dan Monitoring Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota	Petugas Caraka dan Tim Posko monitoring Pemilu Kada	orang	3.575	521.406	2860	432.613	360	521.406	0	188.912	0	261.158	0	41.861	0	14.875	0	506.807	0%	97%	2.860	939.420	80%	180%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											
																			Predikat Kinerja											
4	8	40801	18	Program Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertarikan Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	Jumlah																								
							2569	5.332.000	1153	1.393.387	511	574.830	404	71.835	4	100.761	94	134.686	1	63.769	503	371.051	44%	26,63%	1.656	1.764.438	64%	33,09%		
				1	Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Jumlah rakor dgn instansi terkait, sosialisasi	kali	10	1.219.000	8	328.326	2	111.084	0	-	0	-	1	37.485	1	63.769	2	101.254	100%	91%	10	429.580	100%	35%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kordinasi dgn instansi terkait, sosialisasi	kali	60	2.375.000	48	911.685	12	382.680	2	38.190	4	81.726	3	97.201	0	57.522	9	274.640	75%	72%	57	1.186.325	95%	50%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				3	Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah pemantauan kamtibmas	kali	230	379.000	72	77.395	72	11.285	18	-	0	-	0	0	0	0	18	-	25%	0%	90	77.395	39%	20%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				4	Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan Kamtibmas	Jumlah peserta pembinaan	orang	1.000	1.124.000	800	22.000	200	58.495	200	33.645	0	19.035	0	0	0	2.992	200	55.672	100%	95%	1.000	77.672	100%	7%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitian	jumlah ijin survey/ penelitian yang di monitor	ijin	1.269	235.000	225	53.981	225	11.285	184	-	0	90	0	0	9.595	274	9.595	122%	85%	499	63.576	39%	27%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											
																			Predikat Kinerja											
4	9			Kecamatan.																										
4	9	12008	15	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertarikan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertarikan		300	1.776.913	280	852.987	300	627.303	10	64.813	35	162.291	30	130.605	-	53.785	75	411.493	27%	48,24%	355	1.264.480	118%	71,16%		
				1	Kegiatan Kordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertarikan Masyarakat	Prosentase kehadiran peserta kordinasi peningkatan keamanan dan ketertarikan masyarakat	%	100	612.634	100	135.354	100	124.401	-	15.840	-	30.128	-	44.112	0	53.785	0	143.865	0%	116%	100	279.220	100%	46%	Kecamatan Taman
				1	Kegiatan Kordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertarikan Masyarakat	Prosentase kehadiran peserta kordinasi peningkatan keamanan dan ketertarikan masyarakat	%	100	614.279	100	333.840	100	280.439	10	25.008	30	65.728	30	66.393	0	123.423	70	280.550	70%	100%	170	614.390	170%	100%	Kecamatan Manguharjo



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																														
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		10=8+9		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%								
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP					
				100	550.000	80	383.793	100	222.463	0	23.965	5	66.435	-	20.100	33	46.535	38	157.035	38%	71%	118	540.828	118%	98%	Kecamatan Kar toharjo				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
4	9	12008	16	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase Terseselaikannya Per mohonan Rekomendasi di Kelurahan	%	6300	45.095.635	750380	21.131.443	1960	#####	265	#####	230	3.560.075	235	7.153.324	300	331.178	1030	12.704.062	0%	60,12%	751.410	33.835.505	11927%	75,03%		
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	Persentase Terseselaikannya Per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo	100%	500	1.726.424	400	812.584	100	913.840	0	46.004	0	124.376	0	288.141	300	331.178	300	789.700	300%	86%	700	1.602.284	140%	93%	Kecamatan Kartoharjo
				2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro	Persentase Terseselaikannya Per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Kanigoro	100%	500	2.050.711	400	1.010.273	100	1.040.438	0	53.680	0	167.088	0	159.058	300	515.454	300	895.280	300%	86%	700	1.905.553	140%	93%	Kecamatan Kartoharjo
				3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pilangbango	Persentase Terseselaikannya Per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Pilangbango	100%	500	1.708.889	400	791.838	100	917.051	0	70.385	0	119.974	0	282.627	300	315.994	300	788.980	300%	86%	700	1.580.818	140%	93%	Kecamatan Kartoharjo
				4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	Persentase Terseselaikannya Per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo	100%	500	1.864.154	400	887.687	100	976.467	0	49.435	0	161.560	10	277.548	300	350.967	310	839.510	310%	86%	710	1.727.197	142%	93%	Kecamatan Kartoharjo
				5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kligen	Persentase Terseselaikannya Per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Kligen	100%	500	1.876.884	400	838.049	100	1.038.836	0	94.060	0	87.424	0	335.010	300	389.395	300	905.889	300%	87%	700	1.743.938	140%	93%	Kecamatan Kartoharjo
				6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	Persentase Terseselaikannya Per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Sukosari	100%	500	1.534.100	400	662.505	100	871.594	0	49.356	0	49.356	0	101.194	300	340.934	300	540.841	300%	62%	700	1.203.346	140%	78%	Kecamatan Kartoharjo
				7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Tawangrejo	Persentase Terseselaikannya Per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo	100%	500	1.637.413	400	757.490	100	879.923	0	71.471	5	118.163	0	225.313	300	373.278	305	788.225	305%	90%	705	1.545.715	141%	94%	Kecamatan Kartoharjo
				8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	Persentase Terseselaikannya Per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Kelun	100%	500	1.738.318	400	809.245	100	929.073	0	44.571	0	130.381	0	281.454	300	382.336	300	838.742	300%	90%	700	1.647.987	140%	95%	Kecamatan Kartoharjo

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/ d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/ d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/ d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		9				10=8+9		11=10/7 x 100%			12=6+10		13=12/5 x 100%	
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	RP		K	RP	K (%)	RP
	9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	Prosentase terselesaikannya Per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo	100%	500	1.958.224	400	954.049	100	1.004.176	0	49.306	0	188.581	0	297.346	300	396.740	300	931.973	300%	93%	700	1.886.022	140%	96%	Kecamatan Kartoharjo	
	10	Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	Prosentase terselesaikannya per mohonan rekomendasi di kelurahan madiun lor	%	100	1.295.750	100	346.500	100	949.250	25	96.862	25	125.414	25	320.333	0	248.756	75	791.366	75%	83%	175	1.137.866	175%	88%	Kecamatan Manguharjo	
	11	Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	Prosentase terselesaikannya per mohonan rekomendasi di kelurahan manguharjo	%	100	1.909.690	100	925.502	100	984.188	25	98.403	25	140.061	25	304.123	0	262.842	75	805.429	75%	82%	175	1.730.931	175%	91%	Kecamatan Manguharjo	
	12	Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terselesaikannya per mohonan rekomendasi di kelurahan nambangan kidul	%	100	1.984.547	100	961.290	100	1.023.257	25	54.779	25	180.630	25	334.451	0	289.181	75	859.041	75%	84%	175	1.820.331	175%	92%	Kecamatan Manguharjo	
	13	Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	Prosentase terselesaikannya per mohonan rekomendasi di kelurahan nambangan lor	%	100	2.200.796	100	1.084.609	100	1.116.187	25	62.514	25	165.156	25	373.859	0	323.939	75	925.468	75%	83%	175	2.010.077	175%	91%	Kecamatan Manguharjo	
	14	Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	Prosentase terselesaikannya per mohonan rekomendasi di kelurahan ngegong	%	100	1.497.181	100	636.418	100	860.763	25	46.843	25	77.955	25	281.326	0	292.737	75	698.861	75%	81%	175	1.335.278	175%	89%	Kecamatan Manguharjo	
	15	Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	Prosentase terselesaikannya per mohonan rekomendasi di kelurahan pangongangan	%	100	1.552.519	100	685.918	100	866.601	25	44.351	25	86.661	25	281.327	0	298.458	75	710.797	75%	82%	175	1.396.715	175%	90%	Kecamatan Manguharjo	
	16	Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	Prosentase terselesaikannya per mohonan rekomendasi di kelurahan patihan	%	100	804.391	745239,815	278.524	100	525.867	25	40.716	25	166.418	25	255.501	0	266.648	75	729.283	75%	139%	745.315	1.007.807	745315%	125%	Kecamatan Manguharjo	
	17	Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	Prosentase terselesaikannya per mohonan rekomendasi di kelurahan sogaten	%	100	1.365.451	100	796.761	100	568.689	25	49.114	25	139.702	25	315.222	0	285.437	75	769.474	75%	135%	175	1.566.236	175%	115%	Kecamatan Manguharjo	
	18	Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	Prosentase terselesaikannya per mohonan rekomendasi di kelurahan winongo	%	100	1.546.038	100	906.052	100	639.986	25	54.719	25	146.604	25	331.821	0	260.367	75	793.511	75%	124%	175	1.699.563	175%	110%	Kecamatan Manguharjo	
	19	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojoarjo	Per sentase terselesaikannya per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Mojoarjo	%	100	1.911.693	80	975.465	20	936.228	20	73.548	0	174.182	0	261.830	0	340.580	20	850.141	100%	91%	100	1.825.606	100%	95%	Kecamatan Taman	
	20	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	Per sentase terselesaikannya per mohonan Rekomendasi di Kelurahan Pandean	%	100	1.745.452	80	839.319	20	906.133	20	44.590	0	165.854	0	256.188	0	346.395	20	813.027	100%	90%	100	1.652.346	100%	95%	Kecamatan Taman	



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																																
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																							
	1	2	3	4			5	6	7	8		9		10		11		12		13		14																										
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.																				
4	9	12008	18	Program peningkatan keberdayaan masyarakat Kelurahan	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	%	7	487.682	5	366.972	2	120.062	0	-	0	-	1	43.478	1	62.834	2	106.311	40%	28,97%	7	473.283	100%	97,05%																				
				1 Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan	kali	2	217.682	1	146.317	1	71.365	-	-	-	-	-	-	1	62.834	1	62.834	100%	88%	2	209.151	100%	96%	Kecamatan Manguharjo																			
				1 Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	kali	5	270.000	4	220.655	1	48.697	0	-	0	-	1	43.478	0	-	1	43.478	100%	89%	5	264.133	100%	98%	Kecamatan Kartoharjo																			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																
Predikat Kinerja																																																
0	0	10101	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	%	9049	244.639.282	5982	125.810.485	5317	#####	1021	#####	1146	17.434.348	985	16.728.876	1	1.124.771	3153	45.052.685	53%	35,81%	9.135	170.863.170	101%	69,84%																				
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lembaga	lembaga	50	42.163.394	40	6.249.108	10	4.204.617	0	261.241	0	691.218	0	772.192	1	1.124.771	1	2.848.422	10%	68%	41	9.098.530	82%	22%	Dinas Pendidikan																			
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Per sentase kelancaran pelayanan administrasi per kantor an	%	100	3.918.030	100	2.395.943	100	3.659.429	0	156.422	0	356.247	0	331.969	100	918.744	100	1.763.382	100%	48%	100	4.159.325	100%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana																			
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium PNS dan non PNS yang disediakan	orang	258	4.814.000	154	3.694.000	41	1.120.000	52	214.350	120	337.700	120	320.400	120	240.300	412	1.112.750	1005%	99%	566	4.806.750	219%	100%	Rumah Sakit Umum Daerah																			
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa peralataan dan perlengkapan kantor (ATK, Alat Listrik, Perangko, Materai, Surat Kabar, Foto copy dll)	Jenis	24	6.120.389	10	3.047.622	10	3.072.768	3	252.310	2	825.524	1	788.594	5	1.004.350	11	2.870.779	110%	93%	21	5.918.400	88%	97%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																			
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralataan dan perlengkapan kantor	jenis	75	2.914.107	105	1.406.699	75	1.507.408	12	193.904	0	282.644	0	400.325	75	561.468	87	1.438.341	116%	95%	192	2.845.040	256%	98%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																			
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/ Jenis Barang Jasa Peralataan dan perlengkapan Kantor	Jenis	45	2.556.012			9	2.556.012	5	377.607	9	576.067	11	595.325	7	714.593	32	2.263.591	356%	89%	32	2.263.591	71%	89%	Satuan Polisi Pamong Praja																			
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralataan dan perlengkapan Kantor	unit	11	2.038.843	14	608.403	11	424.000	2	48.244	0	111.993	0	91.289	0	138.547	2	390.073	18%	92%	16	998.476	145%	49%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																			
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralataan dan perlengkapan kantor	Jumlah	50					1.549.453	0	154.423	0	254.241	6	289.012	0	549.258	6	1.246.933	#DIV/0!	80%		6	1.246.933	12%	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralataan bahan penunjang	Paket	6	7.656.977	100%	7.588.364	100	68.612	2	53.250	2	146.967	0	128.315	2	209.818	6	538.351	6%	785%	7	8.126.715	117%	106%	Dinas Tenaga Kerja																			
				1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralataan dan perlengkapan kantor	Paket	50	2.178.887	30	1.392.604	10	786.283	25	85.029	30	180.948	0	160.144	30	268.430	85	694.551	850%	88%	115	2.087.154	230%	96%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																			

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																											
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+9		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%			
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Per alatan dan perlengkapan kantor	Jenis	9	1.815.335	9	466.480	9	1.348.855	3	121.612	0	220.163	0	308.487	0	380.994	3	1.031.256	33%	76%	12	1.497.736	133%	83%	Dinas Lingkungan Hidup
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukup	Jenis	30	4.751.298	24	2.427.001	6	2.324.297	5	213.045	0	359.677	0	1.034.669	0	533.403	5	2.140.793	83%	92%	29	4.567.794	97%	96%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah per alatan dan perlengkapan Kantor	Paket	1	25.931.771	1	22.970.597	1	2.961.174	0	301.608	0	640.424	0	722.246	0	1.053.708	0	2.717.986	0%	92%	1	25.688.584	100%	99%	Dinas Perhubungan
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah per alatan dan perlengkapan kantor	Jenis	2	5.372.259	1	3.081.759	1	2.290.500	0	65.859	0	492.284	1	610.570	1	991.390	2	2.160.103	200%	94%	3	5.241.862	150%	98%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	barang dan jasa yang tersedia	Jenis	70	2.503.805	56	1.398.695	14	1.105.110	0	124.883	0	231.871	0	265.341	14	403.471	14	1.025.567	100%	93%	70	2.424.262	100%	97%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	per alatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	2.000.000	3	869.321	1	2.010.000	0,5	91.523	0,3	154.347	0,3	115.732	0,1	536.764	1	898.366	120%	45%	4	1.767.687	105%	88%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudahan dan Olah Raga
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bahan penunjang	paket	5	1.043.834	4	533.912		509.922	0	68.182	0	102.932	0	120.587	1	148.713	1	440.415	#DIV/0!	86%	5	974.327	100%	93%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Per alatan dan perlengkapan Kantor	Jenis	8	1.482.067	6	694.602	2	787.464	1	72.803	0	143.497	0	108.213	1	109.986	2	434.499	100%	55%	8	1.129.101	100%	76%	Dinas Perdagangan
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa, per alatan dan perlengkapan per kantor an	Jenis	35	3.119.221	28	2.810.930	7	308.291	4	77.814	3	68.146	0	78.621	0	71.056	7	295.638	100%	96%	35	3.106.568	100%	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah per alatan dan perlengkapan kantor	Jenis	17	508.287	1	268.763	17	239.524	1	12.138	2	37.287	1	40.874	10	120.083	14	210.382	82%	88%	15	479.145	88%	94%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Per alatan dan perlengkapan Kantor	paket	13	8.897.213	8	4.021.066	13	3.709.007	1	402.587	1	914.363	1	979.108	0	1.212.367	3	3.508.425	23%	95%	11	7.529.491	85%	85%	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah per alatan dan penunjang	Jenis	14	2.187.984	7	1.525.218	7	186.766	1	18.191	2	31.979	3	36.781	3	93.968	9	180.920	129%	97%	16	1.706.137	114%	78%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah per alatan dan perlengkapan kantor	Paket	40	1.399.577	7	320.946	8	578.258	2	19.866	2	10.658	0	40.083	0	79.994	4	150.601	50%	26%	11	471.547	28%	34%	Bagian Administrasi Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Per alatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah per alatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Paket	30	748.442	24	413.548	6	334.895	0	36.376	1	50.660	0	92.336	1	151.178	2	330.551	33%	99%	26	744.098	87%	99%	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																										
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
										K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	35	4.213.831	21	1.760.293	14	3.477.531	3	145.541	4	898.692	3	279.502	0	846.473	10	2.170.207	71%	62%	31	3.930.500	89%	93%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	6	510.220	0	-	6	473.665	1	35.460	0	98.588	2	112.874	0	183.334	3	430.255	50%	91%	3	430.255	50%	84%	Inspektorat
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kali	60	4.150.000	48	3.323.098	12	826.902	1	46.690	1	170.876	0	153.689	0	330.159	2	701.413	17%	85%	50	4.024.511	83%	97%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	36	44.711.807	7	27.135.057	8	17.576.750	15	3.065.116	17	3.914.731	17	3.369.810	17	3.585.475	66	13.935.132	82%	79%	73	41.070.189	203%	92%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	40	1.799.587	32	788.325	8	483.550	2	76.910	2	92.299	2	189.123	3	219.790	9	578.122	113%	120%	41	1.366.447	103%	76%	Badan Pendapatan Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	13	4.216.714	9	817.095	13	843.343	0	82.473	0	130.647	0	152.836	13	369.230	13	735.185	100%	87%	22	1.552.279	169%	37%	Badan Kepegawaian Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	50	881.900	40	486.433	10	515.662	0	29.118	0	80.086	10	116.201	0	150.563	10	375.969	100%	73%	50	862.402	100%	98%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	10	2.086.689	1	1.226.819	9	859.870	3	78.412	3	182.274	0	166.993	0	255.155	6	682.833	67%	79%	7	1.909.652	70%	92%	Kecamatan Taman
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	9	2.391.869	7	1.432.819	7	959.050	0	71.824	-	173.466	1	207.058	-	323.107	1	775.454	14%	81%	8	2.208.273	89%	92%	Kecamatan Manguharjo
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	35	2.281.101	20	1.348.351	7	932.750	0	85.276	0	199.575	0	270.801	21	270.801	21	826.452	300%	89%	41	2.174.803	117%	95%	Kecamatan Kartoharjo
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali	150	899.987	51	496.586	99	403.402	25	28.129	24	148.565	35	124.992	0	101.724	84	403.411	85%	100%	135	899.996	90%	100%	Dinas Pendidikan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	%	100	1.237.478	100	817.478	100	420.000	10	80.016	5	74.579	0	165.812	5	99.188	20	419.595	20%	100%	120	1.237.073	120%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kali	197	502.174	35	252.174	35	250.000	8	13.210	17	84.704	32	80.768	12	71.317	69	249.999	197%	100%	104	502.173	53%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali	40	555.000	30	207.058	40	153.880	6	59.544	24	34.080	25	70.625	52	19.433	107	183.682	268%	119%	137	390.739	343%	70%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah	25	250.000	25	250.000	18	84.514	25	88.733	0	55.666	0	51.088	43	280.000	172%	112%	43	280.000	172%	112%	112%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali	40	763.826	30	220.488	10	110.000	3	26.193	3	44.519	1	39.586	1	28.885	8	139.182	80%	127%	38	359.670	95%	47%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																												
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		9		10=90		11=10/Tx100%		12=90		13=12/Sx100%				
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP			
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koor dinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Jumlah	350	555.363	230	-	70	555.363	0	81.286	0	101.099	35	102.911	20	270.050	55	555.345	79%	100%	285	555.345	81%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat dan staf	Kali	1	587.200	100%	387.200	100	200.000	8	19.789	0	113.198	0	69.160	1	27.853	9	230.000	9%	115%	10	617.200	1000%	105%	Dinas Tenaga Kerja	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kali	392	844.710	159	580.864	131	250.000	34	41.768	36	83.728	36	106.561	36	32.465	142	264.522	108%	106%	301	845.386	77%	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	kali	85	363.747	20	198.609	29	165.138	39	49.837	25	35.338	58	62.139	13	38.033	135	185.347	466%	112%	155	383.957	182%	106%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukup	kali	30	896.785	30	496.785	30	400.000	11	46.126	0	86.728	0	85.594		176.288	11	394.735	37%	99%	41	891.521	137%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koor dinasi dan konsultasi keluar Daerah	Kali	52	850.000	35	620.000	42	230.000	6	36.000	28	83.955	49	97.333	36	12.712	119	229.999	283%	100%	154	849.999	296%	100%	Dinas Perhubungan	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koor dinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	82	787.140	14	419.500		367.640	22	56.254	21	196.249	28	77.750	29	36.677	100	366.929	#DIV/0!	100%		114	786.429	139%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	kali	211	968.763	72	568.763	122	400.000	0	65.088	0	51.733	0	99.464	125	183.602	125	399.888	102%	100%	197	968.651	93%	100%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koor dinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	kali	200	691.991	160	391.991	40	300.000	54	27.018	82	167.132	2	22.918	1	77.931	139	294.999	348%	98%	299	686.989	150%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koor dinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	150	320.945	120	160.945	30	160.000	8	42.816	12	68.975	32	22.948	0	25.135	52	159.874	173%	100%	172	320.820	115%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	kali	450	830.756	360	414.724	90	416.032	10	91.254	28	92.258	20	118.650	10	130.279	68	432.441	76%	104%	428	847.165	95%	102%	Dinas Perdagangan	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah konsultasi dan koor dinasi	kali	118	437.578	96	207.578	22	230.000	13	24.159	18	97.100	5	87.372	0	21.276	36	229.906	164%	100%	132	437.484	112%	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koor dinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	60	264.540	18	134.540	60	130.000	4	21.662	7	19.190	5	58.183	5	29.661	21	128.696	35%	99%	39	263.236	65%	100%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali	563	9.372.400	491	2.550.235	563	1.417.871	90	426.767	57	585.677	57	735.855	0	649.381	204	2.397.679	36%	169%	695	4.947.914	123%	53%	Bagian Umum Sekretariat Daerah	
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koor dinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	154	762.555	112	470.868	42	291.687	15	36.092	27	83.948	31	92.060	29	79.538	102	291.638	243%	100%	214	762.506	139%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																													
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/ d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/ d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/ d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																			
				5		6		7		8		9		10		9		10=90		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%																					
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K (%)	RP																				
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koor dinasi dan konsultasi	Kali	250	412.820	34	176.037	113	180.000	6	19.385	15	18.986	0	51.620	0	90.010	21	180.000	19%	100%	55	356.037	22%	86%	Bagian Administrasi Per ekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koor dinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Tahun	1	318.856	1	203.716	1	115.140	0	13.532	0	32.739	0	76.731	0	30.921	0	153.923	0%	134%	1	357.639	100%	112%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koor dinasi dazn Konsultasi keluar Daerah	kali	297	9.815.325	250	6.887.793	47	2.927.532	12	512.534	20	1.292.984	3	173.348	0	598.351	35	2.577.218	74%	88%	285	9.465.011	96%	96%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	korang	285	428.983	228	-	57	428.983	7	183.719	5	66.423	0	83.632	0	95.209	12	428.983	21%	100%	240	428.983	84%	100%	Inspektorat																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	kali	60	470.000	48	18.694	12	451.306	1	74.445	1	163.617	0	132.691	9	80.553	11	451.306	92%	100%	59	470.000	98%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	kali	378	999.436	103	599.436	100	400.000	14	231.264	24	92.229	35	100.675	24	71.751	97	495.919	97%	124%	200	1.095.354	53%	110%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koor dinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	190	323.629	152	144.529	38	88.465	0	2.184	10	28.109	10	37.225	3	20.923	23	88.440	61%	100%	175	232.969	92%	72%	Badan Pendapatan Daerah																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	kali	510	3.745.638	36	764.406	84	607.810	38	130.170	37	117.053	35	136.962	47	191.930	157	576.114	187%	95%	193	1.340.521	38%	36%	Badan Kepegawai an Daerah																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koor dinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	389	559.100	320	209.636	69	100.000	25	45.179	0	30.723	5	21.553		22.399	30	119.854	43%	120%	350	329.490	90%	59%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali	36	728.465	15	219.054	21	97.793	3	17.130	3	29.833	3	23.450	3	29.380	12	99.793	57%	102%	27	318.847	75%	44%	Kecamatan Taman																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koor dinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	1882	421.555	1748	277.804	2528	143.751	384	18.733	387	25.505	262	39.047	0	35.886	1.033	119.170	41%	83%	2.781	396.975	148%	94%	Kecamatan Manguharjo																		
	2	Kegiatan Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali	80	307.086	65	209.125	15	97.961	2	18.810	4	31.587	2	25.500	4	18.164	12	94.061	80%	96%	77	303.186	96%	99%	Kecamatan Kartoharjo																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
0	0	10101	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	%	6857	61.426.580	3931	26.157.455	2428	18.804.413	516	1.872.738	301	2.699.035	305	3.884.338	612	7.122.698	1734	15578810	44%	59,56%	5.665	41.736.265	83%	67,94%																	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Ber kala Gedung dan Bangunan	Jumlah Lembaga	lembaga	5	265.876	4	202.008	1	63.868	0	413	0	24.986	0	38.456	0	0	0	63.855	0%	100%	4	265.863	80%	100%	Dinas Pendidikan																		
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Ber kala Gedung dan Bangunan	Prosentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	%	100	184.022	98	113.513	100	70.509	5	2.771	5	6.694	0	28.061	5	32.801	15	70.327	15%	100%	113	183.840	113%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluar ga Berencana																		



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																											
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+9		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%			
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP		
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Gedung	4	3.827.724	4	2.266.224	4	1.561.500	0	151.421	2	460.697	0	436.231	2	697.577	4	1.745.926	100%	112%	8	4.012.150	200%	105%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	gedung	1	154.976	1	83.776	1	71.200	1	13.252	0	30.321	0	3.050	2	191.660	3	238.283	300%	335%	4	322.059	400%	208%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	Gedung	1	50.000	0	-	1	20.000	-	0	0	-	0	-	1	49.633	1	49.633	100%	248%	1	49.633	100%	99%	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Kantor yang dipelihara	paket	1	62.380	1	7.781	1	50.000	0	-	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500	0%	99%	1	57.281	100%	92%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah	10	131.733	0	-	10	131.733	0	-	0	44.602	0	7800	10	192.300	10	244.702	100%	186%	10	244.702	100%	186%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan dan perawatan gedung/ lingkungan	paket	2	312.617	100%	222.617	100	90.000	0	-	0	-	0	3.600	2	85.610	2	89.210	2%	99%	3	311.827	150%	100%	Dinas Tenaga Kerja
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung dan bangunan	Lokasi	5	302.836	2	225.097	1	210.000	0	-	0	-	1	25.598	0	180.813	1	206.411	100%	98%	3	431.508	60%	142%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan	gedung	20	254.250	16	159.598	4	81.000	0	-	0	-	0	0	3	75.772	3	75.772	75%	94%	19	235.370	95%	93%	Dinas Lingkungan Hidup
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukup	gedung	1	58.474	1	58.474	1	-	0	146.109							0	146.109	0%	#DIV/0!	1	204.583	100%	350%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Unit	10	2.054.775	8	1.106.775	2	948.000	1	90.381	0	23.225	0	610.955	1	221.826	2	946.386	100%	100%	10	2.053.162	100%	100%	Dinas Perhubungan
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Gedung	8	422.268	4	62.268	4	360.000	1	1.012	0	-	1	85.054	1	264.298	3	350.364	75%	97%	7	412.632	88%	98%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Unit	5	179.412	4	99.412	1	80.000	0	2.061	0	37.908	0	14.754	1	25.277	1	80.000	100%	100%	5	179.412	100%	100%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung yang dipelihara	Gedung	10	1.179.538	8	579.538	2	600.000	0	-	1	15.026	0	184.650	1	9.899	2	209.575	100%	35%	10	789.113	100%	67%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudahan dan Olah Raga
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	unit	10	174.628	8	99.628	2	75.000	0	31.776	0	23.075	0	12.593	2	7.083	2	74.527	100%	99%	10	174.154	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung yang dipelihara	Gedung	5	180.604	3	136.924	2	43.681	0	75	0	17.835	0	1.209	1	23.510	1	42.629	50%	98%	4	179.553	80%	99%	Dinas Perdagangan
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung dan bangunan	unit	1	10.000	1	4.000	100	2.000	1	-							1	-	1%	0%	2	4.000	200%	40%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																												
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		9		10=8@		11=10/7x100%		12=6+0		13=12/5x100%				
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	unit	1	2.750	1	2.130	1	2.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	1	2.130	100%	77%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	paket	25	968.913	5	489.543	5	479.370	1	6.648	1	6.186	2	177.750	0	227.394	4	417.977	80%	87%	9	907.520	36%	94%	Bagian Umum Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	unit	2	32.619	1	30.619	1	2.000	0	-	1	842	0	-	0	825	1	1.667	100%	83%	2	32.286	100%	99%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	Unit	5	10.000	1	1.127	1	2.000	0	230	0	-	0	0	0	0	0	230	0%	11%	1	1.357	20%	14%	Bagian Administrasi Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Unit	1	2.000.000	1	1.683.000	1	317.000	0	-	0	75.000	0	6000	0	232.370	0	313.370	0%	99%	1	1.996.370	100%	100%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	unit	10	1.081.761	8	562.926	2	518.835	0	21.494	1	63.259	1	58.383	0	336.913	2	480.048	100%	93%	10	1.042.974	100%	96%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/ kantor yang terpelihara	paket	1	2.000	0	-	1	2.000	0	-	0	-	0	0	1	2.000	1	2.000	100%	100%	1	2.000	100%	100%	Inspektorat	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung yang respr esentatif	gedung	5	40.000	4	15.000	1	25.000	0	-	0	-	0	-	1	24.983	1	24.983	100%	100%	5	39.983	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/ kantor	gedung	5	248.175	4	198.175	1	50.000	0	-	0	-	0	0	1	15.570	1	15.570	100%	31%	5	213.745	100%	86%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	unit	5	81.847	4	58.784	1	23.063	0	-	0	3.640	0	1.681	1	16.564	1	21.884	100%	95%	5	80.668	100%	99%	Badan Pendapatan Daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	Gedung	10	100.000	5	22.235	2	20.000	0	205	3	19.795	0	4.234	4	19.765	7	43.999	350%	220%	12	66.234	120%	66%	Badan Kepegawain Daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/ bangunan yang terpelihara	gedung	5	68.000	4	16.000	1	2.000	0	-	0	450	0	500	0	3.000	0	3.950	0%	198%	4	19.950	80%	29%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung/ Bangunan	kali	10	68.080	9	29.999	1	15.000	0,7	15.000	1	1.500	0	0	0,3	20.000	1	36.500	100%	243%	10	66.499	100%	98%	Kecamatan Taman	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	gedung	4	171.661	3	100.363	1	71.298	0	-	1	21.708	0	25.451	0	2.897	1	50.056	100%	70%	4	150.419	100%	88%	Kecamatan Manguharjo	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung/ Bangunan	gedung	5	65.000	4	30.000	1	35.000	0	-	0	-	2	24.754	1	8.056	3	32.810	300%	94%	7	62.810	140%	97%	Kecamatan Kar toharjo	

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																											
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+9		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%			
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP		
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Unit	unit	610	256.784	488	133.039	122	123.745	0	8.435	12	9.912	15	20.324	1	40.937	28	79.608	23%	64%	516	212.647	85%	83%	Dinas Pendidikan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Prosentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	%	100	500.007	98	310.767	100	189.240	5	20.921	0	55.339	0	67.957	5	34.515	10	178.731	10%	94%	108	489.498	108%	98%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	53	916.596	53	491.492	53	185.494	23	25.023	9	48.877	10	32.372	12	63.539	54	169.811	102%	92%	107	661.303	202%	72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan	unit	43	2.653.350	2	980.574	26	1.531.973	0	105.030	0	85.657	0	248.322	26	431.716	26	870.725	100%	57%	28	1.851.299	65%	70%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Jumlah	33	421.872			33	421.872	18	47.227	0	69.141	0	78.698	0	17.476	18	212.543	55%	50%	18	212.543	55%	50%	Satuan Polisi Pamong Praja
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	57	1.723.327	13	242.693	5	153.000	5	15.660	0	31.830	0	32.983	0	50.142	5	130.615	100%	85%	18	373.308	32%	22%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas yang dirawat	Jumlah	125	131.733	100	-	25	131.733	0	23.934	0	18.179	14	13.896	11	50.305	25	106.313	100%	81%	125	106.313	100%	81%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Kegiatan	3	105.468	100%	64.922	100	40.546	1	5.605	1	7.378	0	12.414		2	25.397	2%	63%	3	90.319	100%	86%	Dinas Tenaga Kerja	
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Unit	15	410.297	3	166.267	3	50.000	7	7.823	7	12.579	5	17.782	8	20.166	27	58.350	900%	117%	30	224.617	200%	55%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	285	7.618.230	228	2.442.457	57	1.724.354	41	185.026	2	240.087	0	201.435	60	306.163	103	932.710	181%	54%	331	3.375.167	116%	44%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukup	unit	30	235.353	30	145.353	30	90.000	4	2.010	0	5.523	0	10.561	0	24.876	4	42.970	13%	48%	34	188.323	113%	80%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	230	732.124	184	306.624	46	425.500	0	37.672	0	90.512	0	61.611	46	203.866	46	393.662	100%	93%	230	700.286	100%	96%	Dinas Perhubungan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Unit	50	166.829	25	103.839	25	62.990	6	12.454	5	14.335	5	15.304	9	18.825	25	60.918	100%	97%	50	164.757	100%	99%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	145	151.894	116	54.065	29	40.000	3	9.278	3	2.850	2	3.925	29	21.264	37	37.317	128%	93%	153	91.382	106%	60%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	22	184.079	10	109.079	12	75.000	9	6.695	1	4.250	0	0	2	36.417	12	47.362	100%	63%	22	156.441	100%	85%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	40	215.000	17	83.835	23	66.902	4	17.045	0	5.907	4	12.604	15	18.624	23	54.180	100%	81%	40	138.014	100%	64%	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak pakai	Unit	250	987.237	200	597.329	50	389.907	20	47.760	12	69.376	10	82.520	4	47.201	46	246.857	92%	63%	246	844.187	98%	86%	Dinas Perdagangan

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																											
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		9		10=9x0		11=10/7x100%		12=6x0		13=12/5x100%			
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP		
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	unit	5	106.226	4	87.548	1	18.678	0	2.050	0	5.413	1	3.307	0	7.049	1	17.819	100%	95%	5	105.367	100%	99%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	20	50.550	16	30.002	4	20.548	0	1.457	0	1.227	0	5.604	4	7.965	4	16.253	100%	79%	20	46.255	100%	92%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	170	7.288.491	34	1.130.424	4	1.131.220	2	80.624	2	119.590	5	170.281	0	315.060	9	685.554	225%	61%	43	1.815.978	25%	25%	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	12	112.245	6	37.518	6	21.500	1	2.334	1	2.195	1	2.977	4	8.477	7	15.983	117%	74%	13	53.501	108%	48%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	Unit	20	107.626	1	26.905	1	21.842	1	2.400	1	2.085	0	6.303	0	8.711	2	19.498	200%	89%	3	46.404	15%	43%	Bagian Administrasi Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jenis/ jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	7	82.224	7	42.794	7	24.680	0	3.622	1	2.513	0	4.003	0	12.129	1	22.267	14%	90%	8	65.061	114%	79%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan roda empat yang dipelihara	unit	25	1.160.554	20	878.950	5	281.604	0	10.798	2	50.737	2	43.817	1	132.906	5	238.257	100%	85%	25	1.117.208	100%	96%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	paket	1	26.892	0	-	1	24.892	0	6.495	0	6.213	0	5.279	1	6.507	1	24.494	100%	98%	1	24.494	100%	91%	Inspektorat
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	Unit	32	1.500.000	20	1.468.964	12	31.036	0	2.016	5	5.755	0	1.885	5	13.269	10	22.926	83%	74%	30	1.491.891	94%	99%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	177	127.573	132	72.573	45	55.000	7	4.550	12	8.085	15	9.296	30	12.773	64	34.704	142%	63%	196	107.277	111%	84%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang diawat	Unit	10	195.930	8	55.899	2	55.625	0	3.539	0	10.620	0	6.801	2	16.486	2	37.447	100%	67%	10	93.346	100%	48%	Badan Pendapatan Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	100	150.000	20	35.287	20	30.000	5	2.101	7	3.019	7	4.404	18	8.802	37	18.326	185%	61%	57	53.613	57%	36%	Badan Kepegawaian Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	120	151.300	126	60.021	24	24.892	0	3.400	0	6.922	0	3.219	0	15.504	0	29.045	0%	117%	126	89.066	105%	59%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	51	228.966	42	48.448	9	48.448	1	6.504	1	7.891	0	9.768	0	14.428	2	38.590	22%	80%	44	87.038	86%	38%	Kecamatan Taman
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	16	201.465	16	77.665	16	58.379	1	6.621	0	6.483	0	9.217	0	17.541	1	39.863	6%	68%	17	117.528	106%	58%	Kecamatan Manguharjo
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	80	79.939	65	49.285	16	30.654	1	3.120	1	3.947	5	12.971	16	8.056	23	28.093	144%	92%	88	77.378	110%	97%	Kecamatan Karoharjo
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai	lembaga	20	414.557	16	217.212	4	197.345	0	1.775	0	7.071	2	13.683	1	80.146	3	102.675	75%	52%	19	319.887	95%	77%	Dinas Pendidikan

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																											
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		10=8+0		11=10/7x100%		12=6+0			13=12/5x100%				
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP		K	RP	K (%)	RP	
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Persentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	%	100	224.799	98	145.475	100	79.324	0	10.591	0	16.010	10	21.988	5	29.660	15	78.249	15%	99%	113	223.723	113%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	unit	12	2.141.540	6	1.074.642	12	400.000	16	23.718	22	65.499	14	36.082	4	443.078	56	568.377	467%	142%	62	1.643.019	517%	77%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang di maintain	unit	45	728.000	32	221.871	45	490.066	8	43.590	18	23.528	23	79.646	27	101.552	76	248.317	169%	51%	108	470.188	240%	65%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah	6	25.000			6	25.000	1	318	1	630	0	11.503			2	12.451	33%	50%	2	12.451	33%	50%	Satuan Polisi Pamong Praja
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	unit	37	94.400	8	29.950	8	20.800	6	1.994	1	5.209	0	2.798	0	10.747	7	20.747	88%	100%	15	50.697	41%	54%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Jumlah	25	55.800	20	-	5	55.800	0	17.451	0	9.195	3	9.580	2	19.551	5	55.777	100%	100%	25	55.777	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	Paket	1	72.388	100%	50.388	100	22.000	35	-	0	8.499	0	6.821	1	6.680	36	22.000	36%	100%	37	72.388	3700%	100%	Dinas Tenaga Kerja
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit	284	205.961	163	133.445	55	40.000	12	6.085	13	8.797	0	9.395	14	15.665	39	39.942	71%	100%	202	173.387	71%	84%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	unit	350	853.726	280	289.072	70	110.000	22	21.443	0	8.778	4	17.978	91	29.513	117	77.712	167%	71%	397	366.784	113%	43%	Dinas Lingkungan Hidup
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukup	jenis	30	377.951	24	140.465	6	237.486	2	7.500	0	29.645	0	62.782	4	77.598	6	177.525	100%	75%	30	317.990	100%	84%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	148	108.331	35	68.331	39	40.000	37	11.294	0	14.222	0	15.347	37	28.007	74	68.870	190%	172%	109	137.201	74%	127%	Dinas Perhubungan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit	5	647.000	4	102.000	1	545.000	1	203.183	0	2.112	0	24.828	1	314.236	2	544.359	200%	100%	6	646.359	120%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis sarana kantor yang memadai	jenis	15	265.820	12	115.000	3	60.000	0	15.550	0	14.765	0	7.290	3	22.395	3	60.000	100%	100%	15	175.000	100%	66%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Unit	50	139.090	30	89.090	20	50.000	14	1.529	2	10.765	0	0	2	8.964	18	21.257	90%	43%	48	110.347	96%	79%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang diperbaiki	unit	90	100.000	68	59.869	84	45.000	0	19.222	0	15.208	68	2.250	0	8.320	68	45.000	81%	100%	136	104.869	151%	105%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																											
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14					
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP		
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	315	271.770	252	183.108	63	88.662	21	13.498	17	4.754	13	18.579	3	41.731	54	78.562	86%	89%	306	261.670	97%	96%	Dinas Perdagangan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah barang	buah	16	41.500	12	16.600	4	13.300	3	3.895	1	4.286	0	1869,5	0	3.250	4	13.300	100%	100%	16	29.900	100%	72%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	unit	26	37.172	21	20.210	24	16.962	0	3.010	2	450	0	2.150	0	9.263	2	14.873	8%	88%	23	35.083	88%	94%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	jenis	25	406.384	5	188.827	5	159.600	1	21.328	2	25.335	1	35.050	0	84.288	4	166.001	80%	104%	9	354.828	36%	87%	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	jenis	30	211.290	24	67.671	6	15.000	1	1.938	1	3.200	2	4.973	2	4.890	6	15.000	100%	100%	30	62.671	100%	39%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	jenis	75	46.000	4	14.276	4	9.200	4	2.329	4	625	0	350	0	2.177	8	5.481	200%	60%	12	19.756	16%	43%	Bagian Administrasi Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis/ jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit	61	76.800	30	37.000	31	20.000	2	3.432	3	3.564	0	550	2	12.450	7	19.995	23%	100%	37	56.995	61%	74%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	jenis	50	522.384	40	235.884	10	286.500	2	14.340	3	27.346	2	19.185	3	74.155	10	135.026	100%	47%	50	370.910	100%	71%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	jenis	5	30.000	0	-	5	30.000	1	9.450	1	4.750	0	7.390	0	8.430	2	30.020	40%	100%	2	30.020	40%	100%	Inspektorat
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarpras yang layak pakai	jenis	5	280.000	4	234.460	1	45.540	250	0	6.398	0	19.146	1	19.733	1	45.527	100%	100%	5	279.987	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	jenis	43	185.494	9	124.994	11	60.500	6	14.659	1	309	7	7.185	6	27.750	20	49.903	182%	82%	29	174.897	67%	94%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki	Jenis	25	192.162	20	70.301	5	37.152	0	9.538	0	10.735	0	4.805	5	5.605	5	30.683	100%	83%	25	100.984	100%	53%	Badan Pendapatan Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis Barang	jenis	45	124.000	11	48.009	11	24.800	8	2.398	8	5.854	11	2.359		27	10.611	245%	43%	38	58.620	84%	47%	Badan Kepegawaian Daerah	
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	jenis	45	183.800	36	66.735	9	35.000	7	11.120	0	7.155	0	4.340	0	12.080	7	34.695	78%	99%	43	101.430	96%	55%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarpras Kantor	paket	100	238.700	0	52.631	100	36.500	100	3.900	0	8.090	0	2.880	0	11.182	100	26.052	100%	71%	100	78.683	100%	33%	Kecamatan Tampan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	jenis	3	140.577	3	95.277	3	45.300	3	4.245	0	5.515	0	6.882	0	9.000	3	25.642	100%	57%	6	120.919	200%	86%	Kecamatan Mangharjo

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																									
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																			
				5		6		7		8		9		10		10=8+9		11=10/7x100%		12=6+10			13=12/5x100%																		
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP		K	RP	K (%)	RP															
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor	jenis	15	91.200	12	60.800	3	30.400	1	2.994	2	11.279	1	8.205	6	7.920	10	30.398	333%	100%	22	91.198	147%	100%	Kecamatan Karoharjo												
			4	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas	unit	20	6.392.800	4	1.766.003	4	1.288.717	1	124.640	1	211.841	0	365.757	0	572.881	2	1.275.119	50%	99%	6	3.041.122	30%	48%	Bagian Umum Sekretariat Daerah												
			4	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dikola	unit	5	1.107.000	4	875.319	1	405.429	0	24.528	0	141.489	1	59.762	0	5.566	1	231.345	100%	57%	5	1.106.665	100%	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah												
			5	Kegiatan Pemeliharaan dan Biaya Operasional Gedung Diklat	jumlah acara	kegiatan	1500	666.108	340	260.391	300	133.222	26	13.930	98	35.455	35	28.347	42	54.147	201	131.879	67%	99%	541	392.270	36%	59%	Badan Kepegawaian Daerah												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																									
Predikat Kinerja																																									
0	0	10101	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	31097	183.377.082	7623	106.294.959	5391	#####	125	#####	18	853.813	35	2.220.848	-	-	178	3.508.879	2%	3,30%	7.801	109.803.838	25%	59,88%													
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Kantor	unit	100%	1.164.009	100%	19.805.252	0	-								0	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	1	#VALUE!	100%	#VALUE!	Dinas Pendidikan													
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Per sentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	%	100	5.330.045	98	2.877.358	100	2.452.687	0	-	0	-	0	322.470	5	1.729.162	5	2.051.632	5%	84%	103	4.928.990	103%	92%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana												
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	paket	208	9.563.130	159	8.744.008	4	819.122	0	-	4	143.939	2	36.800	29	1.182.456	35	1.363.196	875%	166%	194	10.107.204	93%	106%	Rumah Sakit Umum Daerah												
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah jenis	jenis	7	2.509.914	7	2.156.314	4	353.600	0	-	3	72.058	9	261.019	12	662.481	24	995.557	600%	282%	31	3.151.871	443%	126%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor (Kelengkapan PemasamKebakaran)															0	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja														
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	paket	5	90.000	1	-	1	65.000	0	-	1	24.850	0	35.580	1	0	2	60.430	200%	93%	3	60.430	60%	67%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah paket															0	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana prasarana kantor	Paket	125	682.999	100	460.749	25	222.250	0	-	0	-	22	189.742	3	32.500	25	222.242	100%	100%	125	682.991	100%	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	unit	268	479.000	214	242.319	34	80.000	6	12.255	9	55.138	0	-	18	32.450	33	99.843	97%	125%	247	342.162	92%	71%	Dinas Lingkungan Hidup												
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukup	jenis	4	2.172.349	4	1.692.649	4	479.700	0	-	0	5.512	0	56.305		517.444	0	579.261	0%	121%	4	2.271.910	100%	105%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	paket	1	6.407.845	0	4.641.440	1	1.766.406	0	-	0	3.740	0	469.255	1	1.274.963	1	1.747.958	100%	99%	1	6.389.398	100%	100%	Dinas Perhubungan												

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7				8		9		10		10=8+0		11=10/7x100%		12=6+0			13=12/5x100%		
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP		K	RP	K (%)
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	unit	0	-	1	5.506.415									0		0%	0%	1	5.506.415	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	10	740.000	6	404.164									0		0%	0%	6	404.164	60%	55%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro		
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	6	531.946	3	511.946	2	20.000	0	-	0	-	1	0	0	14.000	1	14.000	50%	70%	4	525.946	67%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah paket	paket	0	1.440.053	2	1.440.053									0		0%	0%	2	1.440.053	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan		
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		paket	1	108.400	0	-	1	109.400	0	-	0	-	0	0	1	106.227	1	106.227	100%	97%	1	106.227	100%	98%	Dinas Tenaga Kerja
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	paket	1	50.000	1	107.520	0	-	0	-	0	-	0	0		0		0%	0%	1	107.520	100%	215%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	paket	10	8.788.202	3	1.471.574	3	1.058.791	1	367.910	1	154.229	0	401.918	0	2.631.451	2	3.555.509	67%	336%	5	5.027.082	50%	57%	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana	paket			13	388.602	4	-	0	-					0		0%	0%	13	388.602	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	paket	100	306.000	3	229.738	1	-	1	-	0	-	0	0	0	0	1	-	100%	100%	4	229.738	4%	75%	Bagian Administrasi Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah/jenis sarana dan prasarana kantor	Unit	220	514.376	192	281.676	28	232.700	0	-	0	-	0	0	20	231.928	20	231.928	71%	100%	212	513.604	96%	100%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana yang dibeli	jenis	15	17.373.539	12	2.178.904	3	15.194.635	1	7.275	0	28.608	0	36.195	2	14.293.134	3	14.365.212	100%	95%	15	16.544.116	100%	95%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah paket peralatan														0		0%	0%	0		100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	jenis	6	175.000	10	1.470.458	5	100.000	0	-					0		0%	0%	10		167%	167%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																																			
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				5		6		7		8		9		10		9		10=90		11=10/Tx100%		12=6/0		13=12/Sx100%											
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP										
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	.....	100%	546.071	1%	320.802	100	140.552	0	-	0	-	0	-	1	139.076	1	139.076	1%	99%	1	459.878	101%	84%	Badan Pendapatan Daerah								
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor	paket	100%	600.000	2	580.255	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	-	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	580.255	#VALUE!	97%	Kecamatan Taman								
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	paket			94	730.414	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	94	730.414	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Karoharjo								
	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah	150	400.000			150	400.000	96	-	0	339.756	0	0			96	339.756	64%	85%	96	339.756	64%	85%	Satuan Polisi Pamong Praja								
	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	orang	223	260.330	223	133.662	156	20.000	0	-	0	12.410	0	0	159	5.904	159	18.314	102%	92%	382	151.975	171%	58%	Dinas Lingkungan Hidup								
	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Buah	345	367.309	600	173.584	52	193.725	14	2.414	0	13.310	0	31.271	362	138.639	376	185.634	723%	96%	976	359.218	283%	98%	Dinas Perhubungan								
	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Disediakan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang Disediakan																0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perdagangan								
	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	buah	29.250	21.401.188	5.850	1.379.832	4.500	4.336.911	0	6.610	0	263	0	0	0	3.774.140	0	3.781.012	0%	87%	5.850	5.160.844	20%	24%	Bagian Umum Sekretariat Daerah								
	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atribut DPRD	jenis	25	1.330.237	20	771.401	5	558.836	2	37.755	0	-	0	17.700			2	55.455	40%	10%	22	826.856	88%	62%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								
	3	Kegiatan Rehab gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung yang direhab	%	5	4.090.995	1	196.525	100	199.033	0	-	0	-	1	190.093	0	192.093	1	382.186	1%	192%	2	578.711	40%	14%	Bagian umum sekretariat daerah								
	3	Kegiatan Rehab gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung yang direhab	%	1	20.571.234	0	625.584	100	23.700	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	625.584	0%	3%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana								
	3	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Unit	0	-	0	406.179	1	200.000	1								1	-	100%	0%	1	406.179	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan								
	4	Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	paket	2	224.700	1	49.700	2	175.000	0	-	0	-	0	172.500			0	172.500	0%	99%	1	222.200	50%	99%	Satuan Polisi Pamong Praja								
	4	Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	paket	5	50.000	1	49.700	1	50.000	3	-	0	-	0	0	1	0	4	-	400%	0%	5	49.700	100%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga								
	4	Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	paket	1	75.108.211	1	46.266.183	1	262.300	0	-	0	-	0	0	0	1.275.720	0	1.275.720	0%	486%	1	47.541.903	100%	63%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																			
Predikat Kinerja																																			
0	0	10101	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu	%	908	5.520.548	526	2.865.535	447	2.062.082	66	84.117	44	455.555	43	333.293	62	824.387	215	1.697.352	41%	59,23%	741	4.562.888	82%	82,65%							
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen	dokumen	45	191.127	36	116.165	9	74.962	0	-	4	40.331	0	19.517	4	7.841	8	67.688	89%	90%	44	183.854	98%	96%	Dinas Pendidikan								

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		9		10=80		11=10/7x100%		12=6#0		13=12/5x100%			
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP		
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Jumlah dokumen Laporan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	Jenis	55	720.681	44	412.780	11	307.901	2	37.630	0	56.222	2	78.837	1	86.884	5	259.574	45%	84%	49	672.354	89%	93%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD yang disusun															0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Rumah Sakit Umum Daerah	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Per sentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	Dokumen	10	180.000	10	89.340	10	50.000	2	-	3	-	0	11.562	10	34.865	15	46.427	150%	93%	25	135.767	250%	75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	jumlah dokumen	dok	30	125.000	13	53.258	10	31.630	0	2.000	0	-	10	13.461	0	11.872	10	27.334	100%	86%	23	80.592	77%	64%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pelaporan	Jumlah	9	99.850			9	99.850	0	-	3	50.620		10.725	0	21.522	3	82.868	33%	83%	3	82.868	33%	83%	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang disusun	dok	36	159.978	7	58.168	7	25.000	4	-	1	2.467	2	0	0	11.385	7	13.852	100%	55%	14	72.020	39%	45%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja SKPD yang harus dipenuhi	Jumlah	40				8	72.277	0	11.872	0	31.148	4	0			4	43.020	50%	60%	4	43.020	10%	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Ter sedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Dok	6	65.000	100%	34.878	6	25.000	0	-	0	-	0	0	2	4.179	2	4.179	33%	17%	3	39.057	50%	60%	Dinas Tenaga Kerja
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	Dokumen	80	235.000	65	87.107	15	115.000	11	32.615	5	12.826	0	11.093	2	45.374	18	101.907	120%	89%	83	189.014	104%	80%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	24	123.904	10	57.474	8	30.600	2	-	3	23.265	2	5.190			7	28.455	88%	93%	17	85.929	71%	69%	Dinas Lingkungan Hidup
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukup	dokumen	8	110.207	6	51.746	8	58.461	3	-	0	14.395	0	11.544	0	28.838	3	54.777	38%	94%	9	106.523	113%	97%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen	Dokumen	19	150.094	8	61.104	19	88.990	2	-	5	22.324	8	22.324	4	43.362	19	88.010	100%	99%	27	149.114	142%	99%	Dinas Perhubungan
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Jumlah dokumen	dokumen	10	122.284	5	76.949		45.335		-	2	18.701	2	17.941	1	8.408	5	45.050	#DIV/0!	99%	10	121.999	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r ealisasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	dokumen	50	210.000	10	53.537		26.026	0	-	7	5.763	0	-			7	5.763	#DIV/0!	22%	17	59.300	34%	28%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																												
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%				
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP			
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	dokumen	30	100.000	24	68.930	6	25.000	1	-	1	-	1	8.065	1	16.429	4	24.493	67%	98%	28	93.424	93%	93%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen	dokumen	25	65.477	20	31.642	5	33.835	2	-	0	-	0	3.816	3	29.096	5	32.911	100%	97%	25	64.553	100%	99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen	25	156.410	20	81.537	5	74.873	-	0	-	0	0	2	26.074	2	26.074	2	26.074	40%	35%	22	107.610	88%	69%	Dinas Perdagangan
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen	dokumen	21	87.417	17	80.000	4	7.417	4	-	0	400	0	6.516	0	400	4	7.316	100%	99%	21	87.316	100%	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen	dokumen	25	65.883	20	32.760	5	33.123	0	-	0	16.238	0	0	3	16.037	3	32.275	60%	97%	23	65.035	92%	99%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen	dokumen	25	268.076	5	123.068	5	145.008	0	-	0	-	0	0	8	126.901	8	126.901	160%	88%	13	249.968	52%	93%	Bagian Umum Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen	dokumen			5	40.955	5	4.315	3	-	0	-	-	-	-	-	3	#VALUE!	60%	#VALUE!	8	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen yang dikerjakan (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulan, LKj)	dokumen	5	75.000	5	21.351	5	14.094	2	-	0	-	0	0	8.966	2	8.966	2	8.966	40%	64%	7	30.318	140%	40%	Bagian Administrasi Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	75.000	5	45.641	5	21.752	0	-	1	18.976	0	0	0	2.762	1	21.738	20%	100%	6	67.379	120%	90%	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen laporan kinerja SKPD	dok	35	58.665	14	24.371	10	23.665	0	-	0	-	0	0	4	18.931	4	18.931	40%	80%	18	43.302	51%	74%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	dokumen	11	101.582	0	-	11	101.582	0	-	1	21.432	2	21.085	4	45.570	7	88.087	64%	87%	7	88.087	64%	87%	Inspektat	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	72	175.000	60	78.903	12	96.097	2	-	4	15.035	3	15780,6	3	55.455	12	86.271	100%	90%	72	165.174	100%	94%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen	dokumen	37	107.115	29	59.215	8	47.900	4	-	0	14.378	3	0	1	26.857	8	41.235	100%	86%	37	100.450	100%	94%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK																														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+0		11=10/7x100%		12=6+0		13=12/5x100%						
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP					
		1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen	dokumen	100%	64.592	1	17.363	100	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	1	17.363	100%	27%	Badan Pendapatan Daerah
		1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen	dokumen	36	251.859	7	49.993	7	50.372	4	-	0	13.349	0	14.990	2	21.147	6	49.485	86%	98%	13	99.478	36%	39%	Badan Kepegawaian Daerah		
		1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Dokumen per encanaan dan laporan yang disusun	dokumen	37	91.939	5	34.546	9	57.393	5	-	0	-	1	-	0	38.159	6	38.159	67%	66%	11	72.705	30%	79%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen	dokumen	11	170.746	9	81.064	2	41.396	0	-	1	12.936	0	12.936	0	15.506	1	41.378	50%	100%	10	122.442	91%	72%	Kecamatan Taman		
		1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen	dokumen	12	124.511	8	81.390	6	43.121	8	-	-	12.807	-	10.290	-	19.612	8	42.709	133%	99%	16	124.099	133%	100%	Kecamatan Manguharjo		
		1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen	dokumen	41	113.355	32	83.082	9	30.274	5	-	2	8.900	1	7.120	5	11.867	13	27.888	144%	92%	45	110.970	110%	98%	Kecamatan Kartoharjo		
		2	Kegiatan Penyusunan buku pr of il kelurahan dan monograf i kecamatan dan kelurahan	Jumlah Dokumen	dokumen	10	112.092	8	84.251	1	27.842	0	-	0	-	0	-	1	27.208	1	27.208	100%	98%	9	111.459	90%	99%	Kecamatan Taman		
		2	Kegiatan Penyusunan buku pr of il kelurahan dan monograf i kecamatan dan kelurahan	Jumlah dokumen	dokumen	2	132.218	2	103.025	2	29.192	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0%	0%	2	103.025	100%	78%	Kecamatan Manguharjo		
		2	Kegiatan Penyusunan buku pr of il kelurahan dan monograf i kecamatan dan kelurahan	Jumlah Dokumen	dokumen	10	134.840	7	111.957	3	22.883	0	-	0	-	2	7.715	1	12.880	3	20.595	100%	90%	10	132.552	100%	98%	Kecamatan Kartoharjo		
		3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah Dokumen	dokumen	4	123.342	3	57.755	1	27.842	0	-	0	17.401	0	10.097	0	-	0	27.498	0%	99%	3	85.253	75%	69%	Kecamatan Taman		
		3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah dokumen	dokumen	1	92.963	1	63.770	1	29.192	0	-	1	16.031	0	12.687	0	0	1	28.718	100%	98%	2	92.488	200%	99%	Kecamatan Manguharjo		
		3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah Dokumen	dokumen	5	279.342	4	256.458	100	22.883	0	-	0	9.611	0	0	0	0	0	9.611	0%	42%	4	266.069	80%	95%	Kecamatan Kartoharjo		
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														
																Predikat Kinerja														
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>																														
<b>PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>																														
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																											
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.																											
1	3	10301	15	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Pelayanan Instalasi Air Limbah Domestik																									
			1	Kegiatan Pembangunan IPLT	Jumlah bangunan																									
																										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				



PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP																																																	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																							
				5		6		7		8		9		10		9		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%																									
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP																								
1	3	10301	19	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	%	169,5	127.943.280	125	85.688.746	143	#####	0	-	10	4.366.000	15	17.269.615	119	#####	144	92.903.693	115%	108,42%	269	178.592.439	159%	139,59%																					
				1 Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dikerjakan	buah	10	2.743.816	6	2.353.516	1	390.300	0	-	0	-	1	329.623	1	23.261.960	2	23.591.583	200%	6044%	8	25.945.099	80%	946%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				2 Kegiatan Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan	Persentase data yang up to date	Unit	100	263.412	100	200.412	100	63.000	0	-	0	-	0	-	100	61.300	100	61.300	100%	97%	200	261.712	200%	99%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				3 Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi di Kota Madiun	Jumlah lokasi	Lokasi	24	12.076.737	6	5.868.820	16	12.076.737	0	-	10	966.257	0	8.391.628	6	21.187.720	16	30.545.605	100%	253%	22	36.414.425	92%	302%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				4 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen DED	Dok	9	2.575.488	1	1.677.138	2	898.350	0	-	0	224.124	0	-	2	2.210.717	2	2.434.841	100%	271%	3	4.111.979	33%	160%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				5 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Km	4	9.991.681	0	0	4	9.991.681	0	-	0	32.524	0	2.423.354	4	6.579.491	4	9.035.369	100%	90%	4	9.035.369	100%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				6 Kegiatan Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Km	12,5	41.162.395	7	16.631.545	15	24.530.850	0	-	0	3.143.095	14	6.125.010	1	17.838.940	15	27.107.045	100%	111%	22	43.738.590	176%	106%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				7 Kegiatan Inspeksi Jembatan	Dokumen Survey dan Kondisi Jembatan	Dok	5	133.500	3	37.315	2	55.000	0	-	0	-	0	-	2	53.800	2	53.800	100%	98%	5	91.115	100%	68%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				8 kegiatan Inspeksi Jalan	Persentase data yang up to date	Unit	5	58.996.250	2	58.920.000	3	76.250	0	-	0	-	0	-	3	74.150	3	74.150	100%	97%	5	58.994.150	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
1	3	10301	20	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Km	209	77.276.974	77	35.387.316	56	31577397,1	3	#####	33	7.633.055	37	6.142.875	47	#####	120	38.292.923	156%	108,21%	197	73.680.238	94%	95,35%																					
				1 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I	Jumlah lokasi	Lokasi	41	33.087.900	11	21.222.713	10	4.987.900	0	-	17	824.177	12	3.492.310	12	4.932.540	41	9.249.027	410%	185%	52	30.471.740	127%	92%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				2 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II	Jumlah lokasi	Lokasi	85	16.960.000	8	5.527.344	25	11.278.008	0	-	12	952.478	12	248.632	12	9.182.838	36	10.383.948	144%	92%	44	15.911.292	52%	94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				3 Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan	Lokasi	5	714.250	2	240.837	3	149.750	0	-	1	52.959	1	65.909	1	30.150	3	149.017	100%	100%	5	389.854	100%	55%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				4 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III	Jumlah lokasi	Lokasi	50	15.395.000	40	6.292.814	10	4.294.700	0	-	0	2.175.922	10	1.647.915	10	5.273.345	20	9.097.182	200%	212%	60	15.389.996	120%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				5 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kar tohar jo	Jumlah lokasi	Lokasi	6	910.000	3	378.595	1	359.750	1	58.877	1	25.590	1	107.220	1	154.670	4	346.356	400%	96%	7	724.952	117%	80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				6 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo	Jumlah lokasi	Lokasi	7	1.005.074	4	645.324	2	359.750	1	68.350	1	118.850	1	5.250	1	156.100	4	348.550	200%	97%	8	993.874	114%	99%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				7 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman	Jumlah lokasi	Lokasi	6	750.000	4	532.559	1	359.750	1	68.408	1	114.108	0	10.050	1	154.330	3	346.895	300%	96%	7	879.454	117%	117%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				8 Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring Road	Jumlah Lokasi	Lokasi	1	705.000	1	447.059	1	249.750	0	-	0	7.471	0	192.090	1	44.300	1	243.861	100%	98%	2	690.920	200%	98%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
				9 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IV	Jumlah bimtek	Kali	8	7.749.750	4	100.070	3	9.538.039	0	-	0	3.361.500	0	373.500	8	4.393.085	8	8.128.085	267%	85%	12	8.228.155	150%	106%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP																														
Kode	Usaha/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%										
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K (%)	RP							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
1	3	10301	21	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	703	4.276.693	702	2.611.600	703	775.040	-	1.734	-	64.321	-	66.406	703	357.767	703	490.228	100%	18,77%	1.405	3.101.828	200%	72,53%		
				1	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW yg diperdakan	%	100	880.000	100	252.304	100	300.000	0	1.734	-	21.500	-	21.318	100	175.328	100	219.880	100%	73%	200	472.184	200%	54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2	Kegiatan Pendataan IMB	Jumlah data bangunan yang belumber IMB	Kec.	3	1.558.347	2	742.908	3	158.347	-	-	-	10.258	-	9.930	3	105.306	3	125.494	100%	79%	5	868.402	167%	56%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				3	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Persentase Surat Teguran yg diterbitkan	%	100	1.638.347	100	1.480.000	100	158.347	0	-	0	14.514	-	17.050	100	77.133	100	108.696	100%	69%	200	1.588.696	200%	97%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				4	Kegiatan Survey dan Pemetaan	Jumlah Dokumen SKRK	Dok	500	200.000	500	136.388	500	158.347	0	-	0	18.050	-	18.108	500		500	36.158	100%	23%	1.000	172.546	200%	86%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan.																										
1	4	10401	15	Program Lingkungan sehat perumahan	Luas RTH yang dipelihara	ha	74	18.161.950	38	7.196.750	88	6.899.254	19	#####	25	31.861	57	57.307	96	432.378	197	941.221	518%	13,08%	235	8.137.970	318%	44,81%		
				1	Kegiatan Updating Data Kawasan Perumahan Kumuh	Jumlah paket	paket	1	300.000	1	174.573	1	100.000	1	1.445	0	0	0	0	0	1	1.445	100%	1%	2	176.018	200%	59%	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
				2	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi)	Jumlah lokasi	lokasi	27	11.500.000	26	5.881.742	1	6.242.740	1	396.647	0	0	0	27	18.117	28	414.764	2800%	7%	54	6.296.506	200%	55%	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
				3	Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Terwujudnya perumahan yang sehat	lokasi	1	5.000.000	5	516.436	7	-	7	-	0	0	0	0	7	-	7	-	100%	#DIV/0!	12	516.436	1200%	10%	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan
				4	Kegiatan Pembangunan Landscape Rusunawa	Jumlah dokumen	dokumen	1	211.950	1	190.428	1	21.522	0	13.482	0	0	1.218	1	4.964	1	19.664	100%	91%	2	210.092	200%	99%	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
				5	Kegiatan Operasional Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Jumlah paket	paket	1	100.000	-	38.644	1	75.000	0	3.372	0	-	0	1	19.327	1	22.699	100%	30%	1	61.343	100%	61%	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
				6	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi ijin Perumahan	Jumlah lokasi	lokasi	10	150.000	1	14.420	3	16.772	6	-	19	13.051	23	21.751	0	0	48	34.802	1600%	208%	49	49.221	490%	33%	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan
				7	Kegiatan BOP RT LH	Jumlah dokumen	dokumen	2	350.000	-	153.329	1	150.000	0	4.722	0	4.260	1	21.058	2	117.612	3	147.651	300%	98%	3	300.980	150%	86%	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan
				8	Kegiatan BOP Sanitasi Rumah Tangga	Jumlah lokasi	lokasi	1	200.000	-	89.244	2	100.000	2	8	0	2.750	27	12.665	0	81.791	29	97.213	1450%	97%	29	186.457	2900%	93%	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP																													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		9		10=8/9		11=10/7x100%		12=8/10		13=12/5x100%					
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP				
	9	Kegiatan Pemeliharaan MCK, IPAL Wilayah Kota Madiun	Jumlah paket	paket	5	200.000	4	106.247	1	172.220	0	-	0	11800	0	0	1	157.259	1	169.059	100%	98%	5	275.306	100%	138%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	10	kegiatan inventarisasi fasumfaso perumahan	Jumlah lokasi	lokasi	25	150.000	-	31.686	70	21.000	2	-	6	0	6	615	64	33.308	78	33.923	111%	162%	78	65.610	312%	44%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
1	4	10401	16	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dipelihara	ha	5295	70.285.537	5168	33.184.199	4895	#####	1437	#####	1947	2.762.810	3696	4.406.641	5549	#####	12629	26.675.965	244%	80,39%	17.797	59.860.165	336%	85,17%	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman	Jumlah lokasi	lokasi	6	813.984	8	391.984	1	422.000	6	28.402	6	80781,55	6	131.864	6	143.281	24	384.328	2400%	91%	32	776.312	533%	95%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	2	Kegiatan Sosialisasi Perumahan, PU, Pemakaman	Jumlah kegiatan sosialisasi	jenis	3	1.890.000	3	865.906	1	591.750	1	10.301	1	238504,25	0	106.670	3	246.465	5	601.941	500%	102%	8	1.467.847	267%	78%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	3	Kegiatan Program Taman Bersih (Pr otasih)	Jumlah tenaga	orang	72	5.940.629	67	2.956.749	72	2.983.880	0	579.809	0	726.660	0	690.342	105	967.362	105	2.964.172	146%	99%	172	5.920.921	239%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	4	Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/ Median Jalan	Jumlah jenis	jenis	3	715.850	3	445.267	0	255.170	0	-	3	197.867	3	23.105	3	357.945	9	578.918	#DIV/0!	227%	12	1.024.184	400%	143%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	5	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik	titik	4502	918.850	4.017	526.495	72	268.500	1125	35.791	1625	9.235	3376	125.189	4502	93.917	10.628	264.131	14761%	98%	14.645	790.626	325%	86%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	6	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	Pemeliharaan TMP	lokasi	1	1.190.787	1	467.287	1	723.500	0	17.303	0	51.792	234.715	1	234.849	1	538.659	100%	74%	2	1.005.946	200%	84%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	7	Kegiatan pemeliharaan makam Pace Keras	Jumlah lokasi pemakaman	lokasi	1	571.783	1	380.783	1	191.000	1	5.413	0	24.383	0	120.212	1	33.260	2	183.268	200%	96%	3	564.051	300%	99%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	8	Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota	Luas areal kawasan hutan kota yang terpelihara	ha	2	700.950	2	487.183	2	564.800	1	180.878	0	850	1	4.708	1	382.550	3	568.985	150%	101%	5	1.056.169	250%	151%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	9	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota	Jumlah lokasi	lokasi	8	11.644.375	5	5.272.046	3	6.372.329	0	3.579	1	468.263	1	1.176.083	1	3.886.558	3	5.534.484	100%	87%	8	10.806.530	100%	93%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	10	Kegiatan Promoter (Program Madiun Terang)	Jumlah tenaga	orang	17	856.050	10	324.011	17	532.039	0	80.640	0	133.494	0	85.320	17	208.181	17	507.635	100%	95%	27	831.646	159%	97%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	11	Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau.	Jumlah lokasi	lokasi	7	1.917.208	4	1.167.708	6	749.500	1	76.720	2	265.730	1	133.086	2	448.952	6	924.488	100%	123%	10	2.092.196	143%	109%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		



PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP																																														
Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																				
				5		6		7		8		9		10		9		10=8÷0		11=10/7x100%		12=6÷0		13=12/5x100%																						
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP																					
		12	Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU	Jumlah titik	titik	350	6.949.350	410	4.794.836	350	2.406.720	0	432.594	0	43.018	0	15.069	417	2.252.594	417	2.743.275	119%	114%	827	7.538.111	236%	108%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
		13	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman	Jumlah lokasi pemukiman	lokasi	10	15.087.327	11	4.058.582	3	4.223.298	0	300	4	186.642	6	1.436.579	11	2.199.469	21	3.822.991	700%	91%	32	7.881.572	320%	52%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
		14	Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun	Jumlah lokasi	lokasi	1	963.884	1	597.884	4352	366.000	1	2.142.250	1	126.771	1	42.005	1	415.300	4	2.726.326	0%	745%	5	3.324.210	500%	345%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
		15	Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran	Jumlah lokasi	lokasi	1	513.000	1	302.024	1	229.000	1	-	0	0	1	71.344		140.594	2	211.938	200%	93%	3	513.962	300%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
		16	Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi	Jumlah lampu hemat energi	buah	300	9.727.878	607	8.675.178	4	1.052.700	300	991.042	300	16.258	300	9.999	463	613.108	1.363	1.630.407	34075%	155%	1.970	10.305.584	657%	106%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
		17	Mkegiatan pengadaan sarana dan prasarana per taman	Jumlah jenis	jenis	4	319.007	10	99.007	1	220.000	0	17.255	4	192.562	0	350	4	49.735	8	259.902	800%	118%	18	358.909	450%	113%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
		18	kegiatan pengadaan kendaraan operasional per taman dan PJU	Jumlah kendaraan operasional	unit	7	9.564.625	7	1.371.269	8	985.482	0	-	0	0	0	0	11	2.230.118	11	2.230.118	138%	226%	18	3.601.387	257%	38%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10401</b>	<b>15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																																										
				<b>Pertanahan.</b>																																										
				<b>Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah</b>																																									
						<b>328</b>	<b>490.000</b>	<b>126</b>	<b>215.364</b>	<b>328</b>	<b>119.280</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>13.051</b>	<b>22</b>	<b>25.405</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>38.456</b>	<b>25%</b>	<b>17,86%</b>	<b>157</b>	<b>253.820</b>	<b>48%</b>	<b>51,80%</b>																			
				1	Kegiatan Penyusunan Perda/Perwal Bidang Pertanahan	Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik per tanah	kali	4	28.550	4	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0	-	0,00	#DIV/0!	4	28.550	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
				2	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi	Jumlah lokasi	lokasi	10	100.000	-	10.113	300	56.230	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0,00	0,00	-	10.113	0%	10%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
				3	Kegiatan Fasilitasi Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah/Kegiatan Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	Jumlah fasilitasi ijin lokasi dan IPPT	kali	6	225.000	20	49.866	10	14.025	0	-	6	13.051	19	21.751	0	0	25	34.802	250%	248%	45	84.668	750%	38%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																
				4	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik per tanah	kali	12	90.000	2	28.550	4	14.025	0	-	3	-	3	3.654	0	-	6	3.654	150%	26%	8	32.204	67%	36%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																
				5	Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pertanahan	Jumlah peserta	orang	300	75.000	100	98.284	10	35.000	0	-	0	0	0	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																	

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP																																				
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				5		6		7		8		9		10		9		10=8/9		11=10/7x100%		12=6/10			13=12/5x100%											
				K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			Predikat Kinerja																	
2	5	20501	15	Lingkungan Hidup.																																
2	5	20501	15	Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup	Prosentase sarana dan prasarana sumber daya alam yang tersedia dan layak	%																														
							115	3.894.610	76	893.191	70	866.990	2	-	3	89.448	5	61.199	29	553.314	39	703.962	51%	78,81%	115	1.597.153	100%	41,01%								
				1	Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	3	471.110	1	250.744	2	130.845	0	0	1	89.448	0	8.250	0	243	1	97.941	50%	75%	2	348.666	67%	74%	Dinas Lingkungan Hidup						
				2	Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Ekor egion (RPPLH)	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	2	246.000		79.594	1	220.895	0	-	0			22.599	1	162.682	1	185.281	100%	84%	1	264.876	50%	108%	Dinas Lingkungan Hidup						
				3	Kegiatan Koordinasi Izin TPSB3 dan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair	Jumlah pelaku usaha yang melakukan rekomendasi izin TPS B3 dan Izin Pembuangan Limbah Cair	pemohon	10	102.500		11.360	42	74.040	2	-	2	5	30.350	1	37.113	10	67.463	24%	91%	10	78.823	100%	77%	Dinas Lingkungan Hidup							
				4	Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan	unit	100	3.075.000	75	551.493	25	441.210	0	-	0	0	0	0	0	27	353.275	27	353.275	108%	80%	102	904.768	102%	29%	Dinas Lingkungan Hidup					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			Predikat Kinerja																	
2	5	20501	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian pencemaran air		73%	7.238.746.000			68%	439.500	0%	111.634			186.940		165.418	0%	166.013	0%	38%	0%	166.013	0%	0%									
					Prosentase pengendalian pencemaran udara		79%				70%	0%								0%		0%		0%		0%										
				1	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	Jumlah kendaraan peserta uji emisi	kendaraan	1500	195.635	1150	94.814	900	50.000	288	3.000	491	8.437	276	10.200	0	27.593	1055	21.637	117%	43%	2205	116.451	147%	60%	Dinas Lingkungan Hidup						
				2	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan kegiatan	kali	3	485.000	1	38.824	1	66.000	0	-	0		1	54.002	0	0	1	54.002	100%	82%	2	92.826	67%	19%	Dinas Lingkungan Hidup						
				3	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim	kelurahan	6	133.250		30.249	3	100.000	0	0	0	38.845	3	51.530	0	6.000	3	90.375	100%	90%	3	120.624	50%	91%	Dinas Lingkungan Hidup						
				4	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan (SPM) Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	2	481.750	1	145.977	1	223.500	0	22.577	0	35.175	0	71.208	1	131.825	0	128.960	0%	58%	1	274.937	50%	57%	Dinas Lingkungan Hidup						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			Predikat Kinerja																	
2	5	20501	17	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup	Prosentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup																															
							321	2.692.407	10	1.329.603	107	1.039.366	0	10.663	5	85.173	130	57.277	4	664.230	139	817.341	1390%	61,47%	149	2.146.944	46%	79,74%								

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP																																												
Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
				5		6		7		8		9		10		9		10=8/0		11=10/7x100%		12=6/0		13=12/5x100%																				
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP																			
	1	Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan	Pengaduan masyarakat yang tertangani	kasus	15	90.000	5	11.144	5	42.000	0	0	5	1481	2	13.128	0	20.266	7	34.874	140%	83%	12	46.018	80%	51%	Dinas Lingkungan Hidup																	
	2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan Yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	Jumlah kelurahan	kelurahan	3	1.297.632	2	918.834	2	486.000	0	0	0	2.000	1	11.958	1	433.140	1	13.958	50%	3%	3	932.791	100%	72%	Dinas Lingkungan Hidup																	
	3	Kegiatan Peningkatan Edukasi, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Mengenai Izin Lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi	orang	300	307.500	23.798	97	173.366	0	0	0	41.167	127	26.090	0	62.746	127	67.257	131%	39%	127	91.055	42%	30%	Dinas Lingkungan Hidup																		
	4	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat (ADIPURA)	Jumlah titik pantau	kecamatan	3	997.275	3	375.827	3	338.000	0	10.663	0	40.525	0	6.101	3	148.077	0	57.288	0%	17%	3	433.115	100%	43%	Dinas Lingkungan Hidup																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
2	5	20501	18	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perampasan	Prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	184	14.688.276	132	4.688.731	131	6.326.932	0	#####	20	1.211.270	0	1.150.588	165	2.583.634	185	5.341.721	140%	113,93%	317	10.030.452	172%	68,29%																	
	1	Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mematuhi aturan tentang pengelolaan limbah B3	pelaku usaha	14	115.900	56	46.452	55	30.000	0	-	20	0	0	0	60	28.772	80	60	145%	0%	136	46.512	971%	40%	Dinas Lingkungan Hidup																	
	2	Kegiatan PROJASH (Program Jalan Bersih)	Jumlah tenaga projasah	orang	100	5.289.383	50	2.903.383	50	2.386.000	0	202.244	0	605.795	0	458.941	85	891.623	85	1.267.066	170%	53%	135	4.170.449	135%	79%	Dinas Lingkungan Hidup																	
	3	Kegiatan Peningkatan TPS	Jumlah TPS	lokasi	33	762.500	11	292.544	11	458.000	0	-	0	0	0	7	389.456	7	7	64%	0%	18	292.551	55%	38%	Dinas Lingkungan Hidup																		
	4	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah	Jumlah mesin pengolah sampah yang layak pakai	unit	18	383.233	9	142.442	9	227.932	0	16.884	0	8.721	0	101.670	9	28.957	9	127.284	100%	56%	18	269.726	100%	70%	Dinas Lingkungan Hidup																	
	5	Kegiatan Controlled Landfill TPA Winongo	Jumlah Lokasi	unit	15	2.200.760	5	125.760	4	2.075.000	0	177.101	0	539.723	0	354.160	1	525.397	1	1.070.984	25%	52%	6	1.196.744	40%	54%	Dinas Lingkungan Hidup																	
	6	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengelolaan Perampasan	Jumlah pengadaan sarana prasarana operasional perampasan	jenis	2	3.649.000	48.850	1	650.000	0	0	0	0	54.538	0	136.528	2	377.169	2	191.068	200%	29%	2	239.918	100%	7%	Dinas Lingkungan Hidup																	
	7	Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo	Jumlah lokasi	lokasi	2	2.287.500	1	1.129.299	1	500.000	0	0	0	2.493	0	99.289	1	342.261	1	101.783	100%	20%	2	1.231.082	100%	54%	Dinas Lingkungan Hidup																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
2	9	20901	15	Perhubungan. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	Sarana Fasilitas LLAJ yang Berfungsi Baik	635	1518248,6	618	814760,6	625	709488	154	0	155	9680	8	618535,7	155	52.206	472	680.422	76%	83,51%	1.090	1.495.182	172%	98,48%																	

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP																																														
Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																						
				5		6		7		8		9		10		9		10=8÷9		11=10/7x100%		12=6÷0			13=12/5x100%																					
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K	RP		K (%)	RP																				
		1	Kegiatan Penyusunan Data Base Perhubungan Darat	Jumlah yang Dipelihara Outcome Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yg Berfungsi Baik	Dokumen	4	19.488	0	6000	4	19.488	1	-	1	1	0	1	6.385	4	1	100%	0%	4	6.001	100%	31%	Dinas Perhubungan																			
		2	Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan jalan	unit	617	248.638	617	163.638	617	85.000	153	-	154	9680	0	41.481	154	31.771	461	51.315	75%	60%	1078	214.953	175%	86%	Dinas Perhubungan																		
		3	Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SM LLAJ	Jumlah yang Dipelihara Outcome Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yg Berfungsi Baik	Titik	14	1.250.123	1	645.123	4	605.000	0	-	0	0	7	577.055	0	14.050	7	577.055	175%	95%	8	1.222.177	57%	98%	Dinas Perhubungan																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
2	9	20901	16	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Cakupan Tingkat Keselamatan		6744	3.949.643	2131	1.595.145	728	2.959.318	1	64.320	496	14.436	1805	423.451	482	2.546.927	2784	3.049.134	131%	191,15%	4.915	4.644.279	73%	117,59%																		
		1	Kegiatan Pengadaan Peralatan Perengkapan Lalu Lintas	Jumlah Rambu Outcome Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	Buah	1224	1.663.852	237	195.820	122	2.072.852	0	39.760	0	-	979	-	315	1.933.168	1.294	1.972.928	1061%	95%	1.531	2.168.748	125%	130%	Dinas Perhubungan																		
		2	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Jumlah Marka Jalan	m2	4350	1.340.928	1329	804.778	2466,87	536.150	0	24560	483	800	423.451	167	287.509	1.450	735.520	59%	137%	2.779	1.540.298	64%	115%	Dinas Perhubungan																			
		3	Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Jalan	Pendataan Sarana Prasarana Jalan	Dokumen	1	57.116	1	42.500	1	14.616	1	-	0	14435,929	0	-	-	1	14.436	100%	99%	2	56.936	200%	100%	Dinas Perhubungan																			
		4	Kegiatan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian	unit	19	284.327	7	178.327	12	106.000	0	-	-	12	0	0	98.900	12	98.900	100%	93%	19	277.227	100%	98%	Dinas Perhubungan																			
		5	Kegiatan Operasi Penerbitan Pembatas Kecepatan	Jumlah pembatas kecepatan	Titik	36	361.551	0	179.851	36	181.700	0	-	13	0	13	0	0	180.250	26	180.250	72%	99%	26	360.101	72%	100%	Dinas Perhubungan																		
		6	Kegiatan Survey Kinerja Ruas Jalan	Jumlah dokumen	dokumen	1114	241.869	557	193.869	557	48.000	0	-	0	0	1	0	0	47.100	1	47.100	0%	98%	558	240.969	50%	100%	Dinas Perhubungan																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
2	9	20901	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan dan Lalu Lintas		129997	4.964.898	1144	2.307.126	129616	2.890.872	1667	#####	8478	413.969	18758	543.709	24963	1.183.483	53866	2.277.599	4709%	98,72%	55.010	4.584.725	42%	92,34%																		
		1	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Keterlibatan Lalindan angkutan	Jumlah Peserta	Orang	1500	566.259,42	0	264.493	1500	301.766	0	28.350	500	39.523	1050	48.105	1000	156.603	2.550	272.582	170%	90%	2.550	537.075	170%	95%	Dinas Perhubungan																		
		2	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya	Jumlah Kegiatan	Kali	2	1.575.115,98	15	915.116	24	660.000	2	24.467	127.275	121.513	2	277.044	4	550.299	17%	83%	19	1.465.415	950%	93%	Dinas Perhubungan																				
		3	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah Peserta	Peserta	35	135.221,44	35	87.069	35	48.152	0	-	6	36.730	0	4.769	0	-	6	41.499	17%	86%	41	128.569	117%	95%	Dinas Perhubungan																		

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP																											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2014 s/ d 2019 (2019)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/ d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				7		8		9		10		11		12		13		14		15							
				K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	RP	K (%)	RP				
4	Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJ	Jumlah Pelajar yang Dibina	Peserta	54	333.700,94	528	227.394	39	106.307	0	-	0	-	54	59.610	0	24.590	54	84.200	138%	79%	582	311.593	1078%	93%	Dinas Perhubungan	
5	Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan Lebaran	Jumlah Penumpang	Orang	580	146.333,08	427	82.695	427	63.638	0	-	580	32.416	0	-	0	2.494	580	34.910	136%	55%	1.007	117.605	174%	80%	Dinas Perhubungan	
6	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	Peserta	25	188.926,28	20	86.375	5	102.551	5	5.792	0	20.540	0	19.015	0	56.377	5	101.724	100%	99%	25	188.099	100%	100%	Dinas Perhubungan	
7	Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu	Jumlah Pos Pantau	Pos	20	414.549,64	16	206.823	4	207.727	0	-	2	24.200	0	53.984	2	61.553	4	139.737	100%	67%	20	346.560	100%	84%	Dinas Perhubungan	
8	Kegiatan Pelatihan/ Pembinaan SDM Perhubungan	Jumlah Peserta	Orang	200	192.681,16	100	152.223	1	40.458	35	3.790	35	10.470	0	10.470	35	12.030	105	36.760	10500%	91%	205	188.983	103%	98%	Dinas Perhubungan	
9	Kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha (WTN)	Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota	Kali	2	161.580,48	2	130.243	2	31.337	0	-	0	-	0	2.569	0	0	0	2.569	0%	8%	2	132.813	100%	82%	Dinas Perhubungan	
10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan	Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Angkutan Barang Di Terminal Barang	Kendaraan	9000	238.287,90	1	154.694	9.000	83.594	1607	7.800	7355	16.774	4342	12.000	11476	43.300	24780	79.874	275%	96%	24.781	234.568	275%	98%	Dinas Perhubungan	
11	Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Umum Sekolah Gratis	Jumlah Pelajar yang terangkut	orang	118560	627.440,00	0	-	118.560	627.440	0	23.200	0	35.400	13312	147.813	12429	200.582	25741	406.994	22%	65%	25.741	406.994	22%	65%		
12	kegiatan Pengelolaan Operasional UPTD Penguji kendaraan bermotor	Jumlah Pegawai	orang	6	111.300,00	0	-	6	111.300	6	9.000	0	9.000	0	13.700	6	75.050	12	106.750	200%	96%	12	106.750	200%	96%		
13	kegiatan pengelolaan operasional tempat parkir khusus	Jumlah Pegawai	orang	12	200.000,00	0	-	12	433.100	12	34.040	0	61.640	0	50.160	12	273.860	24	419.700	200%	97%	24	419.700	200%	210%		
14	kegiatan akreditasi PKB	Jumlah kegiatan	kali	1	73.502,00	0	-	1	73.502	0	-	0	-	0	-	1	0	1	-	100%	0%	1	-	100%	0%		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>														<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/ d PROGRAM 5)</b>												<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/ d PROGRAM 5)</b>	
Faktor Pendongor Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Tahun Berikutnya :																											

**Keterangan :**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RPKD Kota Madiun Tahun 2019 sesuai matrik diatas Bahwa Rata-rata target kinerja yang direncanakan bisa dicapai, ditahun 2019 untuk data RPJMD masih menggunakan RPJMD Periode Tahun 2014-2019 dan untuk Tahun 2020 sudah menggunakan RPJMD Periode Tahun 2019-2024

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

#### **1) Lingkungan eksternal (Global)**

Bank investasi raksasa asal Amerika Serikat (AS), JP Morgan Chase, menduga pada tahun termaksud (2020) bakal terjadi krisis keuangan global yang dimulai dari kejatuhan mesin-mesin penggerak ekonomi di Negeri Paman Sam.

Pasar saham AS diprediksi bakal anjlok sekitar 20 persen. Imbal hasil obligasi korporasi naik sekitar 1,15 persentase poin. Harga energi diprediksi merosot 35 persen disusul harga barang tambang metal dasar yang amblas 29 persen.

Dampaknya meluas sampai negara-negara berkembang. Utang pemerintah negara berkembang melebar hingga 2,79 persentase poin, begitu juga dengan sahamnya yang merosot 48 persen. Sementara nilai tukar bakal melemah 14,4 persen.

*Laman Fortune menjelaskan model yang dibuat JP Morgan berasal dari kalkulasi rentang ekspansi ekonomi, potensi durasi resesi berikutnya, valuasi nilai aset, tingkat deregulasi, dan inovasi finansial. Kalkulasi penghitungan itu dimulai tepat sepuluh tahun lalu, pasca-runtuhnya Lehman Brothers yang menyebabkan kemunculan krisis keuangan global atau *Great Recession* 2008.*

Ada hal yang bisa menahan kekhawatiran anda. Sebab tim periset ramalan ini, John Normand dan Federico Manicardi, mengatakan krisis yang bakal terjadi tidak akan separah 2008. Dilihat dari seluruh aset yang ada saat ini, proyeksi ini menjadi relatif tidak berbahaya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada krisis keuangan global (GFC) pada masa lalu.

Apalagi, riset ini dirilis untuk memberi peringatan kepada para investor dan pemangku kepentingan untuk segera mengambil kebijakan-kebijakan tepat demi mengadang ramalan ini.

Lalu, apa yang bisa dipersiapkan? Para pemangku kepentingan pada dasarnya bisa mencermati 10 indikator yang bisa menyebabkan krisis keuangan global kembali terjadi pada 2020 dari dua ekonom, Brunello Rosa dan Nouriel Roubini, dalam opini mereka, *The Makings of a 2020 Recession and Financial Crisis*.

Mereka berasumsi, krisis keuangan global mungkin terjadi lantaran AS, meski belakangan ekonominya membaik--masih memiliki defisit fiskal besar. Sementara itu, Tiongkok masih memegang kebijakan fiskal longgar dan Eropa masih dalam masa pemulihan setelah krisis.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui belanja dan pendapatan negara. Kebijakan ini berbeda dengan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Hal itu yang kemudian menjadi poin pertama dalam indikator mereka. Mereka meyakini, kebijakan stimulus fiskal yang saat ini mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan AS di atas 2 persen kemungkinan tidak akan berlanjut.

Pada tahun 2020, stimulus akan berakhir, dan hambatan fiskal akan menurunkan pertumbuhan dari 3 persen menjadi sedikit di bawah 2 persen. Stimulus tadi yang juga menyebabkan ekonomi AS saat ini menjadi panas dengan inflasi yang melaju di atas target. Akibatnya, Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) bakal terus menaikkan suku bunga dari 2 persen hingga 3,5 persen pada 2020.

Suku bunga ini akan mendorong *yield* utang jangka pendek dan jangka panjang serta nilai tukar dolar AS. Di sisi lain, inflasi bakal terus meningkat di negara-negara ekonomi besar lainnya. Kenaikan harga minyak tak bisa dibendung dan menambah tekanan inflasi. Ujung-ujungnya, bank sentral negara maju akan mengikuti The Fed demi menormalisasi kebijakan ekonomi mereka.

Indikator selanjutnya adalah efek dari perang dagang yang dipecut AS terhadap negara-negara saingannya. Persoalannya, sikap AS ini bakal terus memicu negara lain untuk melakukan pembalasan proteksionisme. Tiongkok harus memperlambat pertumbuhan untuk mengatasi kelebihan kapasitas. Jika tidak, Tiongkok akan mengalami *hard landing* alias perlambatan ekonomi secara mendadak yang berefek pada guncangan. Satu hal yang perlu diwaspadai, pada 2020 akan terjadi pemilihan presiden AS untuk periode selanjutnya. Jika Trump kembali maju, maka penguatan ekonomi AS akan menjadi amunisinya.

Oleh karenanya, hal-hal gila yang mungkin menciptakan guncangan bagi negara lain bakal dilakukannya. Dapat dilihat bahwa Trump menyerang The Fed saat pertumbuhan ekonomi mencapai 4 persen pada kuartal dua lalu. Bayangkan, jika target ekonomi kembali tak tercapai pada 2020 nanti.

## **2). Lingkungan Internal (Nasional)**

Terkait permasalahan global di atas, dapat dijelaskan mengapa krisis ekonomi bisa berulang namun tidak akan seburuk 1998. Tentu sangat bisa salah. Yang terjadi saat ini sebenarnya adalah kembalinya dunia kepada situasi normal baru (*new normal*).

Dalam sepuluh tahun terakhir, dunia berada dalam keadaan abnormal akibat kebijakan suku bunga rendah The Fed. Sementara, situasi normal adalah sebelum kebijakan *quantitative easing* (QE) tahun 2009 dengan suku bunga The Fed di kisaran 3,5 persen.

Persoalannya, penguatan ekonomi AS dan meningkatnya defisit anggaran mendorong The Fed melakukan normalisasi. Akibatnya, negara yang transaksi defisit berjalannya (CAD) dibiayai oleh investasi portofolio bakal terkena dampak, dalam hal ini termasuk Indonesia.

Namun, apakah dampak itu akan sangat buruk? Jawabnya tidak. Sebab, yang akan dihadapi Indonesia dalam waktu ke depan adalah nilai tukar akan *volatile* dan tertekan, selain itu tingkat bunga dan inflasi diprediksi berkontraksi. Ini berakibat pada perlambatan ekonomi 2019 dan 2020.

Yang terpenting untuk diperhatikan adalah pemerintah jangan sampai mengeluarkan respons kebijakan yang salah. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya tidak panik dan mengukur semua elemen untuk mengeluarkan stimulus yang bijak. Kita menganut *flexible exchange rate* sekarang, sehingga orang sudah mengerti bagaimana mengantisipasi pelemahan rupiah.

## **3) Lingkungan Internal (Provinsi)**

- a) Perekonomian Jawa Timur Triwulan III-2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 569,39 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 403,68 triliun.



Ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2018 bila dibandingkan Triwulan III-2017 tumbuh sebesar 5,40 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,59 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 8,87 persen, diikuti Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,24 persen, serta Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial sebesar 7,99 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 8,23 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,26 persen dan Ekspor Luar Negeri sebesar 5,73 persen.

Secara q-to-q perekonomian Jawa Timur Triwulan III-2018 tumbuh 3,88 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6,45 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 5,21 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi Komponen Pengeluaran Ekspor Luar Negeri sebesar 14,22 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 12,06 persen.

Ekonomi Jawa Timur sampai dengan triwulan III-2018 (c-to-c) tumbuh 5,48 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,44 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,90 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 6,16 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi PMTB yang tumbuh 5,83 persen.

- b) Letak Jawa Timur sangat strategis, berada di perlintasan Barat dan Timur Indonesia, dan didukung oleh SDA yang berlimpah, dan mampu menjadi pasar untuk melayani permintaan Indonesia Bagian Timur. Jumlah penduduk yang besar (terbesar ke 2 setelah Jawa Barat) juga menjadi salah satu faktor produksi utama
- c) Di bidang industri Jawa Timur memiliki industri padat karya seperti industri rokok, industri tekstil, industri sepatu dan alas kaki, dan industri makanan dan minuman.

**Tabel. II. 41.**  
**Permasalahan Daerah**

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
1	Adanya Wabah Corona Virus	Adanya Wabah Corona Virus	Adanya Wabah Corona Virus
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia termasuk permasalahan gizi buruk	Peningkatan Kualitas Pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana	Regionalisasi dari ekonomi global dengan peningkatan keterkaitan antara perdagangan antar regional dan keuangan
3	Mengantisipasi Perekonomian yang bergerak dengan sangat dinamis terkait dengan kebijakan moneter AS maupun fluktuasi harga	Penigkatan Kualitas Kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidk menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih	Meningkatnya ekonomi regional akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja
4	Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan stake holder khususnya dunia usaha	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Ketenagakerjaan serta “ <i>Link and Match</i> ” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja	Negara ASEAN diharapkan akan semakin meluas dan mendalam
5	Penciptaan nilai tambah sektor pertanian, manufaktur dan jasa	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh	Isu-isu HAM dan lingkungan hidup akan meningkat dan akan semakin menarik
6	Peningkatan sektor pariwisata untuk meningkatkan kontribusi penyumbang devisa	Penguatan konektifitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan ekonomi potensial	
7	Perbaiki tenaga kerja yang tidak hanya dengan pendidikan vokasi tapi juga standar kerja dan kompetensi tenaga kerja	Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika	
8	Peningkatan ketahanan pangan dan energi khususnya energi baru dan terbarukan	Peningkatan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	
9	Kelastarian lingkungan daya sumber daya air	Peningkatan nilai tambah agroindustri, agromaritim dan daya saing koperasi dan UMKM	

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
10		Optimalisasi Kepariwisataaan	
11		Peningkatan Produktifitas Tenaga	
12		Industrialisasi berbasis ekonomi digital	
13		Peningkatan ketahanan pangan	
14		Peningkatan ketahanan energi	
15		Peningkatan ketentraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba	
16		Kesuksesan Pemiu serentak	

#### **4) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Khusus untuk Tahun 2020 dimana di seluruh dunia mengalami pandemi covid-19, yang sangat mempengaruhi pada seluruh sektor kehidupan tidak terkecuali sektor ekonomi. Dengan adanya kontraksi di sektor ekonomi, maka sangat mempengaruhi di sisi pendapatan pemerintahan daerah, yang akhirnya berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pembangunan. Dengan adanya pandemo Covid 19 pemerintah pusat membuat kebijakan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dimana 35 % dari kemampuan APBD direalokasi dan difokuskan untuk program dan kegiatan dalam penanganan Covid 19, dimana hasil realokasi tersebut di tempatkan di Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan alasan fleksibilitas penggunaan anggaran untuk penanggulangan covid 19, yang tidak bisa direncanakan sebelumnya. Dengan adanya refocusing dan realokasi tentunya banyak kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran yang optimal sehingga proses pencapaian target kinerja pasti akan sangat terganggu. Di Tahun 2021 perkiraan secara global maupun nasional dampak dari pandemi Covid 19 masih akan dirasakan, sehingga proyeksi pendapatan baik Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tidak bisa diharapkan melampaui atau bahkan sama dengan tahun sebelumnya.

Sehingga rencana belanja di Tahun 2021 juga tidak akan melampaui atau sama dengan tahun sebelumnya. Akhirnya akan berdampak pada belanja program dan kegiatan yang tidak akan bisa maksimal dan akan bermuara pada pencapaian target kinerja yang tidak maksimal juga.

**Tabel II.42.**  
**Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
1.	<b>Pendidikan</b>	<p><b>DINAS PENDIDIKAN</b></p> <p>a. Terdapat beberapa kegiatan perlombaan dengan anggaran sampai tingkat Nasional, namun dikarenakan kejuaraan sampai tingkat Provinsi maka anggaran tidak dapat diserap.</p> <p>b. Terdapat perbedaan penganggaran honorarium narasumber.</p> <p>c. Kegiatan Lomba dianggarkan sampai dengan lomba ke tingkat Nasional namun kejuaraan hanya menang sampai tingkat propinsi sehingga anggaran untuk tingkat Nasional tidak terserap.</p> <p>d. Pelaksanaan ujian Paket A, B dan C yang semula dianggarkan dua tahap namun pelaksanaannya hanya sampai dengan tahap I karena peserta UNBK sudah lulus pada tahap I.</p>	<p><b>DINAS PENDIDIKAN</b></p> <p>Kegiatan tahun yang akan datang dilaksanakan sesuai DPA yang ada dan akan mengadakan perubahan di PAK apabila ada perubahan pelaksanaan kegiatan</p>
2.	<b>Kesehatan</b>	<p><b>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b></p> <p>a. Adanya Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun sebesar Rp. 26.132.356.000,00 dan terserap sebesar Rp. 18.518.516.567,22. Pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai premi asuransi peserta PBID sebanyak 20.188 orang dan perkiraan jumlah penduduk yang belum terdaftar peserta BPJS sebanyak 73.300 orang. Dalam pelaksanaannya</p>	<p><b>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b></p> <p>a. Rapat koordinasi baik Forum Kepesertaan, Tim Koordinasi Tingkat Kota serta BPJS Kesehatan.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>masyarakat ber KTP Kota Madiun dan masyarakat yang sudah memiliki kartu BPJS/KIS tertunggak tidak bisa secara otomatis menjadi anggota BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Madiun.</p> <p>b. Selain itu adanya potongan pembayaran langsung oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp. 3.484.493.683,00 sehingga mengurangi serapan dari pagu yang sudah direncanakan.</p> <p><b>RSUD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil survey akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari target Paripurna, tercapai Madya</li> <li>2. Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit belum optimal</li> <li>3. Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisionis, Dietisien Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan Tenaga Administrasi di ruangan</li> <li>4. Implementasi SIMRS belum optimal</li> <li>5. Jaminan Kesehatan Nasional             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>RSUD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 melalui:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit baik penambahan sarana prasarana baru maupun untuk mengganti sarana prasarana yang sudah rusak atau perlu peremajaan;</li> <li>b. Pemenuhan kekurangan Sumber Daya Manusia, baik jumlah maupun jenis tenaganya melalui beberapa cara yaitu melaksanakan reposisi dan/atau rekrutmen pegawai non PNS BLUD, mengusulkan rekrutmen PNS, dan menerima mutasi pegawai dari luar RSUD;</li> <li>c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit untuk memastikan tersedianya sarana prasarana kesehatan yang aman, bermutu dan layak pakai serta efisien sehingga meminimalkan resiko yang terkait penggunaan sarana</li> </ol> </li> </ol>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>BPJS Kesehatan dimana rumah sakit harus melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya agar tidak terjadi “defisit” tanpa meninggalkan kualitas layanan atau memberikan layanan yang sub-standar</p> <p>b. Setiap tahun terdapat hutang klaim pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan RSUD Kota Madiun terhadap pasien peserta BPJS, sehingga kemungkinan hutang BPJS juga akan semakin besar dan dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan di RSUD Kota Madiun</p>	<p>prasarana yang ada;</p> <p>d. Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan melalui kegiatan <i>assessment</i> internal dan kegiatan monitoring dan evaluasi;</p> <p>e. Membentuk Unit SIM RS serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIM RS untuk mendukung pelayanan.</p> <p>2. Komitmen seluruh SDM mulai dari pimpinan sampai dengan seluruh staf dan unsur pendukung terhadap implementasi SNARS Edisi 1.1 sehingga bisa memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien/patient safety dan meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan;</p> <p>3. Mengoptimalkan budaya organisasi melalui kelompok budaya kerja untuk meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik;</p> <p>4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan ;</p> <p>5. Menyelenggarakan Forum Pertemuan dan Focus Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai penerima layanan untuk memberikan saran, pendapat dan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan sehingga berperan aktif dalam mengawasi kinerja pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang telah ditetapkan;</p> <p>6. Melakukan evaluasi penilaian kinerja secara terus menerus melalui kegiatan rapat evaluasi, pertemuan dan audit dalam</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Madiun baik antar bidang maupun lintas sektor dengan <i>stake holder</i> serta Dewan Pengawas.</p>
3.	<p><b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b></p>	<p><b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b></p> <p>a. Kegiatan Pengadaan Pompa Banjir tahun anggaran 2019 tidak dapat terserap karena barang yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan barang import dari Amerika dan mengingat barang tersebut datangnya bulan maret tahun 2020 maka pengadaannya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena melewati tahun anggaran dan melebihi dari 50 hari kalender setelah melewati tahun anggaran. Apabila dilanjutkan maka akan menyalahi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah</p>	<p><b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b></p> <p>a. Pengadaan pompa banjir diusulkan di tahun anggaran selanjutnya</p>
4.	<p><b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b></p>	<p><b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b></p> <p>a. Terdapat permasalahan gagal tender pada RTH Cokrobasonto (Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota) dikarenakan rekanan/penyedia tidak memenuhi kualifikasi serta rencananya akan dilakukan retender waktu tidak mencukupi</p> <p>b. RTH saat ini masih terasa kurang</p> <p>c. Pada tahun 2019 dari 430 unit rumah yang tidak layak masih terdapat 20 unit rumah yang tidak menerima bantuan RTLH disebabkan beberapa hal antara lain : target sasaran penerima bantuan yang tidak masuk pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57/HUK/2017</p>	<p><b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b></p> <p>a. RTH cokrobasonto tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2020</p> <p>b. kedepan akan dilakukan pembangunan secara bertahap</p> <p>c. warga melakukan perbaikan sendiri serta adanya penolakan dari penerima bantuan yang menolak program tersebut</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		tentang Penetapan data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017	
5.	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<p><b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b></p> <p>1. Meningkatnya jumlah penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat data sampai dengan bulan Desember 2019 diantaranya :</p> <p>a. Pelanggaran Reklame (baik Rusak, melanggar dan ijin sudah habis) sebanyak 2. 520 buah.</p> <p>b. Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan jumlah pelanggaran 516 kasus.</p> <p>c. Anak jalanan sejumlah 277 orang ; dan</p> <p>d. Anak Bolos Sekolah sejumlah 114 pelajar.</p> <p>2. Adanya perubahan iklim dengan kemarau panjang yang mengakibatkan intensitas kebakaran tinggi dengan jumlah kasus kebakaran sebanyak 86 kasus kejadian kebakaran.</p> <p>3. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dimana semenjak urusan Pemadam Kebakaran bukan lagi menjadi tugas dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang beralih ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdampak berkurangnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.</p>	<p><b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b></p> <p>1. Seiring kemajuan teknologi yang rentan pelanggaran maka langkah-langkah yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diantaranya :</p> <p>a. Dengan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun yang tidak mengizinkan pemasangan reklame secara fisik karena akan diganti dengan videotron, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan patroli kawasan pemasangan reklame di wilayah Kota Madiun. Sehingga pelanggaran reklame dapat diatasi dan diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penertiban.</p> <p>b. Sehubungan dengan implementasi Panca Karya Program Kegiatan Bapak Walikota Madiun, utamanya karya membangun. Banyak kebijakan yang dikeluarkan Bapak Walikota Madiun, diantaranya pembangunan taman dan infrastuktur Kota Madiun. Sehingga perlu penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk ditertibkan dan berjualan di tempat yang telah disediakan. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan jajaran samping untuk penertiban pra yustisi pelanggaran Perda dan Perwal.</p>



No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p> <p>Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang rincian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Disebutkan bahwa urusan Kebakaran beralih menjadi tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga berdampak pada berkurangnya personil BPBD sampai saat ini.</p>	<p>c. Untuk mengatasi pelanggaran anak jalanan Satuan Polisi Pamong Praja mengoptimalkan patroli wilayah Kota Madiun utamanya di perempatan traficlight di wilayah Kota Madiun. Sehingga setiap penertiban anak jalanan diberikan pembinaan dan pengarahan untuk tidak mengamen di lampu merah dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</p> <p>d. Dengan mengoptimalkan patroli dan jejaring sosial untuk mendapatkan informasi pelanggaran anak sekolah yang bolos sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi penertiban anak sekolah yang bolos sekolah di jam belajar. Dan dilakukan pembinaan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolahan melalui Dinas Pendidikan dan memanggil orang tua pelajar.</p> <p>2. Dengan banyaknya kasus kebakaran di Kota Madiun maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemadaman kejadian kebakaran sesuai SOP dan melakukan pencegahan dan pelatihan pemadaman kebakaran.</p> <p>. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah mengoptimalkan petugas yang ada dan memanfaatkan Relawan sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang direkrut dari warga masyarakat peduli kebencanaan dan kemanusiaan guna melaksanakan Piket Siaga Bencana di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p> <p>Dengan mengoptimalkan petugas yang ada dan memanfaatkan relawan sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang direkrut dari warga masyarakat peduli kebencanaan dan kemanusiaan untuk piket siaga bencana di posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>
6.	<b>Sosial</b>	<p><b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b></p> <p>a. Belum optimalnya sinergi Komda PPKS, masih terdapat beberapa celah penghambat dalam penanganan PPKS seperti mekanisme rujukan ke RSJ Spesialis.</p> <p>b. Terbatasnya daya tampung UPT Panti Sosial Provinsi, sehingga menyulitkan daerah untuk menyalurkan Orang Terlantar, dimana kewenangan panti ada di provinsi bukan di kab/kota.</p> <p>c. Masih ada fakir miskin yang belum mendapat bantuan. Kecepatan update data daerah belum dapat diakomodir oleh Pusat, sehingga secara administrasi fakir miskin sudah tercatat dalam DTKS dan layak mendapat bantuan tetapi belum mendapatkan bantuannya karena penetapan penerima bantuan dari Pusat belum dapat seiring dengan proses finalisasi dari daerah.</p>	<p><b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b></p> <p>a. Meningkatkan sinergi Komda PPKS sehingga masing-masing berperan maksimal dalam penanganan PPKS.</p> <p>b. Koordinasi dengan provinsi untuk menambah daya tampung panti.</p> <p>c. Pemberian bantuan sosial mengikuti syarat dan ketentuan masing-masing bantuan, terus diupayakan pemutakhiran data agar masyarakat yang terdata dalam DTKS tepat sasaran</p>
7.	<b>Ketenaga kerjaan</b>	<p><b>DINAS TENAGA KERJA</b></p> <p>Masih banyaknya Jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3.776 orang yang didominasi oleh mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan sejumlah 2.735 orang</p>	<p><b>DINAS TENAGA KERJA</b></p> <p>Dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan kerjasama dengan perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan diharapkan dapat mengurangi pengangguran terbuka di Kota Madiun</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
8.	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</b>	<p><b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b></p> <p>Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG)</p>	<p><b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b></p> <p>Pengusulkan Peraturan Daerah dan Atau Peraturan Walikota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG) serta menyusun Profil gender kerjasama dengan pihak ketiga</p>
9.	<b>Pangan</b>	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b></p> <p>a. Semakin terbatasnya lahan untuk pertanian, peternakan dan perikanan sehingga produksi pangan domestik semakin menurun dan hanya mencukupi sepertiga dari konsumsi pangan utama penduduk.</p> <p>b. Masih perlunya ditingkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui kegiatan sosialisasi B2SA, lomba cipta menu, promosi ketahanan pangan, serta jambore ketahanan pangan dan pemilihan duta keamanan pangan sekolah di tahun 2020.</p> <p>c. Belum termanfaatnya produk hasil pekarangan sebagai sumber pendapatan keluarga.</p>	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b></p> <p>a. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan dari sisi akses dan distribusi pangan melalui kegiatan koordinasi dewan ketahanan pangan, survey harga pangan, serta dari sisi produksi pangan rumah tangga yaitu kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dan karang kitri pada Tahun 2020.</p> <p>b. Selain itu perlu dilakukan pemantauan konsumsi pangan masyarakat melalui kegiatan penyusunan neraca bahan makanan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan survey pola pangan harapan pada Tahun 2020.</p> <p>c. sehingga perlu dikembangkan pemasaran produk olahan hasil pekarangan melalui kegiatan pameran yang diakomodasi dari Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan pada Tahun 2020.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
10.	Pertanahan	<p><b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b></p> <p>a. Dengan Pelaksanaan Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta didukung oleh kegiatan baik yang bersifat layanan maupun sosialisasi masih terdapat berbagai macam permasalahan terutama konflik pertanahan dan rekomendasi ijin</p> <p>b. Mengingat Kota Madiun adalah Kota yang strategis dalam iklim investasi wilayah Jawa Timur Bagian Barat, terdapat permintaan rekomendasi ijin pertanahan cukup tinggi yakni 25 rekomendasi ijin (2 ijin lokasi dan 23 IPPT). Dengan pemberian 25 rekomendasi ijin tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun mengacu regulasi (Peraturan Walikota Madiun No.9 Tahun 2017 tentang Ijin lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah) agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010 – 2030</p>	<p><b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b></p> <p>a. Terkait permasalahan konflik pertanahan diperlukan pendekatan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik antara pemerintah Kota Madiun dan warganya serta dibutuhkan fasilitasi yang optimal agar tidak terjadi konflik pertanahan secara berkelanjutan. Pada tahun 2019 ini telah dilakukan penertiban dan pembongkaran bangunan illegal di 2 lokasi dan dengan total sekitar 54 KK hanya 28 KK yang bersedia pindah ke Rusunawa dan yang lainnya memilih untuk menempati hunian yang lain</p> <p>b. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan layanan tersebut demi memberikan kemudahan/kenyamanan bagi investor serta dapat mensejahterakan masyarakat Kota Madiun</p>
11.	Lingkungan Hidup	<p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>a. Meningkatnya pencemaran baik tanah, air maupun udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya;</p> <p>b. Meningkatnya volume harian sampah sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi dimasyarakat (pendatang musiman), industri/ kegiatan usaha ,dll;</p>	<p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>a. Dengan makin banyaknya industri maka Dinas Lingkungan Hidup harus lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap industri-industri tersebut mulai dari awal pendirian sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan ;</p> <p>b. Sarana dan prasarana sudah banyak di penuhi dan meningkatnya volume sampah dapat ditekan karena banyak berdiri bank-bank sampah baik yang</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>c. Kurang optimalnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan sehingga terjadi pencemaran baik air dan udara;</p> <p>d. Adanya usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan wajib usaha;</p> <p>e. Adanya badan usaha/instansi yang belum memenuhi mengelola limbah B3 sesuai prosedur</p>	<p>sudah berbadan hukum atau belum, dengan sarana prasarana yang tersedia kinerja meningkat, kerjasama yang baik dengan satgas kebersihan yang masuk ke TPS serta pekerja profesional di TPA yang memilah sampah. Sehingga sampah dari tahun ke tahun yang masuk ke TPA di Winongo dapat di tekan;</p> <p>c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan/pelestarian lingkungan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan pendekatan serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Dinas terkait dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan yang terbaik berkenaan dengan lingkungan hidup Kota Madiun agar semakin baik dan sehat</p> <p>d. Menghadapi permasalahan adanya badan usaha/instansi yang belum mempunyai dokumen lingkungan maka ditingkatkan sosialisasi , pembinaan dan pengawasan serta pendekatan kepada pelaku usaha agar segera memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>e. Adanya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan limbah B3. Tahun 2018 sudah banyak yang melakukan koordinasi pada DLH tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga akan lebih intensif melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas terkait
12.	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<p><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) belum maksimal.</li> <li>2. Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga banyak kepindahan penduduk yang tidak terdeteksi.</li> <li>3. Integrasi dan pemanfaatan data yang masih tergantung pada koneksi jaringan SIAK Daerah ke pusat dikarenakan semua data harus melalui server pusat, padahal kegiatan pelayanan di Daerah harus tetap dilaksanakan.</li> <li>4. Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya</li> </ol>	<p><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi dan pelayanan keliling. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi kepada masyarakat kota Madiun mengenai pentingnya kelengkapan dokumen Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil. Sosialisasi dilaksanakan secara rutin baik melalui media pertemuan langsung dengan mengundang RT, RW, wakil kelurahan, tokoh masyarakat, sosialisasi melalui media cetak dan sosialisasi melalui media elektronik</li> <li>b. Layanan Pecel Andok (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi dan Dokumen Kependudukan). Adalah layanan Keliling Dinas Dukcapil melalui mobil keliling yang menjangkau semua kelurahan dan kecamatan se-Kota Madiun. Di layanan Pecel Andok masyarakat bisa mendapatkan layanan kependudukan di hari Sabtu/Minggu, baik pengurusan KK maupun perekaman biometrik untuk KTP-elektronik. Inovasi ini utamanya ditujukan bagi penduduk Kota Madiun yang berdomisili di luar kota dan kembali ke Kota Madiun di akhir pekan.</li> </ol> </li> <li>2. mengadakan pendataan penduduk non permanen melalui RT/RW di masing-masing kelurahan.</li> <li>3. secara rutin mengadakan koordinasi dengan pusat berkaitan dengan jaringan, aplikasi dan regulasi pelaksanaan pelayanan adminduk dan capil</li> </ol>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			4. setiap triwulan mengadakan validasi data dengan kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan keakuratan data kependudukan
13.	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<p><b>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b></p> <p>1. Adanya kegiatan yang tergantung dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi yaitu Kegiatan Pramuka Saka Kencana (Pertida dan Pertinas), Lomba Tribina Tingkat Provinsi dan Lomba UPPKS Tingkat Provinsi. Pada Tahun 2019 di tingkat provinsi tidak melaksanakan kegiatan tersebut sehingga di Kota Madiun juga tidak melaksanakan.</p> <p>2. Adanya honor kader dalam pemberian KIE di Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK) tidak terserap karena sudah dimasukkan anggaran ke poin reward kader kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat.</p> <p>3. Adanya petunjuk teknis pemakaian dana BOKB (DAK) yang tidak fleksibel sesuai dengan kebutuhan Kota Madiun yaitu menu kegiatan sudah ditentukan oleh BKKBN Pusat sehingga tidak dapat terserap dengan maksimal.</p>	<p><b>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b></p> <p>1. Berkoodinasi dengan Provinsi terkait penyelenggaraan kegiatan sehingga kegiatan yang dianggarkan bisa selaras.</p> <p>2. Mengusulkan petunjuk teknis yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan Kota Madiun ke BKKBN Provinsi dan Pusat.</p>
14.	<b>Perhubungan</b>	<p><b>DINAS PERHUBUNGAN</b></p> <p>1. Pada kegiatan Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dilakukan realisasi anggaran dikarenakan kegiatan ini menyesuaikan Kementerian Perhubungan, pada tahun 2019 Kementerian Perhubungan tidak melakukan akreditasi pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>2. Anggaran belanja pegawai dalam hak Uang Kinerja Kegiatan tidak optimal dikarenakan banyaknya</p>	<p><b>DINAS PERHUBUNGAN</b></p> <p>1. Anggaran akreditasi akan dimunculkan kembali pada anggaran 2020.</p> <p>2. Pada tahun 2020 jumlah pejabat struktural di Dinas Perhubungan Kota Madiun sudah tercukupi.</p> <p>3. Untuk penilaian lomba Wahana Tata Nugraha akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>jabatan struktural yang kosong.</p> <p>3. Harga BBM non subsidi yang fluktuatif menyebabkan anggaran yang tersedia tidak dapat diserap dengan maksimal, akan tetapi hal ini telah sesuai dengan aturan karena jumlah liter BBM untuk kendaraan dinas telah diatur dan tidak dapat melebihi jumlah yang ditetapkan.</p> <p>4. Untuk penilaian lomba Wahana Tata Nugraha pada tahun 2019 terjadi perubahan sistem penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Semula direncanakan penilaian dilakukan sebanyak 2 kali di masing-masing daerah kemudian berubah menjadi terpusat di Jakarta dengan mengundang Pemerintah Daerah untuk melakukan paparan di Jakarta.</p>	
15.	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>1. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Madiun;</p> <p>2. Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;</p> <p>3. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;</p> <p>4. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;</p> <p>5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;</p>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>1. Melakukan pengintegrasian sistem <i>e-government</i>;</p> <p>2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publikasi informasi ke masyarakat;</p> <p>4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih harmonis dengan media massa dan instansi terkait;</p> <p>5. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;</p> <p>6. Menyediakan saluran informasi dan komunikasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota;</p> <p>7. Mengoptimalkan PPID;</p>



No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>6. Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Madiun;</p> <p>7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;</p> <p>8. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;</p> <p>9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju <i>e-commerce</i>;</p> <p>10. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya <i>Smart City</i>;</p> <p>11. Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika</p>	<p>8. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat</p>
16.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p><b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b></p> <p>a. Kurangnya Sosialisasi tentang Fasilitasi Permodalan bagi UMKM</p> <p>b. Masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah.</p> <p>c. Masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa.</p> <p>d. Masih kurangnya fasilitas kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha besar.</p> <p>e. Belum tersedianya ruang Pamer Produk UMKM</p>	<p><b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b></p> <p>a. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro telah melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun terkait dengan fasilitasi permodalan dengan bunga lunak, diantaranya yaitu kredit UMKM dari PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank Pemerintah dan Perguliran Dana Pinjaman PKBL (Program Kerja Bina Lingkungan) dari PT. INKA.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>b. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro telah menyelenggarakan berbagai macam bimbingan manajemen kepada para pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD maupun bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui berbagai macam pelatihan diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan pembuatan makanan olahan</li> <li>2. Pelatihan pembuatan <i>handycraft</i></li> <li>3. Pelatihan batik tingkat lanjutan</li> <li>4. Pelatihan internet marketing</li> <li>5. Pelatihan manajerial</li> <li>6. Pelatihan kewirausahaan</li> </ol> <p>c. Beberapa koperasi sudah bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa perusahaan-perusahaan induknya antara lain, KOPINKA, Kopkar Siyvia Cendikia, Primkopad Yon 501, KPRI RSU Sudono, Kopkar RSI, Kopegtel, Koperasi Cahaya PLN, Koperasi Sejahtera PLN. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro terus melakukan upaya pembinaan dan pengarahan pada waktu pelatihan, sosialisasi maupun Rapat Anggota Koperasi untuk memperluas kegiatan usahanya diluar unit simpan pinjam seperti penyediaan barang dan jasa sehingga akan meningkatkan pendapatan dan SHU yang diterima oleh anggota sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan anggota.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>d. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun telah berupaya untuk memfasilitasi kerjasama antara UMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar, yaitu menjalin kerjasama dengan Toko Modern dan Perhotelan diantaranya Carrefour, PT. INKA, Hotel Aston dan Hotel Merdeka. Disamping itu Pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, yang juga mengatur masalah kemitraan antar KUMKM dengan pelaku usaha besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha.</p> <p>e. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro telah mengajukan permohonan bantuan CSR ke PT. INKA untuk merenovasi salah satu gedung yang ada di Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun menjadi gedung pameran produk unggulan UMKM.</p>
17.	<p><b>Penanaman modal</b></p>	<p><b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b></p> <p>Kurangnya pemahaman calon investor akan adanya insentif penanaman modal</p>	<p><b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b></p> <p>Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk mengakses informasi mengenai insentif pada halaman awal <i>Online Single Submission</i> (OSS), disitu pelaku usaha dapat mengetahui insentif apa saja yang akan diperoleh.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
18.	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Madiun memiliki banyak atlit yang potensial untuk dikembangkan bakat dan minat olahraganya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi dikarenakan untuk pembinaan dan pelatihan kepada para atlit belum terlalu optimal, maka diperlukan pembinaan dan pelatihan agar lebih mengasah keahliannya agar lebih bisa berprestasi baik tingkat provinsi, regional maupun nasional ;</li> <li>2. Belum adanya penganggaran untuk pembinaan dan pelatihan 10 cabang olahraga unggulan.</li> </ol>	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun memfasilitasi para atlit dengan melengkapi sarana prasarana olahraga secara bertahap pada setiap cabang olahraga serta memberikan sarana prasarana akomodasi bagi para atlit yang akan bertanding tingkat provinsi, regional maupun nasional ;</li> <li>2. Telah disusunnya penganggaran Tahun 2020 untuk pembinaan dan pelatihan 10 cabang olahraga unggulan.</li> </ol>
19.	<b>Statistik</b>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;</li> <li>2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;</li> <li>4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah</li> </ol>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan BPS dalam penyediaan data statistik daerah;</li> <li>2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang terstruktur dengan seluruh Perangkat Daerah dalam pengumpulan dan penyusunan data statistik daerah, sehingga tercipta data terbuka pemerintah;</li> <li>3. Melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kewenangan urusan statistik.</li> </ol>
20.	<b>Persandian</b>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;</li> <li>2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;</li> </ol>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian;</li> <li>2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam bidang persandian.</li> </ol>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;</p> <p>4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah</p>	
21.	Kebudayaan	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b></p> <p>1. Belum adanya pelimpahan wewenang baik aset maupun kepegawaian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sedangkan di dalam APBD telah disiapkan anggarannya baik untuk gaji Tenaga Kontrak dan Gaji Tenaga Upahan nya serta pemeliharaan GOR, Stadion dan Wisma Haji.</p> <p>2. Kota Madiun memiliki kurang lebih ada 146 benda/bangunan yang diduga cagar budaya, namun benda/bangunan tersebut ada kendala dalam pelestarian dan penjagaannya dikarenakan masih menunggu proses ketetapan Kepala Daerah untuk benda/bangunan tersebut menjadi cagar budaya yang dipelihara dan dirawat oleh Pemerintah Kota Madiun, sehingga belum optimal dalam pemeliharaan cagar budaya yang ada di Kota Madiun yang bisa lebih menarik wisatawan</p>	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b></p> <p>1. Seiring dengan telah dilimpahkannya wewenang dalam kepengurusan GOR, Stadion dan Wisma Haji dan telah dilantiknya Pejabat yang berwenang mengurus GOR, Stadion dan Wisma Haji maka telah kami siapkan penganggaran untuk penggajian pegawai nya baik Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan serta anggaran untuk pemeliharaannya.</p> <p>2. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan penelitian keabsahan benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang masih tersisa untuk ditetapkan sebagai benda/bangunan cagar budaya yang bisa dilestarikan.</p>
22.	Perpustakaan	<p><b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b></p> <p>a. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan;</p> <p>b. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Perpustakaan;</p>	<p><b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b></p> <p>a. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programer pengolahan;</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>c. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan;</p> <p>d. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi;</p> <p>e. Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal.</p>	<p>c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan;</p> <p>d. Meningkatkan Jumlah Bahan Pustaka berupa konvensional dan Digital baik kualitas maupun kuantitas.</p>
23.	<b>Kearsipan</b>	<p><b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b></p> <p>a. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan maupun Kearsipan.</p> <p>b. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Kearsipan</p> <p>c. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kearsipan</p> <p>d. Belum semua perangkat daerah memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis belum mendapatkan penanganan secara khusus;</p> <p>e. Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan personil sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan;</p> <p>f. Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan;</p> <p>g. Kemampuan SDM pengelolaan kearsipan belum optimal</p>	<p><b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b></p> <p>a. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programer pengolahan</p> <p>c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya kearsipan.</p>
24.	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b></p> <p>a. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM perikanan;</p> <p>b. Kurangnya penerapan teknologi perikanan;</p> <p>c. Kurangnya akses permodalan;</p>	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b></p> <p>a. Dalam upaya meningkatkan minat dan pengetahuan SDM perikanan dilakukan bimtek/sosialisasi dan studi banding yang mengikutsertakan masyarakat petani ikan serta petugas perikanan. Petani ikan akan dilatih mengenai teknologi</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>d. Kurang optimalnya kelembagaan perikanan</p>	<p>budidaya ikan serta teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui kegiatan pengembangan olahan berbahan dasar ikan dan lomba masak ikan</p> <p>b. Penerapan teknologi perikanan khususnya teknologi perbenihan ikan di Balai Benih Ikan akan lebih dimaksimalkan sesuai dengan prosedur dan teknik budidaya yang benar, misalnya pengelompokan ikan/ grading berdasarkan ukuran ikan yang lebih baik, perhitungan kepadatan ikan dalam kolam untuk efektifitas penyerapan makanan dan pembakaran energi bagi ikan sehingga mengoptimalkan ukuran/ bobot ikan, pengukuran PH dan kualitas air kolam secara periodik, seleksi induk ikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah produksi benih yang dihasilkan. Adapun penerapan teknologi budiadaya dan pengolahan ikan di masyarakat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis/ pelatihan diantaranya bimtek kolam bundar, penananganan rantai dingin produk perikanan untuk menjaga kualitas dan kesegaran ikan saat dikirim dan sebagainya. Pendampingan dan monitoring ke pembudidaya ikan dan penangkap ikan akan dilakukan secara rutin untuk updating data, untuk melakukan pembinaan/ anjagsana kepada petani ikan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mendukung kegiatan usaha perikanan melalui pemberian rekomendasi kredit bagi petani ikan. Selain itu juga memberikan dukungan sarana kios, kafe dan kolam ikan dengan biaya sewa yang cukup terjangkau</p> <p>d. Peningkatan peran kelembagaan perikanan dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan kelompok pembudidaya ikan dalam kegiatan penyuluhan/ sosialisasi yang diadakan di dinas. Selain itu akan dilakukan upaya peningkatan kelas terhadap kelompok petani ikan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha secara bersama-sama dengan tujuan peningkatan produktivitas sekaligus peningkatan kesejahteraan yang lebih baik</p>
25.	Pariwisata	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA</b></p> <p>1. Tidak terlaksananya event Gebyar Batik dan Fashion Show.</p> <p>2. Di Kota Madiun belum banyak memiliki obyek wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan untuk berkunjung di Kota Madiun, sehingga diperlukan promosi kepariwisataan terutama di dalam Kota Madiun yang mampu menarik minat wisatawan luar kota untuk berkunjung ke Kota Madiun. Sehingga yang harus dilakukan adalah meningkat dan menimbulkan ketertarikan yang besar baik bagi</p>	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b></p> <p>1. Tahun 2020 direncanakan dilaksanakan gebyar batik dengan format berbeda yaitu Batik Fashion on The Street.</p> <p>2. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun menyelenggarakan event promosi di dalam Kota Madiun salah satunya adalah “Madiun Tempo Doeloe” untuk menggali sejarah Kota Madiun agar bisa menarik wisatawan luar Kota Madiun untuk menyaksikan dan menikmati acara tersebut</p>



No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>masyarakat Kota Madiun sendiri maupun di luar Kota Madiun dengan menghadirkan destinasi wisata yang baru dan menarik.</p>	
26.	Pertanian	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>  <b>Bidang Pertanian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas sumberdaya lahan pertanian semakin menurun dikarenakan struktur tanah yang telah jenuh dengan bahan kimia anorganik atau pupuk kimia/ buatan, maupun pestisida (obat tanaman) anorganik yang dapat mempengaruhi struktur, tekstur dan kesuburan tanah. Penggunaan bahan kimia dapat memperkeras tekstur tanah, mengganggu keseimbangan PH tanah, serta membunuh mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanah</li> <li>2. terdapat kendala dalam pembayaran penggunaan abonemen, yaitu terjadi kesalahpahaman antara petani dan dinas mengenai sistem pembayaran penggunaan sumur pompa dalam yang merupakan sarana/ prasarana produksi pertanian yang dibangun dengan biaya APBD Pemerintah Kota Madiun TA. 2016. Petani merasa keberatan dalam pembayaran abonemen listrik PLN untuk sumur pompa dalam</li> <li>3. Masih lemahnya sistem alih teknologi pertanian</li> </ol>	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>  <b>Bidang Pertanian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah membatasi penggunaan bahan kimia dan mengimbangi dengan penggunaan bahan organik dengan tetap melaksanakan kegiatan dan pendampingan pembuatan pupuk organik serta penggunaan agens hayati maupun pestisida nabati. Penggunaan pupuk organik yang dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah, memperbanyak daya jerap air, dan memperbanyak suplai makanan bagi mikroorganisme tanah. Sedangkan penggunaan agens hayati yaitu mikroorganisme (nematode, jamur, bakteri dsb) yang bermanfaat dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit tanaman serta penggunaan pestisida nabati (dari rimpang toga, jarak, alang-alang dsb) yang lebih ramah lingkungan, dapat menggantikan penggunaan pestisida kimia</li> <li>2. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah berupaya melakukan mediasi yang menghadirkan petani, PLN, dinas dan pejabat terkait. Berdasarkan hasil mediasi, terdapat wacana bahwa pembayaran</li> </ol>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>4. Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan senantiasa memberikan fasilitasi dalam pengajuan permohonan kredit petani dengan memberikan rekomendasi kredit pertanian kepada petani yang memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit modal usaha tani</p> <p>5. Masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik dan lemahnya daya saing. Belum optimalnya fungsi gapoktan sebagai unit usaha petani menyebabkan masih lemahnya nilai tawar petani</p> <p>6. Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke industri dan perumahan Alih fungsi lahan di perkotaan tidak dapat dihindari dalam suatu perkembangan wilayah perkotaan</p> <p>7. Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak dapat diprediksi Fluktuasi iklim yang tidak dapat diprediksi sedikit banyak akan mempengaruhi produktivitas tanaman dan produksi tanaman pangan</p> <p>8. Kemampuan SDM petani masih rendah, sehingga pola produksi belum berorientasi bisnis Kemampuan petani dapat ditingkatkan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan/ bimbingan</p>	<p>abonemen listrik akan diupayakan didanai APBD Pemerintah Kota Madiun, namun sampai saat ini masih belum ada ketetapan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu untuk ke depannya, penyerahan bantuan kepada masyarakat hendaknya disertai pemberian informasi yang jelas mengenai hak kewajiban penerima. Selain itu pemberian bantuan pompa air yang menggunakan mesin diesel dirasa lebih efektif dan lebih dapat diterima serta tidak memberatkan petani</p> <p>3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan tetap melakukan kegiatan penyuluhan rutin kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan), sebagai upaya untuk memberikan informasi teknologi terbaru dan sarana transfer teknologi kepada petani</p> <p>4. tetap dilaksanakan pendampingan kepada gapoktan yang mengelola dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), sehingga dana tersebut dapat lebih bermanfaat terutama sebagai pinjaman modal bagi anggota gapoktan</p> <p>5. perlu dilakukan pengoptimalan fungsi gapoktan yang tidak hanya sebagai tempat bertukar ide dan permasalahan pertanian namun juga sebagai unit bisnis pertanian. Sebagai contoh pengoptimalan penggunaan RMU (Rice Milling Unit) dan lantai jemur bagi anggota</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>teknis serta melalui sosialisasi dan penyuluhan dari tenaga penyuluh lapangan pertanian mengenai teknologi baru</p> <p><b>Bidang Peternakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya penerapan teknologi peternakan tepatguna dan rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Peningkatan penerapan teknologi peternakan serta teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilakukan melalui kegiatan transfer teknologi peternakan kepada masyarakat peternak, pedagang daging dan susu dalam kegiatan penyuluhan/ bimtek/ pelatihan dan studi banding peternakan</li> <li>2. Muncul penyakit hewan menular yang bersifat emergensi. Penyakit hewan menular yang bersifat emergensi dapat dikendalikan dengan pemeriksaan rutin hewan/ ternak yang dibudidayakan di masyarakat serta pemeriksaan hewan/ ternak yang masuk di Kota Madiun melalui monitoring lalu lintas ternak</li> <li>3. Belum optimalnya pengawasan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Pengoptimalan pengawasan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dilakukan dengan pemeriksaan <i>post mortem</i> (ternak yang akan diembelih) dan <i>ante mortem</i></li> </ol>	<p>kelompok tani sehingga dapat menghasilkan gabah kering yang lebih berkualitas dan produk beras siap jual sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. perlu dilakukan pemetaan lahan produktif yang akan dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga lokasi yang telah ditetapkan tersebut tidak boleh dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Adapun pemetaan dan penetapan lahan LP2B masih sedang berproses dan akan mengacu pada Perda RTRW tentang lahan pertanian abadi. Penetapan LP2B hendaknya memperhatikan tata letak lokasi yang tidak rawan untuk dialihfungsikan, infrastruktur pertanian yang telah terbangun, serta tingkat kesuburan tanah di wilayah tersebut</li> <li>7. Untuk mengatasi dampak kerugian gagal panen karena anomali iklim seperti banjir, kekeringan maupun ledakan organisme pengganggu tanaman, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah meluncurkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Adapun biaya premi asuransi tersebut 80% ditanggung oleh pemerintah sedangkan petani hanya diwajibkan membayar 20%-nya. Namun untuk Kota Madiun 20% biaya premi tersebut akan dibayar menggunakan dana APBD II Pemerintah Daerah Kota Madiun melalui kegiatan</li> </ol>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>(daging hasil sembelihan) pada pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan. Sedangkan pengawasan produk daging hasil pemotongan yang dilakukan di luar RPH, dilakukan melalui kegiatan periksa ulang daging harian di Pasar Besar dan Pasar Sleko Kota Madiun</p> <p>4. Ancaman penurunan populasi ternak sapi Populasi ternak cenderung semakin menurun setiap tahunnya karena semakin terbatasnya lahan dan peran kepentingan masyarakat dengan usaha peternakan di pemukiman terhadap limbah dan polusi udara yang dihasilkan</p> <p>5. Masih belum tertibnya peredaran obat hewan dan pakan ternak di masyarakat Pengawasan peredaran obat dan pakan ternak telah dilakukan dengan mengambil sample obat dan pakan di toko/kios dan poultry shop secara periodik</p>	<p>yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun TA. 2019 kepada pihak penyedia jasa layanan yang ditunjuk yaitu PT. Jasindo</p> <p>8. perlu dilakukan pendampingan dalam kegiatan produksi pertanian untuk menghasilkan produk sekunder melalui teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, misalnya produksi beras organik atau beras sehat yang siap dilepas di pasar. Konsistensi kegiatan penyuluhan dan kontinuitas kegiatan pendampingan kepada petani, harus dipertahankan demi perubahan dan perbaikan pola pikir petani terhadap pemanfaatan teknologi baru</p> <p>9. Penyuluhan tidak hanya bersifat teknis budidaya namun juga akan menyangkut bidang pengolahan hasil peternakan seperti pembuatan kefir, yogurt, abon, nugget, dendeng. Selain itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus memfasilitasi pengajuan kredit peternakan melalui penerbitan rekomendasi permohonan kredit usaha peternakan</p> <p><b>Bidang Peternakan</b></p> <p>1. Pemeriksaan kesehatan hewan pada ternak besar meliputi pemeriksaan gigi dan mulut, air liur, mata, kebersihan kandang, serta pemberian vaksinasi pada unggas. Pencegahan penyakit hewan peliharaan telah dilakukan sejak tahun 2018 dengan memberikan</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>vaksin rabies gratis. Selain itu penanganan pengaduan/ pelaporan dari masyarakat harus dilakukan dengan tepat dan cepat agar mencegah terjadinya penyebaran wabah penyakit</p> <p>2. Pengawasan produk peternakan juga dilakukan dengan pengambilan dan pemeriksaan sample makanan seperti bakso, mie ayam, rawon, soto menggunakan <i>pork screening test</i> untuk diketahui kandungan babi atau kehalalannya</p> <p>3. Oleh karena itu perlu dikembangkan usaha peternakan ramah lingkungan/ bebas polusi limbah. Peternakan ramah lingkungan dapat dikembangkan melalui pemberian pakan fermentasi yang mampu mengurangi bau kotoran ternak, peningkatan kebersihan kandang dan perlakuan/ pemberian prebiotik terhadap limbah peternakan, sehingga keberlanjutan usaha peternakan di Kota Madiun dapat terjaga</p> <p>4. Untuk pemeriksaan tanggal kadaluarsa dan kesesuaian label dengan isi cukup diberikan teguran lisan atau teguran tertulis. Sedangkan khusus pemeriksaan kandungan sample pakan ternak dikirim ke laboratorium pengawasan mutu pakan di Provinsi</p> <p>5. Dengan mengotimalkan peran petugas lapangan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani dan peternak, serta</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>penggunaan teknologi pertanian dan peternakan ramah lingkungan, diharapkan keberlanjutan kegiatan pertanian dan peternakan di Kota Madiun akan terjaga, sehingga target kinerja tahun yang akan datang dapat tercapai</p>
27.	Perdagangan	<b>DINAS PERDAGANGAN</b>	<p><b>DINAS PERDAGANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun relatif stabil dengan nilai diatas 5 persen. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Karesidenan Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun merupakan yang tertinggi. (data demografi ekonomi dan social budaya Kota Madiun Tahun 2018) sehingga sebagai Dinas yang mengurus urusan perdagangan maka mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dengan mengetahui jumlah pertumbuhan ekonomi melalui data perputaran uang yang beredar di Kota Madiun.</li> <li>2. Dengan adanya beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Kota Madiun, antara lain API ( Akademi Perkereta Apian ) akan ikut memacu dalam Pertumbuhan Ekonomi.</li> <li>3. Dengan berdirinya beberapa Mall seperti Sun City, Madiun Plaza, Timbul Jaya Plaza, Carrefour, President Plaza, Lawu Plaza semakin mengisyaratkan status Kota Madiun ini sebagai Kota Perdagangan sehingga menambah dan membuat iklim Investasi di kota ini menjadi tumbuh subur. Maka tidak heran jika di Kota ini banyak ditemukan Mall dan Pusat Perdagangan, begitu juga sentra Kuliner dan Hiburan yang semakin menjamur,</li> </ol>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			dan mengisyaratkan Kota ini seakan tidak ada matinya. Sarat akan aktivitas perekonomian yang semakin dinamis berubah mengikuti arah kemajuan zaman
28.	<b>Perindustrian</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b> Permasalahan yang sampai saat ini dihadapi adalah merubah sebagian mindset pengusaha untuk melakukan inovasi usaha sesuai perkembangan.	<b>DINAS TENAGA KERJA</b> Adapun solusi saat ini memberikan pemberdayaan, pembinaan serta melakukan promosi guna mengembangkan mindset pengusaha.
29.	<b>Transmigrasi</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b> a. Target penempatan transmigrasi ditentukan oleh pemerintah propinsi b. Penempatan transmigrasi semakin menurun karena adanya otonomi daerah c. Diutamakan disektor pertanian	<b>DINAS TENAGA KERJA</b> a. Mengirim data calon transmigrasi ke propinsi b. Memberikan rekomendasi kepada peserta transmigrasi yang memenuhi syarat setelah adanya verifikasi dari pemerintah provinsi
30.	<b>Unsur Staf</b>	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b> a. Hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kota Madiun yang mendapat kategori B pada Tahun 2019. Pada dasarnya nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 mengalami kenaikan dari nilai 67,21 pada Tahun 2018 menjadi 68,20 pada Tahun 2019. Namun secara kategori nilai hasil evaluasi bernilai tetap yaitu berkategori B. Secara Umum Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan Sistem Sakip sebagai pelaksanaan manajemen kinerja, namun penerapan tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan efektifitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja pada perumusan sasaran strategis kualitas indikator kinerja serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b> a. menyesuaikan seluruh dokumen perencanaan kinerja RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tetap mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti orientasi pada manfaat yang langsung dirasakan masyarakat ( <i>result oriented</i> ), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan ( <i>integrated development plan</i> ) serta mekanisme cascade kinerja. b. Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah sehingga penyusunan IKU mestinya mengacu pada kinerja tersebut. c. Cascade kinerja agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD, sehingga penyusunan IKU semestinya mengacu kepada Cascade kinerja tersebut. d. Menyempurnakan aplikasi Simonev, E-Sakip dan E-Planning sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, disamping itu perlu

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>b. Jumlah dan kualitas tenaga analisa kelembagaan yang belum memadai</p> <p>c. Jumlah dan kualitas tenaga analisa jabatan yang belum memadai</p> <p>d. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting anjab, ABK dan Penataan Kelembagaan</p> <p>e. masih belum terpenuhinya tenaga administrasi dan keuangan;</p> <p>f. masih kurangnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. masih belum terpenuhinya tenaga teknis untuk publikasi produk hukum;</p> <p>h. masih belum terpenuhinya tenaga teknis untuk penyuluhan hukum</p>	<p>mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada baik yang terkait dengan kinerja, keuangan maupun penilaian individu, agar memudahkan manajemen maupun Pegawai dalam penerapan manajemen kinerja.</p> <p>e. Menyempurnakan penyajian laporan kinerja Perangkat Daerah Kota Madiun sehingga penyajian analisis terhadap tidak tercapainya target sudah memadai dan memanfaatkan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan</p> <p>f. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal dengan meningkatkan kapasitas evaluator inpektorat sehingga mampu memberikan saran perbaikan yang konstruktif kepada Peraturan Daerah.</p> <p>g. Mendorong penerapan budaya kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan menyusun indikator kinerja yang selaras dengan kinerja Organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan budaya kinerja ini sebaiknya dilakukan dengan pelaksanaan review kinerja berjenjang secara berkala pada seluruh Perangkat daerah</li> <li>- perlu meningkatkan kualitas dan memberdayakan SDM yang tersedia secara optimal</li> </ul>
31.	<p><b>Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD</b></p>	<p><b>PELAYANAN LEGISLATIF</b></p> <p>Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun sudah berjalan tiga tahun. Ada beberapa masukan, perlu adanya penyesuaian besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD</p>	<p><b>PELAYANAN LEGISLATIF</b></p> <p>Sekretariat DPRD bekerja sama dengan pihak ketiga (Penyedia Jasa Penilai) telah melaksanakan appraisal sebagai dasar penyesuaian tunjangan dimaksud. Hasil penyesuaian terhadap tunjangan tersebut berlaku mulai Tahun Anggaran 2020</p>



No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
32.	<b>Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<p><b>PENGAWASAN</b></p> <p>a. Bukti pendukung parameter sub unsur SPIP belum sepenuhnya dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang dimonitoring, sehingga Tim monitoring Pelaksanaan SPIP kesulitan dalam melaksanakan karena kekurangan data dukung;</p> <p>b. Perangkat Daerah belum mendokumentasikan kegiatan yang termasuk dalam sub unsur SPIP dengan baik dan terstruktur;</p> <p>c. Tim Assesor APIP masih perlu peningkatan kualitas untuk persiapan sebagai Tim penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p>	<p><b>PENGAWASAN</b></p> <p>a. Mengoptimalkan sub unsur yang menjadi bahan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan mendokumentasikan dengan baik terhadap bukti pendukung atas pemenuhan parameter sub unsur SPIP dalam bentuk softcopy dan hardcopy secara rapi dan terstruktur;</p> <p>b. Mengadakan Bimbingan Teknis guna mengoptimalkan kualitas Tim Assesor APIP untuk persiapan sebagai Tim penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p>
33.	<b>Perencanaan</b>	<p><b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b></p> <p>Dalam melaksanakan urusan perencanaan, BAPPEDA terkendala dengan terbitnya Peraturan baru yang terkait dengan perencanaan. Dengan adanya peraturan baru tersebut, berdampak pada dokumen-dokumen perencanaan secara menyeluruh, baik dokumen perencanaan tingkat kota maupun tingkat OPD. Seperti yang terjadi pada Tahun 2017 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dengan adanya perubahan tersebut, maka terdapat</p>	<p><b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b></p> <p>Dengan adanya perubahan tersebut maka harus diikuti penyesuaian yang sangat cepat dikarenakan terbatasnya waktu pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran. Jika tidak, maka akan menghambat proses pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hambatan pada masa transisi/perubahan dokumen tersebut telah dilakukan pemecahan masalah (solusi) yaitu dengan memberikan perintah merubah dokumen tersebut secara segera dan melakukan panduan dalam pengerjaannya (pengendalian dan monitoring), serta koordinasi yang intensif antara BAPPEDA dengan OPD terkait.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		penyesuaian RPJMD Kota Madiun dan tentunya diikuti oleh perubahan Renstra Perangkat Daerah	
34.	Keuangan	<p><b>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Kegiatan Perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 220.950.000,00 dan mengalami realisasi sebesar Rp. 61.011.515,00. Hal ini disebabkan karena proses kerjasama dengan pihak ke III dalam penilaian appraisal aset daerah dengan mendatangkan tenaga ahli tidak dapat dilaksanakan.</li> <li>2. Kurangnya kwantitas SDM petugas pungut</li> <li>3. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan</li> <li>4. Belum optimalnya penggalian potensi terhadap pajak daerah</li> <li>5. Kurangnya akurasi data pajak daerah</li> </ol>	<p><b>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solusi atas pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :</li> <li>- Kegiatan pelayanan perpajakan daerah di tempat pelayanan pajak daerah terpadu dengan harapan dapat membantu penyelesaian pengajuan permohonan oleh wajib pajak</li> <li>- Kegiatan sosialisasi penyebarluasan informasi perpajakan daerah, dengan sasaran bahwa penyebarluasan informasi sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan daerah.</li> </ul> <p>b. Solusi terhadap belum optimalnya penggalian potensi terhadap pajak daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengamanan penerimaan pajak daerah dengan hasil yang diharapkan sebagai upaya untuk pengamanan target penerimaan pajak daerah</li> <li>- Kegiatan pemberian hadiah gebyar undian PBB dan wajib pajak prestasi merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran yang tepat waktu</li> </ul>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>c. Solusi terhadap keakurasian data pajak daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pemeliharaan basis data obyek pajak merupakan upaya untuk mewujudkan pemutakhiran data obyek pajak daerah serta tersedianya dokumen formulir pendaftaran SPTPD dan peremajaan</li><li>- Kegiatan pemeliharaan basis data PBB merupakan upaya untuk mewujudkan keakuratan data subyek dan obyek pajak dalam basis data SPOP, LSPOP, Peta dan pemutakhiran basis data SISMIOP.</li></ul> <p>d. Pada tahun anggaran berikutnya akan kami cermati dalam perencanaan kerjasama agar realisasi anggaran bisa sesuai capaian kerja yang diharapkan.</p> <p>e. Kwantitas SDM petugas pungut yang ada merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi pajak diatas target yang ada, dengan tuntutan selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Sesuai tingkat kondisi kwantitas SDM di Pemerintah Kota Madiun maka untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Mengambil langkah yaitu memaksimalkan kwantitas SDM yang ada semaksimal mungkin dengan pembagian tugas secara tepat dan terbagi habis.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
35.	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<p><b>KEPEGAWAIAN</b></p> <p>Untuk Anggaran Kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2019 sebesar Rp. 885.534.300,00 hanya dapat terserap sebesar Rp. 263.333.593,00 yaitu hanya sebesar 29,73 %. Hal tersebut disebabkan Jadwal untuk Pengadaan CPNS tahun 2019 dari BKN mundur dari rencana jadwal semula, sehingga rangkaian dari kegiatan Pengadaan CPNS untuk pelaksanaan Test Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (SKB) baru dapat dilaksanakan di Tahun 2020</p>	<b>KEPEGAWAIAN</b>
36.	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b></p> <p>Dalam pengumpulan data maupun proses penelitian/kajian, perlu melibatkan pihak-pihak lain. Berkoordinasi dengan pihak lain terkadang tidak selancar seperti yang direncanakan. Hal tersebut membuat proses pengumpulan data dan proses penelitian/kajian agak sedikit lama dan sulit</p>	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b></p> <p>Selanjutnya diharapkan adanya hubungan antarlembagaan lebih ditingkatkan, sehingga dalam proses koordinasi dalam rangka pengumpulan data/penelitian/kajian dapat berjalan lancar sesuai rencana.</p>
37.	<b>Kesatuan Bangsa &amp; Politik</b>	<p><b>Badan Kesatuan Bangsa &amp; Politik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="571 1559 1015 2003">1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama tidak dapat diserap secara maksimal karena FKUB ada dana hibah dan bentuk kegiatan hampir sama oleh karena itu yang diserap dari anggaran hibah sedangkan di kegiatan tidak diserap untuk efisiensi penggunaan anggaran.</li> <li data-bbox="571 2008 1015 2307">2. Ada kegiatan yang isinya hanya Uang Kinerja Kegiatan, karena UKK sudah tercukupi di kegiatan lain sehingga tidak diserap, sedangkan yang anggarannya masih/tidak serap itu sisa UKK di masing-masing</li> </ol>	<p><b>Badan Kesatuan Bangsa &amp; Politik</b></p> <p>Untuk Perencanaan kedepannya lebih ditingkatkan dan untuk pengajuan anggaran lebih teliti lagi sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti diatas untuk kedepannya</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>kegiatan (ada 1 kegiatan yang isinya hanya UKK yang seharusnya sudah dihilangkan pada waktu RDP dengan DPRD ternyata waktu keluar DPA masih muncul sehingga anggaran tidak diserap yaitu Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)</p>	
38.	Kecamatan	<p><b>PENYELENGGARAAN KECAMATAN</b></p> <p>a. Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian dari warga masyarakat semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat matrealistis dan individualis.</p> <p>b. Kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat disebabkan karena kurangnya sumberdaya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang masih kurang baik dari segi kuantitas dan kualitas, masih kurang optimalnya koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/kelurahan dengan masyarakat, kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan masih kurangnya fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p><b>PENYELENGGARAAN KECAMATAN</b></p> <p>a. Adapun Solusi yang diambil yaitu diusahakan menumbuhkembangkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, termasuk meningkatkan interaksi sosial diantara sesama warga masyarakat, melalui program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan BBGRM, kegiatan lomba-lomba di kelurahan, kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya dan lain-lain,</p> <p>b. Untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan meningkatkan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan baik dari kuantitas maupun kualitas, mengoptimalkan koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/kelurahan dengan masyarakat mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan menambah ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
39.	BUMD	<p><b>PENGELOLAAN BUMD PDAM</b></p> <p>a. Semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan. Hal ini disebabkan karena tingkat pelayanan pada akhir tahun 2019 telah mencapai 96,10 %, hampir mencapai titik jenuh karena telah mendekati 100 %. Kondisi Kota Madiun yang sangat mudah mengambil air tanah membuat sebagian besar masyarakat menggunakan sumur dangkal sebagai alternative dalam mendapatkan air bersih. Sehingga semakin berat untuk mendapatkan pelanggan baru.</p> <p>b. Tingginya koefisien jam puncak (c=2,5). Koefisien jam puncak menunjukkan meningkatnya pemakaian air pada saat jam puncak hingga mencapai 2,5 kali rata-rata pemakaian air. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tekanan air pada saat jam puncak walaupun kedua reservoir sudah dioptimalkan, sehingga pada saat jam puncak akan mengalami sedikit penurunan tekanan air terutama di daerah kritis.</p> <p><b>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun</b></p> <p>a. Jaringan kantor seperti Kantor Cabang sangat diperlukan untuk lebih mendekatkan kepada pelayanan, dan memperluas daerah operasional BPR, selama ini kantor Operasional yang</p>	<p><b>PENGELOLAAN BUMD PDAM</b></p> <p>a. Solusi untuk mengatasi semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan yaitu:</p> <p>b. Bekerjasama dengan pengembang perumahan (developer) untuk pemasangan jaringan perpipaan dan sambungan rumah baru.</p> <p>c. Mengadakan penyuluhan akan pentingnya air bersih bagi kesehatan kepada masyarakat kota Madiun.</p> <p>d. Mengadakan program pasang baru gratis.</p> <p>e. Disamping dengan membangun sumur baru yang diharapkan bisa menambah kapasitas produksi, PDAM Melaksanakan rehabilitasi jaringan pipa distribusi untuk meningkatkan debit air sehingga kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi setiap saat.</p> <p><b>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun</b></p> <p>a. Meningkatkan kepuasan kepada customer dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan nasabah dengan sistem tangkap bola.</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>dimiliki adalah 1 ( Satu ) Kantor Pusat, dan 8 (Delapan) Kantor Kas semua di Kota Madiun belum memiliki Kantor Cabang.</p> <p>b. SDM adalah merupakan pilar utama dalam menjaga eksistensi suatu BPR untuk bisa terus tumbuh dan eksis dalam industri perbankan, peran SDM sangat besar dalam rangka pencapaian perusahaan.</p> <p>c. Banyaknya kompetitor sebagai pesaing seperti Bank Umum yang membiayai untuk pangsa pasar BPR, sama-sama BPR, Lembaga Keuangan Non Bank seperti Koperasi, Danamon KSP, Pegadaian dan Lembaga Pembiayaan Keuangan, begitu pula lembaga tidak resmi seperti ijon, rentenir.</p> <p><b>PD. ANEKA USAHA</b></p> <p>a. Bidang SDM Perilaku pegawai dalam pelayanan kepada konsumen belum maksimal, kedisiplinan dan ketrampilan pegawai masih rendah</p> <p>b. Bidang Menejemen Sistem pelaporan keuangan belum sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku</p> <p>c. Bidang Sarana dan Prasarana/Peralatan Bangunan bekas cucian mobil belum dimanfaatkan.</p>	<p>b. Meningkatkan pemasaran / promosi BPR baik dengan penyebaran dan pengenalan langsung oleh petugas kepada sasaran masyarakat yang potensial, guna meningkatkan Image/ Citra BPR lebih baik lagi, juga memiliki Edukasi / Literasi Keuangan.</p> <p>c. Memberikan imbalan suku bunga yang memadai sesuai Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ) dalam produk Tabungan dan Deposito.</p> <p>d. Mengupayakan untuk Ekspansi jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang baru.</p> <p>e. Inovasi dan pengembangan produk baru.</p> <p>f. Mengupayakan penurunan NPL ( Non Performing Loan) dengan berbagai cara seperti melakukan pengeplangan agunan, pelelangan agunan melalui KPKNL dan melakukan gugatan ke pengadilan</p> <p><b>PD. ANEKA USAHA</b></p> <p>a. Telah dilakukan pelatihan kedisiplinan pegawai melalui pembinaan, pelatihan akuntansi guna penyempurnaan sistem pelaporan, pelatihan perpajakan dan pelatihan-pelatihan lain yang dapat mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai;</p> <p>b. Memotivasi kepada pegawai SPBU untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada konsumen;</p> <p>c. Telah dilakukan penggantian mesin dispenser untuk menjamin kualitas dan ketepatan takaran BBM;</p> <p>d. Segera diupayakan pemanfaatan lokasi bekas cucian mobil dengan menggandeng pihak ketiga agar dapat memberi manfaat dan menambah pendapatan Perumda Aneka Usaha</p>

### **BAB III**

#### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGANDAERAH**

Pada saat Rancangan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2021 ini dirumuskan, maka sesuai dengan agenda kerja nasional yang telah ditetapkan dibidang perencanaan pembangunan, bahwa sesungguhnya pada tingkat nasional pun pada saat ini juga sedang disusun Rancangan Awal dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka jika mencermati Tema serta Prioritas Nasional Tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan landasan bagi penyusunan Rancangan Awal dokumen RKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sasaran, arah kebijakan dan program strategis dan prioritas pemerintah yang akan menjadi dasar untuk dituangkan ke dalam Rancangan Awal dokumen RKP Tahun 2021, bersumber dari dokumen Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2021.

Jika demikian, maka titik berat pembangunan yang menjadi target dalam RKP Tahun 2021 adalah mendorong peningkatan investasi dan daya saing industri pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan disini memiliki makna, bahwa sesungguhnya pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan periode 5 (lima) tahun ke 4 dalam agenda kerja RPJPN ternyata belum dapat menyentuh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal. Dalam konteks inilah, maka pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 akan disebar terutama di wilayah kantong kemiskinan, tertinggal dan terbelakang. Hal ini sejalan dengan amanat dari Rancangan Awal RKP Tahun 2021, yang salah satu sasaran strategisnya adalah mendorong pertumbuhan perekonomian yang tangguh dan berkualitas dengan target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 berada pada kisaran 4,5-5,5%.



### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

#### **1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia.**

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di angka 5%, meski mengalami pelemahan di tahun 2021. Bank Dunia dalam laporan terbarunya berjudul *Weathering Growing Risk* memprediksi, ekonomi Indonesia bakal tumbuh sebesar 5,2% pada 2019. Kemudian, pertumbuhan ekonomi RI diprediksi melemah menjadi 5,1% di tahun 2020, dan kembali menguat menjadi 5,2% di tahun 2021. Pertumbuhan itu ditopang oleh konsumsi yang tetap kuat karena inflasi masih rendah dan pasar tenaga kerja kuat. Bank Dunia mengatakan, posisi fiskal diperkirakan akan terus membaik, sehingga memungkinkan investasi menguat. Utamanya ketika proyek infrastruktur berjalan.

Pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diproyeksikan akan tumbuh 5% pada 2019. Pun bakal terus tumbuh di tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 5,5% dan 6%. Meskipun bakal lebih lambat, pertumbuhan investasi diperkirakan tetap kuat, terutama setelah pemilihan umum dan membaiknya sentimen bisnis karena usulan kebijakan peningkatan FDI. Namun, angka itu masih lebih kecil ketimbang capaian investasi tahun 2018. Data Bank Dunia menyebut, pertumbuhan investasi tahun 2018 mencapai 6,7%. Sedangkan sektor ekspor, Bank Dunia memprediksi ekspor akan lemah di tahun 2019. Bahkan pertumbuhannya negatif sebesar -1% pada tahun ini. Namun bakal lebih meningkat sebesar 1,5% tahun 2020 dan 2,8% tahun 2021.

Selain ekspor, pertumbuhan impor akan semakin melemah. Sama seperti ekspor, impor bakal tumbuh di tahun-tahun setelahnya, yakni 2% di tahun 2020 dan 3,7% di tahun 2021. Untuk defisit transaksi berjalan, diprediksi akan semakin berkurang dalam waktu dekat, dari 2,8% dari PDB tahun 2019.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan perekonomian Indonesia pada 2020 akan mencapai antara 5,1%-5,5% meskipun ketidakpastian global semakin meningkat. Bank Indonesia mengejar stabilitas untuk mendorong pertumbuhan yang kami perkirakan akan mencapai 5,1% sampai 5,5% (yoy) pada 2020.

Bank Indonesia optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2%-5,6% pada tahun berikutnya yaitu 2021. Bank juga ingin menyampaikan optimisme pada 2021 seperti yang diharapkan akan ada reformasi struktural dalam perekonomian Indonesia. Bank Indonesia menilai program pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu infrastruktur yang lebih terintegrasi antara pusat ekonomi regional termasuk zona industri dan kawasan pariwisata merupakan kunci pertumbuhan.

Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia. Bank Indonesia menyebutkan lebih dari 17.000 pulau di Indonesia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang besar apabila terdapat infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti peningkatan peran investor swasta dan *innovative financing*, peningkatan kualitas persiapan proyek infrastruktur (*feasibility study*), serta kolaborasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat hingga daerah.

Sementara untuk Bank Indonesia, akan berkontribusi melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang akomodatif, mendorong penerbitan surat berharga komersial dan pemanfaatan instrumen lindung nilai (*hedging*), serta memberikan pendampingan pada pemerintah daerah. Bank Indonesia juga menghimbau kepada pihak swasta untuk turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sebab sumber pembiayaan telah mencapai jumlah besar yang tidak lagi dapat dipenuhi oleh sektor publik saja.

Sumber keuangan tradisional dari sektor perbankan menjadi terbatas karena kendala kehati-hatian, jadi sudah saatnya bagi swasta untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

## **2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.**

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2020 diproyeksikan masih kuat dan kondusif pada rentang 5,3% s.d. 5,8% dengan tingkat inflasi yang terjaga berdasarkan informasi BI Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2019 tercatat sebesar 5,32% (yoy) lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,02% (yoy). Sepanjang tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tersebut ditopang oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan informasi komunikasi yang secara konsisten melebihi pertumbuhannya di skala Nasional. Pertumbuhan ini didukung pula oleh inflasi yang terjaga dengan baik. Hingga November 2019, inflasi Jatim tercatat sebesar 2,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional (3,00%), dan sampai dengan akhir 2019 akan konsisten dibawah nasional yaitu pada level 2,1%.

Kontribusi Jawa Timur terhadap nasional didukung pula oleh kontribusi devisa Jawa Timur yang tidak hanya berasal dari dunia usaha namun juga dari remitansi Pegawai Migran Indonesia (PMI). Devisa Hasil Ekspor (DHE) Jatim tercatat sebesar 94,8% dari nilai eksportnya, lebih tinggi di atas nasional yang sebesar 90%. Begitupun dengan remitansi PMI Jawa Timur yang merupakan kontributor terbesar remitansi nasional dengan tren yang terus meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa ekspor maupun remitansi Jawa Timur menjadi sumber utama pasokan valas Indonesia.

Walaupun demikian, berbagai tantangan masih akan dihadapi oleh perekonomian Jawa Timur ke depan. Diantaranya, pertumbuhan kredit Jatim yang relatif lebih rendah dibanding Nasional, peningkatan cukai rokok yang disinyalir akan menurunkan konsumsi dan produksi rokok, perlunya upaya peningkatan produktivitas sejalan dengan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta neraca perdagangan Luar Negeri Jawa Timur yang masih defisit.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, sinergi dan inovasi menjadi kunci untuk mendorong akselerasi perekonomian Jawa Timur. Dari sisi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur, Bank Indonesia akan mengerahkan 190 klaster komoditas pangan dan komoditas unggulan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam mendorong kerjasama antar daerah.

Selain itu, Bank Indonesia juga akan memanfaatkan big data untuk akselerasi dan elaborasi informasi Jawa Timur serta integrasi platform digital farming yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas di sektor pertanian.

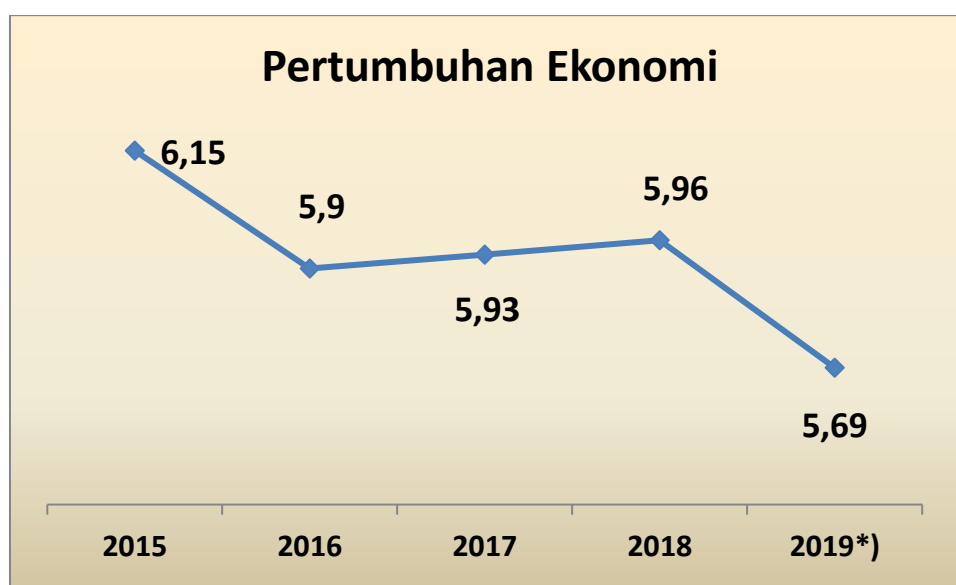
Implementasi QRIS sebagai standar QR Code pembayaran di Indonesia juga akan terus diperkuat. Mendukung program One Pesantren One Product (OPOP) melalui rencana tindak lanjut rencana kerja Koperasi Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP).

Selain itu, Gubernur Jawa Timur memberikan keterangan. “Pekerjaan Rumah Jawa Timur seperti kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, ketimpangan antara desa dan kota serta IPM Jawa Timur yang masih di bawah IPM Nasional memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan dan dunia usaha. Harapannya, pertumbuhan ekonomi juga mampu mendorong pengurangan angka kemiskinan.”.

Gubernur Jawa Timur beranggapan, dengan berpindahnya ibukota negara ke Kalimantan Timur, Jawa Timur memiliki peluang untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi. Kita bisa mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti sektor peternakan melalui kerjasama dengan provinsi lain.

### 3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah.



Sumber :BPS, Tahun 2020  
\*\*) angka sangat sementara

**Gambar III. 1.**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun**

Dari kondisi tersebut, prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2020 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

**Tabel III. 1.**  
**Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2019**

Indikator	Realisasi				Proyeksi
	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,93	5,96	5,69	3,07
PDRB ADHB (milyar rupiah)	11.077,47	12.140,20	13.190,38	14.208,21	14.543,72
PDRB ADHK (juta rupiah)	8.916,29	9.486,00	9.488,07	10.635,46	10.825,63
PDRB per Kapita (juta rupiah)	63,69	68,9	74,31	79,70	81,23
TPT (%)	5,12	4,68	3,96	4,01	4,03
IPM	80,01	80,13	80,33	80,88	80,91
Inflasi	2,25	4,78	2,71	2,20	4±1
Kemiskinan	5,16	4,94	4,49	4,35	4,39

Sumber : Bappeda Kota Madiun, Tahun 2019

\*) Data Sementara

\*\*) Target/Proyeksi

#### **4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021**

Pengamat Ekonomi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hanya tumbuh 4,9 persen, cenderung lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di angka 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi dinilai akan kembali membaik (rebound) pada tahun 2021. Pertumbuhan Indonesia cenderung melambat salah satunya akibat nilai investasi Indonesia yang tidak progresif.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Republik Indonesia sering kali menyampaikan untuk meningkatkan nilai investasi yang diimplementasikan dalam bentuk Omnibus Law. Bahkan rencana ini disampaikan dua kali, dalam pidato kemenangannya pada Pemilu 2019 dan pidato di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Oktober tahun 2019.

Pengamat Ekonomi meyakini, posisi investasi saat ini memang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung tidak progresif bahkan stagnan di angka 5 persen. Kehadiran UU omnibus law sebagai payung hukum Indonesia untuk menggenjot geliat sektor investasi bisa mencampakkan aturan-aturan yang menghantam masuknya investasi ke Indonesia.

Dalam hal ini, investasi rendah lantaran disebabkan banyak faktor di antaranya Undang-Undang perpajakan Indonesia kurang mendukung, otonomi daerah belum lagi pasar tenaga kerja yang cenderung kurang baik terhadap investasi Indonesia. Namun demikian, nilai investasi Indonesia tidak sangatlah buruk bila dibandingkan dengan nilai investasi di negara-negara ASEAN, nilai investasi Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30 persen. Posisi ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Sehingga, jalan satu-satunya untuk menaikkan nilai Investasi bagi Indonesia adalah dengan cara memperbaiki aturan yang menghambat masuknya Investasi asing ke Indonesia. Ini berkaitan lantaran Indeks Hambatan Investasi Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia. Langkah ini lebih penting dari pada pemerintah sibuk dengan narasi menurunkan tarif pajak, untuk menanggulangi dampak perang dagang 30 perusahaan Tiongkok yang mengalihkan investasinya ke Vietnam.

Sebetulnya yang harusnya lebih diwaspadai adalah investor yang bersaing dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia. Perlu ada pembenahan di sektor UMKM Indonesia untuk menjadikan sektor UMKM di Indonesia lebih tangguh sehingga ketahanan Ekonomi Indonesia akan lebih terjaga.

Sehubungan dengan tantangan dan prospek perekonomian tersebut, maka diharapkan Kota Madiun dapat menjaga stabilitas perekonomian daerah. Untuk menjaga stabilitas perekonomian tersebut, maka salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan selalu meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong perkembangan ekonomi daerah yang berbasis pada penguatan ekonomi lokal, perdagangan dan industri yang kuat serta peningkatan peranan UMKM dan tidak ketinggalan peningkatan pelayanan publik di Kota Madiun, serta menjaga laju inflasi yang terkendali. Upaya-upaya pengendalian inflasi secara terbatas melalui TPID, penyediaan informasi suplai dan demand yang lebih luas, perbaikan infrastruktur dan kapasitas produksi, serta peningkatan produksi dan produktivitas.

Dengan berbagai hal diatas, maka prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

**Tabel III. 2.**  
**Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2019 s/d 2022**

	2019**)	Proyeksi		
		2020	2021	2022
<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	5,69	3,07	5,93	6,02
<b>PDRB ADHB (juta rupiah)</b>	14.108,32	14.543,72	14.973,94	15.451,46
<b>PDRB ADHK (juta rupiah)</b>	10.623,81	10.825,63	11.036,19	11.517,38
<b>PDRB per Kapita (juta rupiah)</b>	79,7	81,23	83,52	86,63
<b>TPT (%)</b>	4,01	4,03	3,86	3,52
<b>IPM</b>	80,88	80,91	81,04	81,17
<b>Inflasi (%)</b>	2,2	4±1	4±1	4±1
<b>Kemiskinan</b>	4,35	4,39	4,23	4,06

Sumber: Proyeksi Bappeda Kota Madiun, 2020

\*\*) angka sangat sementara

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah memuat tentang kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Madiun berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

#### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD Kota Madiun terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun 2020 diperlukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dengan tingkat yang moderat pada Tahun 2021 diperkirakan 5,93 persen;
2. Tingkat inflasi Daerah pada Tahun 2021 diperkirakan sebesar  $4\% \pm 1\%$  persen.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut.



**Tabel III. 3.**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020**  
**Serta Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2021**  
**(Format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)**

	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>173.235.929.827,80</b>	<b>230.608.717.369,14</b>	<b>230.847.977.146,73</b>	<b>252.048.754.413,59</b>	<b>235.504.941.000,00</b>	<b>222.856.453.140,00</b>
1.1.1.	Pajak daerah	64.045.559.079,36	75.224.831.585,44	83.454.704.361,41	91.077.191.655,45	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	16.762.538.293,00	18.407.218.016,50	19.138.960.648,50	20.301.325.919,00	18.762.439.600,00	16.113.951.740,00
1.1.3.	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.172.031.994,51	13.320.249.415,39	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	14.934.446.400,00	14.934.446.400,00
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	81.255.800.460,93	123.656.418.351,81	114.888.909.563,23	126.028.525.498,59	116.808.055.000,00	106.808.055.000,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>825.046.400.710,00</b>	<b>727.016.255.956,00</b>	<b>776.598.262.990,91</b>	<b>823.129.463.583,00</b>	<b>802.001.763.000,00</b>	<b>733.238.206.000,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pusat</b>	<b>758.944.056.206,00</b>	<b>646.473.881.834,00</b>	<b>678.417.066.007,00</b>	<b>737.079.907.650,00</b>	<b>736.520.570.000,00</b>	<b>667.854.513.000,00</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>717.561.434.206,00</b>	<b>638.973.881.834,00</b>	<b>678.417.066.007,00</b>	<b>681.537.181.650,00</b>	<b>671.425.330.000,00</b>	<b>609.482.074.000,00</b>
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	34.049.572.850,00	27.325.331.947,00	25.390.798.853,00	16.076.390.385,00	22.423.248.000,00	25.144.766.000,00
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	18.880.139.043,00	18.680.122.868,00	67.464.332.495,00	52.685.578.633,00	31.021.504.000,00	19.978.801.000,00
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	12.409.333.957,00	13.308.934.159,00	13.119.146.000,00	13.939.983.813,00	13.927.277.000,00	16.415.026.000,00
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	511.375.289.000,00	502.392.070.000,00	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00	527.916.797.000,00	476.135.673.000,00
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	140.847.099.356,00	77.267.422.860,00	70.689.542.010,00	76.239.204.819,00	76.136.504.000,00	71.807.808.000,00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	41.382.622.000,00	7.500.000.000,00	0,00	55.542.726.000,00	65.095.240.000,00	58.372.439.000,00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>66.102.344.504,00</b>	<b>80.542.374.122,00</b>	<b>98.181.196.983,91</b>	<b>86.049.555.933,00</b>	<b>65.481.193.000,00</b>	<b>65.383.693.000,00</b>
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.431.714.504,00	79.825.524.122,00	79.153.128.616,00	84.934.976.933,00	64.366.614.000,00	64.366.614.000,00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.670.630.000,00	716.850.000,00	19.028.068.367,91	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.189.280.000,00</b>	<b>19.399.600.000,00</b>	<b>19.399.600.000,00</b>
1.3.1.	Hibah	0,00	0,00	0,00	19.189.280.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>998.282.330.537,80</b>	<b>957.624.973.325,14</b>	<b>1.007.446.240.137,64</b>	<b>1.094.367.497.996,59</b>	<b>1.056.906.304.000,00</b>	<b>975.494.259.140,00</b>

**Tabel III. 4.**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2021**  
**(Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)**

KODE	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>173.235.929.827,80</b>	<b>230.608.717.369,14</b>	<b>230.847.977.146,73</b>	<b>252.048.754.413,59</b>	<b>235.504.941.000,00</b>	<b>222.856.453.140,00</b>
1.1.1	Pajak daerah	64.045.559.079,36	75.224.831.585,44	83.454.704.361,41	91.077.191.655,45	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	16.762.538.293,00	18.407.218.016,50	19.138.960.648,50	20.301.325.919,00	18.762.439.600,00	16.113.951.740,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.172.031.994,51	13.320.249.415,39	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	14.934.446.400,00	14.934.446.400,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	81.255.800.460,93	123.656.418.351,81	114.888.909.563,23	126.028.525.498,59	116.808.055.000,00	106.808.055.000,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>717.561.434.206,00</b>	<b>638.973.881.834,00</b>	<b>678.417.066.007,00</b>	<b>681.537.181.650,00</b>	<b>671.425.330.000,00</b>	<b>609.482.074.000,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak	34.049.572.850,00	27.325.331.947,00	25.390.798.853,00	16.076.390.385,00	22.423.248.000,00	25.144.766.000,00
	Dana bagi hasil bukan pajak	18.880.139.043,00	18.680.122.868,00	67.464.332.495,00	52.685.578.633,00	31.021.504.000,00	19.978.801.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	511.375.289.000,00	502.392.070.000,00	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00	527.916.797.000,00	476.135.673.000,00
1.2.3	Dana Alokasi khusus	140.847.099.356,00	77.267.422.860,00	70.689.542.010,00	76.239.204.819,00	76.136.504.000,00	71.807.808.000,00
1.2.4	Dana Bagi hasil cukai	12.409.333.957,00	13.308.934.159,00	13.119.146.000,00	13.939.983.813,00	13.927.277.000,00	16.415.026.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>107.484.966.504,00</b>	<b>88.042.374.122,00</b>	<b>98.181.196.983,91</b>	<b>160.781.561.933,00</b>	<b>149.976.033.000,00</b>	<b>143.155.732.000,00</b>
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	19.189.280.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	64.431.714.504,00	79.825.524.122,00	79.153.128.616,00	84.934.976.933,00	64.366.614.000,00	64.366.614.000,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	41.382.622.000,00	7.500.000.000,00	0,00	55.542.726.000,00	65.095.240.000,00	58.372.439.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.670.630.000,00	716.850.000,00	19.028.068.367,91	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>998.282.330.537,80</b>	<b>957.624.973.325,14</b>	<b>1.007.446.240.137,64</b>	<b>1.094.367.497.996,59</b>	<b>1.056.906.304.000,00</b>	<b>975.494.259.140,00</b>

### **3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Sub bab ini menjelaskan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis dan prediksi perekonomian dan kerangka pendanaannya.

#### **3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pertumbuhankomponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sahakan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Bahwa peranan sektor Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan, tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah kota Madiun.

Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana-prasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di kota Madiun.

Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini, arahan kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama dua tahun terakhir, serta potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah;
2. meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
4. meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
5. optimaliasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
6. meningkatkan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;

7. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
8. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
9. melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah dan diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

Kebijakan untuk Tahun 2021 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan

daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja.

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga targe-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019–2024.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah sesuai dengan prioritas daerah (money follow program prioritas).
5. Pengelolaan belanja berbasis kinerja (performance base) sehingga setiap belanja akan bermuara mendukung capaian indikator kinerja tahun 2021.
6. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin dan belanja variabel secara terukur dan terarah.
7. Tidak lupa belanja daerah dalam rangka recovery dan penanganan dampak atas pandemi Covid 19 pada semua bidang.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.

**a. Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Belanja Modal terdiri dari :

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

**b. Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi terdiri dari :

- a. belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik.
- c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- e. Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

**c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force major*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

**d. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
2. Belanja Hibah adalah belanja Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel III. 5.**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020**  
**Serta Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021**  
**(Format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>REALISASI 2016</b>	<b>REALISAI '2017</b>	<b>REALISASI '2018</b>	<b>REALISASI '2019</b>	<b>ANGGARAN '2020</b>	<b>TARGET '2021</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>785.169.488.575,44</b>	<b>699.013.726.516,58</b>	<b>775.443.371.637,41</b>	<b>839.939.781.749,69</b>	<b>987.897.019.181,00</b>	<b>1.024.518.537.131,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	511.243.214.266,00	391.631.558.502,00	435.126.974.606,00	440.222.382.579,38	511.353.369.497,00	525.723.946.263,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	257.954.754.292,44	280.472.821.815,27	305.475.751.519,41	366.995.675.620,23	440.432.411.684,00	457.239.841.572,00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.5	Belanja Hibah	7.013.671.600,00	11.924.689.389,31	21.318.545.231,00	15.603.619.810,08	14.862.390.000,00	16.188.482.796,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.957.848.417,00	14.984.656.810,00	13.522.100.281,00	17.118.103.740,00	21.248.848.000,00	25.366.266.500,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>246.394.704.721,00</b>	<b>255.977.976.513,23</b>	<b>259.087.612.258,47</b>	<b>307.800.742.344,06</b>	<b>286.003.429.024,00</b>	<b>294.631.256.244,50</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.160.897.084,00	103.557.504.743,48	47.310.430.082,75	68.460.669.520,00	71.948.919.338,00	72.965.222.398,20
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.614.816.421,00	43.416.541.452,75	64.833.894.806,80	48.758.211.485,26	55.980.205.060,00	53.667.646.157,36
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.909.902.613,00	102.648.521.200,00	138.271.368.268,92	184.022.541.935,80	150.785.620.060,00	157.632.524.826,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	463.668.600,00	3.188.874.942,00	3.542.965.670,00	2.888.082.876,00	7.288.684.566,00	7.757.734.267,12
5.2.5	Belanja Modal Aset Lainnya	2.245.420.003,00	3.166.534.175,00	5.128.953.430,00	3.671.236.527,00	0,00	2.608.128.595,82
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.877.262,00</b>	<b>3.562.209.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	REALISASI 2016	REALISAI '2017	REALISASI '2018	REALISASI '2019	ANGGARAN '2020	TARGET '2021
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	118.877.262,00	3.562.209.000,00	1.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>			<b>2.127.846.700,00</b>	<b>651.920.000,00</b>	<b>700.062.000,00</b>	<b>700.062.000,00</b>
5.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain			2.127.846.700,00	651.920.000,00	700.062.000,00	700.062.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.031.564.193.296,44</b>	<b>954.991.703.029,81</b>	<b>1.036.658.830.595,88</b>	<b>1.148.511.321.355,75</b>	<b>1.278.162.719.205,00</b>	<b>1.320.849.855.375,50</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(33.281.862.758,64)</b>	<b>2.633.270.295,33</b>	<b>(29.212.590.458,24)</b>	<b>(54.198.351.307,17)</b>	<b>(221.173.415.205,00)</b>	<b>-345.355.596.235,50</b>

**Tabel III. 6.**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020**  
**Serta Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021**  
**(Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)**

KODE		JUMLAH					
		REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>467.715.646.171,00</b>	<b>351.277.112.926,31</b>	<b>402.953.607.503,00</b>	<b>404.548.975.076,46</b>	<b>464.944.240.577,00</b>	<b>481.505.820.039,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	457.736.982.871,00	334.828.576.837,00	365.985.115.291,00	371.056.454.264,38	424.570.731.577,00	438.251.008.743,00
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	4.895.131.600,00	11.924.689.389,31	21.318.545.231,00	15.603.619.810,08	14.862.390.000,00	16.888.544.796,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.455.685.000,00	3.896.000.000,00	13.522.100.281,00	17.118.103.740,00	21.248.848.000,00	24.666.204.500,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Parpol	627.846.700,00	627.846.700,00	2.127.846.700,00	651.920.000,00	700.062.000,00	700.062.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	118.877.262,00	3.562.209.000,00	1.000.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>563.848.546.900,44</b>	<b>603.714.590.103,50</b>	<b>633.705.223.092,88</b>	<b>743.962.346.279,29</b>	<b>813.218.478.628,00</b>	<b>839.344.035.336,50</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	53.508.251.170,00	56.802.981.665,00	69.141.859.315,00	69.165.928.315,00	86.782.637.920,00	87.472.937.520,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	263.944.691.009,44	290.933.631.925,27	305.475.751.519,41	366.995.675.620,23	440.432.411.684,00	457.239.841.572,00
2.2.3	Belanja Modal	246.395.604.721,00	255.977.976.513,23	259.087.612.258,47	307.800.742.344,06	286.003.429.024,00	294.631.256.244,50
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.031.564.193.071,44</b>	<b>954.991.703.029,81</b>	<b>1.036.658.830.595,88</b>	<b>1.148.511.321.355,75</b>	<b>1.278.162.719.205,00</b>	<b>1.320.849.855.375,50</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-33.301.957.320,64</b>	<b>2.633.270.295,33</b>	<b>-29.212.590.458,24</b>	<b>-54.143.823.359,16</b>	<b>-221.256.415.205,00</b>	<b>-345.355.596.235,50</b>

### **3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran pokok pengeluaran pihak ketiga.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta satu tahun setelah tahun rencana 2019 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel III. 7.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020**  
**Serta Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2021**  
**(Format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)**

Kode Rekening	Uraian	REALISASI 2016	REALISAI '2017	REALISASI '2018	REALISASI '2019	ANGGARAN '2020	TARGET '2021
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>339.139.349.352,77</b>	<b>305.857.486.594,13</b>	<b>308.491.416.889,46</b>	<b>279.278.826.431,22</b>	<b>221.256.415.205,00</b>	<b>345.355.596.235,50</b>
3.1.1	Penggunaan SiLPA	339.135.179.352,77	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	<b>279.278.826.431,22</b>	221.256.415.205,00	345.355.596.235,50
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.170.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>339.139.349.352,77</b>	<b>305.857.486.594,13</b>	<b>308.491.416.889,46</b>	<b>277.778.826.431,22</b>	<b>221.256.415.205,00</b>	<b>345.355.596.235,50</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>305.857.486.594,13</b>	<b>308.490.756.889,46</b>	<b>279.278.826.431,22</b>	<b>223.580.475.124,05</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

*\*) Penerimaan Pembiayaan disesuaikan dengan defisit yang terjadi*

**Tabel III. 8.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020**  
**Serta Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2021**  
**(Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)**

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>339.139.349.352,77</b>	<b>305.857.486.594,13</b>	<b>308.491.416.889,46</b>	<b>279.278.826.431,22</b>	<b>221.256.415.205,00</b>	<b>345.355.596.235,50</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	339.135.179.352,77	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	221.256.415.205,00	345.355.596.235,50
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.170.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>339.139.349.352,77</b>	<b>305.857.486.594,13</b>	<b>308.491.416.889,46</b>	<b>277.778.826.431,22</b>	<b>221.256.415.205,00</b>	<b>345.355.596.235,50</b>
	<b>SILPA</b>	<b>305.857.486.594,13</b>	<b>308.490.756.889,46</b>	<b>279.278.826.431,22</b>	<b>223.580.475.124,05</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

##### **Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021**

Kementerian PPN/Bappenas melakukan rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, menjadi dasar penetapan kegiatan dan proyek prioritas nasional tahun 2021. Setelah proyek prioritas nasional disetujui, Bappenas akan berkoordinasi dengan mitra kerjanya untuk menetapkan proyek K/L yang mendukung proyek prioritas nasional. Selain itu, Bappenas juga akan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk menetapkan apa saja kegiatan di masing-masing wilayah dalam kerangka prioritas nasional. Menurut Bappenas. Untuk meningkatkan kualitas RKP 2021, maka Bappenas mengemukakan beberapa poin penting. Dengan keterbatasan anggaran, kita harus punya strategi yang optimal, untuk membuat RKP 2021 menjadi lebih tajam dan kuat, kita harus punya prioritas nasional yang lebih tajam, sehingga anggaran dapat dibelanjakan lebih efektif dan tepat sasaran.

Hampir sama dengan RKP sebelumnya yang memiliki 5 prioritas nasional, pada RKP 2021, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan RKP sebelumnya sebagai penentuan struktur prioritasnya dan sudah merujuk ke RPJMN 2020-2024 yang sudah ditetapkan, agar lebih fokus menjadi 7 prioritas nasional, antara lain:

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing ;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar ;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan terobosan ini diharapkan dapat menjadi kunci untuk benar-benar mengintegrasikan kegiatan di satu K/L dengan K/L lain, dan begitu pula dengan daerah.

Kemampuan kita menetapkan prioritas nasional, lalu turun menjadi program prioritas, lalu turun menjadi kegiatan prioritas, sampai ke proyek prioritas, harus menjadi contoh kita ke K/L dan daerah. Hanya dengan prioritas yang kuat, kita dapat meyakinkan K/L dan daerah untuk menerapkan *money follow program*.

Dalam RKP 2021 pendekatan penyusunan dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan *money follow program*. Yang artinya dilaksanakan dengan pendekatan *holistik-tematik-integratif dan spasial*. Penguatan implementasi *moneyfollow program* yaitu dengan menajamkan prioritas nasional. Menajamkan integrasi sumber pendanaan yang berasal dari belanja K/L, belanja non K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman hutang luar negeri (PHLN), BUMN, PINA dan swasta sebagaimana RKP tahun sebelumnya.

Rancangan tema RKP 2021 sebelum terjadinya pandemik Covid 19 yaitu **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah di Dukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Belanja pemerintah menjadi prioritas untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan dari sisi sumber daya manusia dengan harapan agar bisa meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan yang berkualitas. Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan. Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran. Contoh penajaman program prioritas nasional pendidikan.

Agar penyusunan RKP hingga pengamanaan alokasinya di RAPBN 2021 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan yaitu dengan melanjutkan implementasi *money follow program*, memperkuat koordinasi antara K/L dan Pusat-Daerah, memperkuat kendali program.

Dengan adanya bencana nasional yaitu wabah Covid-19 yang menjadi Pandemi pada Tahun 2020 ini mengakibatkan terjadinya perubahan Tema pada Tahun 2021 menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”** sehingga di fokuskan dengan Tema **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan prioritas masih tetap sama yaitu tujuh prioritas dan Fokus Pembangunan dari 7 prioritas tersebut pada Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi;
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
3. Reformasi Jaring Pengaman Sosial;
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Ketujuh Prioritas Nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan tema RKP 2021. Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2021, dilakukan penekanan pada empat Prioritas Nasional dan beberapa *Major Project*. Keempat PN itu adalah PN 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, PN 3 SDM berkualitas dan berdaya saing, PN 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, serta PN 6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Beberapa *Major Project* juga akan menjadi fokus alokasi pendanaan. *Pertama*, terkait pemulihan industri, pariwisata dan investasi antara lain: pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 *smelter*, industri 4.0 di lima subsektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, serta jaringan pelabuhan utama terpadu. *Kedua*, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada *Major Project* baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional. *Ketiga*, terkait jaring pengaman sosial, akan ada *Major Project* yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. *Keempat*, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi

### **Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2021 disusun sebagai penjabaran tahun pertama RPJMD 2019-2024 yang memuat Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024: "***Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong***". Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2019-2024 tersebut, maka didukung dengan misi pembangunan Jawa Timur 2019-2024. Adapaun misi Pembangunan Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok, Antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Untuk melaksanakan Misi Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 diwujudkan dalam sembilan Nawabhakti Satya sebagai berikut :

**Bhakti 1 Jatim Sejahtera** yang orientasinya untuk pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Bentuknya berupa PKH Plus untuk penduduk miskin 38 kabupaten/kota, 664 kecamatan, 5.674 desa dan 2.827 kelurahan.

**Bhakti 2 Jatim Kerja.** Fokusnya pada *millineal Job Center* dengan cara memberikan *job training*, pendidikan vokasi, membantu *starting up* usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha. Lalu membuat *Dream Team Science Techno Park/STP* (5-10 anak SMK dan 2-4 anak D3/S1), membentuk STP bagi kelompok rintisan usaha di berbagai daerah.

**Bhakti 3 Jatim Cerdas dan Sehat** denganfokus pada pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas. Bentuknya bermacam-macam, misalnya Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap.

**Bhakti 4 Jatim Akses,** yang diprioritaskan untuk membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar. Turunannya berupa pembangunan Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbang Kertasusila, Koridor Maritim Pantura Jawa- Madura, Koridor Maritim Selatan Jawa.

**Bhakti 5 Jatim Berkah,** dilakukan dengan cara memberi tunjangan kehormatan Imam Masjid di Kampung, Pesisir dan Pulau Terluar. Perluasan tunjangan kehormatan Hafidz dan Hafidzoh, penguatan peran Pondok Pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah dan beasiswa guru diniyah hingga S2, membangkitkan kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan keperintisan.

**Bhakti 6 Jatim Agro**, diprioritaskan untuk memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan. Program turunnnya berupa menguatkan program petik, olah, kemas, jual, mengembangkan agropolitan, stabilisasi dan tabungan pangan, asuransi petani, restrukturisasi produk pertanian.

**Bhakti 7 Jatim Berdaya**, yang diprioritaskan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Programnya bermacam-macam, seperti *One Village One Product One Corporate & Agropolitan*, *Communal Branding* untuk UMKM, *Supply and Demand Channel*, penataan pasar tradisional, inklusi UMKM retail modern, serta menumbuhkembangkan koperasi perempuan, petani dan nelayan dan perdagangan antar pulau.

**Bhakti 8 Jatim Amanah**, yang diprioritaskan untuk memberantas penyelewengan di pemerintahan khususnya di Jawa Timur dengan menyelenggarakan pemerintahan bersih, efektif dan anti korupsi. Membudidayakan meritokrasi, menyelenggarakan *complain handling system*, budaya birokrasi yang melayani dan efektif, menjaga *clean government*, *soud governance*, perlusaaan dan pelayanan berbasis IT.

**Bhakti 9 Jatim Harmoni** yang diprioritaskan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Programnya bermacam-macam, seperti *One Village One Product One Corporate & Agropolitan*, *Communal Branding* untuk UMKM, *Supply and Demand Channel*, penataan pasar tradisional, inklusi UMKM retail modern, serta menumbuhkembangkan koperasi perempuan, petani dan nelayan dan perdagangan antar pulau.

Rancangan tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2021 yaitu “**Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Jawa Timur yang di dukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas**”, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*;
4. Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
7. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Mengikuti perubahan Tema Pemerintah Pusat akibat Dampak Covid-19 yang menjadi Pandemi pada Tahun 2020 ini mengakibatkan terjadinya perubahan Tema pada Tahun 2021 menjadi “**Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan dan Infrastruktur di Jawa Timur**” sehingga di fokuskan dengan Tema “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”

#### **Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021**

Sesuai dengan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, arah kebijakan pada Tahun 2021 hasil penjabaran tiap misi dijadikan sebagai dasar meningkatkan fokus dan lokus PANCA KARYA yang harus sudah dimunculkan dalam tema “Penguatan *Good Governance* untuk Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pembangunan”

Visi Walikota Madiun Tahun 2019-2024 “**Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera**” yang dijabarkan dalam empat misi utama yaitu:

1. mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
2. mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
3. meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun;
4. mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan pemerataan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.

Untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 diwujudkan dalam sembilan **Panca Karya** sebagai berikut :

**Karya 1 Madiun Kota Pintar/Smart**, yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM Kota Madiun, yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kota madiun, termasuk juga meningkatkan kualitas apartur sipil negara.

**Karya 2 Madiun Kota Melayani**, berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, peningkatan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik (*good governance*) serta peningkatan akuntabilitas kinerja pelaksanaan pemerintahan.

**Karya 3 Madiun Kota Mambangun**, diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan selalu melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, dengan mengakomodir ide-ide atau gagasan yang sangat berguna untuk pembangunan serta menghadirkan tenaga profesional dan kompeten di bidangnya.

**Karya 4 Madiun Kota Peduli**, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun, ekonomi, tenaga kerja serta menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Kota Madiun.

**Karya 5 Madiun Kota Terbuka**, berfokus pada penyediaan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi.

#### **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Madiun merupakan integrasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan capaian kinerja program dan kegiatan daerah serta permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan memperhatikan dan mengacu pada tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur dan arahan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 serta mempertimbangkan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kota Madiun

Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 sebelum terjadinya wabah Covid 19 adalah **“Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Pariwisata yang di Dukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”**.

Pengambilan tema ini didasarkan pada kondisi eksisting Kota Madiun dimana semakin pentingnya kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang ditopang sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang handal, pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah. Selain itu, penyiapan sumberdaya manusia yang handal melalui pelayanan prima di bidang

pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota merupakan fokus dari tahun kedua RPJMD Kota Madiun 2019-2024.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2021 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan;**
- 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualiatas SDM yang Berdaya Saing;**
- 3. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata;**
- 4. Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah;**
- 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;**
- 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;**

Berkaitan dengan prioritas kedua baik di RKP maupun RKPD Provinsi yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan di Kota Madiun tidak memasukkannya ke dalam prioritas, karena di Kota Madiun tidak ada potensi untuk pengembangan wilayah serta kondisi tiga kecamatan yang ada di Kota Madiun hampir tidak ada kesenjangan diantara ketiganya.

Mengikuti perubahan Tema Pemerintah Pusat dan Provinsi akibat Dampak Covid-19 yang menjadi Pandemi pada Tahun 2020 ini mengakibatkan terjadinya perubahan Tema pada Tahun 2021 menjadi **“Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Infrastruktur di Kota Madiun”** sehingga di fokuskan dengan Tema **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Kehidupan Sosial dan Masyarakat”**.



**Tabel IV. 1.**  
**Tema Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota Madiun**

Kondisi	Tema Pemerintah Pusat	Tema Pemerintah Provinsi	Tema Pemerintah Kota Madiun
Sebelum Pandemi Covid 19	<i>Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah di Dukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas</i>	<i>Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Jawa Timur yang di dukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas</i>	<i>Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Pariwisata yang di Dukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan</i>
Setelah Pandemi Covid 19	<i>Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan InvestasiPenguatan Sistem Kesehatan Nasional</i>	<i>Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan dan Infrastruktur di Jawa Timur</i>	<i>Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Infrastruktur di Kota Madiun</i>

**Tabel IV. 2.**  
**Prioritas Nasional/Prioritas Provinsi/Prioritas Kota/Program Prioritas**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	<b><i>Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan</i></b>	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pembinaan Industri Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan Program Peningkatan,

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
				Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat Program Pengelolaan Pasar Rakyat Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Program Stabilisasi Ekonomi Daerah
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur		
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)	<b>Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualiatas SDM yang Berdaya Saing</b>	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan Program Perlindungan Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
				Program Ketransmigrasian Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal	<b>Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata</b>	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	<b>Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah</b>	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong Program Pengendalian Banjir Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	<b>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana</b>	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman Program Pelayanan Pertanahan Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
				Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7	Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Sosialisasi di Bidang Cukai Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
				Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya
				Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota
				Program Pengembangan Kajian dan Penelitian
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Anggaran Daerah
				Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
				Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah
				Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah
				Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian
				Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS
				Program Penataan Aparatur
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
				Program Pembinaan Aparatur
				Program Pengembangan Aparatur
				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
				Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial
				Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi
				Program Penyelenggaraan Kelurahan
				Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan,

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
				Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan
				Program Dana Kelurahan
				Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah
				Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama
				Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru
				Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
				Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

#### 4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan harus mengacu pada RPJP 2005-2025. Hal ini akan memberikan arahan yang jelas mengenai kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun pada saat pemilihan kepala daerah. Hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran dalam RPJMD 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel IV. 3.**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun**

<b>Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>	Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
		b. Meningkatnya pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
<b>Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan</b>	Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan	a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Prasarana Transportasi serta Permukiman
		b. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun</b>	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik	a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun
		b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun
<b>Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	a. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja
		b. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
		c. Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
	Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif	a. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi
		b. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tabel diatas sudah sangat jelas menghubungkan antara visi Kepala Daerah Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahterayang dijabarkan dalam empat misi utama yaitu:

1. mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
2. mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
3. meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun; dan
4. mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.

Guna mengoperasionalkan misi-misi tersebut di atas dibutuhkan arah misi atau orientasi pembangunan, sehingga setiap langkah pembangunan menjadi jelas tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan umum pembangunan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 4.**  
**Hubungan Tujuan/Sasaran dengan Strategi/Arah Kebijakan**  
**Pembangunan Kota Madiun**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2021
1	2	3	4	5
<b>Misi 1: mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>				
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) untuk peningkatan kinerja birokrasi melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah dengan pengintegrasian pada sistem akuntabilitas kinerja yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.	<p>Penguatan <i>Good Governance</i> untuk Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Hasil Pembangunan</p> <p><b>Penjelasan</b></p> <p>Pada tahun 2021 ini, kinerja pencapaian PANCA KARYA di tahun sebelumnya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) pada seluruh pelayanan publik perangkat daerah.	
			Meningkatkankualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintah melalui pengintegrasian sistem yang berbasis <i>E-government, E-planning, E-budgeting, E-Contract dan E-Monev.</i>	
			Penerapan Wilayah yang telah terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga (Smart City) di Kota Madiun	
			Optimalisasi Program satu RT satu free wifi untuk peningkatan pembelajaran online dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis internet.	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengintegrasian dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).	
1.	Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan	a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Prasarana Transportasi serta Permukiman	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah melalui pembinaan maturitas penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah, penguatan prosedur standar pengelolaan keuangan serta peningkatan komitmen seluruh jajaran di Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	
			Menguatkan kualitas mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Madiun melalui pengembangan ide atau gagasan inovatif masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Madiun.	
<b>Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan</b>				
1.	Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan	a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Prasarana Transportasi serta Permukiman	Meningkatkan Indeks Daya Saing Infrastruktur melalui penguatan koordinasi dan sinergi vertikal dan horizontal dan penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, yang meliputi jalan dan jembatan; air minum; penyehatan lingkungan perumahan; dan aksesibilitas masyarakat terhadap perumahan dan permukiman.	



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2021
1	2	3	4	5
			Menurunkan disparitas wilayah lingkup Kota Madiun yang sinergis dengan kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui penguatan prioritas pembangunan infrastruktur.	
		b. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan melalui optimalisasi RTH dan peningkatan peran seluruh stakeholder dalam meningkatkan keasrian lingkungan.	
<b>Misi 3 : meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun</b>				
1.	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik	a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan kebudayaan paradigma sehat di masyarakat serta peningkatan keberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya. Peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, kemitraan dan sinergi para pihak terkait untuk mewujudkan Madiun Kota Sehat. Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu bagi warga Kota Madiun.	
		b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan. Meningkatkan Harapan Lama Sekolah masyarakat Kota Madiun melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Meningkatkan kapasitas ASN aparatur melalui optimalisasi pendidikan dan pelatihan, beasiswa khusus serta mempercepat dan mempermudah pengembangan karir ASN.	
<b>Misi 4 : mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>				
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	a. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatkan daya saing iklim investasi Kota Madiun melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan dan sinergi para pihak dalam meningkatkan iklim investasi. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja sektor formal dan non formal melalui penyesuaian kompetensi tenaga kerja sesuai dengan karakteristik Kota Madiun dalam konteks wilayah Provinsi Jawa Timur. Mengembangkan ekonomi kreatif yang disinergikan dengan penyelenggaraan Seni Budaya Mingguan. Mengoptimalkan bantuan modal dan pengembangan SDM UKM Kota Madiun. Mengembangkan sektor perdagangan melalui optimalisasi kualitas pelayanan Bis Wisata gratis keliling Kota Madiun. Mengembangkan pemasaran produk unggulan lokal yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun melalui pengembangan Madiun Display.	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2021
1	2	3	4	5
		b. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan peran Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi para pihak terkait pengembangan sektor unggulan daerah.	
		c. Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak dalam penyediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi subsidi pupuk bagi petani kurang mampu dan potensial serta subsidi listrik dan air bersih bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	
2.	Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif	a. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Meningkatkan peran masyarakat melalui peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak untuk penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi.	
		b. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi para pihak.	

**Rumusan kebijakan umum urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari :**

**1. Pendidikan:**

- a. peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Percepatan Pencapaian SPM dan Standar Nasional;
- b. peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan, diseluruh jejang pendidikan;
- c. meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal lainnya;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan serta mengoptimalkan kualitas dan jaringan kerjasama; sanitasi sekolah;
- e. meningkatkan penyelenggaraan PAUD, penguatan UKS, serta meningkatkan
- f. di masa pademi Covid 19 kegiatan belajar dan mengajar tetap memperhatikan protokol kesehatan.

## **2. Kesehatan:**

- a. meningkatkan kualitas, kuantitas dan jenis sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya percepatan pencapaian SPM kesehatan;
- b. meningkatkan kualitas tenaga kesehatan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu;
- d. meningkatkan upaya pencarian (*case finding*) anak balita dengan gizi buruk dan stunting;
- e. meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder dan pencegahan tersier penyakit-penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, demam dengue, TBC, Diare, dan penyakit menular lainnya;
- f. meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan;
- g. meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan;
- h. peningkatan kuantitas, kualitas dan jenis obat-obatan.
- i. Melakukan tindakan pencegahan (baik preventif maupun motorik) dan penanganan terhadap penyebaran Covid 19.

## **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur publik yang memadai seperti jalan dan jembatan untuk menunjang distribusi barang/jasa ke dan dari pusat pertumbuhan ekonomi (sentra-sentra ekonomi) serta dalam rangka percepatan pencapaian SPM;
- b. mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air dalam memenuhi hajat hidup masyarakat;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat;
- d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. menerapkan dan mengawasi pelaksanaan tata ruang agar sesuai dengan peruntukannya;

- f. penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan peraturan/peraturan daerah tata ruang dan peruntukannya; dan
- g. mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, guna memayungi kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

**4. Perumahan :**

- a. mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah Kota Madiun serta tetap mengacu keselarasan dengan daya dukung lingkungan guna mempercepat pencapaian SPM.

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :**

- a. memfasilitasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dalam rangka pencapaian SPM;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan tanggap darurat kebencanaan;
- c. memfasilitasi meningkatnya pemahaman 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat;
- d. memfasilitasi berkembangnya budaya dan kerajinan lokal yang lebih kondusif;
- e. meningkatnya kualitas dan kuantitas penegakan regulasi;
- f. di masa apndemi Covid 19 ini penegakkan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan merupakan upaya pencegahan penyebarannya.

**6. Sosial :**

- a. penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas untuk umum; dan
- c. melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan penyandang masalah social dalam rangka pencapaian SPM.
- d. Mengkoordinasikan pemberian bantuan sosial terhadap warga yang terkena dampak dampak pandemi covid 19.

**Rumusan kebijakan umum urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, terdiri dari :**

**1. Ketenagakerjaan :**

- a. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat; dan
- b. menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

- a. melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi diskriminasi dan penguatan kelembagaan;
- b. meningkatkan perlindungan dan kualitas perempuan agar dapat lebih mandiri dalam melakukan aktivitasnya; dan
- c. meningkatkan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai tindak kekerasan.

**3. Pangan :**

meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan di Kota Madiun.

**4. Pertanahan :**

meningkatkan dan mengembangkan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah.

**5. Lingkungan Hidup :**

- a. mengoptimalisasikan potensi, keselarasan/pelestarian tatanan lingkungan hidup;
- b. mengembangkan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup;
- c. pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- d. peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
- e. peningkatan Pengelolaan Limbah/Sampah Padat dan Cair.

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :**

penataan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang handal.

**7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :**

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dalam upaya menekan laju perkembangan penduduk serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas;
- b. meningkatkan current use (prevalensi) dan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (*IUD, tubektomi dan vasektomi*);
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan KB di seluruh kecamatan se-Kota Madiun.

**8. Perhubungan :**

- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi masyarakat;
- b. peningkatan dan pengembangan rambu-rambu jalan untuk keselamatan pengguna kendaraan dan pejalan kaki dalam rangka menekan korban kecelakaan lalu lintas;
- c. revitalisasi dan penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan;
- d. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung pembangunan di Kota Madiun serta menjaga konektivitas wilayah.
- e. Pengendalian kendaraan yang keluar masuk ke kota madiun merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid 19.

**9. Komunikasi dan Informatika**

- a. mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan; dan
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerja sama dengan media massa dalam rangka menginformasi berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

**10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :**

- a. meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif; dan
- b. meningkatkan kapasitas SDM yang unggul.

**11. Penanaman Modal :**

- a. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik para investor; dan
- b. pengembangan sistem informasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.

**12. Kepemudaan dan Olah Raga:**

- a. meningkatkan pembinaan olahraga kalangan masyarakat dan kepemudaan;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas kepemudaan; dan
- c. mengoptimalkan program-program rutin dalam menunjang pencapaian target program prioritas pembangunan jangka menengah.

**13. Statistik :**

- a. meningkatkan kualitas data dan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. memfasilitasi terbitnya “Buku Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019”, dan terbitnya “Buku Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2019”.

**14. Persandian :**

- a. mendukung kegiatan peringatan dini dalam pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul;
- b. melaksanakan tata kelola persandian untuk menjamin keamanan informasi; dan
- c. pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan persandian.

**15. Kebudayaan :**

- a. memperkuat kelembagaan tradisional masyarakat guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- b. memfasilitasi berkembangnya keaneka ragaman budaya lokal; dan

- c. penggalian dan pengembangan cagar dan situs-situs lokal yang bernilai budaya.

**16. Perpustakaan:**

- a. memfasilitasi meningkatnya ketersediaan buku-buku yang berkualitas; dan
- b. peningkatkan budaya gemar membaca dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan pelajar/mahasiswa.

**17. Kearsipan:**

meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas tenaga dan sarana serta prasarana kearsipan modern yang berbasis Informasi Tehnologi (IT);

**Rumusan kebijakan umum urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:**

**1. Kelautan dan Perikanan :**

Pengembangan kawasan pembudidayaan ikan air tawar berbasis IPTEK sesuai daya dukung lahan, dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan hidup guna mewujudkan sistem usaha budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

**2. Pariwisata :**

Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

**3. Pertanian :**

- a. pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani;
- b. peningkatan peran sektor pertanian dalam memperkokoh ketahanan pangan;
- c. peningkatan kualitas perencanaan Kehutanan yang berkelanjutan;
- d. mengembangkan pertanian dalam arti luas yang tangguh menuju kemandirian, kesejahteraan dan keadilan; dan
- e. meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi.

**4. Perdagangan :**

- a. peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal; dan
- b. peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.



**5. Perindustrian :**

- a. mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing;
- b. pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri.

**6. Ketransmigrasian :**

Peningkatan dan pengembangan kualitas layanan bidang ketransmigrasian.

**Rumusan kebijakan umum urusan Penunjang Pemerintahan , terdiri dari :**

**1. Unsur Staf :**

- a. memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. peningkatan dan pengembangan penataan ketetalaksanaan perangkat daerah;
- c. memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. peningkatan dan pengembangan kerjasama antar kabupaten/kota se Provinsi Jawa Timur; dan
- e. peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

**2. Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan Fungsi DPRD :**

- a. peningkatan Kapasitas SDM Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- b. pemfasilitasi terlaksananya berbagai agenda pertemuan antara DPRD dengan berbagai stakeholders;
- c. memfasilitasi terlaksananya pertemuan/rapat koordinasi dengan eksekutif; dan
- d. memfasilitasi terlaksananya rapat koordinasi pembahasan berbagai regulasi daerah.

**3. Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :**

- a. meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah bagi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik;

- b. memfasilitasi terlaksananya pembinaan, pengawasan asistensi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik; dan
- c. Memfasilitasi terlaksananya pemanfaatan berbagai sumber daya untuk pembangunan secara efektif, efisien dan transparan.

**4. Perencanaan :**

- a. melakukan asistensi, pemantauan dan memfasilitasi tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas;
- b. melakukan asistensi, pemantauan dan memfasilitasi penetapan dokumen perencanaan tepat waktu;
- c. mendorong terlaksananya penelitian dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lain;
- e. memfasilitasi terselenggaranya pemantauan dan evaluasi, serta perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. penguatan data dan informasi bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

**5. Keuangan :**

- a. mendorong tercipta partisipasi masyarakat untuk taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- b. pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan dan kinerja daerah.

**6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan :**

- a. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur;
- b. memfasilitasi terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara transparan, adil dan akuntabel;
- c. mendorong terlaksananya disiplin aparatur yang berkualitas; dan
- d. mendorong terciptanya profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik.

**7. Penelitian dan Pengembangan :**

- a. memfasilitasi meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian secara terpadu;
- b. mendorong terwujudnya penelitian sebagai masukan untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah;

- c. memfasilitasi hasil penelitian sebagai karya ilmiah yang perlu mendapatkan apresiasi oleh berbagai lembaga dan masyarakat; dan
- d. memfasilitasi hasil penelitian untuk dikembangkan dan ditindak lanjuti lebih lanjut.

**8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:**

- a. meningkatkan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, media massa dan partai politik.
- b. mengurangi semaksimal mungkin terjadinya friksi dan konflik baik antar agama, antar golongan, dan antar ras/suku; dan
- c. meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan dalam rangka menciptakan tertib hukum;

**9. Kecamatan :**

- a. meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan; dan
- b. meningkatkan peran serta masyarakat diseluruh kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan diberbagai bidang.

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya.

**4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021**

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2021 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

**Tabel IV. 5.**  
**Prioritas Pembangunan berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan;

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan		4,46
		Pertumbuhan PDRB		6,02
		PDRB Per Kapita		79,78
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	
Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,35	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	
	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	1,04	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan		
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Pengolahan	7,30	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	
			Program Pembinaan Industri	
	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	6,01	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	
			Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	
			Program Pengelolaan Pasar Rakyat	
		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR	2,50	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	
			Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	
			Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,63
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota	Indeks Pengetahuan	0,77	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
			Program Peningkatan Mutu	

TUJUAN		INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,63
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Madiun			Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Pendidikan Dasar
			Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Pendidikan Non Formal
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
			Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
			Program Peningkatan Pelayanan BLUD

TUJUAN		INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		PDRB Per Kapita	79,78
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,75	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan
			Program Perlindungan Tenaga Kerja
			Program Ketransmigrasian

### 3. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata

TUJUAN		INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman	78
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan	2,89 (tinggi)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Prestasi Pemuda dan Olah Raga di tingkat regional dan nasional	33	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

TUJUAN		INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan PDRB	6,02
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,80	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata

#### 4. Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi

Daerah;

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)		81,45
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Infrastruktur	96,20	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	
			Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
			Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	
			Program Pengendalian Banjir	
	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	88,62	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	
	Kinerja Ruas Jalan	0,43	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	

#### 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)		81,45
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	65,44	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
			Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	
			Program Pelayanan Pertanahan	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman		78
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	79	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

TUJUAN		INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks reformasi birokrasi	B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meingkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	84 (baik)	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
			Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan
			Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat
			Program Penyelenggaraan Kelurahan
			Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik
			Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah
	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Sangat Tinggi 3,1100	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota
			Program Pengembangan Kajian dan Penelitian
			Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian
			Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS
			Program Penataan Aparatur
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Program Pembinaan Aparatur			
Program Pengembangan Aparatur			
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,36 (baik)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Program Sosialisasi di Bidang Cukai	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

TUJUAN		INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks reformasi birokrasi	B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (73)	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Anggaran Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
			Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah
			Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah
			Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan
			Program Dana Kelurahan

TUJUAN		INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman	78
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan	2,89 (tinggi)	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial
			Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	79	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



TUJUAN		INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman	78
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
			Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
			Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah diatas dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas sebagai berikut ini.

**Tabel IV. 6**  
**Matriks Program Pembangunan Daerah Kota Madiun 2021**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja
					Tahun 2021
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>Pendidikan</b>					
1	101	15	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	88
1	101	16	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	80
1	101	17	Program Pendidikan Dasar	Angka Partispasi Murni SD/SMP	100%
1	101	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%
1	101	19	Program Pendidikan NonFormal	Jumlah Lembaga yang terakreditasi	100
<b>Kesehatan</b>					
1	102	18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	97
1	102	19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kesehatan Masyarakat yang sesuai standart	45
1	102	20	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	10
1	102	21	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi	51,72
1	102	15	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	91,13
1	102	16	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencaaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja
					Tahun 2021
1	102	18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase penyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	91,13
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
1	103	15	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100
1	103	17	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	95
1	103	18	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat	90,5
1	103	19	Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Genangan	10
1	103	16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Terlayannya air bersih	96
1	103	20	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	100%
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>					
1	104	15	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah tinggal layak huni dan bersanitasi	99,35
1	104	16	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permukiman	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemukiman yang dikelola	77,67
<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>					
1	105	15	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100
1	105	16	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	96%
1	105	17	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	1 orang tiap RT
1	105	18	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%
1	105	19	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam yang Tertangani	100
<b>Sosial</b>					
1	106	15	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	100
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>Tenaga Kerja</b>					
2	201	15	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79,25
2	201	17	Program Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	63
2	201	18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	81

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja
					Tahun 2021
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>					
2	202	15	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	13,32
2	202	16	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100
<b>Pangan</b>					
2	203	15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,8
<b>Pertanahan</b>					
2	204	15	Program Pelayanan Pertanahan	Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100
<b>Lingkungan Hidup</b>					
2	205	15	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	69,23
2	205	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu	48
2	205	17	Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	52,9
2	205	18	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
2	206	15	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84
2	206	16	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	94
2	206	17	Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Persentase Uptime database kependudukan dan pencatatan sipil	99,1
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
2	208	15	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase peserta KB aktif MKJP	42,75
<b>Perhubungan</b>					
2	209	15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Perlengkapan Jalan	75%
2	209	16	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kinerja angkutan Umum	40%
<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
2	210	15	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Publik	85
2	210	16	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi	45
2	210	17	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100
<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>					
2	211	15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	98,7
2	211	16	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	0,42

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja
					Tahun 2021
<b>Penanaman Modal</b>					
2	212	15	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi	19
2	212	16	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan terselesaikan	86
<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>					
2	213	15	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	17
				Jumlah Atlit yang ikut kejuaraan di tingkat Provinsi dan Nasional	190
<b>Statistik</b>					
2	214	15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	80
<b>Persandian</b>					
2	215	15	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan Informasi	40
<b>Kebudayaan</b>					
2	216	15	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	40
<b>Perpustakaan</b>					
2	217	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan	72%
<b>Kearsipan</b>					
2	218	15	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip yang dikelola	500 berkas
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>					
<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
3	301	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	1
<b>Pariwisata</b>					
3	302	15	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan	28
<b>Pertanian</b>					
3	303	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,22
3	303	16	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	2
<b>Kehutanan</b>					
<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>					
<b>Perdagangan</b>					
3	306	16	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah Omset Pasar Rakyat	672.000 Juta (Rp)
3	306	15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	0,5
3	306	17	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah Barang Kena Cukai ilegal	0

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja
					Tahun 2021
<b>Perindustrian</b>					
3	307	15	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berstandart	17,1
3	307	16	Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	84
<b>Transmigrasi</b>					
3	308	15	Program Ketransmigrasian	Persentase Pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	81
<b>Urusan Penunjang Pemerintahan</b>					
<b>Unsur Staf</b>					
4	401	15	Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai regulasi	100
4	401	24	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	100
4	401	20	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat Syarat	6 dokumen
4	401	21	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerja sama
4	401	19	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Jumlah Kegiatan sosialisasi Bidang Cukai yang dilaksanakan	100
4	401	25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Persentase kelompok sosial ekonomi yang difasilitasi	100
4	401	18	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	4%
4	401	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100
4	401	22	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	100
4	401	23	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKj Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik ( $\geq 100$ )	82
4	401	24	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2,7 (cukup)
4	401	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100
<b>Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD</b>					
4	402	15	Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat	81

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja
					Tahun 2021
<b>Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>					
4	403	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	30
4	403	16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	100
4	403	19	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang terpenuhi	100
<b>Fungsi Penunjang Perencanaan</b>					
4	404	15	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan	100
				Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80%	100
4	404	16	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosil dan budaya	100
				Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan	100
4	404	17	Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	100
				Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan	100
<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</b>					
4	405	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100
4	405	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu
4	405	16	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	405	18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi pengelolaan aset terhadap PAD	4.528.005.499
4	405	19	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak daerah	100
4	405	20	Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak daerah	1,5
<b>Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>					
4	406	15	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	100
4	406	19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	100
4	40	18	Program Penataan Aparatur	Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM	100
4	406	16	Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS	Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	100
4	406	20	Program Pembinaan Aparatur	Persentase Kedisiplinan ASN	100
4	406	21	Program Pengembangan Aparatur	Persentase Pengembangan ASN	100

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja
					Tahun 2021
<b>Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan</b>					
4	407	15	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan	100
<b>Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik</b>					
4	408	15	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Hubungan Sosial	2,7
4	408	16	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0 konflik
4	408	18	Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi	Persentase Orkemas	73
<b>Fungsi Penunjang Kecamatan</b>					
4	409	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	12
4	409	15	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%
4	409	16	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
4	409	18	Program Dana Kelurahan	Indeks Perkembangan Kelurahan	0,81
4	409	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	12
4	409	15	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%
4	409	16	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
4	409	18	Program Dana Kelurahan	Indeks Perkembangan Kelurahan	0,81
4	409	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	12
4	409	15	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%
4	409	16	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
4	409	18	Program Dana Kelurahan	Indek Perkembangan Kelurahan	0,81

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Dalam bab terdahulu telah diuraikan tentang prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2021. Agar prioritas pembangunan dapat diwujudkan, maka perlu dijabarkan melalui program dan kegiatan prioritas yang telah selaras dan bersinergi antar dokumen perencanaan, antar ruang, antar tingkatan pemerintahan dan antar wilayah. Sementara itu, pada sisi pendanaan kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam penyediaan anggaran telah dapat memenuhi kebutuhan, sehingga penetapan program dan kegiatan yang dijabarkan di dalam Bab V ini bersifat optimistik, dalam arti dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan kedalam dokumen RKPD Tahun 2021. Rencana program dan kegiatan yang disusun merupakan prioritas pembangunan yang mengacu pada dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, yang disusun sesuai tahun rencana, aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2021 yang dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan, serta mendapatkan penyempurnaan dengan memasukan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kota Madiun

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah, merupakan gambaran tentang berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2021. Program dan pendanaan yang bersifat indikatif, tersusun selaras dan sinergi dengan dokumen RPJMD Kota Madiun pada tahun berkenaan. Oleh karena itu, telah bersinergi dan terintegrasi pula dengan kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Madiun. Sementara itu, dari sisi penganggaran, rencana kerja yang berisikan program prioritas dan kegiatan prioritas yang telah tersusun ini tentunya sudah mempertimbangkan kemampuan kapasitas riil keuangan Pemerintah Kota Madiun sepanjang Tahun 2021.

Rincian rencana kerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, dapat disajikan sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 5.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**  
**Per Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021**

**Prioritas I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan**

Kode	Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIDANG URUSAN SOSIAL				14.750.220.100			
1 0 6	1 0 6 0 1	1 5		100 %	14.750.220.100	100 %		
	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani						
	1 Kegiatan Pembinaan Perintis Kemerdekaan atau Keluarganya serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Jumlah jandaperintis yang mendapat bantuan dan peserta sarasehan	Kota Madiun	63 orang	43.030.000	63 orang	46.664.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 Kegiatan Pembinaan PSKS	Jumlah PSKS yang dibina dan aktif	Kota Madiun	4 lembaga	337.212.200	4 lembaga	756.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3 Kegiatan Pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT	Jumlah data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia	Kota Madiun	3 dokumen	879.645.000	3 dokumen	1.305.046.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan KPM PKH	Jumlah KPM PKH yang mendapat pembinaan dan pelatihan	Kota Madiun	2.090 orang	334.950.000	2.090 orang	447.477.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5 Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana	Kota Madiun	21 orang	502.390.000	21 orang	274.998.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6 Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	Jumlah layanan karang werdha dan lanjut usia	Kota Madiun	27 Karang werdha	3.127.312.500	27 Karang werdha	1.584.257.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	7 Kegiatan Sunat dan Nikah Masal	Jumlah peserta sunat dan nikah massal	Kota Madiun	70 orang	222.721.000	70 orang	269.492.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	8 Kegiatan Bantuan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin penerima manfaat	Kota Madiun	91 orang	9.035.368.680	91 orang	1.250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9 Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah kelompok fakmis yang mendapat bantuan	Kota Madiun	10 kelompok	267.590.720	10 kelompok	456.599.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.967.481.560			
2 0 2	2 0 6 0 1	1 6		100 %	2.967.481.560	100 %		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan						

1					2	3	4	5	6	7	8	9
						dan Anak						
				1	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani	Kota Madiun	100 %	492.525.970	100 %	389.464.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	450 orang	21.742.250	450 orang	300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				3	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	135 peserta	63.858.520	135 peserta	100.430.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				4	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Lembaga Fakom dan Panti Asuhan Anak yang Aktif	Kota Madiun	7 lembaga	627.299.520	7 lembaga	749.977.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	Kota Madiun	415 orang	1.762.055.300	415 orang	730.136.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN				1.287.000.000			
2	2	3	1		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan		95,8 indeks	1.287.000.000	95,8 indeks		
				1	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah produksi pangan hasil pekarangan/kawasan Rumah Pangan Lestari	Kota Madiun	2.000 Kg	292.000.000	2.000 Kg	175.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				3	Kegiatan Promosi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, Sehat dan Aman	Jumlah menu konsumsi olahan pangan yang tercipta	Kota Madiun	190 produk	420.000.000	190 produk	450.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				4	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan	Persentase sampel pangan segar dan olahan aman dikonsumsi	Kota Madiun	86,27 %	325.000.000	86,27 %	500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				5	Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah dokumen informasi harga, pasokan dan akses pangan	Kota Madiun	4 dokumen	130.000.000	4 dokumen	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				6	Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah cadangan pangan daerah dan masyarakat	Kota Madiun	122 ton	120.000.000	122 ton	130.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					BINDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO				2.204.010.000			
2	2	2	1		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif		98,7 %	1.194.010.000	98,7 %		

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			1	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian.	Jumlah koperasi aktif	Kota Madiun	151 koperasi	513.000.000	151 koperasi	630.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			2	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi	Jumlah koperasi dengan omzet meningkat	Kota Madiun	20 koperasi	190.000.000	20 koperasi	230.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah anggota koperasi/usaha mikro yang meningkat	Kota Madiun	151 koperasi/ 25 UM	491.010.000	151 koperasi/ 25 UM	491.010.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	2	2	1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro		0,42 %	1.010.000.000	0,42 %		
			1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Madiun	Jumlah Wira Usaha Baru	Kota Madiun	87 WUB	1.010.000.000	87 WUB	1.222.100.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
				BINDANG URUSAN PENANAMAN MODAL				1.178.991.000			
2	2	2	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi		19 %	670.591.000	19 %		
			1	Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor baru	Kota Madiun	10 investor	472.366.000	10 investor	520.783.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			2	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan/Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	Kota Madiun	10 perusahaan	198.225.000	10 perusahaan	218.543.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	2	2	1	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan terselesaikan		86 %	508.400.000	86 %		
			1	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perizinan.	Jumlah izin yang diterbitkan	Kota Madiun	1.500 izin	61.000.000	1.500 izin	74.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Perizinan	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	300 orang	210.000.000	300 orang	230.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			3	Kegiatan Evaluasi Perizinan Berusaha	Persentase pemenuhan komitmen yang di evaluasi	Kota Madiun	10%	237.400.000	10%	305.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

1				2	3	4	5	6	7	8	9
				BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				813.000.000			
3	0	1	5	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan		1 %	813.000.000	1 %		
				1 Kegiatan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Kota Madiun	378 ton	260.000.000	378 ton	310.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				2 Kegiatan Peningkatan Mutu, Pengolahan dan Promosi Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan	Kota Madiun	15,4 kg/perkapi ta/tahun	553.000.000	15,4 kg/perkapi ta/tahun	658.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				BIDANG URUSAN PERTANIAN				3.197.483.380			
3	0	3	5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian		7,22 Ton/Ha	2.338.483.380	7,22 Ton/Ha		
				1 Kegiatan Peningkatan Produktivitas Pertanian	Produktivitas padi	Kota Madiun	7,22 Ton/Ha	40.348.800	7,22 Ton/Ha	500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				2 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah produk pertanian yang dikemas dan dipasarkan	Kota Madiun	2 produk	620.538.880	2 produk	250.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				4 Kegiatan Dukungan Pembiayaan Pertanian	Persentase cakupan petani penerima subsidi pupuk dan AUTP	Kota Madiun	85 %	1.331.717.600	85 %	2.500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				5 Kegiatan Penerapan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang menerapkan sistem budidaya tanaman ramah lingkungan	Kota Madiun	10 Ha	185.000.000	10 Ha	275.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				6 Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian	Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan / pembinaan / penyuluhan	Kota Madiun	117 orang	160.878.100	117 orang	325.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	0	3	6	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan		2 %	859.000.000	2 %		
				2 Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produk hasil peternakan yang dipasarkan	Kota Madiun	25 produk	439.000.000	25 produk	400.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				3 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak/ Hewan Peliharaan	Jumlah ternak dan hewan peliharaan yang terlayani / diperiksa	Kota Madiun	3.050 ekor	220.000.000	3.050 ekor	230.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				4 Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase sampel bahan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Kota Madiun	96 %	200.000.000	96 %	220.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				BIDANG URUSAN PERDAGANGAN				7.638.792.000			
3	0	6	5	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat		0,5%	1.223.457.000	0,5%		

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			1	Kegiatan Promosi Produk Perdagangan	Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan	Dinas Perdagangan Kota Madiun	15 jenis	548.000.000	15 jenis	570.000.000	Dinas Perdagangan
			2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	Jumlah ketersediaan bahan pokok	Dinas Perdagangan Kota Madiun	9 jenis	87.800.000	9 jenis	50.000.000	Dinas Perdagangan
			3	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Dinas Perdagangan Kota Madiun	7.000 buah	237.457.000	7.000 buah	230.000.000	Dinas Perdagangan
			4	Kegiatan Peningkatan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Prosentase kenaikan BDKT yang terjamin mutunya	Dinas Perdagangan Kota Madiun	20 %	23.000.000	20 %	23.000.000	Dinas Perdagangan
			5	Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan	Jumlah pemohon perpanjangan perijinan	Dinas Perdagangan Kota Madiun	75 Lembar	42.000.000	75 Lembar	35.000.000	Dinas Perdagangan
			6	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL	Jumlah PKL dengan pendapatan diatas UMK	Dinas perdagangan Kota Madiun	500 orang	125.200.000	500 orang	155.000.000	Dinas Perdagangan
			8	Kegiatan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun	Jumlah Dokumen	Dinas Perdagangan Kota Madiun	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	160.000.000	Dinas Perdagangan
3	0	6	0	1	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah Omset Pasar Rakyat	672.000 Juta (Rp)	6.365.335.000	672.000 Juta (Rp)		
			1	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dikembangkan fasilitas, sarana dan prasarananya	Dinas Perdagangan Kota Madiun	17 pasar	1.780.500.000	17 pasar	1.500.000.000	Dinas Perdagangan
			2	Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya oleh unsur masyarakat.	Dinas Perdagangan Kota Madiun	17 pasar	3.428.950.000	17 pasar	3.500.000.000	Dinas Perdagangan
			3	Kegiatan Promosi Pasar Rakyat	Jumlah omset pasar rakyat (Jt)	Dinas Perdagangan Kota Madiun	672.000 Rp.	1.045.885.000	672.000 Rp.	790.000.000	Dinas Perdagangan
			4	Kegiatan Revitalisasi Pasar-Pasar	Jumlah pasar dan pedagang yang direvitalisasi	Dinas Perdagangan Kota Madiun	3 pasar	110.000.000	3 pasar	2.600.000.000	Dinas Perdagangan
3	0	6	0	1	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal	0 buah	50.000.000	0 buah		
			1	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekati Pita Cukai Palsu, tidak di lekati Pita Cukai	Jumlah informasi Hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu	Dinas Perdagangan Kota Madiun	0 buah	50.000.000	0 buah	50.000.000	Dinas Perdagangan
					BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN			1.341.354.600			
3	0	7	2	1	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang Berstandart	17,1 %	1.241.354.600	17,1 %		
			1	Kegiatan Sosialisasi Penerapan dan Fasilitasi Standart Produk Industri (HKI) bagi IKM/IRT Kota Madiun	jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat HKI	kota madiun	40 IKM	81.500.000	40 IKM	147.000.000	Dinas Tenaga Kerja

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			2	Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan Diversifikasi Produk Industri Manufaktur dan Fasilitasi Ijin Teknis	Jumlah IKM yang mempunyai ijin PIRT	kota madiun	20 IKM	48.600.000	20 IKM	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			3	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil, Menengah Tk. Nasional; INACRAFT	jumlah produk unggulan yang di pamerkan	kota madiun	3 jenis	306.000.000	3 jenis	371.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			4	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan IKM/IRT oleh DEKRANASDA	jumlah produk unggulan kerajinan handmade yang di pamerkan	kota madiun	5 produk	300.000.000	5 produk	300.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			6	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi IKM / IRT	jumlah IKM/IRT yang meningkat SDMnya	kota madiun	110 IKM	255.254.600	110 IKM	540.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			7	Kegiatan Penyusunan Raperda Perindustrian	jumlah dokumen peraturan perindustrian	kota madiun	2 dokumen	250.000.000	2 dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja
3	3	2	1	Program Pembinaan Industri	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)		84 %	100.000.000	84 %		
		0	0	1	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau DBHCH	jumlah pengujian kadar Tar dan Nikotin	kota madiun	4 kali Pengujian	4 kali Pengujian	120.000.000	Dinas Tenaga Kerja
					BIDANG URUSAN UNSUR STAF			1.233.733.600			
4	4	4	1	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi		4 %	483.733.600	4 %		
		0	0	1	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	jenis kegiatan tpid	bagian prekokesra	3 kegiatan	3 kegiatan	170.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			2	Kegiatan Pembinaan BUMD	kontribusi PAD	bagian prekokesra	8 milyar rupiah	153.733.600	8 milyar rupiah	320.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			3	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	jumlah kegiatan pengembangan	bagian prekokesra	3 kegiatan	120.000.000	3 kegiatan	360.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			4	Kegiatan sosialisasi kebijakan atau ketentuan di bidang Lembaga Keuangan (LK)	jumlah lembaga keuangan yang sesuai dengan kriteria ojk	bagian prekokesra	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	80.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

1				2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	4	1	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Dilaksanakan		100 %	450.000.000	100 %		
			1	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan melalui Forum Tatap Muka, Media Elektronik dan Media Cetak	jumlah informasi yang disampaikan	bagian prekokesra	3 Macam	350.000.000	3 Macam	360.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			2	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	jumlah pemantau dan evaluasi	bagian prekokesra	12 kegiatan	100.000.000	12 kegiatan	160.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	4	4	2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi		100 %	300.000.000	100 %		
			1	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	jenis kegiatan promosi	bagian prekokesra	2 kegiatan	300.000.000	2 kegiatan	350.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
<b>Prioritas I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan</b>								36.612.066.240			

**Prioritas II : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing**

Kode	Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju		Perangkat Daerah			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN				165.898.687.588						
1	1	1	1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan		88 %	7.569.156.200	88 %		
			1	Kegiatan Operasional BOS Tingkat Kota	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan	94 lembaga	95.000.000	94 lembaga	95.000.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT	Jumlah Lembaga yang sesuai SPM	Dinas Pendidikan	142 lembaga	198.737.160	142 lembaga	198.737.160	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	Jumlah Lembaga yang mendapat dana BOS	Dinas Pendidikan	49 lembaga	1.185.815.040	49 lembaga	642.695.040	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			5	Kegiatan BOP Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM)	Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima bantuan	Dinas Pendidikan	400 mahasiswa	6.089.604.000	400 mahasiswa	6.089.604.000	Dinas Pendidikan
1	0	1	6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi		80 %	6.401.556.000	80 %		
			1	Kegiatan Sertifikasi Guru	Jumlah guru yang bersertifikasi	Dinas Pendidikan	125 guru	546.664.000	125 guru	485.000.000	Dinas Pendidikan
			2	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	Jumlah guru yang mengikuti penilaian angka kredit	Dinas Pendidikan	500 guru	103.319.000	500 guru	122.000.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi, OGN, Inobel, Literasi, Media Pembelajaran Berbasis IT serta Lomba Guru	Jumlah kasek yang mempunyai kinerja baik	Dinas Pendidikan	500 Guru/ KS	1.019.047.000	500 Guru/ KS	482.000.000	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan S1/S2/S3	jumlah guru yang berkualifikasi S1	Dinas Pendidikan	20 guru	271.735.000	20 guru	400.000.000	Dinas Pendidikan
			6	Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Guru Kelas dan Mapel Online serta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	jumlah guru yang memahami materi	Dinas Pendidikan	500 guru	450.076.000	500 guru	500.000.000	Dinas Pendidikan
			7	Kegiatan Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan (TU)	jumlah guru yang taat aturan	Dinas Pendidikan	80 orang	3.710.200.000	80 orang	574.200.000	Dinas Pendidikan
			8	Kegiatan Outdoor Learning Guru	jumlah guru yang mengikuti outdoor learning	Dinas Pendidikan	400 guru	300.515.000	400 guru	301.000.000	Dinas Pendidikan
1	0	1	7	Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP		100 %	142.609.452.188	100 %		
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1	jumlah lembaga yang beroperasi 1 dengan baik	SMPN 1	1 lembaga	1.102.906.750	1 lembaga	2.479.573.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	jumlah lembaga yang beroperasi 1 dengan baik	SMPN 2 Madiun	1 lembaga	960.417.339	1 lembaga	1.726.569.000	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	jumlah lembaga yang beroperasi 1 dengan baik	SMPN 3 Madiun	1 lembaga	723.468.801	1 lembaga	1.666.485.000	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	jumlah lembaga yang beroperasi 1 dengan baik	SMPN 4 Madiun	1 lembaga	896.884.010	1 lembaga	1.845.893.100	Dinas Pendidikan
			6	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	jumlah lembaga yang beroperasi 1 dengan baik	SMPN 5 Madiun	1 lembaga	447.271.000	1 lembaga	1.245.833.000	Dinas Pendidikan
			7	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	jumlah lembaga yang beroperasi 1 dengan baik	SMPN 6 Madiun	1 lembaga	848.058.200	1 lembaga	1.489.076.000	Dinas Pendidikan
			8	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	jumlah lembaga yang beroperasi 1 dengan baik	SMPN 7 Madiun	1 lembaga	856.072.800	1 lembaga	1.458.032.000	Dinas Pendidikan
			9	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8	jumlah lembaga yang beroperasi 1 dengan baik	SMPN 8 Madiun	1 lembaga	647.541.618	1 lembaga	1.204.131.000	Dinas Pendidikan



1		2		3		4		5		6		7		8		9	
			10	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SMPN 9 Madiun	1 lembaga	970.102.100	1 lembaga	1.581.439.000	Dinas Pendidikan						
			11	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SMPN 10 Madiun	1 lembaga	990.883.300	1 lembaga	2.011.705.000	Dinas Pendidikan						
			12	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SMPN 11 Madiun	1 lembaga	572.024.860	1 lembaga	1.284.510.000	Dinas Pendidikan						
			13	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SMPN 12 Madiun	1 lembaga	788.113.997	1 lembaga	1.376.178.500	Dinas Pendidikan						
			14	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SMPN 13 Madiun	1 lembaga	721.870.600	1 lembaga	1.472.486.700	Dinas Pendidikan						
			15	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SMPN 14 Madiun	1 lembaga	549.836.936	1 lembaga	906.011.000	Dinas Pendidikan						
			16	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Kartoharjo	1 lembaga	398.921.930	1 lembaga	529.245.900	Dinas Pendidikan						
			17	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Kartoharjo	1 lembaga	174.225.700	1 lembaga	230.738.000	Dinas Pendidikan						
			18	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 03 Kartoharjo	1 lembaga	158.714.129	1 lembaga	236.899.400	Dinas Pendidikan						
			19	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Klegen	1 lembaga	439.917.280	1 lembaga	658.045.400	Dinas Pendidikan						
			20	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Klegen	1 lembaga	235.867.830	1 lembaga	341.874.000	Dinas Pendidikan						
			21	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 03 Klegen	1 lembaga	427.649.204	1 lembaga	341.874.000	Dinas Pendidikan						
			22	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 04 Klegen	1 lembaga	188.681.900	1 lembaga	263.635.900	Dinas Pendidikan						
			23	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN Oro-Oro Ombo	1 lembaga	404.180.920	1 lembaga	617.326.500	Dinas Pendidikan						
			24	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Rejomulyo	1 lembaga	152.983.600	1 lembaga	203.313.000	Dinas Pendidikan						
			25	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Rejomulyo	1 lembaga	118.577.800	1 lembaga	196.376.000	Dinas Pendidikan						
			26	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Kanigoro	1 lembaga	203.514.221	1 lembaga	288.996.400	Dinas Pendidikan						
			27	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Kanigoro	1 lembaga	236.472.500	1 lembaga	420.286.200	Dinas Pendidikan						
			28	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 03 Kanigoro	1 lembaga	325.998.860	1 lembaga	365.292.300	Dinas Pendidikan						
			29	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN Sukosari	1 lembaga	133.033.780	1 lembaga	232.550.000	Dinas Pendidikan						
			30	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pilangbango	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN Pilangbango	1 lembaga	434.648.280	1 lembaga	575.616.800	Dinas Pendidikan						
			31	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Tawangrejo	1 lembaga	245.295.129	1 lembaga	280.264.000	Dinas Pendidikan						

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Tawangrejo	1 lembaga	201.132.690	1 lembaga	242.228.600	Dinas Pendidikan
		3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN kelun	1 lembaga	219.314.286	1 lembaga	342.661.300	Dinas Pendidikan
		3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Manguharjo	1 lembaga	442.249.500	1 lembaga	670.000.000	Dinas Pendidikan
		3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Nambangan Lor	1 lembaga	361.331.850	1 lembaga	633.047.000	Dinas Pendidikan
		3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Nambangan Lor	1 lembaga	168.804.293	1 lembaga	452.794.600	Dinas Pendidikan
		3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Madiun Lor	1 lembaga	200.240.036	1 lembaga	299.467.000	Dinas Pendidikan
		3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Madiun Lor	1 lembaga	187.439.615	1 lembaga	423.978.400	Dinas Pendidikan
		3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 03 Madiun Lor	1 lembaga	713.782.190	1 lembaga	1.085.192.500	Dinas Pendidikan
		4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 04 Madiun Lor	1 lembaga	368.390.550	1 lembaga	598.514.000	Dinas Pendidikan
		4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 05 Madiun Lor	1 lembaga	404.274.356	1 lembaga	644.202.000	Dinas Pendidikan
		4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Nambangan Kidul	1 lembaga	215.169.075	1 lembaga	270.425.000	Dinas Pendidikan
		4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Kidul	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Nambangan Kidul	1 lembaga	171.752.900	1 lembaga	280.084.700	Dinas Pendidikan
		4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Nambangan Kidul	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 03 Nambangan Kidul	1 lembaga	367.121.700	1 lembaga	484.579.000	Dinas Pendidikan
		4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Nambangan Kidul	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 04 Nambangan Kidul	1 lembaga	163.858.693	1 lembaga	308.742.000	Dinas Pendidikan
		4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Winongo	1 %	311.609.705	1 %	529.388.000	Dinas Pendidikan
		4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Winongo	1 lembaga	182.398.586	1 lembaga	259.749.100	Dinas Pendidikan
		4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Ngegong	1 lembaga	165.504.570	1 lembaga	0	Dinas Pendidikan
		4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan		1 lembaga	392.924.400	1 lembaga	606.831.200	Dinas Pendidikan
		5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Pangongangan	1 lembaga	171.380.000	1 lembaga	371.268.000	Dinas Pendidikan
		5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Pangongangan	1 lembaga	289.615.700	1 lembaga	557.271.000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			5 2	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN Sogaten	1 lembaga	237.277.590	1 lembaga	370.482.000	Dinas Pendidikan
			5 3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Taman	1 lembaga	448.761.170	1 lembaga	758.817.000	Dinas Pendidikan
			5 4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Taman	1 lembaga	139.473.290	1 lembaga	285.249.500	Dinas Pendidikan
			5 5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 03 Taman	1 lembaga	216.522.786	1 lembaga	302.131.000	Dinas Pendidikan
			5 6	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Pandean	1 lembaga	359.064.695	1 lembaga	730.143.000	Dinas Pendidikan
			5 7	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Pandean	1 lembaga	408.003.750	1 lembaga	625.127.000	Dinas Pendidikan
			5 8	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN Banjarejo	1 lembaga	483.712.742	1 lembaga	689.502.000	Dinas Pendidikan
			5 9	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Mojorejo	1 lembaga	259.985.858	1 lembaga	301.444.930	Dinas Pendidikan
			6 0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Mojorejo	1 lembaga	572.308.056	1 lembaga	1.082.127.376	Dinas Pendidikan
			6 1	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Manisrejo	1 lembaga	432.337.400	1 lembaga	736.593.000	Dinas Pendidikan
			6 2	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Manisrejo	1 lembaga	330.217.250	1 lembaga	636.133.000	Dinas Pendidikan
			6 3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 03 Manisrejo	1 lembaga	275.372.900	1 lembaga	526.260.200	Dinas Pendidikan
			6 4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 4 Manisrejo	1 lembaga	382.671.300	1 lembaga	485.495.000	Dinas Pendidikan
			6 5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Demangan	1 lembaga	190.640.340	1 lembaga	320.740.500	Dinas Pendidikan
			6 6	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Demangan	1 lembaga	198.442.583	1 lembaga	330.005.000.000	Dinas Pendidikan
			6 7	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Josenan	1 lembaga	215.164.400	1 lembaga	333.616.000	Dinas Pendidikan
			6 8	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 02 Josenan	1 lembaga	193.993.800	1 lembaga	323.078.000	Dinas Pendidikan
			6 9	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 03 Josenan	1 lembaga	180.271.850	1 lembaga	275.000.000	Dinas Pendidikan
			7 0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN Kejuron	1 lembaga	181.820.100	1 lembaga	278.328.000	Dinas Pendidikan
			7 1	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN Kuncen	1 lembaga	162.478.800	1 lembaga	239.000.000	Dinas Pendidikan
			7 2	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 1	1 lembaga	1.303.000.000	1 lembaga	844.800.000	Dinas Pendidikan
			7 3	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 2	1 lembaga	744.000.000	1 lembaga	840.400.000	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	7 4	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 3	1 lembaga	573.000.000	1 lembaga	623.700.000	Dinas Pendidikan
	7 5	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 4	1 lembaga	886.000.000	1 lembaga	986.700.000	Dinas Pendidikan
	7 6	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 5	1 lembaga	462.000.000	1 lembaga	510.400.000	Dinas Pendidikan
	7 7	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 6	1 lembaga	650.000.000	1 lembaga	710.600.000	Dinas Pendidikan
	7 8	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 7	1 lembaga	764.000.000	1 lembaga	817.300.000	Dinas Pendidikan
	7 9	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 8	1 lembaga	550.000.000	1 lembaga	602.800.000	Dinas Pendidikan
	8 0	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 9	1 lembaga	439.000.000	1 lembaga	479.600.000	Dinas Pendidikan
	8 1	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 10	1 lembaga	518.000.000	1 lembaga	578.600.000	Dinas Pendidikan
	8 2	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 11	1 lembaga	651.000.000	1 lembaga	722.700.000	Dinas Pendidikan
	8 3	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 12	1 lembaga	723.000.000	1 lembaga	779.900.000	Dinas Pendidikan
	8 4	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 13	1 lembaga	725.000.000	1 lembaga	796.400.000	Dinas Pendidikan
	8 5	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SMP Negeri 14	1 lembaga	376.000.000	1 lembaga	408.100.000	Dinas Pendidikan
	8 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Kartoharjo	1 lembaga	288.800.000	1 lembaga	315.000.000	Dinas Pendidikan
	8 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Kartoharjo	1 lembaga	52.800.000	1 lembaga	51.300.000	Dinas Pendidikan
	8 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 03 Kartoharjo	1 lembaga	66.400.000	1 lembaga	62.100.000	Dinas Pendidikan
	8 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Klegen	1 lembaga	296.000.000	1 lembaga	324.000.000	Dinas Pendidikan
	9 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Klegen	1 lembaga	121.600.000	1 lembaga	122.400.000	Dinas Pendidikan
	9 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 03 Klegen	1 lembaga	287.200.000	1 lembaga	310.500.000	Dinas Pendidikan

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
			9 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegén	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 04 Klegén	1 lembaga	85.600.000	1 lembaga	89.100.000	Dinas Pendidikan						
			9 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Oro Oro Ombo	1 lembaga	228.000.000	1 lembaga	235.800.000	Dinas Pendidikan						
			9 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Rejomulyo	1 lembaga	84.800.000	1 lembaga	85.500.000	Dinas Pendidikan						
			9 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Rejomulyo	1 lembaga	51.200.000	1 lembaga	56.700.000	Dinas Pendidikan						
			9 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Kanigoro	1 lembaga	92.800.000	1 lembaga	83.700.000	Dinas Pendidikan						
			9 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Kanigoro	1 lembaga	136.000.000	1 lembaga	147.600.000	Dinas Pendidikan						
			9 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 03 Kanigoro	1 lembaga	143.200.000	1 lembaga	150.300.000	Dinas Pendidikan						
			9 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Sukosari	1 lembaga	33.600.000	1 lembaga	31.500.000	Dinas Pendidikan						
			1 0 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Pilangbango	1 lembaga	184.000.000	1 lembaga	178.200.000	Dinas Pendidikan						
			1 0 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Tawangrejo	1 lembaga	133.600.000	1 lembaga	147.600.000	Dinas Pendidikan						
			1 0 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Tawangrejo	1 lembaga	86.400.000	1 lembaga	80.100.000	Dinas Pendidikan						
			1 0 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Kelun	1 lembaga	141.600.000	1 lembaga	156.600.000	Dinas Pendidikan						
			1 0 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Madiun Lor	1 lembaga	272.000.000	1 lembaga	286.200.000	Dinas Pendidikan						
			1 0 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Nambangan Lor	1 lembaga	248.000.000	1 lembaga	269.100.000	Dinas Pendidikan						
			1 0 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Nambangan Lor	1 lembaga	114.400.000	1 lembaga	117.000.000	Dinas Pendidikan						
			1 0 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Madiun Lor	1 lembaga	105.600.000	1 lembaga	117.000.000	Dinas Pendidikan						
			1 0 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Madiun Lor	1 lembaga	122.400.000	1 lembaga	129.600.000	Dinas Pendidikan						
			1 0 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 03 Madiun Lor	1 lembaga	419.200.000	1 lembaga	466.200.000	Dinas Pendidikan						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1 1 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 04 Madiun Lor	1 lembaga	293.600.000	1 lembaga	310.500.000	Dinas Pendidikan
	1 1 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 05 Madiun Lor	1 lembaga	362.400.000	1 lembaga	398.700.000	Dinas Pendidikan
	1 1 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Nambangan Kidul	1 lembaga	124.800.000	1 lembaga	126.900.000	Dinas Pendidikan
	1 1 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Nambangan Kidul	1 lembaga	164.200.000	1 lembaga	91.800.000	Dinas Pendidikan
	1 1 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 03 Nambangan Kidul	1 lembaga	247.200.000	1 lembaga	282.600.000	Dinas Pendidikan
	1 1 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 04 Nambangan Kidul	1 lembaga	122.400.000	1 lembaga	124.200.000	Dinas Pendidikan
	1 1 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Winongo	1 lembaga	277.600.000	1 lembaga	291.600.000	Dinas Pendidikan
	1 1 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Winongo	1 lembaga	54.400.000	1 lembaga	55.800.000	Dinas Pendidikan
	1 1 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Ngegong	1 lembaga	197.800.000	1 lembaga	135.900.000	Dinas Pendidikan
	1 1 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Patihan	1 lembaga	288.800.000	1 lembaga	306.900.000	Dinas Pendidikan
	1 2 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Pangongangan	1 lembaga	77.600.000	1 lembaga	72.900.000	Dinas Pendidikan
	1 2 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Pangongangan	1 lembaga	256.800.000	1 lembaga	279.000.000	Dinas Pendidikan
	1 2 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Sogaten	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Sogaten	1 lembaga	145.600.000	1 lembaga	156.600.000	Dinas Pendidikan
	1 2 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Taman	1 lembaga	364.800.000	1 lembaga	402.300.000	Dinas Pendidikan
	1 2 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Taman	1 lembaga	64.000.000	1 lembaga	66.600.000	Dinas Pendidikan
	1 2 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 03 Taman	1 lembaga	82.400.000	1 lembaga	90.000.000	Dinas Pendidikan
	1 2 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Pandean	1 lembaga	288.000.000	1 lembaga	311.400.000	Dinas Pendidikan
	1 2 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Pandean	1 lembaga	264.000.000	1 lembaga	282.600.000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			1 2 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Banjarejo	1 lembaga	374.400.000	1 lembaga	401.400.000	Dinas Pendidikan
			1 2 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Mojorejo	1 lembaga	109.600.000	1 lembaga	104.400.000	Dinas Pendidikan
			1 3 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan		1 lembaga	436.000.000	1 lembaga	474.300.000	Dinas Pendidikan
			1 3 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	SDN 01 Manisrejo	1 lembaga	283.200.000	1 lembaga	314.100.000	Dinas Pendidikan
			1 3 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Mojorejo	1 lembaga	251.200.000	1 lembaga	271.800.000	Dinas Pendidikan
			1 3 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 03 Manisrejo	1 lembaga	145.600.000	1 lembaga	157.500.000	Dinas Pendidikan
			1 3 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 04 Manisrejo	1 lembaga	194.400.000	1 lembaga	189.000.000	Dinas Pendidikan
			1 3 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Demangan	1 lembaga	130.400.000	1 lembaga	130.500.000	Dinas Pendidikan
			1 3 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Demangan	1 lembaga	138.400.000	1 lembaga	151.200.000	Dinas Pendidikan
			1 3 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 01 Josenan	1 lembaga	149.600.000	1 lembaga	166.500.000	Dinas Pendidikan
			1 3 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 02 Josenan	1 lembaga	145.600.000	1 lembaga	161.100.000	Dinas Pendidikan
			1 3 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN 03 Josenan	1 lembaga	86.400.000	1 lembaga	90.000.000	Dinas Pendidikan
			1 4 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Kejuron	1 lembaga	50.400.000	1 lembaga	52.200.000	Dinas Pendidikan
			1 4 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	SDN Kuncen	1 lembaga	68.800.000	1 lembaga	72.000.000	Dinas Pendidikan
			1 4 2	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah siswa yang memenuhi kualifikasi	Dinas Pendidikan	94 lembaga	3.812.709.400	94 lembaga	3.538.714.320	Dinas Pendidikan
			1 4 3	Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba USBN SD, SMP, Kegiatan USBN Pendidikan Agama SD dan SMP, Kegiatan USBN SD, SMP dan UN SMP	Jumlah Lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN	Dinas Pendidikan	93 lembaga	808.480.640	93 lembaga	808.475.000	Dinas Pendidikan
			1 4 4	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	Jumlah Siswa yang berprestasi	Dinas Pendidikan	522 siswa	687.260.530	522 siswa	611.161.320	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			145	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP	Jumlah Siswa yang berprestasi	Dinas Pendidikan	309 siswa	1.536.430.320	309 siswa	1.506.651.000	Dinas Pendidikan
			146	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	Jumlah lembaga yang terakreditasi	Dinas Pendidikan	106 lembaga	1.026.514.850	106 lembaga	1.101.902.400	Dinas Pendidikan
			147	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajaran	Jumlah lembaga yang memahami materi pemberdayaan pengembangan kurikulum 13	Dinas Pendidikan	93 lembaga	681.084.000	93 lembaga	950.916.100	Dinas Pendidikan
			148	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	Jumlah Lembaga yang sesuai SPM	Dinas Pendidikan	106 lembaga	615.171.720	106 lembaga	614.661.320	Dinas Pendidikan
			151	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhab/dibangun sesuai standar	Lembaga	7 gedung	40.000.000.000	7 gedung	50.000.000.000	Dinas Pendidikan
			153	Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan	jumlah paket	Dinas Pendidikan	1 paket	47.121.250.000	1 paket	44.196.250.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
			1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD		100 %	6.538.619.200	100 %		
			1	Kegiatan Penyelenggaraan TK Pembina	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	TK Pembina	1 lembaga	376.297.000	1 lembaga	376.297.000	Dinas Pendidikan
			2	Kegiatan Workshop Kurikulum PAUD	jumlah lembaga yang memahami kurikulum PAUD	Dinas Pendidikan	169 lembaga	250.000.000	169 lembaga	250.000.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Terpadu Kota Madiun	jumlah gugus yang berprestasi	Dinas Pendidikan	22 gugus	490.325.600	22 gugus	490.325.600	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Bantuan BOP PAUD	jumlah lembaga yang mendapat BOP	Dinas Pendidikan	169 lembaga	4.826.016.600	169 lembaga	4.826.016.600	Dinas Pendidikan
			7	Kegiatan Pagelaran Hari Anak Nasional	jumlah anak yang mengikuti HAN	Dinas Pendidikan	2000 anak	595.980.000	2000 anak	595.980.000	Dinas Pendidikan
1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	
			1	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga yang Terakreditasi		100 lembaga	2.779.904.000	100 lembaga		
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang terakreditasi	Dinas Pendidikan	5 lembaga	964.840.000	5 lembaga	964.840.000	Dinas Pendidikan
			2	Kegiatan Pembinaan Lembaga PAUD dan PNF	jumlah lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dinas Pendidikan	230 lembaga	106.064.000	230 lembaga	106.064.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Bimbingan Teknis Extra Kurikuler Pembina Pramuka	jumlah peserta yang mengikuti bimtek ekskul pembina pramuka	Dinas Pendidikan	263 peserta	1.084.000.000	263 peserta	917.050.000	Dinas Pendidikan



1				2	3	4	5	6	7	8	9		
			4	Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	jumlah peserta yang memahami workshop pengelolaan perpustakaan	Dinas Pendidikan	94 lembaga	375.000.000	94 lembaga	375.000.000	Dinas Pendidikan		
			5	Kegiatan Workhop Penyusunan Bahan Ajar Mulok Bahasa Daerah	kegiatan workhop penyusunan bahan ajar mulok bahasa daerah	Dinas Pendidikan	94 lembaga	250.000.000	94 lembaga	250.000.000	Dinas Pendidikan		
				BIDANG URUSAN KESEHATAN				155.724.199.346					
1	1	1	1	0	0	2	0	1	8	1	2	0	1
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan		91,13 %	36.886.788.000	91,13 %				
			1	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang diadakan	RSUD Kota Madiun	2 jenis	5.881.393.000	2 jenis	3.000.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah		
			2	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Prosentase sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang layak pakai	Dinkes KOTA Madiun	100 %	5.696.091.000	100 %	5.696.091.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		
			4	Kegiatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Masyarakat Kota Madiun	88.966 orang	23.627.334.000	88.966 orang	23.627.334.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		
			5	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Manguharjo	90 %	266.050.000	90 %	266.050.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		
			6	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Patihan	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Patihan	88 %	212.330.000	88 %	212.330.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		
			7	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Demangan	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Demangan	87 %	326.000.000	87 %	936.500.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		
			8	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Banjarejo	93 %	346.215.000	93 %	346.215.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	
				Puskesmas Banjarejo								
			9	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Oro-Oro Ombo	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Oro-Oro Ombo	86 %	281.900.000	86 %	281.900.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			10	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Tawangrejo	90 %	249.475.000	90 %	249.475.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
1	0	2	0	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart	45 %	7.936.798.000	45 %			
				1	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	85 %	4.674.591.000	85 %	4.835.185.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Prosentase kelurahan STBM	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	63 %	797.773.000	63 %	688.210.400	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	100 %	1.251.749.000	100 %	1.514.615.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				4	Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK)	Prosentase SPM yang mencapai Target	Dinas Kesehatan dan KB	100 %	749.593.000	100 %	574.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				5	Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Bk Prov)	Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	Kota Madiun	41 %	55.000.000	41 %	55.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				6	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Monitoring Evaluasi	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	6 puskesmas	39.448.000	6 puskesmas	250.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				7	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Bk Prov)	Prosentase Poskestren berstrata PURI	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	70 %	121.029.000	70 %	121.029.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				8	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK)	Jumlah sarana farmasi dan IRT yang terpantau	40 saryankes 30 irtp di Kota Madiun	70 sarana	247.615.000	70 sarana	247.615.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	0	2	0	1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa		10 %	1.973.830.000	10 %		
				1	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	70 %	966.145.000	70 %	809.372.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				2	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	62 %	816.674.000	62 %	564.867.500	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			3	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi	Prosentase capaian indikator surveillence dan imunisasi mencapai target	Dinas Kesehatan dan Kb	100 %	191.011.000	100 %	130.855.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	0	2	1	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi		51,72 %	27.787.920.796	51,72 %		
			1	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Obat kadaluarsa < 1%	Dinas Kesehatan dan KB	1 %	166.765.000	1 %	160.050.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK)	Prosentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terlaksana	Dinas Kesehatan dan KB	100 %	3.171.009.000	100 %	3.171.009.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Kesehatan	Persentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar	Dinas Kesehatan dan KB	92 %	297.997.000	92 %	581.402.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			5	Kegiatan Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dasar dan Rujukan	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Dinas Kesehatan dan KB	100 %	2.992.637.796	100 %	848.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			6	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Manguharjo (BLUD)	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Puskesmas Manguharjo	84 %	2.172.155.000	84 %	2.184.554.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			7	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Patihan (BLUD)	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Puskesmas Patihan	90 %	1.273.856.000	90 %	1.161.500.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			8	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Oro-Oro Ombo (BLUD)	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Puskesmas Oro-Oro Ombo	82 %	1.972.413.000	82 %	2.101.668.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			9	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Tawangrejo (BLUD)	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Puskesmas Tawangrejo	89 %	1.611.104.000	89 %	1.640.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			0	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Banjarejo (BLUD)	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Puskesmas Banjarejo	94 %	2.669.288.000	94 %	3.183.543.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Demangan (BLUD)	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Puskesmas Demangan	81,5 %	2.278.377.000	81,5 %	2.249.798.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Patihan	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Puskesmas Patihan	94 %	1.009.680.000	94 %	1.439.435.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Oro-oro Ombo	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Puskesmas Oro-Oro Ombo	91 %	938.112.000	91 %	1.735.159.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			1 4	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tawangrejo	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Puskesmas Tawangrejo	91 %	1.130.976.000	91 %	1.727.440.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1 5	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Banjarejo	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Puskesmas Banjarejo	94 %	1.120.224.000	94 %	1.849.030.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1 6	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Demangan	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Puskesmas Demangan	93 %	881.160.000	93 %	1.537.670.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1 7	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manguharjo	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Puskesmas Manguharjo	93 %	942.984.000	93 %	1.792.639.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1 8	Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Puskesmas Tawangrejo	1 dokter	30.000.000	1 dokter	30.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2 0	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Wilayah Puskesmas Manguharjo	100 %	463.002.000	100 %	517.049.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2 1	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Wilayah Puskesmas Patihan	100 %	459.810.000	100 %	459.746.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2 2	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Wilayah Puskesmas Demangan	100 %	535.000.000	100 %	535.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2 3	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	Wilayah kerja Puskesmas Banjarejo	100 %	580.632.000	100 %	548.968.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2 4	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro-oro Ombo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	Wilayah kerja Puskesmas Oro-Oro Ombo	100 %	496.964.000	100 %	529.079.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2 5	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	Wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo	100 %	564.295.000	100 %	564.295.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2 6	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase Obat kadaluarsa < 1%	Dinkes Kb	1 %	29.480.000	1 %	29.480.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	1 0 2	1 2 0 2	1 5	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar		91,13 %	4.984.911.000	91,13 %		
			1	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	RSUD Kota Madiun	3 unit	1.256.761.000	3 unit	500.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			2	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	RSUD Kota Madiun	24 jenis	3.404.950.000	24 jenis	12.366.158.581	Rumah Sakit Umum Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Gedung/Bangunan Rumah Sakit	Jumlah dokumen perencanaan teknis (DED) pembangunan gedung/bangunan rumah sakit yang disusun	RSUD Kota Madiun	1 dokumen	323.200.000	1 dokumen	471.349.673	Rumah Sakit Umum Daerah
1	0	2	2	Program Peningkatan Kinerja BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah		100 %	76.153.951.550	100 %		
			1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan BLUD	Jumlah kebutuhan operasional BLUD	RSUD Kota Madiun	60 jenis	76.153.951.550	60 jenis	91.552.030.798	Rumah Sakit Umum Daerah
				BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA				4.152.697.000			
2	0	8	2	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Peserta KB Aktif MKJP		42,75 %	4.152.697.000	42,75 %		
			1	Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina	Kota Madiun	67 %	762.783.000	67 %	570.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2	Kegiatan Advokasi, Penggerakkan dan Informasi KB	Prosentase cakupan penyediaan informasi dan data mikro	Kota Madiun	100 %	575.706.000	100 %	983.312.530	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			3	Kegiatan Pengendalian Penduduk	Prosentase usia kawin pertama perempuan	Kota Madiun	3,5 %	1.060.090.000	3,5 %	1.282.708.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			4	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB Aktif	Kota Madiun	7 Kampung KB	1.013.768.000	7 Kampung KB	1.144.549.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			5	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan	Dinkes dan Kb	2 paket	740.350.000	2 paket	1.418.620.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				BIDANG URUSAN TENAGA KERJA				3.904.336.820			
2	0	1	2	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		79,25 %	938.765.320	79,25 %		
			1	Kegiatan Updating data Pengangguran Tenaga Kerja	Tersedianya data ketenagakerjaan atau pengangguran	kota madiun	1 dokumen	180.584.000	1 dokumen	403.882.000	Dinas Tenaga Kerja
			2	Kegiatan Penyebarluasan Optimalisasi Informasi Pasar Kerja dan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri maupun luar negeri	kota madiun	600 orang	149.170.000	600 orang	391.630.000	Dinas Tenaga Kerja
			3	Kegiatan Pameran Bursa Kerja Job Market Fair	jumlah pencari kerja yang terserap di dunia kerja	kota madiun	100 orang	120.000.000	100 orang	520.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			4	Kegiatan penerapan Tehnologi Tepat Guna	jumlah angkatan kerja yang mendapatkan penerapan teknologi tepat guna	kota madiun	40 angkatan kerja	228.749.000	40 angkatan kerja	380.000.000	Dinas Tenaga Kerja

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			5	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan berkompeten	kota madiun	35 orang	121.297.360	35 orang	122.297.360	Dinas Tenaga Kerja
			6	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan	jumlah wirausaha baru yang berkembang	kota madiun	40 orang	138.964.960	40 orang	137.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	2	2	1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten		81 %	972.571.500	81 %		
			1	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	jumlah peserta pelatihan yang berkompeten	kota madiun	200 orang	972.571.500	200 orang	973.571.500	Dinas Tenaga Kerja
2	2	2	1	Program Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi		63 %	1.993.000.000	63 %		
			1	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	kota madiun	12 kasus/ pengaduan	50.000.000	12 kasus/ pengaduan	87.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			2	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan	-	350 perusahaan	271.000.000	350 perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja
			3	Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja	jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan tenaga kerja	kota madiun	150 Tenaga Kerja	156.000.000	150 Tenaga Kerja	236.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			4	Kegiatan Asuransi Tenaga Kerja Sektor Informal (SIAGA KITA)	jumlah tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS ketenagakerjaan dari PBID	kota madiun	21.000 Tenaga Kerja Sektor Informal	1.516.000.000	21.000 Tenaga Kerja Sektor Informal	5.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja
				BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN				1.285.000.000			
2	2	2	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan		72 %	1.285.000.000	72 %		
			1	Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Kota Madiun	36 pembinaan	395.000.000	36 pembinaan	780.994.710	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2	Kegiatan Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah Pengunjung	Kota Madiun	87.740 orang	635.000.000	87.740 orang	1.054.354.060	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			3	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Pustaka	Kota Madiun	3.500 eksemplar	255.000.000	3.500 eksemplar	365.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				BIDANG URUSAN KETRANSMIGRASI				32.694.480			

1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	2	1		Program Ketransmigrasian	Persentase Pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi		81 %	32.694.480	81 %		
				1	Kegiatan Penyelenggaraan ketransmigrasian	jumlah sosialisasi ketransmigrasian	kota madiun	1 kegiatan	32.694.480	1 kegiatan	30.400.000	Dinas Tenaga Kerja
<b>Prioritas II : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing</b>									330.997.615.234			

**Prioritas III : Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata**

Kode	Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju		Perangkat Daerah			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.573.050.000						
2	2 1 3	2 1 0 1	1 5	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	17 orang	6.573.050.000	17 orang			
			1	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	DISBUDPAR PORA	2 event	1.304.050.000	2 event	1.850.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			2	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	DISBUDPAR PORA	3 unit	2.314.000.000	3 unit	3.500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan	DISBUDPAR PORA	4 event	2.955.000.000	4 event	8.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN						5.480.000.000				
2	2 1 6	2 1 0 1	1 5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang di Pentaskan		40 %	5.480.000.000	40 %		
			1	Kegiatan Festival Seni	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	DISBUDPAR PORA	33 festival	1.570.000.000	33 festival	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			2	Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya	Prosentase benda atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan	DISBUDPAR PORA	21 %	700.000.000	21 %	900.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			3	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	DISBUDPAR PORA	25 event	3.210.000.000	25 event	4.500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	BIDANG URUSAN PARIWISATA							1.798.254.000			

1				2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	2	1	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan		28 %	1.798.254.000	28 %		
				1 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah laporan kepariwisataan	DISBUDPAR PORA	2 Laporan	398.254.000	2 Laporan	550.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
				2 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam Negeri	Jumlah promosi pariwisata	DISBUDPAR PORA	4 event	750.000.000	4 event	2.500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
				3 Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pemberdayaan sumber daya pariwisata yang diselenggarakan	DISBUDPAR PORA	2 event	650.000.000	2 event	1.100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
<b>Prioritas III : Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata</b>								13.851.304.000			

**Prioritas IV : Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah**

Kode	Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju		Perangkat Daerah			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				194.945.400.000						
1	0	1	1	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan		100 %	47.331.400.000	100 %		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dibangun	Kota Madiun	8 gedung	29.300.000.000	8 gedung	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2 Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	200 orang	550.000.000	200 orang	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				3 Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Lokasi	Kota Madiun	27 lokasi	17.481.400.000	27 lokasi	35.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0	3	3	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik		95 %	83.814.000.000	95 %		
				1 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah lokasi	Kota Madiun	85 ruas jalan	39.990.000.000	85 ruas jalan	75.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	5 dokumen	1.940.000.000	5 dokumen	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				3 Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	Jumlah lokasi	Kota Madiun	3 lokasi	11.500.000.000	3 lokasi	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				5 Kegiatan Peningkatan Jalan	Jumlah Lokasi	Kota Madiun	2 lokasi	13.384.000.000	2 lokasi	14.520.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



1				2	3	4	5	6	7	8	9
			7	Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Lokasi		20 lokasi	16.000.000.000	20 lokasi	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			9	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Ring Road	Jumlah Lokasi	Kota Madiun	1 lokasi	1.000.000.000	1 lokasi	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0	3	1 0 8 3 0 1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air tidak Tersumbat		90,50 %	53.150.000.000	90,50 %		
			1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Dokumen DED Saluran Drainas/ Gorong-gorong	Kota Madiun	8 dokumen	1.000.000.000	8 dokumen	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			2	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang saluran yang dibangun	Kota Madiun	1.500 meter	49.650.000.000	1.500 meter	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kecamatan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah kecamatan	Kota Madiun	3 kecamatan	2.500.000.000	3 kecamatan	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0	3	1 0 3 0 1	Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang		10 Titik	10.650.000.000	10 Titik		
			1	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan/ Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	Kota Madiun	92 %	650.000.000	92 %	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			2	Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Jumlah lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kota Madiun	10 titik	5.000.000.000	10 titik	50.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			4	Kegiatan Penataan Rumah Jaga dan Kawasan Rumah Pompa Pandan	Jumlah Lokasi	Kota Madiun	1 titik	5.000.000.000	1 titik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.730.000.000			
1	0	4	1 0 5 4 0 1	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Layak Huni dan Bersantiasi		99,35 %	12.730.000.000	99,35 %		
			1	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan data/ Kajian Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pembuatan data/kajian perumahan yang dihasilkan	Kota Madiun	1 dokumen	566.000.000	1 dokumen	150.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			2	Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah rumah yang disediakan	Kota Madiun	1 lokasi	504.000.000	1 lokasi	1.650.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			3	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan	Jumlah rumah yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	Kota Madiun	1 lokasi	2.704.000.000	1 lokasi	4.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			5	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Permukiman yang	Kota Madiun	2 dokumen	606.000.000	2 dokumen	150.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1				2	3	4	5	6	7	8	9
					dihasilkan						
			6	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi sarana prasarana permukiman yang disediakan	Kota Madiun	3 kecamatan	6.700.000.000	3 kecamatan	5.500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			7	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman	Jumlah permukiman yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	Kota Madiun	5 lokasi	1.650.000.000	5 lokasi	1.800.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				9.215.385.544			
2	2	2	1	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Kelengkapan Jalan		75 %	5.771.991.480	75 %		
				1 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Kota Madiun	632 unit	446.858.720	632 unit	460.000.000	Dinas Perhubungan
				2 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Kegiatan	Kota Madiun	6 kali	1.506.755.000	6 kali	1.700.000.000	Dinas Perhubungan
				3 Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen	Kota madiun	3 dokumen	560.377.760	3 dokumen	550.000.000	Dinas Perhubungan
				4 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	Kota Madiun	4.000 m2	600.000.000	4.000 m2	400.000.000	Dinas Perhubungan
				5 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah Peralatan dan perlengkapan lalu lintas	Kota Madiun	937 unit	2.658.000.000	937 unit	7.422.000.000	Dinas Perhubungan
2	2	2	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kinerja angkutan Umum		40 %	3.443.394.064	40 %		
				1 Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang	Jumlah Orang	Kota Madiun	119.256 orang	1.243.925.360	119.256 orang	1.500.000.000	Dinas Perhubungan
				2 Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Barang	Jumlah angkutan barang yang di data	Kota Madiun	23.000 kendaraan	229.905.104	23.000 kendaraan	179.905.104	Dinas Perhubungan
				3 Kegiatan Pelatihan SDM Perhubungan	Jumlah SDM yang terampil	Kota Madiun	1250 orang	126.970.000	1250 orang	186.970.000	Dinas Perhubungan
				4 Kegiatan Pembangunan Halte	Luas Halte	Kota Madiun	27 m2	130.000.000	27 m2	110.000.000	Dinas Perhubungan
				5 Kegiatan Kalibrasi Pengujian Alat Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat yang di Kalibrasi	Kota Madiun	12 unit	106.000.000	12 unit	106.000.000	Dinas Perhubungan
				6 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah awak kendaraan yang di beri penghargaan	Kota Madiun	6 peserta	42.382.000	6 peserta	42.382.000	Dinas Perhubungan
				7 Kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Wahana Tata Nugraha	Jumlah Penilaian	kota Madiun	1 kali	66.180.000	1 kali	66.180.000	Dinas Perhubungan
				8 Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalin dan Angkutan	Jumlah orang yang paham	Kota madiun	1.000 orang	170.140.000	1.000 orang	170.140.000	Dinas Perhubungan

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			9	Kegiatan Akreditasi PKB	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	1 dokumen	73.502.000	1 dokumen	73.502.000	Dinas Perhubungan
			1 2	Kegiatan Pengelolaan Operasional Tempat Parkir Khusus	Jumlah Pegawai	Kota madiun	13 orang	710.062.400	13 orang	500.000.000	Dinas Perhubungan
			1 3	Kegiatan Pengelolaan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Pegawai	Kota Madiun	15 orang	544.327.200	15 orang	500.000.000	Dinas Perhubungan
<b>Prioritas IV : Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah</b>								216.890.785.544			

**Prioritas V : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana**

Kode	Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				1.700.000.000			
1 0 3 0 1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW		100 %	1.700.000.000	100 %		
	1 Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang diperdakan	Kota Madiun	100 %	400.000.000	100 %	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2 Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Jumlah surat teguran yang diterbitkan	Kota Madiun	250 surat	300.000.000	250 surat	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	3 Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				27.128.906.000			
1 0 4 0 1	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Permakaman yang dikelola		77,67 %	27.128.906.000	77,67 %		
	2 Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah RTH yang dibangun	Kota Madiun	6 lokasi	6.257.250.000	6 lokasi	8.300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah RTH yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	Kota Madiun	59 lokasi	10.369.991.000	59 lokasi	9.785.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6 Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik penerangan jalan yang disediakan	Kota Madiun	400 Titik	5.107.700.000	400 Titik	4.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	7 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik penerangan jalan yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	Kota Madiun	6.181 Titik	2.524.765.000	6.181 Titik	1.590.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1 0 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah sarana prasarana pemakaman yang dibangun	Kota Madiun	7 lokasi	2.050.000.000	7 lokasi	2.100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			1	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman	Jumlah pemakaman yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	Kota Madiun	7 lokasi	819.200.000	7 lokasi	560.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.607.275.000			
1	1	1	1	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)		100 %	1.022.948.000	100 %		
			1	Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	ProsentaseAnggota Damkar yang bersertifikat	Kota Madiun	80 %	776.358.000	80 %	1.028.170.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Kegiatan Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Kota Madiun	100 %	246.590.000	100 %	400.440.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	1	1	1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam yang Tangani		100 %	1.584.327.000	100 %		
			1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah piket siaga bencana	BPBD Kota Madiun	730 shift	825.000.000	730 shift	860.000.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
			3	Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase peserta yang hadir	Kota Madiun	100 %	131.700.000	100 %	200.000.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
			4	Kegiatan Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana	Kota Madiun	1 dokumen	186.350.000	1 dokumen	300.000.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
			5	Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah peserta yang terlatih	Kota Madiun	50 orang	131.764.000	50 orang	150.000.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
			7	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang diadakan	BPBD Kota Madiun	1 paket	153.560.000	1 paket	0	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
			8	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	Persentase peserta yang hadir	Kota Madiun	100 %	155.953.000	100 %	260.000.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
				BIDANG URUSAN PERTANAHAN				120.000.000			
2	2	1	1	Program Pelayanan Pertanahan	Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan		100 %	120.000.000	100 %		
			2	Kegiatan Pelayanan Pertanahan	Jumlah rekomendasi ijin yang diterbitkan	Kota Madiun	10 lokasi	120.000.000	10 lokasi	150.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				12.435.000.000			
2	2	2	1	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia		69,23 %	710.000.000	69,23 %		

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			1	Kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	Kota Madiun	4 dokumen	375.000.000	4 dokumen	276.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			4	Kegiatan pengendalian lahan	Jumlah lubang biopori yang terpasang	Kota Madiun	675 unit	250.000.000	675 unit	111.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			6	Kegiatan Pembinaan Izin TPS B3 dan Izin IPAL	Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin	Kota Madiun	5 perusahaan	85.000.000	5 perusahaan	110.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	2	2	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu		48 %	1.970.000.000	48 %		Dinas Lingkungan Hidup
			1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	Kota Madiun	68 perusahaan	600.000.000	68 perusahaan	275.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	Jumlah kendaraan yang diuji gas emisi	Kota Madiun	950 kendaraan	250.000.000	950 kendaraan	165.000.000	
			4	Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pemilik usaha / kegiatan sebagai peserta sosialisasi	Kota Madiun	75 orang	135.000.000	75 orang	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			5	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim yang terbentuk	Kota Madiun	3 kampung	400.000.000	3 kampung	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			6	Kegiatan Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca dan Profil Kehati	Jumlah dokumen yang tersusun	Kota Madiun	1 dokumen	285.000.000	1 dokumen	135.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			7	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah yang mendapat kejuaraan	Kota Madiun	6 juara	300.000.000	6 juara	125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	2	2	1	Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup		52,9 %	1.675.000.000	52,9 %		Dinas Lingkungan Hidup
			2	Kegiatan Pelayanan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	Kota Madiun	10 kasus/ pengaduan	35.000.000	10 kasus/ pengaduan	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			3	Kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang taat (Proper)	Kota Madiun	3 perusahaan	45.000.000	3 perusahaan	86.000.000	
			4	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah Adiwiyata	-	3 sekolah	250.000.000	3 sekolah	335.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan Yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	Jumlah kelompok masyarakat berbudaya lingkungan hidup	Kota Madiun	36 kelompok	887.000.000	36 kelompok	1.004.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			7	Kegiatan Pembinaan Perusahaan yang Mempunyai Izin Lingkungan	Jumlah usaha / kegiatan yang taat membuat laporan	Kota Madiun	18 kegiatan/ usaha	115.000.000	18 kegiatan/ usaha	163.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			8	Kegiatan Edukasi dan Kader lingkungan yang Aktif	Jumlah kader lingkungan yang aktif	Kota Madiun	100 peserta	38.000.000	100 peserta	43.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			9	Kegiatan Pembinaan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah usaha yang mengurus dokumen rekomendasi izin lingkungan	Kota Madiun	500 usaha	50.000.000	500 usaha	81.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			10	Kegiatan adopsi regulasi tentang lingkungan hidup	Jumlah adopsi regulasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kota Madiun	2	255.000.000	2	97.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	2	2	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		74 %	8.080.000.000	74 %		Dinas Lingkungan Hidup
			1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Kota Madiun	11 jenis	1.650.000.000	11 jenis	1.970.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah	Jumlah ruas jalan yang ditangani	Kota Madiun	11 ruas jalan	3.650.000.000	11 ruas jalan	3.990.000.000	
			3	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah	Kota Madiun	27 kelurahan	330.000.000	27 kelurahan	1.085.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			4	Kegiatan Peningkatan Kegiatan/ Usaha dalam Pengelolaan Limbah	Kegiatan / usaha yang melakukan pengelolaan limbah sesuai prosedur	Kota Madiun	10 kegiatan/ usaha	50.000.000	10 kegiatan/ usaha	52.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			5	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah Akhir dengan Metode Controlled Landfill	Jumlah zona pengelolaan sampah akhir	Kota Madiun	1 zona	2.300.000.000	1 zona	2.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			6	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama kegiatan Usaha dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan / usaha dan kelompok masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan sampah	Kota Madiun	35 kelompok	50.000.000	35 kelompok	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			7	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Jumlah kecamatan dalam titik pantau penilaian Adipura	Kota Madiun	3 kecamatan	50.000.000	3 kecamatan	140.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Prioritas V : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana</b>								43.991.181.000			

**Prioritas VI : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

Kode	Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.116.260.000			
10501	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan		100 %	340.000.000	100 %		
	1 Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	Kota Madiun	100 %	130.000.000	100 %	135.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase peserta yang paham terhadap Perda dan Perwal	Kota Madiun	100 %	210.000.000	100 %	230.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
10501	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan		96 %	1.594.530.000	96 %		
	1 Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan	Kota Madiun dan Luar Kota Madiun	80 %	300.000.000	80 %	550.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Prosentase Kegiatan Pengamanan	Kota Madiun	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	3 Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang tertangani	Kator Satpol PP Kota Madiun	96 %	1.044.530.000	96 %	1.302.757.000	Satuan Polisi Pamong Praja
10501	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota		1 orang tiap RT	181.730.000	1 orang tiap RT		
	1 Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Masyarakat pesilat yang berpartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kota Madiun	92 %	31.730.000	92 %	715.020.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan	Kota Madiun	75 %	150.000.000	75 %	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.884.787.622			

1				2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	1	1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan		13,32 %	1.884.787.622	13,32 %		
	0	0	5	1 Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Evaluasi	Kota Madiun	8 kelurahan	201.764.080	8 kelurahan	1.485.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6	0		2 Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan	Jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan	Kota Madiun	47 kali	557.236.720	47 kali	1.760.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	0	1		3 Kegiatan Pemantapan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG	Kota Madiun	550 orang	647.762.120	550 orang	705.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				4 Kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba, pencanangan, pembinaan serta pameran	Kota Madiun	27 kelurahan	478.024.702	27 kelurahan	1.050.800.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.293.084.120			
2	2	2	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan		84 %	328.148.160	84 %		
	0	6	5	1 Kegiatan Pelayanan Keliling	Jumlah Pelayanan Keliling	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	50 kali	150.508.400	50 kali	275.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan	Jumlah penerbitan KK, KTP dan KIA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	98 %	177.639.760	98 %	241.695.971	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	2	2	1	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil		94 %	1.506.409.920	94 %		
	0	6	6	1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan Akta Lahir, Akta Kematian, Akta- Akta Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	95 %	544.390.400	95 %	1.195.268.109	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2 Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	5.000 Lembar	130.487.520	5.000 Lembar	157.889.899	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				3 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Prosentase Penerbitan KTP dan Akte Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	96 %	831.532.000	96 %	831.532.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	2	2	1	Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil		99,1 %	458.526.040	99,1 %		
	0	6	7	1 Kegiatan Implementasi SIAK dan Penyebaran Informasi	Persentase update data penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota	77 %	357.222.960	77 %	682.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1				2	3	4	5	6	7	8	9
						Madiun					
			2	Kegiatan Peningkatan Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah inovasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	7 jenis	101.303.080	7 jenis	325.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				20.730.850.000			
2	2	2	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase sasaran penyebaran informasi publik		85 %	9.182.000.000	85 %		
			1	Kegiatan Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik Melalui Media Massa	Jumlah pemberitaan di media massa yang di analisa	Kota Madiun	1.200 Informasi	4.438.000.000	1.200 Informasi	5.500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Kota Madiun	12 sub	900.000.000	12 sub	900.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			3	Kegiatan Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah media yang dikelola Pemerintah Daerah	Kota Madiun	5 Media	2.500.000.000	5 Media	2.500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kota Madiun	27 kelompok	750.000.000	27 kelompok	750.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			5	Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindak lanjuti	Kota Madiun	100 %	594.000.000	100 %	600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	2	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi		45 %	9.949.850.000	45 %		
			1	Kegiatan Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah Infrastruktur TIK yang dikelola	Kota Madiun	1 paket	2.480.200.000	1 paket	500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2	Kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda	Jumlah titik Wifi Gratis bagi Masyarakat	Kota Madiun	1.500 Titik	5.044.650.000	1.500 Titik	4.700.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			3	Kegiatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemda	Jumlah titik Client	Kota Madiun	301 Titik	400.000.000	301 Titik	400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4	Kegiatan Layanan Website Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Kota Madiun	146 Domain	350.000.000	146 Domain	450.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			5	Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Jumlah Komunitas penunjang Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City yang dibina	Kota Madiun	6 Komunitas	425.000.000	6 Komunitas	800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			6	Kegiatan Penyelenggaraan Government Chief Information Office (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	Kota Madiun	1 unit	150.000.000	1 unit	500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			7	Kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi	Jumlah Aplikasi	Kota Madiun	9 Aplikasi	600.000.000	9 Aplikasi	500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			8	Kegiatan Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan	Jumlah Layanan	Kota Madiun	2 Layanan	500.000.000	2 Layanan	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	2	1	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai		100 %	1.599.000.000	100 %		
			1	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah Event	Kota Madiun	10 event	1.599.000.000	10 event	5.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				BIDANG URUSAN STATISTIK				570.000.000			
2	2	2	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi		80 %	570.000.000	80 %		
			1	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen statistik	Kota Madiun	5 dokumen	570.000.000	5 dokumen	700.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				BIDANG URUSAN PERSANDIAN				400.000.000			
2	2	2	1	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimpleme ntasikan keamanan Informasi		40 %	400.000.000	40 %		Dinas Komunikasi dan Informatika
			1	Kegiatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah PD yang mencapai kematangan tingkat level II pada indeks KAMI	Kota Madiun	34 OPD	400.000.000	34 OPD	500.000.000	
				BIDANG URUSAN KEARSIPAN				610.000.000			
2	2	2	1	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola		500 berkas	610.000.000	500 berkas		
			1	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip	Jumlah Unit Kearsipan	Kota Madiun	5 unit kearsipan	305.000.000	5 unit kearsipan	760.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Jumlah SDM Pengelola Arsip	Kota Madiun	131 orang	305.000.000	131 orang	725.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				BIDANG URUSAN UNSUR STAF				18.532.376.920			
4	4	4	1	Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan n pengadaan barang/jasa sesuai regulasi		100 %	864.596.560	100 %		
			1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang dan jasa	Kota Madiun	170 orang	221.022.560	170 orang	267.437.298	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
			2	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang di lelang	Kota Madiun	160 paket	353.944.000	160 paket	428.272.240	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
			3	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standar Kegiatan	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	1 dokumen	222.966.000	1 dokumen	269.788.860	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan

1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Konstruksi							
			4	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	1 dokumen	66.664.000	1 dokumen	80.663.440	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
4	4	4	1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan		100 %	3.321.054.380	100 %		
			1	Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Madiun	jumlah kegiatan pemerintah Kota	Kota Madiun	500 kali	3.198.396.140	500 kali	3.198.396.140	Sekretariat Daerah Bagian Umum
			2	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Sekretariat Daerah	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani		45 kali	122.658.240	45 kali	122.658.240	Sekretariat Daerah Bagian Umum
4	4	4	1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi		100 %	8.989.315.000	100 %		
			1	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Peringatan Hari Besar Keagamaan	jumlah peringatan hari besar islam (phbi) dan kegiatan keagamaan lainnya	bagian prekokesra	15 kegiatan	8.489.315.000	15 kegiatan	7.719.315.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			2	Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	jumlah calon jamaah haji yang terdaftar	bagian prekokesra	170 orang	250.000.000	170 orang	290.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			3	Kegiatan Pengiriman Kafilah MTQ	jumlah peserta yang menjadi juara tingkat kota	bagian prekokesra	10 Cabang Lomba	250.000.000	10 Cabang Lomba	0	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	4	4	2	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat Syarat		6 dokumen	1.816.403.000	6 dokumen		
			1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan	jumlah dokumen kinerja pemerintahan	kota Madiun	5 dokumen	200.000.000	5 dokumen	200.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			2	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintahan	jumlah peringatan hari jadi pemerintahan	kota Madiun	2 kali kegiatan	90.000.000	2 kali kegiatan	90.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			3	Kegiatan Inventarisasi Rupa Bumi	Jumlah dokumen Rupa Bumi	Kota Madiun	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	40.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			4	Kegiatan Pembinaan Kecamatan	Jumlah pembinaan kecamatan	kota Madiun	10 kali kegiatan	645.563.000	10 kali kegiatan	409.532.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			5	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	jumlah kunjungan	kota Madiun	6 kali kegiatan	830.840.000	6 kali kegiatan	700.840.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
4	4	4	2	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama		5 kerjasama	445.000.000	5 kerjasama		

1				2	3	4	5	6	7	8	9
		01									
			1	Kegiatan Kerjasama Daerah	Jumlah MoU	Kota Madiun	5 dokumen	445.000.000	5 dokumen	402.425.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
4	4010103	4010103	2	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang berkualitas		100 %	1.228.496.980	100 %		
			1	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah raperda/perd a, kompilasi, sosialisasi perda	Kota Madiun	3 jenis	419.360.080	3 jenis	338.831.169	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			2	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian sengketa hukum	Kota Madiun	3 jenis	633.286.200	3 jenis	542.437.511	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			3	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi produk hukum daerah	Kota Madiun	3 jenis	175.850.700	3 jenis	212.781.984	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
4	4010106	4010106	2	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKj Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥100)		82 %	927.550.000	82 %		
			1	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 80% sesuai Target	Kota Madiun	8 OPD	70.000.000	8 OPD	92.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			2	Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya BB (>70-80)	Kota Madiun	29 OPD	235.000.000	29 OPD	240.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			3	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kinerja	Jumlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) Aktif	Kota Madiun	13 KBK	208.150.000	13 KBK	217.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			4	Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Besaran dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kota Madiun	29 OPD	159.400.000	29 OPD	150.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			5	Kegiatan Standarisasi Penataan Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang penataan jabatannya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku	Kota Madiun	29 OPD	255.000.000	29 OPD	260.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

1				2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	4	2	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik		2,7 .	799.058.000	2,7 .		
				1 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang kinerja pelayanan publiknya bernilai B	Kota Madiun	5 unit	692.194.000	5 unit	794.694.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
				2 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	Nilai evaluasi administrasi ketatalaksanaan	Kota Madiun	66,5 .	106.864.000	66,5 .	84.864.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
4	4	4	2	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal		100%	140.903.000	100%		
				1 Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen / laporan	Kota Madiun	12 dokumen	140.903.000	12 dokumen	170.492.630	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
					PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD			20.258.589.060			
4	4	4	1	Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat		81 %	20.258.589.060	81 %		
				1 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah dokumen materi raperda DPRD yang disiapkan dalam pembahasan	Kota Madiun	10 dokumen	4.276.241.500	10 dokumen	0	Sekretariat DPRD
				2 Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	jumlah Dokumen notulensi hasil rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun	Kota Madiun	45 dokumen	3.897.456.260	45 dokumen	0	Sekretariat DPRD
				3 Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna dan Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Dokumen Notulensi hasil rapat-rapat paripurna	Kota Madiun	20 dokumen	581.095.900	20 dokumen	0	Sekretariat DPRD
				4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti peningkatan kapasitas	Kota Madiun	150 orang	3.266.085.900	150 orang	0	Sekretariat DPRD
				5 Kegiatan Reses	Jumlah dokumen laporan hasil reses anggota DPRD yang disusun	kota madiun	3 dokumen	864.420.000	3 dokumen	0	Sekretariat DPRD
				6 Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen kunjungan kerja dan hasil kunjungan kerja yang disiapkan	kota madiun	45 dokumen	5.519.469.700	45 dokumen	0	Sekretariat DPRD

1				2	3	4	5	6	7	8	9	
			7	Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	jumlah informasi kegiatan DPRD yang disusun dan dipublikasikan	kota madiun	50 acara	1.853.819.800	50 acara	0	Sekretariat DPRD	
				BIDANG URUSAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.510.176.000				
4	0	3	0	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	30 %	2.281.151.000	30 %			
				1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah dokumen hasil audit	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	18 dokumen	290.169.000	18 dokumen	548.000.000	Inspektorat
				2	Kegiatan Evaluasi SPIP Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP nya	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	34 laporan	45.200.000	34 laporan	53.600.000	Inspektorat
				3	Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil reviu	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	8 dokumen	486.582.000	8 dokumen	125.000.000	Inspektorat
				4	Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	150 orang	36.134.000	150 orang	45.000.000	Inspektorat
				6	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen evaluasi	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	4 dokumen	471.692.000	4 dokumen	385.000.000	Inspektorat
				7	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan Pengendalian Gratifikasi	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	4 dokumen	271.514.000	4 dokumen	324.500.000	Inspektorat
				8	Kegiatan Optimalisasi Saber Pungli	Jumlah Laporan	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	1 dokumen	679.860.000	1 dokumen	730.000.000	Inspektorat
4	0	3	0	1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat		100 %	222.425.000	100 %		
				1	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang bersertifikat	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	25 orang	222.425.000	25 orang	630.000.000	Inspektorat
4	0	3	0	1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi		100 %	6.600.000	100 %		
				1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sisdur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang disusun	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	2 dokumen	6.600.000	2 dokumen	27.500.000	Inspektorat
					BIDANG URUSAN PERENCANAAN			2.675.074.000				
4	0	4	0	1	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan		100 %	1.446.000.000	100 %		
				1	Kegiatan Perencanaan Pemerintahan Umum	Tersusunnya dokumen perencanaan pemerintah Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	4 dokumen	1.000.750.000	4 dokumen	1.150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			2	Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun	6 dokumen	320.250.000	6 dokumen	140.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya perangkat lunak yang diakses perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai kebutuhan	Kota Madiun	1 Aplikasi	125.000.000	1 Aplikasi	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	4	4	1	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya		100 %	693.074.000	100 %		
			1	Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi	Tersusunnya dokumen tentang data / informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Kota Madiun	100 %	242.074.000	100 %	155.036.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2	Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Tersusunnya dokumen tentang data / informasi perencanaan pembangunan sosial budaya	Kota Madiun	2 dokumen	451.000.000	2 dokumen	143.412.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	4	4	1	Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah		100 %	536.000.000	100 %		
			1	Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi tata ruang dan lingkungan hidup	Kota Madiun	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	124.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2	Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Tersusunnya dokumen sub bidang sarana prasarana perkotaan		4 dokumen	416.000.000	4 dokumen	124.220.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				BIDANG URUSAN KEUANGAN				8.885.756.000			
4	4	4	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu		tepat waktu	1.267.329.000	tepat waktu		
			1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	120.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Produk Hukum	BPKAD	2 produk hukum	280.000.000	2 produk hukum	300.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	BPKAD	2 buku	40.000.000	2 buku	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			4	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peserta bimtek	BPKAD	500 orang	228.129.000	500 orang	235.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			5	Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pendampingan dengan OPD	BPKAD	20 kali	619.200.000	20 kali	546.100.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	4	4	1	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu		tepat waktu	1.142.592.000	tepat waktu		
			1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran	BPKAD	2 dokumen	68.529.000	2 dokumen	60.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD	Jumlah produk hukum	BPKAD	2 produk hukum	454.414.000	2 produk hukum	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			3	Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus	Jumlah dokumen standar biaya/ ASB	BPKAD	2 dokumen	304.650.000	2 dokumen	157.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			4	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah perbaikan/pe nambahan fitur aplikasi	BPKAD	5 fitur	314.999.000	5 fitur	186.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	4	4	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu		100 %	250.000.000	100 %		
			1	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan SPD dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Jumlah dokumen pengeluaran kas	BPKAD	3 dokumen	120.000.000	3 dokumen	104.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah	Jumlah dokumen administrasi gaji/ kasda	BPKAD	55 dokumen gaji/ kasda	130.000.000	55 dokumen gaji/ kasda	112.244.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	4	4	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD		4.528.005.499 (Rp)	5.244.980.000	4.528.005.499 (Rp)		
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah Kota Madiun	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	BPKAD	2 jenis	3.000.000.000	2 jenis	3.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	BPKAD	18 buku	50.000.000	18 buku	60.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			3	Kegiatan Optimalisasi, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	BPKAD	6 tanah/ bangunan	1.944.980.000	6 tanah/ bangunan	838.780.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			4	Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	BPKAD	5 dokumen	250.000.000	5 dokumen	300.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	4	4	1	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah		100 %	243.750.000	100 %		
			1	Kegiatan Pemutakiran Basis Data Obyek Pajak Daerah	Jumlah Basis Data Yang Update	Kota Madiun	150 WP	36.200.000	150 WP	58.250.000	Badan Pendapatan Daerah
			3	Kegiatan Cetak Masal dan Penyampaian	Jumlah Penerbitan SPPT PBB	Kota Madiun	55.000 SPPT	46.800.000	55.000 SPPT	54.675.000	Badan Pendapatan Daerah



1				2	3	4	5	6	7	8	9
				SPPT	dan DHKP						
			5	Kegiatan Monitoring Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan BPHTB	jumlah wajib pajak yang dibeban konsultasi dan pendampingan	Kota Madiun	2.500 WP	10.750.000	2.500 WP	21.500.000	Badan Pendapatan Daerah
			7	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Kota Madiun	1 Aplikasi	150.000.000	1 Aplikasi	300.000.000	Badan Pendapatan Daerah
4	4	4	2	Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah		1,5 %	737.105.000	1,5 %		
			1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB	Jumlah Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB	Kota Madiun	207 WP	60.000.000	207 WP	336.535.000	Badan Pendapatan Daerah
			4	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Intensifikasi Pajak Daerah	Kota Madiun	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	634.360.000	Badan Pendapatan Daerah
			5	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pembinaan Petugas Pungut	Peningkatan Capaian Penerimaan Pajak Daerah	Kota Madiun	450 petugas pungut	82.105.000	450 petugas pungut	142.690.000	Badan Pendapatan Daerah
			6	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Peningkatan Kepatuhan WP terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah dan Petugas Pungut PBB	Kota Madiun	1 dokumen	34.200.000	1 dokumen	34.800.000	Badan Pendapatan Daerah
			7	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Piutang Pajak Non PBB	Dokumen hasil Monev Piutang Pajak Non PBB	Kota Madiun	1 dokumen	10.800.000	1 dokumen	16.380.000	Badan Pendapatan Daerah
				BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				7.660.187.044			
4	4	4	1	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP		100 %	462.762.200	100 %		
			1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian	Kota Madiun	93 %	9.500.000	93 %	60.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
			2	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Dipupdate	Kota Madiun	3.451 dokumen	357.787.200	3.451 dokumen	357.787.200	Badan Kepegawaian Daerah
			3	Kegiatan Administrasi Calon ASN	Jumlah CPNS	Kota Madiun	300 PNS	95.475.000	300 PNS	95.745.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	4	4	1	Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS	Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	Kota Madiun	100 %	107.880.000	100 %		
			1	Kegiatan Administrasi Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS	Jumlah SK yang diterbitkan		2.142 dokumen	107.880.000	2.142 dokumen	110.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	4	4	1	Program Penataan Aparatur	Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM		100 %	317.978.080	100 %		
			1	Kegiatan Penempatan PNS	Jumlah Penempatan PNS	Kota Madiun	209 PNS	317.978.080	209 PNS	315.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	4	1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur		100 %	5.702.240.204	100 %		
				1 Kegiatan Diklat teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta	Kota Madiun	100 peserta	1.441.015.204	100 peserta	1.500.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
				2 Kegiatan Diklat Kepemimpinan	Jumlah Peserta	Kota Madiun	54 PNS	1.450.000.000	54 PNS	1.450.818.000	Badan Kepegawaian Daerah
				3 Kegiatan Pembekalan CPNS	Jumlah Peserta	Kota Madiun	200 PNS	74.575.000	200 PNS	74.575.000	Badan Kepegawaian Daerah
				4 Kegiatan Latihan Dasar CPNS	Jumlah Peserta	Luar Kota	163 ASN	2.278.800.000	163 ASN	2.793.450.000	Badan Kepegawaian Daerah
				5 Kegiatan Bimtek/Sosialisasi /Workshop	Jumlah Peserta	Kota Madiun	100 peserta	119.600.000	100 peserta	119.600.000	Badan Kepegawaian Daerah
				6 Kegiatan Assesment Pegawai	Jumlah Peserta	Kota Madiun	60 PNS	338.250.000	60 PNS	338.250.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	4	4	2	Program Pembinaan Aparatur	Persentase Kedisiplinan ASN		100 %	60.000.000	100 %		
				1 Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Masalah Kepegawaian	jumlah pembinaan	Kota Madiun	40 PNS	60.000.000	40 PNS	9.500.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	4	4	2	Program Pengembangan Aparatur	Persentase Pengembangan ASN		100 %	1.009.326.560	100 %		
				2 Kegiatan Pengadaan ASN	Jumlah peserta	Kota Madiun	4000 peserta	1.009.326.560	4000 peserta	900.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
				BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				868.420.600			
4	4	4	1	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan		100 %	868.420.600	100 %		
				1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum	Tersedianya dokumen kajian dan laporan pembangunan	Bappeda Kota Madiun	2 dokumen	489.570.600	2 dokumen	425.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana	Tersedianya dokumen kajian dan data SIPD	Kota Madiun	2 dokumen	378.850.000	2 dokumen	375.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.613.085.961			
4	4	4	1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Hubungan Sosial		2,7 %	1.090.381.891	2,7 %		
				1 Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi	Jumlah peserta penguatan	Kota Madiun	1250 orang	359.632.167	1250 orang	550.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2 Kegiatan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama	Jumlah peserta pembinaan	Kota Madiun	200 orang	353.830.304	200 orang	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				3 Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta pembinaan dan penguatan	Kota Madiun	150 orang	222.557.201	150 orang	87.794.213	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			4	Kegiatan Pembinaan Penganut Kepercayaan dan Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta pembinaan	Kota Madiun	475 orang	154.362.219	475 orang	186.778.285	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	0	8	1	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Konflik Horizontal di dalam Masyarakat		0 konflik	2.342.817.070	0 konflik		
			1	Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta Pengembangan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM	Jumlah peserta sosialisasi, lomba pidato dan cerdas cermat	Kota Madiun	1.020 orang	319.318.052	1.020 orang	380.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	200 orang	1.323.495.168	200 orang	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			3	Kegiatan Pemantapan Ketahanan dan Kebijakan Strategis	Jumlah peserta Rakor	Kota Madiun	780 orang	700.003.850	780 orang	900.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	0	8	1	Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi	Persentase Orkesmas		73 %	1.179.887.000	73 %		
			1	Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Fasilitasi Orkesmas	Jumlah peserta pembinaan	Kota Madiun	100 orang	222.985.000	100 orang	106.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Jumlah peserta pembinaan	Kota Madiun	100 orang	231.840.000	100 orang	341.026.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah peserta pengelolaan keuangan parpol	Kota Madiun	22 orang	725.062.000	22 orang	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				BIDANG URUSAN KECAMATAN				25.781.936.496			
4	0	9	1	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan		100 %	15.009.182.100	100 %		
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Madiun Lor sesuai ketentuan	Kelurahan Madiun Lor	100 %	606.063.200	100 %	626.308.800	Kecamatan Manguharjo
			2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan	Kelurahan Manguharjo	100 %	634.835.390	100 %	634.835.390	Kecamatan Manguharjo
			3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul sesuai ketentuan	Kelurahan Nambangan Kidul	100 %	673.326.140	100 %	674.881.340	Kecamatan Manguharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Lor sesuai ketentuan	Kelurahan Nambangan lor	100 %	751.035.280	100 %	751.035.280	Kecamatan Manguharjo
	5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Ngegong sesuai ketentuan	Kelurahan Ngegong	100 %	496.325.440	100 %	496.325.440	Kecamatan Manguharjo
	6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Pangongangan sesuai ketentuan	Kelurahan Pangongangan	100 %	515.309.650	100 %	565.546.000	Kecamatan Manguharjo
	7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Patihan sesuai ketentuan	Kelurahan Patihan	100 %	523.046.940	100 %	526.000.000	Kecamatan Manguharjo
	8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Sogaten sesuai ketentuan	Kelurahan Sogaten	100 %	564.459.440	100 %	598.689.440	Kecamatan Manguharjo
	9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Winongo sesuai ketentuan	Kelurahan Winongo	100 %	638.319.280	100 %	669.985.980	Kecamatan Manguharjo
	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo	Kelurahan Kartoharjo	100 %	543.174.800	100 %	700.000.000	Kecamatan Kartoharjo
	11	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Kanigoro sesuai ketentuan	Kelurahan Kanigoro	100 %	630.448.690	100 %	643.057.700	Kecamatan Kartoharjo
	12	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pilangbango	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pilangbango	Kelurahan Pilangbango	100 %	530.965.340	100 %	568.592.600	Kecamatan Kartoharjo
	13	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Oro - oro Ombo	Kelurahan Oro - oro Ombo	100 %	581.024.800	100 %	651.432.160	Kecamatan Kartoharjo
	14	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Klegen sesuai ketentuan	Kelurahan Klegen	100 %	626.494.510	100 %	800.000.000	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 5 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sukosari	Kelurahan Sukosari	100 %	473.620.520	100 %	526.611.822	Kecamatan Kartoharjo
	1 6 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Tawangrejo	Presentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo	Kelurahan Tawangrejo	100 %	504.396.520	100 %	100	Kecamatan Kartoharjo
	1 7 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Kelun sesuai ketentuan	Kelurahan kelun	100 %	529.547.240	100 %	561.354.185	Kecamatan Kartoharjo
	1 8 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo	Kelurahan Rejomulyo	100 %	604.124.540	100 %	837.239.260	Kecamatan Kartoharjo
	1 9 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Mojorejo	Kelurahan Mojorejo	100 %	569.186.640	100 %	589.786.640	Kecamatan Taman
	2 0 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Pandean	Kelurahan Pandean	100 %	544.209.680	100 %	564.209.608	Kecamatan Taman
	2 1 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Banjarejo	Kelurahan Banjarejo	100 %	482.411.040	100 %	502.376.700	Kecamatan Taman
	2 2 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Kuncen	Kelurahan Kuncen	100 %	352.108.420	100 %	381.470.580	Kecamatan Taman
	2 3 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manisrejo	Kelurahan Manisrejo	100 %	611.275.560	100 %	650.435.360	Kecamatan Taman
	2 4 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Kejuron	Kelurahan Kejuron	100 %	530.256.040	100 %	560.856.040	Kecamatan Taman
	2 5 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Josenan	Kelurahan Josenan	100 %	463.824.560	100 %	483.824.560	Kecamatan Taman
	2 6 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Demangan	Kelurahan Demangan	100 %	468.208.400	100 %	498.208.400	Kecamatan Taman
	2 7 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Taman	Kelurahan Taman	100 %	561.184.040	100 %	610.707.000	Kecamatan Taman

1				2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	4	1	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100 %	545.296.310	100 %		
			1	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan Manguharjo	100 %	242.007.414	100 %	334.500.000	Kecamatan Manguharjo
			1	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	prosentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	kecamatan kartoharjo	100 %	178.887.600	100 %	500.000.000	Kecamatan Kartoharjo
			1	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan Taman	100 %	124.401.296	100 %	170.910.440	Kecamatan Taman
4	4	4	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD		12 %	750.989.086	12 %		
			1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	prosentase usulan musrenbang kecamatan manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Kecamatan Manguharjo	11 %	294.274.240	11 %	294.274.240	Kecamatan Manguharjo
			1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan Musrenbang Kecamatan Kartoharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang kota	Kecamatan Kartoharjo	10 %	250.000.000	10 %	357.000.000	Kecamatan Kartoharjo
			1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kecamatan taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Kecamatan dan 9 kelurahan	10 %	206.714.846	10 %	275.871.840	Kecamatan Taman
4	4	4	1	Program Dana Kelurahan	Indek perkembangan kelurahan		0,81 %	9.476.469.000	0,81 %		
			1	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Madiun Lor	4 unit	150.000.000	4 unit	150.000.000	Kecamatan Manguharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Manguharjo	4 unit	250.000.000	4 unit	250.000.000	Kecamatan Manguharjo
	3	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Nambangan Kidul	4 unit	250.000.000	4 unit	250.000.000	Kecamatan Manguharjo
	4	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Lor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan nambangan Lor	4 unit	250.000.000	4 unit	250.000.000	Kecamatan Manguharjo
	5	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngegong	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Ngegong	4 unit	150.000.000	4 unit	150.000.000	Kecamatan Manguharjo
	6	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Pangongangan	4 unit	110.000.000	4 unit	110.000.000	Kecamatan Manguharjo
	7	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Patihan	4 jenis	150.000.000	4 jenis	150.000.000	Kecamatan Manguharjo
	8	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Sogaten	4 unit	250.000.000	4 unit	250.000.000	Kecamatan Manguharjo
	9	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Winongo	4 unit	250.000.000	4 unit	250.000.000	Kecamatan Manguharjo
	10	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kartoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terpenuhi	Kelurahan Kartoharjo	2 paket	211.200.000	2 paket	215.424.000	Kecamatan Kartoharjo
	11	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klegen	Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Klegen	2 paket	211.200.000	2 paket	215.424.000	Kecamatan Kartoharjo
	12	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukosari	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi		2 paket	211.200.000	2 paket	211.200.000	Kecamatan Kartoharjo
	13	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumsh sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan tawangrejo	2 paket	209.200.000	2 paket	215.424.000	Kecamatan Kartoharjo

1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Tawangrejo							
			1 4	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejomulyo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	-	2 paket	211.200.000	2 paket	211.200.000	Kecamatan Kartoharjo
			1 5	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigoro	Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terpenuhi	Kelurahan Kanigoro	2 paket	209.200.000	2 paket	215.424.000	Kecamatan Kartoharjo
			1 6	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro-oro Ombo	Jumlah terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Oro - oro Ombo	2 paket	211.200.000	2 paket	215.424.000	Kecamatan Kartoharjo
			1 7	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilangbango	Jumlah sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Pilangbango	2 paket	211.120.000	2 paket	215.424.000	Kecamatan Kartoharjo
			1 8	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Kelun	2 paket	211.200.000	2 paket	215.424.000	Kecamatan Kartoharjo
			1 9	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Taman	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Kecamatan Taman
			2 0	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuncen	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Kuncen	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Kecamatan Taman
			2 1	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Kejuron	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Kecamatan Taman
			2 2	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Josenan	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Kecamatan Taman
			2 3	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manisrejo	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Manisrejo	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Kecamatan Taman
			2 4	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Demangan	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Kecamatan Taman



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2 5	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Mojorejo	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Kecamatan Taman
	2 6	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Pandean	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Kecamatan Taman
	2 7	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Banjarejo	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Kecamatan Taman
	2 8	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manguharjo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Manguharjo	40 %	100.000.000	40 %	90.300.000	Kecamatan Manguharjo
	2 9	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Nambangan Kidul	40 %	100.000.000	40 %	100.000.000	Kecamatan Manguharjo
	3 0	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Lor	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Nambangan Lor	45 %	100.000.000	45 %	100.000.000	Kecamatan Manguharjo
	3 1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngegong	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Ngegong	30 %	200.000.000	30 %	200.000.000	Kecamatan Manguharjo
	3 2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangongangan	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Pangongangan	30 %	240.000.000	30 %	240.000.000	Kecamatan Manguharjo
	3 3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patihan	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Patihan	35 %	200.000.000	35 %	200.000.000	Kecamatan Manguharjo
	3 4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sogaten	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Sogaten	30 %	100.000.000	30 %	100.000.000	Kecamatan Manguharjo
	3 5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Madiun Lor	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Madiun Lor	35 %	200.000.000	35 %	200.000.000	Kecamatan Manguharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	36	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Winongo	40 %	100.000.000	40 %	100.000.000	Kecamatan Manguharjo
	37	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Kartoharjo	10 %	138.800.000	10 %	143.616.000	Kecamatan Kartoharjo
	38	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klegen	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Klegen	10 %	138.800.000	10 %	143.616.000	Kecamatan Kartoharjo
	39	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukosari	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Sukosari	10 %	138.800.000	10 %	143.616.000	Kecamatan Kartoharjo
	40	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Tawangrejo	10 %	140.800.000	10 %	143.616.000	Kecamatan Kartoharjo
	41	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Rejomulyo	10 %	138.800.000	10 %	143.616.000	Kecamatan Kartoharjo
	42	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigoro	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Kanigoro	10 %	140.800.000	10 %	143.616.000	Kecamatan Kartoharjo
	44	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Ombo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Oro - oro Ombo	10 %	138.800.000	10 %	143.616.000	Kecamatan Kartoharjo
	45	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilangbango	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Pilangbango	10 %	138.880.000	10 %	143.616.000	Kecamatan Kartoharjo
	46	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelun	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Kelun	10 %	138.800.000	10 %	143.616.000	Kecamatan Kartoharjo
	47	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taman	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Taman	10 %	252.941.000	10 %	252.941.000	Kecamatan Taman

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			48	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuncen	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Kuncen	10 %	252.941.000	10 %	252.941.000	Kecamatan Taman
			49	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejuron	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Kejuron	10 %	252.941.000	10 %	252.941.000	Kecamatan Taman
			50	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Josenan	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Josenan	10 %	252.941.000	10 %	252.941.000	Kecamatan Taman
			51	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrejo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Manisrejo	10 %	252.941.000	10 %	252.941.000	Kecamatan Taman
			52	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Demangan	10 %	252.941.000	10 %	252.941.000	Kecamatan Taman
			53	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojorejo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Mojorejo	10 %	252.941.000	10 %	252.941.000	Kecamatan Taman
			54	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandean	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Pandean	10 %	252.941.000	10 %	252.941.000	Kecamatan Taman
			55	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarejo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Kelurahan Banjarejo	10 %	252.941.000	10 %	252.941.000	Kecamatan Taman
<b>Prioritas VI : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>								120.390.583.823			

**Rutin**

Kode	Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>URUSAN RUTIN</b>				<b>558.116.319.634</b>			
00101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran		100 %	515.566.550.462	100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	1 OPD	192.840.430.958	1 OPD	218.644.062.866	Dinas Pendidikan
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah kali	Dinas Pendidikan	105 kali	276.705.300	105 kali	553.410.600	Dinas Pendidikan
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	100 %	33.393.592.918	100 %	4.701.489.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	100 %	420.000.000	100 %	823.406.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium non PNS yang disediakan	RSUD Kota Madiun	39 orang	22.119.231.956	39 orang	21.311.455.956	Rumah Sakit Umum Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( ATK, Alat Listrik, Perangko, Mate rai, Surat Kabar, Foto copi dll )	Dinas PUTR Kota Madiun	10 jenis	9.966.460.422	10 jenis	10.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas PUTR Kota Madiun	650 kali	300.000.000	650 kali	275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	75 jenis	6.522.856.000	75 jenis	5.950.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Seluruh Indonesia	50 kali	183.880.000	50 kali	234.032.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Madiun	7 jenis	8.670.837.000	7 jenis	9.825.113.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Luar Kota Madiun	30 kali kegiatan	250.000.000	30 kali kegiatan	279.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD Kota Madiun	11 unit	1.814.750.000	11 unit	1.920.000.000	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPBD Kota Madiun	20 kali	80.000.000	20 kali	140.000.000	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	100 paket	5.598.731.908	100 paket	7.482.979.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Kota Madiun	132 kali	250.000.000	132 kali	670.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	Kota Madiun	1 paket	3.706.503.500	1 paket	3.707.503.500	Dinas Tenaga Kerja
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kota madiun	1 kegiatan	262.000.000	1 kegiatan	0	Dinas Tenaga Kerja
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	9 jenis	13.760.000.000	9 jenis	14.873.456.520	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	32 kali	200.000.000	32 kali	206.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	24 jenis	6.174.199.968	24 jenis	8.214.851.307	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas selama setahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	60 kali	122.356.000	60 kali	484.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	15 jenis	9.399.137.791	15 jenis	9.750.000.000	Dinas Perhubungan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kota Madiun	60 kali	230.000.000	60 kali	300.000.000	Dinas Perhubungan
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	12 Bulan	6.132.736.000	12 Bulan	8.900.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Madiun	187 kali	367.000.000	187 kali	800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa operasional kantor	Kota Madiun	14 jenis	5.124.704.000	14 jenis	6.500.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jawa, Luar Jawa	125 kali	400.000.000	125 kali	550.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	DISBUDPAR PORA	1 paket	5.309.113.000	1 paket	6.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DISBUDPAR PORA	50 kali	299.700.000	50 kali	600.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Penunjang	Kota Madiun	1 paket	3.365.195.927	1 paket	4.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	90 kali	160.000.000	90 kali	235.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	20 unit	5.021.168.720	20 unit	5.686.737.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah / laporan yang disusun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	120 Laporan	264.550.000	120 Laporan	450.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perdagangan Kota Madiun	8 jenis	9.981.925.000	8 jenis	9.700.000.000	Dinas Perdagangan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke	Dinas Perdagangan Kota Madiun	80 kali	476.000.000	80 kali	500.000.000	Dinas Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daerah	luar daerah						
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Kota Madiun	100 %	18.155.118.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kelaur Daerah	Kota Madiun	100 %	3.395.846.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	18 jenis	6.277.103.000	18 jenis	6.235.833.000	Inspektorat
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	65 kali	491.980.000	65 kali	645.000.000	Inspektorat
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa kantor	BAPPEDA Kota Madiun	12 Bulan	6.795.926.500	12 Bulan	7.200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	BAPPEDA Kota Madiun	12 Bulan	401.000.000	12 Bulan	800.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	7 jenis	50.751.835.046	7 jenis	17.776.750.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	BPKAD	103 kali	400.000.000	103 kali	420.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Penunjang	Kota Madiun	8 jenis	9.156.406.000	8 jenis	9.147.294.000	Badan Pendapatan Daerah
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Kota Madiun	38 kali	88.465.000	38 kali	93.465.000	Badan Pendapatan Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	BKD	15 jenis	5.000.000.000	15 jenis	5.100.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	BKD	150 kali	700.000.000	150 kali	775.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	10 jenis	3.451.428.339	10 jenis	4.137.607.563	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	50 kali	120.000.000	50 kali	252.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan Kartoharjo	9 jenis	9.987.481.680	9 jenis	11.193.638.700	Kecamatan kartoharjo
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Kartoharjo	16 kali	138.900.000	16 kali	196.231.680	Kecamatan kartoharjo
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Taman	9 jenis	10.107.008.033	9 jenis	10.705.229.587	Kecamatan Taman
	2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Taman	35 kali	97.793.000	35 kali	99.793.000	Kecamatan Taman
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Manguharjo	21 jenis	10.587.724.886	21 jenis	10.476.635.166	Kecamatan Manguharjo

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Manguharjo	25 kali	143.751.000	25 kali	171.627.500	Kecamatan Manguharjo
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Penunjang	Kota Madiun	13 jenis	681.671.200	13 jenis	803.748.428	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	45 kali	291.687.000	45 kali	352.900.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	bagian prekokesra	8 paket	830.266.000	8 paket	970.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bagian prekokesra	65 kali	180.000.000	65 kali	250.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis barang dan jasa kantor	Kota Madiun	1 Tahunan	1.560.229.780	1 Tahunan	1.633.938.684	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	1 Tahunan	155.140.000	1 Tahunan	187.719.400	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	14 jenis	1.348.281.400	14 jenis	263.476.400	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kota Madiun	45 kali	130.000.000	45 kali	121.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	Kota Madiun	13 paket	16.727.984.730	13 paket	16.727.984.730	Sekretariat Daerah Bagian Umum
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Madiun	650 kali	3.000.000.000	650 kali	3.000.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Umum
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	kota Madiun	7 jenis	769.757.500	7 jenis	799.157.500	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jakarta, Surabaya	24 kali kegiatan	200.000.000	24 kali kegiatan	250.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
0	0	1 0 1 0 1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100 %	18.987.729.500	100 %		
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	Dinas Pendidikan	1 gedung	329.000.000	1 gedung	375.000.000	Dinas Pendidikan
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan	Dinas Pendidikan	125 unit	136.100.000	125 unit	301.000.000	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarpras kantor	Dinas Pendidikan	1 OPD	140.800.000	1 OPD	197.000.000	Dinas Pendidikan
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	100 %	14.126.000	100 %	16.950.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala	Persentase terwujudnya kendaraan	Dinas Kesehatan dan KB Kota	100 %	201.098.000	100 %	232.290.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga

1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Kendaraan Dinas	dinas yang layak pakai	Madiun					Berencana
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Persentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	100 %	82.405.000	100 %	86.085.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	Dinas PUTR	2 gedung	250.000.000	2 gedung	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas	Dinas PUTR	40 kendaraan	300.000.000	40 kendaraan	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Dinas PUTR	12 unit	300.000.000	12 unit	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	Kota Madiun	1 gedung	28.000.000	1 gedung	30.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kota Madiun	57 unit	1.760.360.000	57 unit	2.509.444.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kota Madiun	48 jenis	472.170.400	48 jenis	699.603.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Madiun	2 gedung	30.000.000	2 gedung	35.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Madiun	33 unit	500.000.000	33 unit	500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Madiun	6 jenis	30.000.000	6 jenis	35.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang dipelihara	BPBD Kota Madiun	1 paket	50.000.000	1 paket	15.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	BPBD Kota Madiun	5 unit	157.500.000	5 unit	160.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	BPBD Kota Madiun	8 unit	15.000.000	8 unit	25.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Madiun	2 gedung	200.000.000	2 gedung	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Kota Madiun	25 kendaraan	181.834.200	25 kendaraan	159.397.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Kota Madiun	15 jenis	75.800.000	15 jenis	67.518.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung		2 gedung	35.700.000	2 gedung	36.414.000	Dinas Tenaga Kerja



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	kota madiun	2 unit	44.159.000	2 unit	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	kota madiun	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	3 gedung	79.000.000	3 gedung	94.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	59 unit	1.390.000.000	59 unit	1.896.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	63 unit	78.000.000	63 unit	127.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	1 gedung	44.750.000	1 gedung	125.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	27 unit	54.138.500	27 unit	99.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	6 jenis	209.562.000	6 jenis	275.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Luas gedung yang di pelihara	Kota Madiun	142 m2	650.000.000	142 m2	400.000.000	Dinas Perhubungan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	37 unit	650.000.000	37 unit	650.000.000	Dinas Perhubungan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Madiun	73 unit	150.000.000	73 unit	200.000.000	Dinas Perhubungan
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	Kota Madiun	3 unit	150.000.000	3 unit	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	33 unit	65.000.000	33 unit	75.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Madiun	60 unit	150.000.000	60 unit	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung dan kantor yang bersih dan nyaman	Kota Madiun	1 unit	80.000.000	1 unit	90.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang aman dan nyaman	Kota Madiun	26 unit	45.000.000	26 unit	55.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis sarana kantor yang memadai	Kota Madiun	3 jenis	73.537.000	3 jenis	75.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	DISBUDPAR PORA	2 unit	199.650.000	2 unit	210.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	DISBUDPAR PORA	27 unit	50.000.000	27 unit	97.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang tersedia	DISBUDPAR PORA	130 unit	54.650.000	130 unit	150.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	Kota Madiun	2 unit	59.650.000	2 unit	95.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diperbaiki	Kota Madiun	22 unit	66.552.000	22 unit	75.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara	Kota Madiun	78 unit	44.650.000	78 unit	120.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	1 unit	200.000.000	1 unit	150.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	29 unit	60.000.000	29 unit	70.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	75 unit	50.000.000	75 unit	60.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	Dinas Perdagangan Kota Madiun	3 gedung	175.000.000	3 gedung	520.000.000	Dinas Perdagangan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Dinas Perdagangan Kota Madiun	50 unit	465.000.000	50 unit	465.000.000	Dinas Perdagangan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Dinas Perdagangan	51 unit	130.000.000	51 unit	125.000.000	Dinas Perdagangan
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Kota Madiun	100 %	1.230.702.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	Kota Madiun	100 %	374.642.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Kota Madiun	100 %	315.150.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
	4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Persentase terwujudnya rumah dinas yang layak	Kota Madiun	100 %	616.821.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan	Jumlah gedung/ kantor yang terpelihara	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	1 paket	5.000.000	1 paket	5.500.000	Inspektorat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bangunan Kantor							
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	1 unit	24.892.000	1 unit	25.500.000	Inspektorat
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	5 jenis	35.000.000	5 jenis	36.000.000	Inspektorat
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung	BAPPEDA Kota Madiun (Mayjend Panjaitan 17, Banjarejo, Taman, Kota Madiun)	1 gedung	105.000.000	1 gedung	40.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	BAPPEDA Kota Madiun	34 unit	32.000.000	34 unit	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	BAPPEDA Kota Madiun	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	60.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/kantor	BPKAD	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	BPKAD	30 kendaraan	55.000.000	30 kendaraan	55.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	BPKAD	12 jenis	87.000.000	12 jenis	64.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Perbaikan gedung kantor	Kota Madiun	1 unit	15.000.000	1 unit	9.315.000	Badan Pendapatan Daerah
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Yang Diperbaiki	Kota Madiun	2 unit	44.500.000	2 unit	46.500.000	Badan Pendapatan Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Madiun	7 jenis	100.000.000	7 jenis	132.850.000	Badan Pendapatan Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung dan Bangunan	BKD	2 gedung	25.000.000	2 gedung	30.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	BKD	20 kendaraan	22.000.000	20 kendaraan	23.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis sarpras kantor	BKD	9 jenis	30.000.000	9 jenis	30.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Diklat	Jumlah acara	BKD	100 acara	130.000.000	100 acara	115.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	Kota Madiun	1 gedung	7.500.000	1 gedung	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota Madiun	23 unit	24.892.000	23 unit	33.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	Kota Madiun	7 jenis	35.000.000	7 jenis	38.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	Kecamatan Kartoharjo	1 gedung	53.000.000	1 gedung	2.958.000.000	Kecamatan kartoharjo
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Kartoharjo	16 unit	35.251.000	16 unit	43.146.000	Kecamatan kartoharjo
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana Prasarana Kantor yang dipelihara	Kecamatan Kartoharjo	3 jenis	34.960.000	3 jenis	54.060.000	Kecamatan kartoharjo
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	Kecamatan Taman	1 gedung	15.000.000	1 gedung	35.000.000	Kecamatan Taman
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kecamatan Taman	16 unit	48.448.000	16 unit	48.448.000	Kecamatan Taman
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	Kecamatan Taman	3 jenis	36.500.000	3 jenis	36.500.000	Kecamatan Taman
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	Kecamatan Manguharjo	1 gedung	71.298.000	1 gedung	71.298.000	Kecamatan Manguharjo
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	Kecamatan Manguharjo	16 unit	59.559.200	16 unit	59.559.200	Kecamatan Manguharjo
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan prasarana	Kecamatan Manguharjo	3 jenis	45.300.000	3 jenis	45.300.000	Kecamatan Manguharjo
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yng Representatif	Kota Madiun	1 unit	2.000.000	1 unit	3.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Kondisi Baik		6 unit	22.575.000	6 unit	27.315.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	JUmlah Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kota Madiun	5 jenis	15.750.000	5 jenis	19.057.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	bagian prekokesra	1 unit	4.000.000	1 unit	6.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	bagian prekokesra	9 unit	22.000.000	9 unit	27.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	bagian prekokesra	27 unit	9.200.000	27 unit	22.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Madiun	1 gedung	82.000.000	1 gedung	99.220.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jenis/Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Madiun	7 unit	24.205.600	7 unit	29.288.776	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana	Jenis/Jumlah sarana dan prasarana kantor yang	Kota Madiun	31 unit	20.000.000	31 unit	24.200.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan

1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Kantor	dipelihara						
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	Kota Madiun	1 unit	2.500.000	1 unit	3.025.000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	1 unit	20.547.600	1 unit	24.862.596	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana akantor	Kota Madiun	6 jenis	16.962.000	6 jenis	20.524.000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	Kota Madiun	2 gedung	514.676.500	2 gedung	514.676.500	Sekretariat Daerah Bagian Umum
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	40 unit	1.685.065.600	40 unit	1.685.065.600	Sekretariat Daerah Bagian Umum
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	Kota Madiun	5 jenis	229.600.000	5 jenis	229.600.000	Sekretariat Daerah Bagian Umum
			4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	jumlah rumah dinas		4 unit	1.669.539.900	4 unit	1.669.539.900	Sekretariat Daerah Bagian Umum
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	Kota Madiun	1 unit	7.500.000	1 unit	7.500.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	kota Madiun	3 buah	12.000.000	3 buah	12.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
0	0	1 0 1 0 1	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	21.061.451.516	100%		
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarpras	Dinas Pendidikan	1 paket	1.000.000.000	1 paket	0	Dinas Pendidikan
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	RSUD Kota Madiun	18 jenis	906.710.000	18 jenis	1.245.782.172	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	3 jenis	301.000.000	3 jenis	1.725.554.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dibeli	Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Madiun	6 jenis	196.000.000	6 jenis	196.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Madiun	118 orang	388.000.000	118 orang	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	BPBD Kota Madiun	1 paket	47.400.000	1 paket	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Kota Madiun	2 paket	168.100.000	2 paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	Dinas Lingkungan Hidup Kota	10 unit	300.000.000	10 unit	93.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prasarana Kantor	kantor yang dibutuhkan	Madiun					
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	220 orang	182.000.000	220 orang	41.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	4 jenis	230.000.000	4 jenis	847.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Madiun	8 jenis	30.000.000	8 jenis	300.000.000	Dinas Perhubungan
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah kelengkapan pakaian dinas	Kota madiun	674 buah	220.000.000	674 buah	300.000.000	Dinas Perhubungan
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor baru	Kota Madiun	1 paket	140.971.000	1 paket	1.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Kegiatan Pembangunan Gedung	Jumlah Paket	Kota Madiun	2 paket	140.000.000	2 paket	9.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung / bangunan yang direhab	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	Kota Madiun	100 %	351.927.300	100 %	0	Sekretariat DPRD
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase penerimaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Madiun	100 %	394.047.456	100 %	0	Sekretariat DPRD
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yg dipenuhi	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	2 jenis	75.000.000	2 jenis	75.000.000	Inspektorat
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipenuhi	Kota Madiun	5 paket	100.000.000	5 paket	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	1 jenis	557.520.000	1 jenis	339.500.000	Badan Pendapatan Daerah
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis sarpras kantor		4 jenis	290.000.000	4 jenis		Badan Kepegawaian Daerah
4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Mushola BKD dan atap gedung diklat	1 gedung/ bangunan	1.225.000.000	1 gedung/ bangunan	0	Badan Kepegawaian Daerah
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan prasarana	Kecamatan Kartoharjo	3 paket	158.818.000	3 paket	364.850.000	Kecamatan kartoharjo
4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Kelurahan Kartoharjo	1 gedung	991.418.000	1 gedung	3.000.000.000	Kecamatan kartoharjo
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan prasarana	Kecamatan Manguharjo	1 paket	50.000.000	1 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana		1 paket	1.358.197.680	1 paket	1.358.197.680	Sekretariat Daerah Bagian Umum
2	Kegiatan Pengadaan	jumlah pakaian dinas	Kota Madiun	3.800 orang	10.859.342.080	3.800 orang	7.761.092.080	Sekretariat Daerah Bagian

1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	dan kelengkapannya						Umum
			4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	kota Madiun	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Umum
0	0	1 0 1 0 1	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu		100 %	2.500.588.156	100 %		
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	Dinas pendidikan	9 dokumen	190.000.000	9 dokumen	99.390.040	Dinas Pendidikan
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun	11 dokumen	285.608.000	11 dokumen	320.000.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	10 dokumen	40.000.000	10 dokumen	45.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun	Kota Madiun	10 dokumen	45.000.000	10 dokumen	50.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan/ pelaporan	Kota Madiun	12 dokumen	84.850.000	12 dokumen	99.850.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	BPBD Kota Madiun	7 dokumen	20.000.000	7 dokumen	20.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/ pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Madiun	9 dokumen	142.278.000	9 dokumen	187.455.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	kota madiun	6 dokumen	65.000.000	6 dokumen	25.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	10 dokumen	81.000.000	10 dokumen	51.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	8 dokumen	62.811.360	8 dokumen	76.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kota Madiun	6 dokumen	102.089.400	6 dokumen	102.089.400	Dinas Perhubungan
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kota Madiun	5 dokumen	115.000.000	5 dokumen	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Kota Madiun	10 dokumen	52.905.120	10 dokumen	52.905.120	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	DISBUDPAR PORA	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	40.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	10 dokumen	40.000.000	10 dokumen	55.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16 dokumen	128.700.000	16 dokumen	145.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	6 dokumen	95.000.000	6 dokumen	95.000.000	Dinas Perdagangan
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	Kota Madiun	100 %	26.031.500	100 %	0	Sekretariat DPRD
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	INSPEKTOR AT KOTA MADIUN	10 dokumen	97.353.000	10 dokumen	97.000.000	Inspektorat
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	BAPPEDA Kota Madiun	12 dokumen	85.000.000	12 dokumen	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	BPKAD	8 dokumen	20.000.000	8 dokumen	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen OPD	Kota Madiun	7 dokumen	2.500.000	7 dokumen	2.500.000	Badan Pendapatan Daerah
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	BKD	6 dokumen	72.162.576	6 dokumen	63.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kota Madiun	12 dokumen	92.392.640	12 dokumen	97.596.560	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kecamatan Kartoharjo	12 dokumen	30.273.600	12 dokumen	0	Kecamatan kartoharjo
	2 Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah Dokumen	Kecamatan Kartoharjo	1 dokumen	9.807.120	1 dokumen	100.032.700	Kecamatan kartoharjo
	3 Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	Kecamatan Kartoharjo	2 dokumen	22.883.280	2 dokumen	23.340.900	Kecamatan kartoharjo
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kecamatan Taman	12 dokumen	41.395.968	12 dokumen	55.425.168	Kecamatan Taman
	2 Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah Dokumen		1 dokumen	27.841.536	1 dokumen	35.536.320	Kecamatan Taman
	3 Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	Lanjutan	2 dokumen	27.841.536	2 dokumen	35.536.320	Kecamatan Taman
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kecamatan Manguharjo	12 dokumen	43.120.800	12 dokumen	53.784.000	Kecamatan Manguharjo
	2 Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah dokumen	Kecamatan Manguharjo	1 dokumen	29.192.400	1 dokumen	37.247.040	Kecamatan Manguharjo
	3 Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	Kecamatan Manguharjo	2 dokumen	37.950.120	2 dokumen	37.247.040	Kecamatan Manguharjo
	1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan/ laporan yang disusun tepat waktu	bagian prekokesra	5 dokumen	20.000.000	5 dokumen	24.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

1				2	3	4	5	6	7	8	9
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kota Madiun	5 dokumen	33.252.000	5 dokumen	40.234.920	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kota Madiun	7 dokumen	38.923.200	7 dokumen	38.923.000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	8 dokumen	145.008.000	8 dokumen	145.008.000	Sekretariat Daerah Bagian Umum
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun	kota Madiun	6 dokumen	7.417.000	6 dokumen	15.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
<b>RUTIN</b>								<b>558.116.319.634</b>			

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan amanat masyarakat untuk berada di garda terdepan memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2021 dalam mengemudikan pembangunan di Kota Madiun. Indikator kinerja pemerintahan daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (out-come) dan kegiatan (out put) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya kedalam dokumen RKPD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program dan kegiatan (outcome dan out put) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

Berdasarkan awal pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka untuk mencapainya diperlukan upaya dari seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mendorong tercapainya target-target indikator yang meliputi:

1. aspek kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari
  - a. kesejahteraan dan pemerataan ekonomi;
  - b. kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. seni budaya dan olahraga.
2. aspek pelayanan umum, yang terdiri dari
  - a. layanan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - b. layanan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - c. layanan urusan pilihan;
  - d. layanan penunjang dan pendukung urusan pemerintahan; dan
  - e. layanan rutin.

Rincian lebih lanjut tentang indikator kinerja Pemerintahan Daerah yang harus dapat dicapai dan telah tertuang dalam Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021, dapat disajikan sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah Kota Madiun**  
**IKU dan IKK Tahun 2021**

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO	INDIKATOR	TARGET
		TAHUN KE-2 2021
1	2	3
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (73)
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,63
4	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	81,45
5	Laju Pertumbuhan PDRB	6,02
6	PDRB Perkapital	79,78
7	Angka Kemiskinan	4,46
8	Indeks Ketentraman	78
9	Indeks Gini	0,35
10	Indeks Pengetahuan	0,77
11	Indeks Kesehatan	0,81
12	Indeks Rasa Aman	79
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,75
14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,7
15	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	1,04
16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,36 (baik)
17	Prestasi Pemuda dan Olah Raga di tingkat regional dan nasional	33
18	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	3,1100
19	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	84 (baik)
20	Opini BPK	WTP
21	Indeks Kerukunan	2,89 (tinggi)
22	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	29,63% (8 kelurahan)
23	ICOR	2,50
24	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,80
25	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	6,01
26	Pertumbuhan Sektor Pengolahan	7,30
27	Indeks Infrastruktur	96,20
28	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100
29	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	88,62
30	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	65,44
31	Kinerja Ruas Jalan	0,43%

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
<b>I</b>		<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>		
a		Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
	1	Laju Pertumbuhan PDRB	6,02	
	2	PDRB Per Kapita	79,78	
	3	Angka Kemiskinan	4,46	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4	Indeks Gini	0,35	
b		Fokus Kesejahteraan Sosial		
	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,63	
	I	Bidang Urusan Sosial		
	1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	
	3	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	
	4	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	
	5	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	
	6	Persentase Penurunan PMKS	3,5	
	7	Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	91	
	8	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	100	
	II	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	1	Rasio KDRT	0,02	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100	
	3	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100	
c.		Fokus Seni Budaya dan Olahraga		

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
	I	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		1 Jumlah Prestasi Pemuda	17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2 Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih	18	
		3 Prestasi Pemuda dan Olah Raga ditingkat regional dan nasional	33	
		4 Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	20	
		5 Jumlah Atlit yang Ikut Kejuaraan di Tingkat Provinsi dan Nasional	190	
	II	Bidang Urusan Kebudayaan		
		1 persentase budaya daerah yang dilestarikan	40	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2 Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	40	
<b>II</b>		<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
a		Fokus Lelayanan Urusan Pemerintahan Wajib		
	<b>1</b>	<b>Terkait Pelayanan Dasar</b>		
	I	Bidang Urusan Pendidikan		
		1 jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	26.405	Dinas Pendidikan
		2 jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	45	
		3 jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4.971	
		4 Indeks Pengetahuan	0,77	
		5 Rata-rata Lama Sekolah	11,13	
		6 Harapan Lama Sekolah	14,23	
		7 Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	88	
		8 Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	80	
		9 Angka Partisipasi Murni SD/SMP	100%	
		10 Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%	
		11 Jumlah Lembaga non formal yang Terakreditasi	100 lembaga	
	II	Bidang Urusan Kesehatan		
		1 Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		2 Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
	3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	
	4	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	
	5	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	
	6	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	
	7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	
	8	Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	
	9	Persentase warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	
	10	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	
	11	Persentase warga negara terduga tubercolosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	
	12	Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	
	13	Indeks Kesehatan	0,81	
	14	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	81,43	
	15	Indeks Keluarga Sehat	0,39	
	16	Status Akreditasi SNARS		Rumah Sakit Umum Daerah
	17	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Madiun	80,16	
	18	Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	76,69	
	19	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	91,13	
	20	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	
	21	Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	91,13	

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
1		2	3	4	
	22	Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	97	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
	23	Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart	45		
	24	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	10		
	25	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	51,72		
	III	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	1	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	2	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%		
	3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%		
	4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%		
	5	Jumlah warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%		
	6	Indeks Ketentraman	78		
	7	Indeks Rasa Aman	79		
	8	Persentase Masyarakat yang taat perda dan perwal	96		
	9	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%		
	10	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	1 orang setiap RT		
	11	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100		
	12	Prosentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	96%		
	13	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Persentase Penanggulangan Korban Bencana	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	14	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan Bencana	100		
	15	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100		
	16	Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani	100		
	17	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	100		



NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
	<b>2</b>	<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>		
	I	Bidang Urusan Tenaga Kerja		
		1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,75	Dinas Tenaga Kerja
		2 Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja	55	
		3 Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79,25	
		4 Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	63	
		5 Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	81	
	II	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		1 persentase uptime SIAK	99,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2 Persentase Kepemilikan dokumen KK	100	
		3 Persentase Kepemilikan Dokumen KTP	98,30	
		4 Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	95	
		5 Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	98,60	
		6 Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kematian	98,50	
		7 Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Perkawinan	98,80	
		8 Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84	
		9 Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94	
		10 Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,10	
	III	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan swasta	49,12	
		3 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	13,36	
	IV	Bidang Urusan Pangan		
		1 Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	1,04	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2 Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	0,19	
		3 Indeks Ketahanan Pangan	80,4	
		4 Skor Pola Pangan Harapan	95,8	

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
	V	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 Persentase Peserta KB Aktif MKJP	42,75	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	VI	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika		
		1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,26 (baik)	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,50	
		3 Nilai Domain Layanan SPBE	3,3	
		4 Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	45	
		5 Persentase sasaran penyebaran informasi public	85	
		6 Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100	
	VII	Bidang Urusan Statistik		
		1 Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
	VIII	Bidang Urusan Persandian		
		1 Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	40	Dinas Komunikasi dan Informatika
	IX	Bidang Urusan Perpustakaan		
		1 Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2 Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan	72%	
	X	Bidang Urusan Kearsipan		
		1 Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	2,29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2 Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola	500 berkas	
	<b>3</b>	<b>Fokus Pelayanan Urusan Pilihan</b>		
	I	Bidang Urusan Transmigrasi		
		1 Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	81	Dinas Tenaga Kerja
	<b>4</b>	<b>Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintahan</b>		
	I	Unsur Staf		
		1 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	BB (73)	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
		2 Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	3,1100 Sangat Tinggi	
		3 Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	84 (baik)	

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
	4	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai Target yang ditetapkan	76	
	5	persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100	
	6	persentase OPD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	100	
	7	jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	15	
	8	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik	100%	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	9	Nilai IKM Bagian Umum	81,5	
	10	IKM di Bidang Administrasi dan Keuangan	81,5	
	11	IKM di Bidang Kerumahtanggaan	81,5	
	12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang keprotokolan dan kepegawaian	81,5	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
	13	Pelayanan Dibidang Hukum	3 jenis	
	14	Persentase Pencapaian Kinerja Pemerintahan Tepat waktu	100	
	15	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	16	Jumlah Dokuem Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat syarat	6 dokumen	
	17	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerjasama	Sekretariat Daerah Bagian Umum
	18	Persentase Produk Hukum yang Berkualitas	100	
	19	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	2,7 (cukup)	
	20	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	100	
	21	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik ( $\geq 100$ )	82	
	22	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
	23	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	100	
II		Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	79	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	81	
	III	Unsur Pengawas Penyelenggraan Pemerintahan Daerah		
	1	Indeks reformasi birokrasi	B	Inspektorat
	2	Level maturitas SPIP Kota Madiun	2,5	
	3	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	92	
	4	Level Kapabilitas APIP	2	
	5	Persentase OPD yang maturitas SPIInya level 3	30	
	6	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	100	
	7	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100	
	IV	Fungsi Penunjang Perencanaan		
	1	Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, RENSTRA, RENJA)	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Persentase Capaian Kinerja atas Target Indikator Sasaran Strategis Kota Madiun	100	
	3	Sinergitas dokumen perencanaan Kota Madiun, Provinsi dan Nasional	100	
	4	Penerapan Kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	100	
	5	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan	100	
	6	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosil dan budaya	100	
	7	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan	100	
	8	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	100	
	9	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan	100	
	10	Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80%	100	

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
	V	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan		
		1 Opini BPK	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2 Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangansesuai SAP	100	
		3 Persentase Peningkatan nilai Aset Pemerintah Daerah	7,2	
		4 Persentase Bidang tanah bersertifikat	80	
		5 Persentase Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	36	
		6 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		7 Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		8 Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100	
		9 Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD	4.528.005.499	
		10 Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	100	Badan Pendapatan Daerah
		11 Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1,5	
	IV	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
		1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kepegawaian	89 poin	Badan Kepegawaian Daerah
		2 Persentase Jabatan yang diisi sesuai kompetensi	23,52	
		3 Persentase Nilai SKP Pegawai yang Bernilai Baik	100%	
		4 Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	100	
		5 Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100	
		6 Persentase Penyelesaian SK Terkait Kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	100	
		7 Persentase Penempatan PNS sesuai SKM	100	
		8 Persentase Kedisiplinan ASN	100	
		9 Persentase Pengembangan ASN	100	
	V	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan		
		1 Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat sebagai dasar perencanaan dan/atau diimplementasikan	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	VI	Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik		
		1 Indeks Kerukunan	2,89 (tinggi)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 persentase konflik yang	100	

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
		tertangani		
	3	Persentase Orkesmas yang berbadan Hukum	45	
	4	Cakupan Hubungan Sosial	2,7	
	5	Konflik Horizontal di dalam Masyarakat	0 konflik	
	6	Persentase Orkemas	73%	
	VII	Fungsi Penunjang Kecamatan		
	1	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	29,63% (8 kelurahan)	
	2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	
	3	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di kecamatan	33	3 Kecamatan
	4	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100	
	5	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti	100	
	6	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	12	
	7	Indeks perkembangan kelurahan	0,81	
<b>III</b>		<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>		
	<b>A</b>	<b>Kemampuan Ekonomi</b>		
	I	Bidang Urusan Koperasi Usaha Mikro dan Menengah		
	1	persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas	1,3	
	2	persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri	0,005	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	3	Persentase koperasi aktif	98,70	
	4	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,42	
	II	Bidang Urusan Penanaman Modal		
	1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	191 milyar	
	2	Persentase penyelesaian ijin yang diterbitkan tepat waktu	100%	
	3	ICOR	2,5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	4	Persentase investor yang merealisasikan investasi	19	
	5	Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan	86%	

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
	III	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan		
		1 Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	1,1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		2 Persentase peningkatan Pendapatan pelaku usaha perikanan	1	
	IV	Bidang Urusan Pariwisata		
		1 Jumlah Kunjungan Wisatawan	375.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2 Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,80%	
		3 Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan	28	
	V	Bidang Urusan Pertanian		
		1 Nilai Tukar Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1,396	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2 Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,22	
		3 Rasio Pendapatan Pelaku Usaha peternakan dengan biaya produksi	1,208	
		4 Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	2	
	VI	Bidang Urusan Perdagangan		
		1 Pertumbuhan Sektor Perdagangan	6,01	Dinas Perdagangan
		2 Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	0,5	
		3 Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	0,5	
		4 Jumlah Omset Pasar Rakyat	672.000 juta (Rp)	
		5 Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal	0	
	VII	Bidang Urusan Perindustrian		
		1 Pertumbuhan Sektor Pengolahan	7,30	Dinas Tenaga Kerja
		2 persentase pertumbuhan industry	0,03	
		3 Persentase IKM yang Berstandart	17,10	
		4 Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	84	
	VIII	Unsur Staf		
		1 jumlah kegiatan pendukung aktivitas ekonomi	4	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		2 Jumlah kegiatan terkait penyelesaian peredaran rokok ilegal	2	
		3 Tingkat Inflasi	4%	
		4 Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi	100	
		5 Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	100	

NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
	<b>B</b>	<b>Fasilitas Wilayah Infrastruktur</b>		
		1 Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	81,45	
	I	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
		1 Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		2 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90	
		3 Indeks Infrastruktur	96,20	
		4 Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	
		5 Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kota yang mantap	94,50	
		6 Persentase Kawasan Bebas Banjir/ genangan	94,20	
		7 Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100	
		8 Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100	
		9 Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	95	
		10 Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang	10	
		11 Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat	90,50	
		12 Ketaatan terhadap RTRW	100%	
		13 Persentase terlayannya air bersih/ minum	96	
	II	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/ kota	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2 Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prpgram pemerintah daerah/ kab/ kota	100%	
		3 Indeks Sarana Prasarana Permukiman	88,62	
		4 Indeks Perumahan Permukiman	99,57	
		5 Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Pemakaman	77,67	
		6 Persentase Rumah tinggal Layak Huni dan Bersanitasi	99,35	
		7 Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	77,67	
	III	Bidang Urusan Pertanahan		
		1 Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	IV	Bidang Urusan Lingkungan Hidup		



NOMOR		ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4
	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	77,39	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,94	
	3	Persentase Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	98	
	4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	65,44	
	5	Persentase data dan informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang tersedia	69,23	
	6	Persentase titik sample kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	48	
	7	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	52,90	
	8	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74	
	V	Bidang Urusan Perhubungan		
	1	Kinerja Ruas Jalan	0,43%	Dinas Perhubungan
	2	Kepadatan Lalu Lintas	46	
	3	Persentase Perlengkapan jalan	75%	
	4	Kinerja Angkutan Umum	40%	

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rancangan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2021, merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder pembangunan Kota Madiun tentang arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Madiun tahun 2021. Tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan dokumen RKPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sementara itu, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat telah dilakukan mulai dari konsultasi publik, pelaksanaan forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti oleh berbagai profesi mulai dari perwakilan organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan dunia usaha, serta masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Pelaksanaan forum Musrenbang dimaksud dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Seluruh masukan/saran, aspirasinya berupa tanggapan serta pertimbangan-pertimbangan yang riil terhadap kebijakan pemerintah daerah, telah menjadi masukan untuk menyempurnakan draft dokumen RKPD ini.

Seiring dengan pelaksanaan penyusunan yang dilakukan sesuai tahapannya, maka secara otomatis pendekatan-pendekatan penyusunannya juga telah terpenuhi yakni: pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas - bawah dan bawah - atas (*top down dan bottom up*). Hal ini menunjukkan, bahwa semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021. Demikian pula dalam penyusunan Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 ini senantiasa memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hal ini dalam upaya untuk menjamin adanya keselarasan, sinergi dan harmonisasi antar dan antara dokumen perencanaan pembangunan tingkatan pemerintahan. Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam Rancangan dokumen RKPD ini memuat dan mengintegrasikan pula program *corporate social responsibility (CSR)* perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Madiun dalam rangka mendukung program prioritas Kota Madiun.

Dengan telah tersusunnya Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 ini, maka diharapkan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dapat melakukan penyempurnaan dengan mempedomani dan menuangkannya kedalam Rancangan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
 NOMOR : 34 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 Juli 2020

PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 DENGAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg Permen 90	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021			Kegiatan Sesuai Renstra/ usulan renja PD	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Keterangan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>													
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH								
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Pendidikan	100%					
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Pendidikan	6 dokumen	190.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	9 dokumen	190.000.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Dinas Pendidikan	100%					
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dinas Pendidikan	100%	186.278.180.958	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah OPD	1 OPD	186.278.180.958
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan						



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	Kota Madiun	100%						
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	terlaksananya 8 Standar Nasional Pendidikan	Kota Madiun	100%						
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Lembaga yang direhab	Dinas Pendidikan	20 lembaga	28.200.000.000	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Sekolah	prosentase pemenuhan kebutuhan saras aparatur	100%	28.200.000.000	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Laptop	Dinas Pendidikan	5.450 Laptop	47.121.250.000	Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan	jumlah paket	1 Paket	47.121.250.000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	Kota Madiun	56 lembaga	15.845.498.417	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	398.921.930	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	174.225.700	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	158.714.129	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	439.917.280	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	235.867.830	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	427.649.204	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	188.681.900	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	404.180.920	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	152.983.600	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	118.577.800	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	203.514.221	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	236.472.500	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	325.998.860	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	133.033.780	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pilangbango	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	434.648.280	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	245.295.129	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	201.132.690	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	219.314.286	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	442.249.500	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	361.331.850	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	168.804.293	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	200.240.036	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	187.439.615	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	713.782.190	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	368.390.550	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	404.274.356	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	215.169.075	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	171.752.900	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	367.121.700	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	163.858.693	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	311.609.705	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	182.398.586	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	165.504.570	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	392.924.400	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	171.380.000	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	289.615.700	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	237.277.590	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	448.761.170	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	139.473.290	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	216.522.786	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	359.064.695	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	408.003.750	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	483.712.742	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	259.985.858	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	572.308.056	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	432.337.400	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	330.217.250	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	275.372.900	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	382.671.300	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	190.640.340	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	198.442.583	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	215.164.400	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	193.993.800	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	180.271.850	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	181.820.100	
										Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	162.478.800	
1	01	02	2.01	2 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Dinas Pendidikan	73 Lembaga	746.342.360	Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba USBN SD, SMP, Kegiatan USBN Pendidikan Agama SD dan SMP, Kegiatan USBN SD, SMP dan UN SMP	Jumlah Lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN	93 Lembaga	371.170.640	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	Jumlah Lembaga yang sesuai SPM	106 lembaga	375.171.720	
1	01	02	2.01	2 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	meningkatnya jumlah prestasi siswa akademik dan non akademik dalam 14 bidang kreatifitas	Dinas Pendidikan	14 bidang kreatifitas bakat minat siswa	1.016.685.530	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	Jumlah Siswa yang berestasi	522 siswa	328.815.210	
										Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP	Jumlah Siswa yang berestasi	309 siswa	687.870.320	
1	01	02	2.01	2 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Dinas Pendidikan	73 Lembaga	797.964.885	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	Jumlah lembaga yang terakreditasi	106 lembaga	650.465.485	
										Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah siswa yang memenuhi kualifikasi	94 lembaga	147.499.400	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	288.800.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	288.800.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	52.800.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	52.800.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	66.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	66.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	296.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	296.000.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	121.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	121.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	287.200.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	287.200.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	85.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	85.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	228.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	228.000.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	84.800.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	84.800.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	51.200.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	51.200.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	92.800.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	92.800.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	136.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	136.000.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	143.200.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	143.200.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	33.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	33.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	184.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	184.000.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	133.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	133.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	86.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	86.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	141.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	141.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	272.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	272.000.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	248.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	248.000.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	114.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	114.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	105.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	105.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	122.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	122.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	419.200.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	419.200.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	293.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	293.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	362.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	362.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	124.800.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	124.800.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	164.200.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	164.200.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	247.200.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	247.200.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	122.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	122.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	277.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	277.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	54.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	54.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	197.800.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	197.800.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	288.800.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	288.800.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	77.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	77.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	256.800.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	256.800.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	145.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	145.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	364.800.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	364.800.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	64.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	64.000.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	82.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	82.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	288.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	288.000.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	264.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	264.000.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	374.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	374.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	109.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	109.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	436.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	436.000.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	283.200.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	283.200.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	251.200.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	251.200.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	145.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	145.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	194.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	194.400.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	130.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	130.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	138.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	138.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	149.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	149.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	145.600.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	145.600.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	86.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	86.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	50.400.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	50.400.000	
1	01	02	2.01	X X	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	68.800.000	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	68.800.000	
1	01	02	2.01	X X	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (DAK)	Jumlah Lembaga yang direhab	Dinas Pendidikan	11 Lembaga						
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	terlaksananya 8 Standar Nasional Pendidikan		100%						
1	01	02	2.02	1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Lembaga yang direhab	Dinas Pendidikan	6 lembaga	11.800.000.000	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah	prosentase pemenuhan kebutuhan saras aparatur	100%	11.800.000.000	
1	01	02	2.02	2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Kain	Dinas Pendidikan	5.960 Kain seragam	3.384.371.000	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah siswa yang memenuhi kualifikasi	94 lembaga	3.384.371.000	
1	01	02	2.02	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	Kota Madiun	14 lembaga	11.075.452.311	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1.102.906.750	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	960.417.339	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	723.468.801	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	896.884.010	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	447.271.000	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	848.058.200	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	856.072.800	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	647.541.618	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	970.102.100	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	990.883.300	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	572.024.860	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	788.113.997	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	721.870.600	
										Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	549.836.936	
1	01	02	2.02	3 7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Dinas Pendidikan	23 Lembaga	677.310.000	Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba USBN SD, SMP, Kegiatan USBN Pendidikan Agama SD dan SMP, Kegiatan USBN SD, SMP dan UN SMP	Jumlah Lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN	93 Lembaga	437.310.000	
										Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	Jumlah Lembaga yang sesuai SPM	106 lembaga	240.000.000	
1	01	02	2.02	3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	meningkatnya jumlah prestasi siswa akademik dan non akademik dalam 14 bidang kreatifitas	Dinas Pendidikan	14 bidang kreatifitas bakat minat siswa	1.207.005.320	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	Jumlah Siswa yang berestasi	522 siswa	358.445.320	
										Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP	Jumlah Siswa yang berestasi	309 siswa	848.560.000	
1	01	02	2.02	4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Dinas Pendidikan	100 Lembaga	656.888.365	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	Jumlah lembaga yang terakreditasi	106 lembaga	376.049.365	
										Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah siswa yang memenuhi kualifikasi	94 lembaga	280.839.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	1.303.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1.303.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	744.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	744.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	573.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	573.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	886.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	886.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	462.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	462.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	650.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	650.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	764.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	764.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	550.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	550.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	439.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	439.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	518.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	518.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	651.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	651.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	723.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	723.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	725.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	725.000.000	
1	01	02	2.02	X X	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	1 Lembaga	376.000.000	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	376.000.000	
1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar PAUD		100%						
1	01	02	2,03	1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas pendidikan	1 lembaga	376.297.000	Kegiatan Penyelenggaraan TK Pembina	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	1 lembaga	376.297.000	
1	01	02	2,03	1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Lembaga yang memahami kurikulum PAUD	Dinas pendidikan	169 Lembaga	250.000.000	Kegiatan Workshop Kurikulum PAUD	jumlah lembaga yang memahami kurikulum PAUD	169 lembaga	250.000.000	
1	01	02	2,03	1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dinas pendidikan	230 Lembaga	5.912.322.200	Kegiatan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Teadu Kota Madiun	jumlah gugus yang berestasi	22 gugus	490.325.600	
										Kegiatan Bantuan BOP PAUD	jumlah lembaga yang mendapat BOP	169 lembaga	4.826.016.600	Hibah Bansos
										Kegiatan Pagelaran Hari Anak Nasional	jumlah Anak yang mengikuti HAN	2000 anak	595.980.000	
1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang terakreditasi		100 lembaga						







1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%						
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6 dokumen	285.608.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	11 dokumen	285.608.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%						
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	29.691.891.460				29.455.553.918	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	3.766.659.288	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.938.039.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	420.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	420.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	14.126.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	100%	14.126.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	201.098.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	100%	201.098.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	82.405.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Persentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	100%	82.405.000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat		0,39						
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan		100%						
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Obat kadaluarsa < 1%	Dinas Kesehatan dan KB	'1 %	166.765.000	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Obat kadaluarsa < 1%	'1 %	166.765.000	FARALKE S ukk
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM mencapai target		100%						
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	Dinkes dan KB	100%	654.043.950	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar	'100 %		KGM

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi stunting	Dinkes dan KB	9,70%	428.018.800	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar	'100 %	1.251.749.000	KGM ukk
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Prosentase imunisasi rutin lengkap	Ruang Kelas Asrama Haji Kota Madiun	93%	28.700.000	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi	Prosentase capaian indikator surveillance dan imunisasi mencapai target	'100 %		SURVIM
						Cakupan kunjungan balita paripurna		100%	-	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar	'100 %		KEGIATAN KGM
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Prosentase respon KLB < 24 jam	Ruang Kelas Asrama Haji Kota Madiun, Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan dan KB	100%	152.401.000	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi	Prosentase capaian indikator surveillance dan imunisasi mencapai target	'100 %	191.011.000	SURVIM ukk
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Prosentase kasus potensial KLB konfirmasi lab	BBLK Surabaya	Sesuai Kasus	9.910.000	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi	Prosentase capaian indikator surveillance dan imunisasi mencapai target	'100 %		SURVIM
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Gedung diklat & asrama haji, 6 puskesmas, Latketmas murnajati, Dinkes dan KB	100%	504.563.000	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini	'62 %		PTM
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Asrama haji, gedung diklat, Sunda y Market	100%	9.364.000	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini	'62 %		PTM



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dan diobati dengan ACT								
						Prosentase RFT Rate								
						Prosentase cakupan Pneumonia balita ditemukan dan ditangani								
						Prosentase cakupan Diare balita ditemukan dan ditangani								
						Prosentase bayi yang lahir dari bumil HBsAg positif diberi HBIG								
1	02	02	2,02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (APBD dan DBHCHT)	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Kota Madiun	88.966 orang	23.627.334.000	Kegiatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	88.966 orang	23.627.334.000	SDK (JKN)
1	02	02	2,02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	puskesmas	'81,99 IKM	11.977.193.000	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas manguharjo blud	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	2.172.155.000	
										Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas patihan blud	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	1.273.856.000	
										Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas oro-oro ombo blud	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	1.972.413.000	
										Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas tawangrejo blud	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	1.611.104.000	
										Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas banjarejo blud	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	2.669.288.000	
										Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas demangan blud	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	2.278.377.000	
1	02	02	2,02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (UKK)	Indeks Kepuasan Masyarakat	puskesmas	'81,99 IKM	6.023.136.000	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas patihan	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	1.009.680.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas oro-oro ombo	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	938.112.000	
										Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas tawangrejo	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	1.130.976.000	
										Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas banjarejo	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	1.120.224.000	
										Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas demangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	881.160.000	
										Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas manguharjo	Indeks Kepuasan Masyarakat	'81,99 IKM	942.984.000	
1	02	02	2,02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	terlaksananya pelayanan gawat darurat	PSC, P3K	100%	2.943.456.036	Kegiatan Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dasar dan Rujukan	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	'100 %	2.992.637.796	YANKES, ukk hibah pmi
1	02	02	2,02	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Prosentase SPM indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target	Fasyankes, Lapas, Dinkes, Kecamatan	100%	150.800.000	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	'70 %		P2M TB
1	02	02	2,02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Prosentase SPM indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV mencapai target	Fasyankes, Lapas, Cafe, Dinkes, Kecamatan	100%	600.836.400	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	'70 %	966.145.000	P2M HIV AIDS ukk

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Prosentase penyakit menular dan tidak menular yang angka kesakitan dan kematian menurun, indikator terdiri dari :								
						Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)								
						Case Fatality Rate DBD								
						Kasus Malaria yang ditemukan dan diobati dengan ACT								
						Prosentase RFT Rate								
						Prosentase cakupan Pneumonia balita ditemukan dan ditangani								
						Prosentase cakupan Diare balita ditemukan dan ditangani								
						Prosentase bayi yang lahir dari bumil HBsAg positif diberi HBIG								
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prosentase Pekerja yang dilayani	Dinkes & KB	40%	65.566.000	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Prosentase kelurahan STBM	'63 %		kesjaor
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Prosentase TTU Sehat	Dinkes & KB	85%	232.743.200	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Prosentase kelurahan STBM	'63 %	797.773.000	kesjaor ukk
1	02	02	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Prosentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan	Dinkes & KB	60%	442.024.000	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Prosentase kelurahan STBM	'63 %		kesjaor + HONOR PPTK



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Bk Prov)	Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	Dinas Kesehatan dan KB	'41 %	55.000.000	Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Bk Prov)	Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	'41 %	55.000.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Dinas Kesehatan dan KB	'1 dokter	30.000.000	Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	'1 dokter	30.000.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK)	Prosentase SPM yang mencapai Target	Dinas Kesehatan dan KB	'100 %	749.593.000	Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK)	Prosentase SPM yang mencapai Target	'100 %	749.593.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Monitoring Evaluasi	Dinas Kesehatan dan KB	'6 puskesmas	39.448.000	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Monitoring Evaluasi	'6 puskesmas	39.448.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makan (DAK)	Jumlah sarana farmasi dan IRT yang teantau	Dinas Kesehatan dan KB	'70 sarana	247.615.000	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makan (DAK)	Jumlah sarana farmasi dan IRT yang teantau	'70 sarana	247.615.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK)	Prosentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terlaksana	Dinas Kesehatan dan KB	'100 %	3.171.009.000	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK)	Prosentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terlaksana	'100 %	3.171.009.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Dinas Kesehatan dan KB	'100 %	463.002.000	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	'100 %	463.002.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Dinas Kesehatan dan KB	'100 %	459.810.000	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	'100 %	459.810.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Dinas Kesehatan dan KB	'100 %	535.000.000	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	'100 %	535.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	Dinas Kesehatan dan KB	'100 %	580.632.000	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	'100 %	580.632.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro-oro Ombo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	Dinas Kesehatan dan KB	'100 %	496.964.000	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro-oro Ombo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	'100 %	496.964.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	Dinas Kesehatan dan KB	'100 %	564.295.000	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	'100 %	564.295.000	
1	02	02	2,02	x x	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase Obat kadaluarsa < 1%	Dinas Kesehatan dan KB	'1 %	29.480.000	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase Obat kadaluarsa < 1%	'1 %	29.480.000	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang tersertifikasi		85%						
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Prosentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang mendapat No.P-IRT		85%						
1	02	04	2,03	0 1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Prosentase IRT yang sehat	Dinkes & KB	85%	51.200.000	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Prosentase kelurahan STBM	'63 %		kesjaor

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan		90%						
1	02	03	2,04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi		92%						
1	02	03	2,04	0 1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar	Dinkes & KB	'92 %	288.636.600	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Kesehatan	Persentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar	'92 %	297.997.000	SDK ukk
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata		57,14%						
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1						
1	02	05	2,01	0 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Prosentase Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan dan KB	68%	500.436.900	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	'85 %		ukbm
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM aktif		42,86%						
1	02	05	2,03	0 1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Prosentase Puskesmas membina UKBM sesuai standar	Dinas Kesehatan dan KB	33,33%	4.170.731.950	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	'85 %	4.674.591.000	ukbm ukk

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya angka UKP (usia kawin pertama ) < 20 tahun		≤ 4 %	-					
2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase OPD yang terlibat dalam program Bangga Kencana (Kampung KB)		>50%						
2	14	02	2.01	07	Penyediaan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai iso lokal Kab/Kota	terbentuknya P Sekolah siaga Kependudukan di 5 sekolah	Dinkes dan KB	100%	26.413.600	Kegiatan Advokasi, Penggerakkan dan Informasi KB	Prosentase cakupan penyediaan informasi dan data mikro	'100 %		dalduK ADPIN
2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	tersedianya data PK di 18 kel		100%						
2	14	02	2,02	12	pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	terdatanya semua keluarga dalam Pendataan Keluarga (PK) 2021 di 18 kelurahan		100%	173.991.280					
x	xx	xx			PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DI BIDANG KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar		91,13%						
						Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN		97%						
x	xx	xx	xxx	02	x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)	Prosentase sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang layak pakai	Dinas Kesehatan dan KB	100%	5.696.091.000	x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)	Prosentase sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang layak pakai	100%	5.696.091.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	xx	xxx	03	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	Dinas Kesehatan dan KB	'90 %	266.050.000	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	'90 %	266.050.000	
x	xx	xx	xxx	04	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Patihan (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	Dinas Kesehatan dan KB	'88 %	212.330.000	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Patihan (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	'88 %	212.330.000	
x	xx	xx	xxx	05	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Demangan (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	Dinas Kesehatan dan KB	'87 %	326.000.000	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Demangan (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	'87 %	326.000.000	
x	xx	xx	xxx	06	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Banjarejo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	Dinas Kesehatan dan KB	'93 %	346.215.000	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Banjarejo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	'93 %	346.215.000	
x	xx	xx	xxx	07	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Oro-Oro Ombo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	Dinas Kesehatan dan KB	'86 %	281.900.000	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Oro-Oro Ombo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	'86 %	281.900.000	
x	xx	xx	xxx	08	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	Dinas Kesehatan dan KB	'90 %	249.475.000	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	'90 %	249.475.000	
x	xx	xx	xxx	09	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Bk Prov)	Prosentase Poskestren berstrata PURI	Dinas Kesehatan dan KB	'70 %	121.029.000	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Bk Prov)	Prosentase Poskestren berstrata PURI	'70 %	121.029.000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmeet Need		< 8%						
2	14	03	2,03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka Drop Out		<15%						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tercapainya KB MKJP 80 aseptor	Dinas Kesehatan dan KB	100%	126.720.000	Kegiatan Pengendalian Penduduk	Prosentase usia kawin pertama perempuan	'3,5 %	1.060.090.000	yan kb
2	14	03	2,03	xx	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Jumlah Kampung KB Aktif	Dinas Kesehatan dan KB	'7 Kampung KB	1.013.768.000	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Jumlah Kampung KB Aktif	'7 Kampung KB	1.013.768.000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB		70%						
2	14	04	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS		BKB 67%, BKR 9%, BKL 13% UPPKS 57%						
2	14	04	2,01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pembinaan pada poktan Tribina, PIKR dan UPPKS	Dinas Kesehatan dan KB	Kenaikan pengetahuan peserta sebesar 20%	212.911.600	Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina	'67 %		K3S
2	14	04	2,01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya sosialisasi kegiatan poktan tribina, PIKR dan UPPKS	Dinas Kesehatan dan KB	Kenaikan pengetahuan peserta sebesar 20%	227.479.500	Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina	'67 %	762.783.000	K3S ukk
2	14	04	2,01	xx	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK KB)	Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan	Dinas Kesehatan dan KB	'2 paket	740.350.000	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK KB)	Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan	'2 paket	740.350.000	
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>														
x					RUTIN PERANGKAT DAERAH									
x	xx				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
x	xx	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				23.025.941.956				23.025.941.956	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	RSUD Kota Madiun	100%	20.962.015.956				20.962.015.956	
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	RSUD Kota Madiun	100%	20.962.015.956				20.962.015.956	
X	XX	1	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	RSUD Kota Madiun		2.063.926.000				2.063.926.000	
X	XX	1	2.03	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif	RSUD Kota Madiun	100%	1.157.216.000	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium non PNS yang disediakan	39 orang	1.157.216.000	
X	XX	1	2.03	2 4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	RSUD Kota Madiun	100%	906.710.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	18 jenis	906.710.000	
X					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB									
X	XX				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH									
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan Masyarakat di RSUD Kota Madiun		0,39	81.138.862.550				81.138.862.550	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar		91,13%	4.984.911.000				4.984.911.000	
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	RSUD Kota Madiun	3 unit	1.256.761.000	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	3 unit	1.256.761.000	





1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%						
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 dokumen	40.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	10 dokumen	40.000.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%						
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	6.500.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	'13 paket	6.500.000.000	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	3.766.460.420	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	13 jenis	3.466.460.422	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	300.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	'650 kali	300.000.000	
X	XX	01	2.03	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	2.000.000.000	Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air	Jumlah Bangunan Pintu air	10 titik	2.000.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	250.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	'2 gedung	250.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	300.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	'40 unit	300.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	300.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah saras kantor	612 unit	300.000.000	
1					URUSAN PRIORITAS									
1	03				Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									
1	03	08	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) dan Sertifikat Laik fungsi Bangunan Gedung	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	Kota Madiun	100%		Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dibangun	8 gedung	-	
1	03	8	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB), Sertifikat Laik Fungsi ( SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan BangunanGedung, serta Implementasi SIMBG				200.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan	Jumlah Dokumen		200.000.000	
1	03	8	2,01	02	Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan rehabilitasi, renovasi, Ubahsuai, serta pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota				29.100.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dibangun	8 gedung	29.100.000.000	Pembangunan GOR ciliwung ( .1.500.000.000), gedung penunjang publik sumber umis ( 15.000.000.000)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									
1	03	11	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	100%		Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah SKT	200 orang	-	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	100%	250.000.000	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah SKT	200 orang	250.000.000	
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Jumlah Perusahaan	Kota Madiun	100%	250.000.000	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Perusahaan	50 perusahaan	250.000.000	
1	3	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									
1	03	09	2.01		Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kab/kota	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	Kota Madiun	100%		Kegiatan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah lokasi	27 Lokasi	-	
1	03	09	2.01	03	Penataan bangunan dan lingkungan	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	Kota Madiun	100%	17.481.400.000	Kegiatan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah lokasi	27 Lokasi	17.481.400.000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				40.640.000.000					
1	03	10	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/ Kota	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	Kota Madiun	95%		Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	jumlah lokasi	85 ruas jalan	-	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan jalan	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	95%	23.000.000.000	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	jumlah lokasi	85 ruas jalan	23.000.000.000	
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yg dibangun	Kota Madiun	95%	700.000.000	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	jumlah lokasi	1 lokasi	700.000.000	
1	03	10	2.01	02	Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan	Jumlah Lokasi yang yg dibebaskan	Kota Madiun	95%	15.000.000.000	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	jumlah lokasi		15.000.000.000	
1	03	10	2.01	04	Survey kondisi jalan/ jembatan		Kota Madiun		412.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Jl. Berkala	Jumlah Lokasi	20 lokasi	250.000.000	
1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur		Kota Madiun		5.075.000.000	Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	jumlah lokasi	3 lokasi	11.500.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yg dibangun	Kota Madiun	95%	205.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Jl. Berkala	Jumlah Lokasi	20 lokasi	250.000.000	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis sistem pengembangan jalan	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	95%	1.940.000.000	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	1.940.000.000	Amdal Ring Road Timur (. 500.000.000)
1	03	10	2.01	06	Pelebaran jalan Menuju Standar	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	Kota Madiun	95%	1.290.000.000	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Lokasi	5 lokasi	1.290.000.000	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	Kota Madiun	95%	13.384.000.000	Kegiatan Peningkatan Jalan	Jumlah Lokasi	2 lokasi	13.384.000.000	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan rutin jalan	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	Kota Madiun	95%	1.000.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Jl. Ring road	Jumlah Lokasi	1 lokasi	1.000.000.000	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan berkala jalan	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	Kota Madiun	95%	16.000.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Jl. Berkala	Jumlah Lokasi	20 lokasi	15.500.000.000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE KAB/KOTA									
1	03	06	2.01		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung langsung dengan sungai dalam daerah	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	Kota Madiun	94%		Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong	Jumlah saluran yg dibangun		-	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	Kota Madiun	94%	1.000.000.000	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran	Jumlah Dokumen	8 dokumen	1.000.000.000	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan saluran sistem drainase perkotaan dan lingkungan	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	Kota Madiun	94%	49.650.000.000	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong	Panjang saluran yg dibangun	1500 m	49.650.000.000	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	Kota Madiun	94%	2.500.000.000	Pemeliharaan Rutin Kecamatan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah lokasi stasiun pompa	3 Kec	2.500.000.000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03	12	2,03	01	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	jumlah dokumen			400.000.000	Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP )	Persentase pemanfaatan runag sesuai RTRW	100%	400.000.000	
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>														
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH									
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	81	9.313.266.400					
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	45.000.000					
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6 dokumen	24.800.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/1 aporan yang disusun	10 dokumen	24.800.000	
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12 dokumen	10.100.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/1 aporan yang disusun	10 dokumen	10.100.000	
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 dokumen	10.100.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/1 aporan yang disusun	10 dokumen	10.100.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	5.000.000.000					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	5.000.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Pekerjaan Belanja Gaji PNS 43 org)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (dengan indikator jumlah PNS)	43 orang	5.000.000.000	
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13 dokumen	61.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Pekerjaan Belanja Gaji PNS 43 org)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (dengan indikator jumlah PNS)	43 orang	61.000.000	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	4.163.266.400					
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	1.417.856.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	75 jenis	1.417.856.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	183.880.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	50 kali	183.880.000	
X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	210.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor (Sub Pekerjaan Belanja kendaraan)	1 unit	210.000.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	91.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor (Sub Pekerjaan Belanja Peralatan Gedung Kantor)	3 jenis	91.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	28.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	1 gedung	28.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	1.760.360.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	57 unit	1.760.360.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	472.170.400	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah sarana dan prasarana	48 jenis	472.170.400	
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	pemenuhan kebutuhan pegawai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	105.000.000					
X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	105.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pakaian dinas	175 orang	105.000.000	
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	persentase peserta yang paham	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	10.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pakaian dinas	175 orang	10.000.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan		100%	1.070.000.000					
1	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Kota Madiun	2 dokumen	566.000.000					



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	02	2,01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen rumah sewa milik masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dihasilkan	Kota Madiun	2 dokumen	566.000.000	Kegiatan Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Perumahan yang dihasilkan	1 dokumen	566.000.000	
1	04	02	2,05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah lokasi Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Madiun	1 lokasi	504.000.000					
1	04	02	2,05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah lokasi Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Madiun	1 lokasi	504.000.000	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan	Jumlah rumah yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	1 lokasi	504.000.000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Penanganan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Kota Madiun	20%	2.806.000.000					
1	04	03	2,02		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani	Kota Madiun	1 lokasi	606.000.000					
1	04	03	2,02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh yang dihasilkan	Kota Madiun	1 dokumen	204.000.000	Kegiatan Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Perumahan yang dihasilkan	1 lokasi	204.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	03	2,02	02	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh yang dihasilkan	Kota Madiun	6 dokumen	402.000.000	Kegiatan Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Perumahan yang dihasilkan	1 lokasi	402.000.000	
1	04	03	2,03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh Yang ditangani	Kota Madiun	3 lokasi	2.200.000.000					
1	04	03	2,03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan terhadap RTLH yang sesuai kriteria	Kota Madiun	100%	2.200.000.000	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan	Jumlah rumah yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	1 lokasi	2.200.000.000	
1	04	03	2,03	03	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Prosentase PSU Rumah yang dilakukan perbaikan terhadap PSU Rumah yang sesuai kriteria	Kota Madiun	100%	1.456.000.000	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi sarana dan prasarana permukiman yang dihasilkan	3 kecamatan	6.500.000.000	
										Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	5 lokasi	650.000.000	
1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		100%	504.000.000					
1	04	04	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Madiun	3 kecamatan	504.000.000					
1	04	04	2,01	02	Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah lokasi Prasarana, sarana dan utilitas umum yang disediakan	Kota Madiun	3 kecamatan	404.000.000	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi sarana dan prasarana permukiman yang disediakan	3 kecamatan	200.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	5 lokasi	1.000.000.000	
1	04	04	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kota Madiun	1 dokumen	100.000.000	Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah rumah yang disediakan	1 lokasi	504.000.000	
1	06				URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL									
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		100%	115.600.000					
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Taman Makam Pahlawan Nasional yang dilakukan pemeliharaan		1 lokasi	115.600.000					
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	Taman Makam Pahlawan	1 lokasi	115.600.000	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman	1	lokasi	115.600.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah	Kota Madiun	1	120.000.000					
2	10	10	2,01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi tanah yang digunakan	Kota Madiun	10 lokasi	120.000.000					
2	10	10	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Kota Madiun	10 kali	120.000.000	Kegiatan Pelayanan Pertanahan	Jumlah rekomendasi ijin yang diterbitkan	10 lokasi	120.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						penggunaan tanah								
2	11				URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				19.380.841.000					
2	11	04	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah keanekaragaman hayati yang dikelola	Kota Madiun	59 lokasi	19.380.841.000					
2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	Kota Madiun	59 lokasi	19.380.841.000	Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah RTH yang dibangun	6 lokasi	6.257.250.000	
										Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan RTH dan fasilitas pendukungnya	Jumlah RH yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	59 lokasi	10.369.991.000	
										Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang dibangun	7 lokasi	2.050.000.000	
										Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman	Jumlah pemakaman yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	6 lokasi	703.600.000	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Madiun	100%	7.632.465.000					
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	Kota Madiun	200 titik	7.632.465.000					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	Kota Madiun	200 titik	5.107.700.000	Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik penerangan jalan umum yang disediakan	400 titik	5.107.700.000	
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan	Kota Madiun	6181 titik	2.524.765.000	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik penerangan jalan yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	6181 titik	2.524.765.000	
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>														
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH									
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar							
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%						
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	6 dokumen	84.850.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	12 dokumen	84.850.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%						
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%	6.031.369.000	Belanja Tidak Langsung	Jumlah PNS	44 orang	6.031.369.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Peringkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%	2.639.468.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	7 jenis	2.639.468.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	250.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 kali	250.000.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%	196.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	6 jenis	196.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%	30.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	'2 gedung	30.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%	500.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	33 unit	500.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%	30.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	6 jenis	30.000.000	
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang representatif	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%						
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%						
X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	100%	299.000.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	118 orang	388.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	Satuan Polisi Pamong Praja	100%	89.000.000					
5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
5	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	Wilayah Kota Madiun	96%						
5	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kota Madiun	96%						
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase kegiatan pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Wilayah Kota Madiun	100%	250.000.000	Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Prosentase kegiatan Pengamanan	100%	250.000.000	
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Prosentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada yang tertangani	Wilayah Kota Madiun	96%	986.030.000	Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang tertangani	96%	1.044.530.000	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase peserta koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	90%	58.500.000					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Wilayah Kota Madiun	92%	181.730.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Masyarakat pesilat yang beartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	92%	31.730.000	
										Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan	92%	150.000.000	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Prosentase SDM Satpol Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Damkar yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	80%	300.000.000	Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan	80%	300.000.000	
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Prosentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Wilayah Kota Madiun	100%						
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Prosentase peserta yang paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Wilayah Kota Madiun	100%	210.000.000	Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase peserta yang paham terhadap Perda dan Perwal	100%	210.000.000	
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Bupati/Walikota	Prosentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Bupati/Walikota yang tertangani	Wilayah Kota Madiun	100%	130.000.000	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	100%	130.000.000	





1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BPBD Kota Madiun		2.184.650.000					
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	BPBD Kota Madiun	100%	20.000.000					
X	XX	01	2.01	0 2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BPBD Kota Madiun	6 dokumen	20.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	7 dokumen	20.000.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	BPBD Kota Madiun	100%	1.384.360.000					
b	XX	01	2.02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	BPBD Kota Madiun	100%	1.384.360.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.384.360.000	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	BPBD Kota Madiun	100%	780.290.000					
X	XX	01	2.03	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	BPBD Kota Madiun	100%	430.390.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 unit	430.390.000	
X	XX	01	2.03	1 8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Luar daerah	100%	80.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 kali	80.000.000	
X	XX	01	2.03	2 4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	BPBD Kota Madiun	100%	47.400.000	Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	1 paket	47.400.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	BPBD Kota Madiun	100%	50.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang dipelihara	1 paket	50.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase gedung kantor yang layak digunakan	BPBD Kota Madiun	100%	157.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	157.500.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	BPBD Kota Madiun	100%	15.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	8 unit	15.000.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	BPBD Kota Madiun	100%	1.584.327.000					
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Dokumen yang telah disusun	BPBD Kota Madiun	100%	131.700.000					
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Persentase peserta yang hadir	BPBD Kota Madiun	100 %	131.700.000	Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase peserta yang hadir	100 %	131.700.000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	BPBD Kota Madiun	100 %	1.452.627.000					
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Persentase peserta yang hadir	BPBD Kota Madiun	100 %	155.953.000	Mitigasi Penanggulangan Bencana	Persentase peserta yang hadir	100 %	155.953.000	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	BPBD Kota Madiun	1 Paket	153.560.000	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang diadakan	1 paket	153.560.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah peserta yang terlatih	Kota Madiun	50 Orang	131.764.000	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah peserta yang terlatih	50 orang	131.764.000	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana	Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana	BPBD Kota Madiun	1 Dokumen	186.350.000	Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana	1 Dokumen	186.350.000	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	BPBD Kota Madiun	730 Shift	825.000.000	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	730 Shift	825.000.000	
<b>DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>														
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			6.616.744.108				6.616.744.108	
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Dinsos, PP dan PA	100%	142.278.000				142.278.000	
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinsos, PP dan PA	6 dokumen	142.278.000	Kegiatan penyusunan perencanaan serta pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan/ pelaporan yang disusun tepat waktu	9 dokumen	142.278.000	
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah		12 dokumen						
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah		2 dokumen						
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%	4.456.929.618				4.456.929.618	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dinsos, PP dan PA	100%	4.456.929.618	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	100%	4.456.929.618	
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah		13 dokumen						
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Dinsos, PP dan PA	100%	2.017.536.490				2.017.536.490	
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Dinsos, PP dan PA	100%	1.000.802.290	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.141.802.290	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Dinsos, PP dan PA	100%	250.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah		250.000.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Dinsos, PP dan PA	100%	168.100.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	2 paket	168.100.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dinsos, PP dan PA	100%	200.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	2 gedung	200.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Dinsos, PP dan PA	100%	181.834.200	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	25 kendaraan	181.834.200	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dinsos, PP dan PA	100%	75.800.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	15 jenis	75.800.000	
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai		100%						
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	persentase peserta yang paham	Dinsos, PP dan PA	100%	141.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.141.802.290	
1	06				URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	persentase peserta yang paham		100%						
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang beeran aktif dalam menyelenggara	Dinsos PPPA	100%	3.507.554.700				3.507.554.700	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kan kesejahteraan sosial								
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang beotensi untuk dikembangkan	Dinsos PPPA	7	3.507.554.700				3.507.554.700	
1	06	02	2,03	0 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan/pembi naan untuk meningkatkan kemampuan	Dinsos PPPA	135 orang	311.172.200	Pembinaan PSKS	Jumlah PSKS yang dibina dan aktif	4 lembaga	311.172.200	
1	06	02	2,03	0 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang didampingi oleh tenaga TKSK	Dinsos PPPA	80 orang	26.040.000	Pembinaan PSKS	Jumlah PSKS yang dibina dan aktif	4 lembaga	26.040.000	
1	06	02	2,03	0 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa yang mengikuti sarasehan	Dinsos PPPA	115 orang	43.030.000	Kegiatan pembinaan perintis kemerdekaan atau keluarganya serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan			43.030.000	
1	06	02	2,03	0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota ( tambah Bansos)	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Dinsos PPPA	5 Lembaga	3.127.312.500	Kegiatan pemberdayaan pelayanan karang werdha dan kesejahteraan lansia,			3.127.312.500	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		90%	10.740.275.400				10.740.275.400	
1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial		90%	7.880.000				7.880.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar didata	Kelurahan	24 orang	3.600.000	kegiatan pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT	Jumlah dokumen data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia	3 dokumen	3.600.000	
1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar di rujuk	Kota Madiun	24 orang	4.080.000	kegiatan pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT	Jumlah dokumen data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia	3 dokumen	4.080.000	
1	06	05	2,01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Kelurahan	24 orang	200.000	kegiatan pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT	Jumlah dokumen data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia	3 dokumen	200.000	
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		100%	10.732.395.400				10.732.395.400	
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Fakir miskin yang di data	Kelurahan	10.000 orang	871.765.000	kegiatan pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT	Jumlah dokumen data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia	3 dokumen	871.765.000	
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota + bansos	jumlah Fakir miskin yang mendapatkan bansos	Kelurahan	10.000 orang	9.860.630.400	Kegiatan Bantuan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin penerima manfaat		9.035.368.680	
										Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan KPM PKH	Jumlah KPM PKH yang mendapat pembinaan dan pelatihan	2090 KPM	334.950.000	
										Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah kelompok fakir miskin yang mendapat bantuan	10 kelompok	267.590.720	
										Kegiatan Sunat dan Nikah Masal	Jumlah peserta sunat dan nikah massal	90 orang	222.721.000	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana		100%						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						bagi korban bencana								
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase Taruna Siaga Bencana yang handal		100%	183.250.000				183.250.000	
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan makanan	Kota Madiun	3.300 orang	40.150.000	Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana	21 orang	40.150.000	
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan sandang	Kota Madiun	1.000 orang	10.000.000	Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana	21 orang	10.000.000	
1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan psikososial	Kota Madiun	300 orang	133.100.000	Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana	21 orang	133.100.000	
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	prosentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana		100%	319.140.000				319.140.000	
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	Kota Madiun	60 orang	13.370.000	Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana	21 orang	13.370.000	
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang mendapatkan sosialisasi	Kota Madiun	20 orang	305.770.000	Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana	21 orang	305.770.000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun	100%	1.762.055.300				1.762.055.300	
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Prosentase PMKS terlantar yang tertangani	Kota Madiun	100%	1.506.813.040				1.506.813.040	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan pangannya	Kota Madiun	155 orang	278.538.040	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	278.538.040	
1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Shelter Srintit	10 orang	15.000.000	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	15.000.000	
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Kota Madiun	9 orang	10.500.000	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	10.500.000	
1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Kota Madiun	10 orang	27.300.000	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	27.300.000	
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta pertemuan PPDKM, FKKADK dan hari jadi disabilitas anak	Kota Madiun	500 orang	276.625.000	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	276.625.000	
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis, dan Masyarakat	Jumlah keluarga PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial	Kota Madiun	10 orang	821.400.000	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	821.400.000	
1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang terlayani	Kota Madiun	10 orang	77.450.000	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	77.450.000	
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Kota Madiun	415 orang	255.242.260				255.242.260	
1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Kota Madiun	10 orang	121.182.500	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	121.182.500	
1	06	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya yang terlayani	Kota Madiun	10 orang	47.400.000	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	47.400.000	
1	06	04	2,02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS lainnya yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Kota Madiun	7 orang	7.500.000	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	7.500.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kota Madiun	10 orang	39.400.000	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	39.400.000	
1	06	04	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Kota Madiun	10 orang	18.200.000	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	415 orang	18.200.000	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IDG		83,25	1.428.924.240				1.428.924.240	
2	08	02	2,01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Dinas Sosial, PP dan PA	13,32%	162.072.640				162.072.640	
2	08	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta pertemuan	Dinas Sosial, PP dan PA	100 orang	91.172.640	Pemantapan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG	550 orang	91.172.640	
2	08	02	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor	Dinas Sosial, PP dan PA	350 orang	43.750.000	Pemantapan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG	550 orang	43.750.000	
2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta review	Dinas Sosial, PP dan PA	68 orang	12.550.000	Pemantapan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG	550 orang	12.550.000	
2	08	02	2,01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi	Dinas Sosial, PP dan PA	100 orang	14.600.000	Pemantapan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG	550 orang	14.600.000	
2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase partisipasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Dinas Sosial, PP dan PA	92%	871.378.960				871.378.960	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah kegiatan Monev P3EL dan pertemuan Poksus	6 kelurahan dan Dinas Sosial, PP dan PA	440 orang	144.322.640	Pemantapan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG	550 orang	122.161.320	
										Kegiatan Pemberdayaan lembaga masyarakat	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba, pencaangan, pembinaan serta pameran	27 kelurahan	22.161.320	
2	08	02	2,02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah peserta lomba, pelatihan dan pertemuan rutin	3 kelurahan dan Dinas Sosial, PP dan PA	8173 orang	727.056.320	Pemantapan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG	550 orang	363.528.160	
										Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan perempuan	jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan	47 kali	161.764.080	
										Kegiatan evaluasi 10 program pokok PKK, Hari kesatuan gerak PKK dan hariibu	jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi	8 kelurahan	201.764.080	
2	08	02	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta	Dinas Sosial, PP dan PA	48,34%	395.472.640				395.472.640	
2	08	02	2,03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor	Dinas Sosial, PP dan PA	650 orang	92.822.640	Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan perempuan	jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan	47 kali	92.822.640	
2	08	02	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan forum	Dinas Sosial, PP dan PA	580 orang	14.400.000	Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan perempuan	jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan	47 kali	14.400.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti dan jumlah peserta pertemuan	Luar Kota Madiun dan Dinas Sosial, PP dan PA	1 kegiatan / 528 orang	72.250.000	Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan perempuan	jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan	47 kali	72.250.000	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	Kota Madiun	100%	691.158.040				691.158.040	
2	08	06	2,01		Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pertemuan gugus tugas	Kota Madiun	100%	95.795.000				95.795.000	
2	08	06	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemu gugus tugas tingkat kota/kec/kel	Kota Madiun	150 orang	95.795.000	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif	7 lembaga	95.795.000	
2	08	06	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kota Madiun	100%	595.363.040				595.363.040	
2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	Kota Madiun	175 orang	154.256.040	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif	7 lembaga	154.256.040	
2	08	06	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan FAKOM yang dilaksanakan	Kota Madiun	8 kegiatan	132.000.000	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif	7 lembaga	132.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	06	2,02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia	Kota Madiun	1 dokumen	179.865.000	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif	7 lembaga	179.865.000	
2	08	06	2,02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi Ramah Anak	Kota Madiun	170 orang	129.242.000	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif	7 lembaga	65.383.480	
										Kegiatan revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	jumlah peserta sosialisasi	135 orang	63.858.520	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam upaya perlindungan perempuan	Kota Madiun	100%	299.672.360				299.672.360	
2	08	03	2,01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kota Madiun	100%	94.114.820				94.114.820	
2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan	Kota Madiun	120 orang	56.630.320	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani	100%	56.630.320	
2	08	03	2,01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelaksanaan goes to village	Kota Madiun	165 orang	37.484.500	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani	100%	15.742.250	
										Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	jumlah peserta sosialisasi	450 orang	21.742.250	
2	08	03	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan	Kota Madiun	100%	160.372.020				160.372.020	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kewenangan Kabupaten/Kota	korban kekerasan								
2	08	03	2,02	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan, Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan tim jejaring/stakeholder	Kota Madiun	35 orang	160.372.020	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani	100%	160.372.020	
2	08	03	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifiknya dalam situasi darurat	Kota Madiun	100%	45.185.520				45.185.520	
2	08	03	2,03	0 3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan yang diberikan kepada perempuan dalam situasi darurat	Kota Madiun	30 kali	26.276.520	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani	100%	26.276.520	
2	08	03	2,03	0 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tim gugus tugas yang terbentuk	Kota Madiun	1 tim	18.909.000	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani	100%	18.909.000	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	Kota Madiun	100%	214.595.860				214.595.860	
2	08	07	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Kota Madiun	100%	214.595.860				214.595.860	
2	08	07	2,01	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah	Kota Madiun	28 sekolah	82.229.560	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani	100%	82.229.560	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			4.138.362.500				4.138.362.500	
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%	65.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase Dokumen Perencanaan		65.000.000	
X	XX	01	2.01	0 2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Tenaga Kerja	6 dokumen	65.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	6 dokumen	65.000.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%	2.971.503.500	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terlaksananya Administrasi perkantoran		2.971.503.500	
b	XX	01	2.02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dinas Tenaga Kerja	100%	2.971.503.500	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	1 paket	2.971.503.500	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	persentase Terpenuhinya kebutuhan pegawai		100%	1.101.859.000				1.101.859.000	
X	XX	01	2.03	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	100%	735.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	1 paket	735.000.000	
X	XX	01	2.03	1 8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Dinas Tenaga Kerja	100%	262.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 kegiatan	262.000.000	
X	XX	01	2.03	2 8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Tenaga Kerja	100%	35.700.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	'2 gedung	35.700.000	
X	XX	01	2.03	3 0	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasion	Dinas Tenaga Kerja	100%	44.159.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	2 unit	44.159.000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						al yang layak digunakan								
X	XX	01	2.03	3 4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Tenaga Kerja	100%	25.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten		285 orang	1.232.833.820	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan dan	79%	1.232.833.820	
											Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98%		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase Pencari Kerja Yang ditempatkan		79%	1.232.833.820				1.232.833.820	
2	07	03	2.01	0 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja	30 orang	121.297.360	pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten	35 orang	121.297.360	
2	07	03	2.01	0 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Dinas Tenaga Kerja	20 Lembaga	138.964.960	pengembangan kelambagaan produktivitas dan pelaksanaan kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Baru yang berkembang	40 orang	138.964.960	
X	XX	XX			PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi nasional		81%		PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi nasional	81%		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	XX	XXX		Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH - CHT)	Jumlah peserta pelatihan pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja	200 orang	972.571.500	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH - CHT)	Jumlah peserta pelatihan pelatihan ketrampilan yang berkompeten	200 orang	972.571.500	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja Yang ditempatkan		79%	449.754.000	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan dan	79%	449.754.000	
											Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98%		
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun di Luar Negeri		500 orang	449.754.000				449.754.000	
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Data Pencari kerja dan Penempatan bagi Pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja	1 dokumen	180.584.000	Updating data pengangguran tenaga kerja	Tersedianya data ketenagakerjaan atau pengangguran	1 dokumen	180.584.000	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan Sosialisasi Bursa Kerja	Dinas Tenaga Kerja	500 orang	149.170.000	Penyebarluasan optimalisasi informasi pasar kerja dan penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri maupun luar negeri	600 orang	149.170.000	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	Dinas Tenaga Kerja	75 orang	120.000.000	Pameran bursa kerja job market fair	Jumlah pencari kerja yang terserap di dunia kerja	100 orang	120.000.000	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan		70%	1.993.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan melalui PB	98.25%	1.993.000.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Hubungan Industrial					Prosentase perusahaan yang menerapkan program BPJS	60,50%		
										Prosentase Tenaga Kerja Sektor Informal yang mendapatkan Perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan	87%		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB		25%	1.787.000.000				1.787.000.000
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah dokumen peraturan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	15 dokumen	200.000.000				
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Sarana HI dan Jumlah Tenaga kerja Sektor Informal yang mendapatkan SIAGAKITA	Dinas Tenaga Kerja	300 Perusahaan dan 36.000 tenaga kerja sektor informal	1.587.000.000	pembinaan hubungan industrial dan kelembagaan ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan	300 perusahaan	271.000.000
										Asuransi tenaga kerja sektor informal (SIAGA KITA)	21000 tenaga kerja sektor informal	21000 tenaga kerja sektor informal	1.516.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan HI		100 perusahaan	206.000.000				206.000.000
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan melalui PB	Dinas Tenaga Kerja	15 kasus/pengaduan	206.000.000	fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan melalui PB	12 kasus/pengaduan	50.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Sosialisasi perlindungan tenaga kerja	tenaga kerja yang mendapatkan pengetahuan perlindungan tenaga kerja	150 tenaga kerja	156.000.000	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti pemasaran produk		12,80%	403.854.600	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	Prosentase IKM yang berstandart	17,10%	403.854.600	
3	31	04	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran produk Dalam Negeri		5 kali pameran	403.854.600				403.854.600	
3	31	04	2,01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran/pemasaran Produk	Dinas Tenaga Kerja	5 kali pameran	303.854.600	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi IKM/IRT	Jumlah IKM/IRT yang meningkat SDMnya	110 IKM (tiga kali kegiatan)	255.254.600	
										Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan disverifikasi produk industri manufaktur dan fasilitasi ijin teknis	Jumlah IKM yang mempunyai ijin PIRT	20 IKM	48.600.000	
X	XX	XX			PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)		4 penguji		PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI	Porentase IKM yang Melaksanakan GMP	84%		
X	XX	XX	XXX		Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi Industri Kecil dan Menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practies bagi Industri Hasil Tembakau (DBH-CHT)	jumlah pengujian kadar Tar dan Nikotin	Dinas Tenaga Kerja	4 kali	100.000.000	Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi Industri Kecil dan Menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practies bagi Industri Hasil Tembakau (DBH-CHT)	jumlah pengujian kadar Tar dan Nikotin	4 kali	100.000.000	DBHCHT
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian		100%	250.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	Prosentase IKM yang berstandart	17,10%	250.000.000	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian		2 dokumen	250.000.000				250.000.000	
3	31	02	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	jumlah dokumen peraturan perindustrian	Dinas Tenaga Kerja	2 dokumen	250.000.000	Kegiatan Penyusunan Raperda Perindustrian	Jumlah Dokumen Peraturan Perindustrian	2 dokumen	250.000.000	
3	31	02	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Usaha Mikro	Dinas Tenaga Kerja	130 IKM (tiga kali kegiatan)	606.000.000	Kegiatan fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil, Menengah Tk. Nasional, INACRAFT	Jumlah produk Unggulan yang dipamerkan	3 produk (2 kali pameran)	306.000.000	
										Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan IKM/IRT oleh DEKRANASDA	Jumlah produk unggulan kerajinan handmade yang di pamerkan	5 produk	300.000.000	
3	31	02	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi HKI		20 IKM	60.000.000	Kegiatan Sosialisasi Penerapan dan fasilitasi standart produk Industri (HKI) bagi IKM/IRT Kota madiun	Jumlah IKM yang mendapatkan Sertifikat HKI	40 IKM	81.500.000	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Pendaftar Transmigrasi yang terfasilitasi		3%	32.694.480	PROGRAM KETRANSMIGRASIAN	Prosentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	81%	32.694.480	
3	32	03	2,01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sosialisasi ketransmigrasi an		1 kegiatan	32.694.480				32.694.480	
3	32	03	2,01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah sosialisasi ketransmigrasi an	Dinas Tenaga Kerja	1 kegiatan	32.694.480	Penyelenggaraan ketransmigrasian	Animo Masyarakat pendaftar Transmigrasi yang terfasilitasi	1 kegiatan	32.694.480	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase Inovasi terfasilitasi		45%	81.500.000					
5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang terfasilitasi		20 inovasi	81.500.000					
5	05	02	2,04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Fasilitasi Cipta	Dinas Tenaga Kerja	2 kegiatan	81.500.000	penerapan teknologi tepat Guna	Jumlah angkatan kerja yang	40 angkatan kerja	228.749.000	

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Teknologi Tepat guna					mendapatkan penerapan teknologi tepat guna				
<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>																
X							RUTIN PERANGKAT DAERAH									
X	XX						PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			4.138.362.500				4.138.362.500		
X	XX	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun		5.924.418.720			5.924.418.720	
X	XX	01	2.01				Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Kerja Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	100%	128.700.000			128.700.000	
X	XX	01	2.01	02			Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	6 dokumen	128.700.000	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	16	128.700.000
X	XX	01	2.02				Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	100%	3.863.594.000			3.863.594.000	
X	XX	01	2.02	01			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	100%	3.863.594.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	20	3.863.594.000
X	XX	01	2,03				Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat		Dinas Pertanian dan	100	1.932.124.720			1.932.124.720	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Perangkat Daerah	Ketahanan Pangan Kota Madiun							
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	100	1.157.574.720	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	20	1.157.574.720	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	100	264.550.000	Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120	264.550.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	100	36.500.000	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	36.500.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	100	200.000.000	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara (unit)	1	200.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	100	60.000.000	Kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara (unit)	29	60.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	100	50.000.000	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (unit)	75	50.000.000	
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi sedang/berat/rumah/gedung kantor	persentase gedung kantor yang representatif	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	100	200.000.000	Kegiatan rehab gedung dan bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang direhab (unit)	1	200.000.000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	95,8	962.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	95,8	962.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (ton)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	16200	357.000.000				357.000.000	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	2	65.000.000	Pemantauan harga dan pasokan pangan	Jumlah dokumen informasi harga pasokan dan akses pangan	4	65.000.000	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Produksi Pangan Hasil Pekarangan / Kawasan Rumah pangan Lestari (kg)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	2000	210.000.000	Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah produksi pangan hasil pekarangan/kawasan rumah pangan lestari (kg)	2000	210.000.000	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	2	82.000.000	Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah produksi pangan hasil pekarangan/kawasan rumah pangan lestari (kg)	2000	82.000.000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/perkapita)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	2100	605.000.000				605.000.000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	2	65.000.000	Pemantauan harga dan pasokan pangan	Jumlah dokumen informasi harga pasokan dan akses pangan	4	65.000.000	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Menu Olahan yang Tercipta (produk)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	190	420.000.000	Promosi pola konsumsi beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman	Jumlah menu konsumsi olahan pangan yang tercipta (produk)	190	420.000.000	
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	2	120.000.000	Penguatan cadangan pangan dan dewan ketahanan pangan	Jumlah cadangan pangan daerah dan masyarakat (ton)	122	120.000.000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Peningkatan Sampel Pangan yang Teruji (%)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	3	325.000.000				325.000.000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan (4 kali)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	4	325.000.000				325.000.000	
	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan (orang)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	450	225.000.000	Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan	Persentase sample pangan segar dan olahan aman dikonsumsi (%)	82,27	225.000.000	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel yang teeriksa (sampel)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	45	100.000.000	Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan	Persentase sample pangan segar dan olahan aman dikonsumsi (%)	82,27	100.000.000	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	0,05	260.000.000				260.000.000	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan (ton)		378	260.000.000					
3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	(orang)	180	260.000.000	Pendampingan, pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan dan budidaya tangkap (ton)	378	260.000.000	
3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio Pendapatan Usaha Perikanan (%)		1	553.000.000				553.000.000	
3	25	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Konsumsi Makan Ikan (kg/perkapita/ta hun)		15,4	553.000.000				553.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan (orang)		488	553.000.000	Kegiatan peningkatan mutu, pengolahan dan promosi hasil perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	15,4	553.000.000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian (ton/ha)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	7,22	1.952.256.480				1.952.256.480	
						Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)		0,2						
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase jumlah sarana pertanian yang dimanfaatkan (%)		85	1.952.256.480				1.952.256.480	
3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana pendukung pertanian (kali)		1	620.538.880	Kegiatan peningkatan mutu dan pemasaran hasil pertanian	Jumlah produk pertanian yang dikemas dan dipasarkan	2	620.538.880	
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana pertanian pendukung produktivitas lahan (paket)		1	1.331.717.600	Kegiatan dukungan pembiayaan petani	Persentase cakupan petani penerima Pupuk dan AUP (%)	85	1.331.717.600	
3	27	02	2,03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Daging Peternakan (ton)		1900	439.000.000				439.000.000	
3	27	02	2,03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan (orang)		1185	439.000.000	Peningkatan, pengolahan dan pemasaran hasil produk hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan (produk)	25	439.000.000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan pengadaan prasarana (%)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	3	40.348.800				40.348.800	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya lahan LP2B	(Ha)	120	40.348.800				40.348.800	
3	27	03	2,01	01	Pengelolaan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan / LP2B, kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan / KP2B dan lahan cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan / LCP2B	Luas lahan terdata sebagai calon LP2B (Ha)		120	40.348.800	Kegiatan peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas padi (ton/ha)	7,22	40.348.800	
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara		100%	0					
3	27	03	2,02	x x	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (DAK)	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun / direhabilitasi / dipelihara		2	0					
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan lahan aman bencana pertanian (%)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	80	185.000.000				185.000.000	
3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian (ha/th)		2000	185.000.000				185.000.000	
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan (ha)		10	185.000.000	Kegiatan penerapan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura	Luas lahan yang menerapkan budidaya tanaman ramah lingkungan (ha)	10	185.000.000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Peningkatan jumlah SDM Pertanian terlatih (%)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	5	160.878.100				160.878.100	
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Jenis pelatihan / Penyuluhan Pertanian (jenis)		2	160.878.100				160.878.100	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%						
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	DLH Kota Madiun	6 dokumen	81.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	'10 dokumen	81.000.000	
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah		2 dokumen						
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%						
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	DLH Kota Madiun	100%	12.410.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	'9 jenis	12.410.000.000	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	DLH Kota Madiun	100%	1.350.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	99 jenis	1.350.000.000	
X	XX	01	2.03	18	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	200.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah perjalanan dinas	32 kali	200.000.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor		100%	300.000.000	Kegiatan Pengadaan Srana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	10 unit	300.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Gedung DLH se Kota Madiun	100%	79.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	'3 gedung	79.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	DLH Kota Madiun	100%	1.390.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	'59 unit	1.390.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	DLH Kota Madiun	100%	78.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	'63 unit	78.000.000	
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	pemenuhan kebutuhan pegawai		100%						
X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	Pegawai DLH Kota Madiun	100%	182.000.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	220 pakaian dinas	182.000.000	
2					URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
2	11				LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase data Perencanaan LH yang tersedia		69,23%						
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia		4 dokumen						
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	4 dok	375.000.000	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	'4 dokumen	375.000.000	
										Kegiatan Peningkatan Edukasi Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang menerapkan upaya PPLH		0	
2	11	02	2,02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab / Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia		1 dokumen	-					
2	11	02	2,02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk K yang Beotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	jumlah dokumen yang disusun		1 dokumen		Kegiatan Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi KLH yang tersedia			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu		48%		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya		68 kegiatan/ usaha						
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	Kota Madiun	20 kali	1.100.000.000	Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	'68 perusahaan	600.000.000	
										Koordinasi Pembinaan Langit Biru	Jumlah kendaraan yang diuji gas emisi	'950 kendaraan	250.000.000	
										Kegiatan Pengendalian Lahan	Jumlah lubang biopori yang teasang	675 unit	250.000.000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Madiun	1 dokumen	150.000.000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca dan Profil Kehati (sub Kegiatan penyusunan dokumen gas rumah kaca)	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	150.000.000	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair		15 usaha/ kegiatan						
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Kota Madiun	5 kali	835.000.000	Peringatan hari lingkungan hidup	Jumlah yang mendapatkan kejuaraan	6 juara	300.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan pembentukan dan pembinaan kampung iklim	Jumlah kampung iklim yang terbentuk	3 kampung	400.000.000	
										Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pemilik usaha / kegiatan sebagai peserta sosialisasi	75 orang	135.000.000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Pengelolaan Ke anekaragaman Hayati		96,83%						
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab / Kota	jumlah Pengelolaan Ke anekaragaman Hayati Kab / Kota		1 lokasi						
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen yang tersusun		1 dokumen	135.000.000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca dan Profil Kehati (sub Penyusunan Profil KEHATI (Keanekaragaman Hayati))	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	135.000.000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)		71%		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase data dan informasi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia			
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3								
2	11	05	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin		5 perusahaan	100.000.000	Kegiatan Pembinaan Izin TPS B3 dan Izin IPAL( sub Kegiatan Pembinaan izin TPS B3)	Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin	5 perusahaan	50.000.000	
										Kegiatan Inventarisasi perusahaan/ instansi penghasil limbah B3 dan penghasil limbah cair	Jumlah data dan informasi yang tersedia	0		



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Peningkatan Kegiatan / Usaha dalam Pengelolaan Limbah	Kegiatan / usaha yang melakukan pengelolaan limbah sesuai prosedur	10 kegiatan/ usaha	50.000.000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan Yang Taat Terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)		52,90%		PROGRAM PENAATAN, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup			
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		15 perusahaan						
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat membuat laporan		15 wajib usaha	160.000.000	Kegiatan Pembinaan Perusahaan yang mempunyai Izin Lingkungan	Jumlah usaha / kegiatan yang taat membuat laporan	'18 kegiatan/ usaha	115.000.000	
										Kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang taat PROPER	'3 perusahaan	45.000.000	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan		4 perusahaan	290.000.000	Kegiatan Adopsi Regulasi tentang Lingkungan Hidup	Jumlah adopsi regulasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	'2 .	255.000.000	
										Pembinaan Izin TPS B3 dan Izin IPAL(sub Kegiatan pembinaan izin IPAL)	Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin	'5 perusahaan	35.000.000	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prosentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		90%		PROGRAM PENAATAN, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup			
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota		15 kegiatan						
2	11	08	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup		4 kegiatan	1.175.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan Yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	Jumlah kelompok masyarakat berbudaya lingkungan hidup	'36 kelompok	887.000.000	
										Kegiatan Edukasi dan Kader Lingkungan yang Aktif	Jumlah kader lingkungan yang aktif	'100 peserta	38.000.000	
										Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	Output : jumlah sekolah Adiwiyata	'3 sekolah	250.000.000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan dan pengaduan lingkungan hidup		90%		PROGRAM PENAATAN, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup			
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan		10 kasus						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		10 kasus	35.000.000	Kegiatan Pelayanan Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	jumlah pengaduan yang diselesaikan	'10 kasus/ pengaduan	35.000.000	
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan	jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk		900 usaha	50.000.000	Kegiatan Pembinaan Penuatan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah usaha yang mengurus dokumen rekomendasi izin lingkungan	55500 usaha	50.000.000	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		74%		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga			
2	11	11			Kegiatan Pengelolaan Sampah	jumlah sampah yang ditangani DLH		32.350						
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah		11 jenis	1.870.000.000	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	'11 jenis	1.650.000.000	
										Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah	'27 kelurahan	220.000.000	
									-	Kegiatan Perluasan Lahan TPA	jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	0	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah ruas jalan yang ditangani		11 ruas jalan	3.500.000.000	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah (sub kegiatan PROJASIH)	jumlah ruas jalan yang ditangani	11 ruas jalan	3.500.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	11	2.01	0 2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah tempat / lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH		2 lokasi	2.560.000.000	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah Akhir dengan Metode Controlled Landfill	Jumlah zona pengelolaan sampah akhir	'1 zona	2.300.000.000	
										Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah (sub operasional mesin pengolah sampah)	jumlah ruas jalan yang ditangani	11 ruas jalan	150.000.000	
										Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Sub Kegiatan Pemanfaatan Gas methane menjadi Sumber Energi)	jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah	'27 kelurahan	110.000.000	
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi								
2	11	11	2.03	0' 2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah (Adipura)		3 kecamatan	50.000.000	Kegiatan Koordinasi Penilaian Adipura	jumlah kecamatan dalam titik pantau penilaian Adipura	'3 kecamatan	50.000.000	
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>														
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH									
X	X				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dispenduk capil		62.811.360					
X	X	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Dispenduk capil	100%	62.811.360					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dispenduk capil	6 dokumen	62.811.360	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	62.811.360	
X	X	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Dispenduk capil	100%	4.500.000.000					
X	X	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dispenduk capil	100%	4.500.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	32 ASN	4.500.000.000	
X	X	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Dispenduk capil	100%	2.335.006.468					
X	X	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Dispenduk capil	100%	1.674.199.968	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	16 Jenis	1.674.199.968	
X	X	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Luar Daerah	100%	122.356.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	60 Kali	122.356.000	
X	X	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Dispenduk capil	100%	230.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasana Kantor	4 Jenis	230.000.000	
X	X	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dispenduk capil	100%	44.750.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	1 gedung, 2 Lantai	44.750.000	
X	X	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Dispenduk capil	100%	54.138.500	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	27 Unit Kendaraan Dinas	54.138.500	
X	X	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dispenduk capil	100%	209.562.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasana Kantor	6 Jenis	209.562.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	Disdukcapil	84%	328.148.160					
2	12	02	2.01		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	37.000 dokumen	328.148.160	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase penerbitan dokumen kependudukan			
2	12	02	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman KTP EL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	3.000 data	177.639.760	Peningkatan Pelayanan bidang Kependudukan	Jumlah Penerbitan KK, KTP dan KIA	98%	177.639.760	
2	12	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Kependudukan yang diterbitkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	37.000 dokumen	150.508.400	Pelayanan Keliling	Jumlah Pelayanan Keliling	50 kali	150.508.400	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen Akta Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94%	674.877.920					
2	12	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.200 dokumen	674.877.920					
2	12	03	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran penduduk usia diatas 50 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000 dokumen	544.390.400	Peningkatan Pelayanan bidang Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan AL,AK dan akta lainnya.	95%	544.390.400	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	03	2.01	01	Sub Kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang diterbitkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.200 dokumen	130.487.520	Pengelolaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen	5000 lbr	130.487.520	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,1%	1.290.058.040					
2	12	04	2.01		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77%	458.526.040	PROGRAM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN INOVASI PELAYANAN	Prosentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	12	04	2.01	03	Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Perkembangan Penduduk	Persentase uptime aplikasi SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99 %	357.222.960	Implementasi SIAK dan Penyebaran Informasi	Persentase update data penduduk	77%	357.222.960	
2	12	04	2.01	05	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah PKS dan Inovasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 buah	101.303.080	Peningkatan Inovasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Inovasi	7 Jenis	101.303.080	
2	12	04	2.01	XX	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penerbitan KTP, KIA dan Akte lahir	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.000 dokumen	831.532.000	Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan KTP dan akta kelahiran	96%	831.532.000	
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>														
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH									
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Perhubungan Kota Madiun	6 dokumen	102.089.400	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	6 dokumen	102.089.400	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%						
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dinas Perhubungan Kota Madiun	100%	6.686.758.079	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	63 orang	6.686.758.079	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Dinas Perhubungan Kota Madiun	100%	2.712.379.712	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	15 jenis	2.712.379.712	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Wilayah Indonesia	100%	230.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	230.000.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan Kota Madiun	100%	30.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	75 unit	30.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Perhubungan Kota Madiun	100%	650.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Luas gedung yang dipelihara	142 m2	650.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Dinas Perhubungan Kota Madiun	100%	650.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	37 unit	650.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Perhubungan Kota Madiun	100%	150.000.000	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	73 unit	150.000.000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai		100%						
X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100%	220.000.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	674 buah	220.000.000	
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	persentase peserta yang paham		100%	126.970.000	Kegiatan pelatihan SDM Perhubungan	Jumlah orang yang terampil	1250orang	126.970.000	
2					URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	KEPADATAN LALU LINTAS (kend/Km)		46						
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	200 titik						
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah prasarana jalan	Wilayah Kota Madiun	1 unit	130.000.000	Kegiatan pembangunan halte	Luas halte	27 m2	130.000.000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah perlengkapan jalan	Wilayah Kota Madiun	937 unit	2.658.000.000	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan	937 unit	2.658.000.000	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Wilayah Kota Madiun	632 unit	1.046.858.720	- Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas	- jumlah peralatan dan perlengkapan lalu lintas	632 unit	446.858.720	
										- kegiatan pengadaan marka jalan	- panjang marka jalan yang baru	4000 m2	600.000.000	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah MRLL		160						
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah MRLL	Wilayah Kota Madiun	2 dokumen	626.557.760	- Kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas	- jumlah dokumen	3 dokumen	560.377.760	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- Kegiatan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota Wahana Tata Nugraha	- jumlah penilaian	1 kali	66.180.000	
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan	Wilayah Kota Madiun	1000 orang	170.140.000	Kegiatan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalin dan angkutan	Jumlah orang yang paham	1000 orang	170.140.000	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan	Wilayah Kota Madiun	5 Kegiatan	1.506.755.000	Kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah kegiatan	6 Kegiatan	1.506.755.000	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kegiatan keselamatan		100%						
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	1 kegiatan	73.502.000	Kegiatan Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen	1 dokumen	73.502.000	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara-an Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan	Dinas Perhubungan Kota Madiun	1 kegiatan	42.382.000	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/ awak kendaraan umum teladan	Jumlah awak kendaraan yang diberi penghargaan	6 peserta	42.382.000	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kinerja Angkutan		0,4						
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Kendaraan	Kota Madiun	23000 kend	1.473.830.464	- Kegiatan peningkatan penyelenggaraan angkutan orang	Jumlah orang	119.256 orang	1.243.925.360	
										-Kegiatan penyelenggaraan angkutan barang	Jumlah angkutan barang yang didata	23000 kend	229.905.104	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik		100%						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	02	2.03	03	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Luas bangunan	Wilayah Kota Madiun	45 m2	710.062.400	- Kegiatan pengelolaan operasional tempat parkir khusus	Jumlah pegawai	13 orang	710.062.400	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan Lulus uji		100%						
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	Wilayah Kota Madiun	4600 kend	544.327.200	Kegiatan pengelolaan operasional PKB	Jumlah pegawai	18 orang	544.327.200	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	12 unit	106.000.000	Kegiatan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat yang dikalibrasi	12 unit	106.000.000	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>														
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH									
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun		7.120.707.000				7.120.707.000	
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Kota Madiun	100%	115.000.000				115.000.000	
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Madiun	6 dokumen	115.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	5 Dokumen	115.000.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Kota Madiun	100%	3.733.400.000				3.733.400.000	
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Kota Madiun	100%	3.733.400.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	12 Bulan	3.733.400.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Kota Madiun	100%	3.272.307.000				3.272.307.000	
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Kota Madiun	100%	2.399.336.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	12 Bulan	2.399.336.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Kota Madiun	100%	367.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	187 Kali	367.000.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Kota Madiun	100%	140.971.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Baru	1 Paket	140.971.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Kota Madiun	100%	150.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	3 Unit	150.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Kota Madiun	100%	65.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	33 Unit	65.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Kota Madiun	100%	150.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60 Unit	150.000.000	
X					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Kota Madiun	50%	9.182.000.000	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Publik	50%	9.182.000.000	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Kota Madiun	100%	9.182.000.000				9.182.000.000	
2	16	02	2.01	02	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	Kota Madiun	1200 Informasi	4.438.000.000	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik melalui Media Massa	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	1200 Informasi	4.438.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	16	02	2.01	04	Pegelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	Kota Madiun	5 Media	2.500.000.000	Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah media yang dikelola Pemerintah Daerah	5 Media	2.500.000.000	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	Kota Madiun	100%	594.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	594.000.000	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Kota Madiun	27 Kelompok	750.000.000	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	27 Kelompok	750.000.000	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Kota Madiun	12 Tema Informasi	900.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	12 Tema Informasi	900.000.000	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan	Kota Madiun	3,6	9.949.850.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	45%	9.949.850.000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	Kota Madiun	100%	5.394.650.000				5.394.650.000	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Kota Madiun	126 Domain	350.000.000	Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	146 Domain	350.000.000	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	Kota Madiun	1350 Titik	5.044.650.000	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	1500 Titik	5.044.650.000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang melaksanakan e-Government	Kota Madiun	100%	4.555.200.000				4.555.200.000	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Kota Madiun	1 Paket	2.480.200.000	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	1 Paket	2.480.200.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	Kota Madiun	301 Titik	400.000.000	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemda	Jumlah titik Client	301 Titik	400.000.000	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	Kota Madiun	7 Aplikasi	600.000.000	Layanan Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi	Jumlah aplikasi	9 Aplikasi	600.000.000	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan	Kota Madiun	1 Layanan	500.000.000	Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan	Jumlah Layanan	2 Layanan	500.000.000	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah komunitas penunjang Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smart City yang dibina	Kota Madiun	6 Komunitas	425.000.000	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smart City	Jumlah komunitas penunjang Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smart City yang dibina	6 Komunitas	425.000.000	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	Kota Madiun	1 Unit	150.000.000	Penyelenggaraan Government Chief Information (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	1 Unit	150.000.000	
2	16	xx			PROGRAM SOSIALISASI DI BIDANG CUKAI	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	Kota Madiun	100%	1.599.000.000	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai		1.599.000.000	
2	16	xx	xxx		Peningkatan Jumlah Sasaran Penyebaran Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) yang tersampaikan kepada Masyarakat	Kota Madiun	100%	1.599.000.000				1.599.000.000	
2	16	xx	xxx	xx	Penyelenggaraan Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah Event	Kota Madiun	10 Event	1.599.000.000	Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah event	10 Event	1.599.000.000	DBHCHT
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	Kota Madiun	80%	570.000.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	80%	570.000.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang memenuhi Data Statistik Sektoral	Kota Madiun	34 OPD	570.000.000				570.000.000		
	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	Kota Madiun	5 Dokumen	570.000.000	Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Statistik	5 Dokumen	570.000.000		
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	Kota Madiun	Level II	400.000.000	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang mengimplementasikan keamanan informasi	40%	400.000.000		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang mengimplementasikan keamanan informasi	Kota Madiun	40%	400.000.000				400.000.000		
	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Kota Madiun	5 OPD	400.000.000	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang mencapai kematangan tingkat level II pada indeks KAMI	34 OPD	400.000.000		
<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>															
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH										
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah									
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%					52.905.120	10 dokumen	52.905.120

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.01	0 2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	DPMPTSPKUM	6 dokumen	52.905.120	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	10 dokumen	52.905.120	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%	3.921.584.000				3.921.584.000	
X	XX	01	2.02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	DPMPTSPKUM	100%	3.921.584.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa operasional kantor	14 jenis	3.921.584.000	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%	1.801.657.000				1.801.657.000	
X	XX	01	2.03	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	DPMPTSPKUM	100%	1.203.120.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa operasional kantor	14 jenis	1.203.120.000	
X	XX	01	2.03	1 8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	DPMPTSPKUM	100%	400.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	125 kali	400.000.000	
X	XX	01	2.03	2 8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	DPMPTSPKUM	100%	80.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung dan kantor yang bersih dan nyaman	1 gedung	80.000.000	
X	XX	01	2.03	3 0	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	DPMPTSPKUM	100%	45.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang aman dan nyaman	26 unit	45.000.000	
X	XX	01	2.03	3 4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	DPMPTSPKUM	100%	73.537.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis sarana kantor yang memadai	3 jenis	73.537.000	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasi		13%	472.366.000	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Persentase investor yang merealisasikan investasi	13%	472.366.000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah investor baru	DPMPTSPKUM	10 investor	472.366.000	Kegiatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah investor baru	10 investor	472.366.000	
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	jumlah promosi penanaman modal		10 INVESTOR						
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	jumlah perusahaan wajib LKPM		80 Perusahaan	198.225.000	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Persentase investor yang merealisasikan investasi	13%	198.225.000	
2	18	05	2,01		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	DPMPTSPKUM	100 Perusahaan	198.225.000	Pembinaan dan pemantauan/pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	10 perusahaan	198.225.000	
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM		15 perusahaan	198.225.000					
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan		80%	447.400.000	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan	80%	508.400.000	
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Teadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemohon izin	DPMPTSPKUM	1500 izin	447.400.000					
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Teadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah peserta sosialisasi perizinan elektronik		75 orang	210.000.000	Peningkatan Kualitas Perizinan	Jumlah peserta sosialisasi	300 peserta	210.000.000	
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi		10%	237.400.000	Evaluasi Perizinan Berusaha	Prosentase pemenuhan komitmen yang dievaluasi	10%	237.400.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah layanan konsultasi dan Pengaduan yang ditindak lanjuti		50 kali	18.800.000					
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	persentase jenis izin yang diproses secara elektronik		90%	61.000.000					
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis izin yang di proses menggunakan sistem elektronik	DPMP TSPKUM	65 Jenis izin	61.000.000					
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah jenis izin yang di proses menggunakan sistem elektronik		65 Jenis izin	61.000.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan	1500 izin	61.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH					DINAS PENANAM MODAL, PTSP, KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif		98,69%	1.004.010.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	98,69%	1.004.010.000	
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi aktif	DPMP TSPKUM	150 koperasi	1.004.010.000	Kegiatan Pemingkatan Koperasi dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian	Jumlah Koperasi Aktif	151 koperasi	513.000.000	
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta	jumlah koperasi yang tertib melaksanakan RAT		108 koperasi	513.000.000					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
2	17	05	2.01	x x	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK)	Jumlah anggota koperasi/usaha mikro yang meningkat		'151 koperasi/ 25 UM	491.010.000	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah anggota koperasi/usaha mikro yang meningkat	'151 koperasi/ 25 UM	491.010.000	DAK
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat		52%	190.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	98,69%	190.000.000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina	DPMPTSPKUM	152 koperasi	190.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi	Jumlah koperasi dengan omzet meningkat	20 koperasi	190.000.000	
2	17	06	2.01	0 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	jumlah omzet koperasi		80 koperasi	190.000.000					
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro naik kelas		1,86%	1.010.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,41%	1.010.000.000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	DPMPTSPKUM	3 orang	1.010.000.000	Kegiatan Peberdayaan Usaha Mikro di Kota Madiun	Jumlh Wira Usaha Baru	87 WUB	1.010.000.000	
2	17	08	2.01	0 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi		145 orang	1.010.000.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>													
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH								
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%						
X	XX	01	2.01	0 2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6 dokumen	40.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	6 dokumen	40.000.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%					
b	XX	01	2.02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100%	3.184.463.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	1 paket	3.109.463.000
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100%	2.124.650.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	1 paket	2.024.650.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	299.700.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 kali	299.700.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100%	175.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah paket pengadaan sarana prasarana kantor	1 paket	175.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100%	199.650.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	2 gedung	199.650.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100%	50.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	27 unit	50.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100%	54.650.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	130 unit	54.650.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Prestasi Pemuda		1						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan		1 event						
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pemuda	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	200 orang	996.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	2 event	996.000.000	seleksi paskibra ka
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga		12 medali						
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi		3 sarana pra sarana olahraga						
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3 sarana pra sarana olahraga	2.314.000.000	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 unit	2.314.000.000	GOR, Stadion, Asrama Haji
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan		2 event						
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 event	1.226.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan	4 event	1.226.000.000	Lomba Lari 10 K, Tour de Indonesia , Seleksi pembinaan dan pengiriman POR SD
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina		10 cabang olahraga						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	10 cabang olahraga	1.000.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan	4 event	1.000.000.000	Hibah KONI
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan		2 festival olahraga						
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 festival olahraga	729.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan	4 event	729.000.000	Festival Seni Pencak Silat Nusantara, Festival Seni Pencak Silat se Jatim, Festival Drum band Nasional
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan		30%						
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi		15 event						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	12 event	3.000.000.000	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	25 event	3.000.000.000	Gelar Budaya TMII, Pagelaran Wayang Kulit, MNC, Gelar Budaya 3 kecamatan, Festival Bersih Desa, Seni Periodik, Gelar Budaya Cah Mediu an, Upacara HJM, Kenduri Akbar, Pawai HUT RI, Ziarah Makam, Sholawat 1000 Rebana, Isti ghosah, Grebeg Maulud, Belanja Modal
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3 festival	1.570.000.000	Festival Seni	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	33 festival	1.570.000.000	Festival Kartini, Festival Gebyar Kemerdekaan, Festival Pelestarian Bahasa Jawa, Festival Hari Santri,



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
														Festival Seni Tradisi, Pekan Seni Pelajar, Festival Dalang Nasional, Festival Dalang Tingkat Provinsi, Festival Karawitan Tingkat Provinsi
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan		2 kesenian						
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan		2 pelatihan						
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 pelatihan	210.000.000	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya, Festival Seni	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	2 event	210.000.000	pelatihan bahasa jawa, pembinaan dalang anak tingkat kota
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan		21%						
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan		21%						
2	22	05	2.01	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Prosentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	21%	700.000.000	Revitalisasi Benda Cagar Budaya	Prosentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan	21%	700.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola		2 destinasi						
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola		2 destinasi						
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Event pengembangan destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 event	250.254.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah laporan kepariwisataan	2 laporan	250.254.000	pembentukan KSWK, workshop, monev
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Event pemberdayaan masyarakat	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1 event	148.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah laporan kepariwisataan	2 laporan	148.000.000	festival pecel pincuk
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah promosi pariwisata		2 promosi						
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata		2 event						
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 event	750.000.000	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Negeri	Jumlah promosi pariwisata	4 event	750.000.000	MTD, Gebyar Batik, Madiun Kreatif, Festival Barongsai
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif		2 event						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif		2 event						
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 event	650.000.000	Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pemberdayaan sumber daya pariwisata yang di selenggarakan	2 event	650.000.000	pengiriman raka raki, pemilihan kakang mbakkyu, workshop ekonomi kreatif
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>														
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH									
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%						
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Peustakaan dan Kearsipan	6 dokumen	40.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	10 dokumen	40.000.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%						
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dinas Peustakaan dan Kearsipan	100%	2.845.195.927	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pegawai ASN	12 bulan	2.845.195.927	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Peringkat Daerah		100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Dinas Peustakaan dan Kearsipan	100%	520.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bahan penunjang	1 paket	520.000.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	160.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 kali	160.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Peustakaan dan Kearsipan	100%	59.650.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	2 unit	59.650.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Dinas Peustakaan dan Kearsipan	100%	66.552.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	22 unit	66.552.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Peustakaan dan Kearsipan	100%	44.650.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	78 Unit	44.650.000	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEUSTAKAAN									
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PEUSTAKAAN	Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Peustakaan		72%		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PEUSTAKAAN	Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Peustakaan	72%		
2	23	02	2,01		Pengelolaan Peustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan		5%						
2	23	02	2,01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengunjung	Kota Madiun	20.000 orang	635.000.000	Pengelolaan layanan dan pelestarian bahan pustaka	Jumlah pengunjung	87740 orang	635.000.000	
2	23	02	2,01	xx	Pengembangan Perpustakaan di tingkat Kabupaten/Kota (dana DAK)	Jumlah Paket	Kota Madiun	2 paket	418.750.000					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23	02	2,01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi	Kota Madiun	500 eksemplar	255.000.000	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Peustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Pustaka	3500 eksemplar	255.000.000	
2	23	02	2,01	xx	Pengembangan Bahan Pustaka (dana DAK)	Jumlah koleksi	Kota Madiun	3000 eksemplar	390.000.000					
2	23	02	2,02		Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah	Indeks Minat Baca		2						
2	23	02	2,02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi		10 lembaga	338.000.000	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	36 pembinaan	395.000.000	
2	23	02	2,02	02	Pembangunan dan pemeliharaan sarana peustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket	Dinas Peustakaan dan Kearsipan	2 Paket	140.000.000	Kegiatan Pembangunan gedung	Jumlah paket	2 Paket	140.000.000	FS dan DED Pembangunan Gedung Layanan Peustakaan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah berkas arsip yang dikelola	Dinas Peustakaan dan Kearsipan	59.500 berkas		PROGRAM PENYELAMATAN, PENINGKATAN SDM DAN LAYANAN ARSIP DAERAH	Jumlah berkas arsip yang dikelola	59.500 berkas		
2	24	02	2,01		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip dinamis yang dikelola		59.500 berkas						
2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah berkas arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	Kota Madiun	59.556 berkas	305.000.000	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip	Jumlah Unit Kearsipan	'5 unit kearsipan	305.000.000	
2	24	02	2,02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip statis yang dikelola		250 berkas						
2	24	02	2,02	02	Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan layanan akses arsip	Kota Madiun	250 berkas	305.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Jumlah SDM Pengelola Arsip	'131 orang	305.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>DINAS PERDAGANGAN</b>													
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH								
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		11.322.925.000			11.322.925.000		
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%					
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Perdagangan	6 dokumen	95.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	6 dokumen	95.000.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%					
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Dinas Perdagangan	100%	8.321.925.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	8 jenis	8.321.925.000
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%					
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Dinas Perdagangan	100%	1.755.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	8 jenis	1.660.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Dinas Perdagangan	100%	476.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	80 kali	476.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Perdagangan	100%	175.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	3 gedung	175.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Dinas Perdagangan	100%	465.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	50 unit	465.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Dinas Perdagangan	100%	130.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	51 unit	130.000.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah sarana distribusi perdagangan			167.200.000	Program Peningkatan, Pengembangan Dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase pertumbuhan perdagangan non pasar rakyat		167.200.000	
3	30	02	2,01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan									
3	30	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah peanjangkan perijinan	Dinas Perdagangan	75 lembar	167.200.000	Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan	Jumlah pemohon peanjangkan perijinan	75 lembar	42.000.000	
										Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL	Jumlah PKL dengan pendapatan diatas UMK	500 orang	125.200.000	





1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan	Dinas Perdagangan	15 jenis produk unggulan daerah	548.000.000	Kegiatan Promosi Produk Perdagangan	Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan	15 jenis produk unggulan daerah	548.000.000	
3	30	07	2,01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen Informasi Perdagangan	Dinas Perdagangan	1 dokumen	160.000.000	Kegiatan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun	Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan	1 dokumen	160.000.000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana distribusi perdagangan			6.415.335.000	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah omset pasar rakyat (Jt)		6.415.335.000	
3	30	03	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Pasar Winongo, Pasar Sepoor dan Pasar Manguharjo	3 pasar	110.000.000	Revitalisasi Pasar-pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi	3 pasar	110.000.000	
3	30	03	2,01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar-pasar rakyat dikota Madiun	17 pasar	1.830.500.000	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dikembangkan fasilitas, sarana dan prasarannya	17 pasar	1.780.500.000	
3	30	03	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya									
3	30	03	2,02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang dengan pendapatan diatas UMK per bulan	Pasar-pasar rakyat dikota Madiun	500 orang	1.045.885.000	Kegiatan Promosi Pasar Rakyat	Jumlah omset pasar rakyat (Jt)	670.000.000.000	1.045.885.000	
3	30	03	2,02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya melalui pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Pasar-pasar rakyat dikota Madiun	17 pasar	3.428.950.000	Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya oleh unsur masyarakat.	17 pasar	3.428.950.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	xx		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)				50.000.000					
x	xx	xx	xxx	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai	Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu	Dinas Perdagangan	0 buah	50.000.000	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai	Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu	0 buah	50.000.000	
<b>SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</b>													
<b>x</b>				<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>									
<b>x</b>	<b>xx</b>			<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
<b>x</b>	<b>xx</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								
x	xx	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%	7.417.000		Prosentase dokumen perencanaan/1 aporan yang disusun tepat waktu	100%	7.417.000	
x	xx	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	6 dokumen	7.417.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	6 dokumen	7.417.000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%	499.157.500				499.157.500
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	100%	499.157.500	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	9 orang	499.157.500

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Peringkat Daerah		100%	510.100.000		Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	510.100.000	
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	100%	270.600.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	7 jenis	270.600.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	200.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 kali	200.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	100%	7.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	1 unit	7.500.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	100%	20.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	1 unit	20.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	100%	12.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	3 buah	12.000.000	
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
4	01				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>80,08</b>	<b>2.261.403.000</b>		<b>Prosentase Laporan Kinerja Pemerintahan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>340.000.000</b>	
											<b>Prosentase Kelurahan Beradministrasi Baik</b>	<b>70%</b>	<b>1.476.403.000</b>	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase laporan administrasi pemerintahan yang disusun tepat waktu	Kota Madiun	100%	1.816.403.000				1.816.403.000	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan	Kota Madiun	8 kali	1.476.403.000	Kegiatan Pembinaan Kecamatan	Jumlah Pembinaan	10 kali	645.563.000	
		02		Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala daerah/Wakil Kepala daerah						Jumlah Kunjungan	6 kali	830.840.000		
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen Rupa Bumi	Kec. Manguharjo Kota Madiun	1 dokumen	50.000.000	Kegiatan Inventarisasi Rupa Bumi	Jumlah dokumen rupa bumi	1 dokumen	50.000.000	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Madiun	5 dokumen	290.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintahan	5 dokumen	200.000.000	
				Kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintahan						Jumlah peringatan hari jadi pemerintahan	2 kali	90.000.000		
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	Kota Madiun	100%	445.000.000				445.000.000	
4	01	04	2,04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	Kota Madiun	5 kali	445.000.000	Kegiatan Kerjasama Daerah	Jumlah MoU	5 dokumen	445.000.000	
<b>SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>														
<b>X</b>					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>				<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								
X	XX	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%						



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>80,08</b>						
4	01	02	2,02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%						
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi bina mental spiritual	dalam dan luar kota	15 kegiatan	8.989.315.000	Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	15 kegiatan	8.489.315.000	anggaran 2020+hibah bansos
										Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji			250.000.000	
										Kegiatan Pengiriman Kafilah MTQ			250.000.000	
4	01	03			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>80,98</b>						
4	01	03	2,01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai Target	dalam dan luar kota	100%						
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	dalam kota	2 kegiatan	153.733.600	Kegiatan Pembinaan BUMD	Kontribusi PAD	3 BUMD	153.733.600	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah Kota Madiun							
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Sekretariat Daerah Bagian Umum	100%	145.008.000					
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sekretariat Daerah Bagian Umum	6 dokumen	145.008.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	145.008.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Sekretariat Daerah Bagian Umum	100%	11.227.984.730					
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Sekretariat Daerah Bagian Umum	100%	11.227.984.730	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	13 paket	11.227.984.730	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah Bagian Umum	100%	14.157.079.680					
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Sekretariat Daerah Bagian Umum	100%	5.500.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	13 paket	5.500.000.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	3.000.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	650 kali	3.000.000.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah Bagian Umum	100%	1.358.197.680	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	1 paket	1.358.197.680	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	2 7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	persentase rumah dinas yang layak digunakan	Rumdin Walikota, Rumdin Wawali, Rumdin Sekda, Rumdin Sby	100%	1.669.539.900	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	jumlah rumah dinas	4 unit	1.669.539.900	
X	XX	01	2.03	2 8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Sekretariat Daerah dan Guest House	100%	514.676.500	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	2 gedung	514.676.500	
X	XX	01	2.03	3 0	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasi onal yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Umum	100%	1.685.065.600	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	40 unit	1.685.065.600	
X	XX	01	2.03	3 4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Umum	100%	229.600.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana	5 jenis	229.600.000	
X	XX	01	2.03	3 8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang representatif	Sekretariat Daerah Bagian Umum	100%	200.000.000	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	1 paket	200.000.000	
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Pemerintah Kota Madiun	100%	11.063.192.080					
X	XX	01	2.04	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	persentase pemuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pegawai Pemerintah Kota Madiun	100%	10.825.292.080	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas dan kelengkapan nya	3.800 orang	10.859.342.080	
X	XX	01	2.04	0 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	persentase pemuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat Daerah Bagian Umum	100%	237.900.000					
<b>4</b>					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>4</b>	<b>01</b>				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>IKM di bidang administrasi umum</b>	<b>Sekretariat Daerah Bagian Umum</b>	<b>84,74%</b>						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum	Prosentase administrasi umum yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah Kota Madiun	100%	122.658.240					
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Jumlah fasilitasi Tata Usaha	Sekretariat Daerah Bagian Umum	3 jenis	122.658.240	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Sekretariat Daerah	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani	45 kali	122.658.240	
4	01	04	2.03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	dalam dan luar kota	100%	2.994.546.140					
4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolan	jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	dalam dan luar kota	500 kali	2.994.546.140	Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Madiun	jumlah kegiatan Pemerintah Kota	500 kali	3.198.396.140	
<b>SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM</b>														
<b>X</b>					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>				<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun		38.923.200					
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Kota Madiun	100%	38.923.200	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Prosentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	100%	<b>38.923.200</b>	



1					2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Kota Madiun</b>		<b>80,08</b>							
4	01	02	2,03		koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	Kota Madiun		100%	1.228.496.980	Program penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	100%		1.228.496.980		
4	01	02	2,03	01	fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Sosialisasi Perda dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Madiun		2 jenis	419.360.080	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah raperda/perda, kompilasi, sosialisasi perda	3 jenis		419.360.080		
4	01	02	2,03	02	fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	Kota Madiun		3 kegiatan	633.286.200	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian sengketa hukum	3 jenis		633.286.200		
4	01	02	2,03	03	pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah publikasi produk hukum daerah	Kota Madiun		3 jenis	175.850.700	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi produk hukum daerah	4 jenis		175.850.700		
<b>SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI</b>																	
X					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>					<b>1.013.683.200</b>					<b>1.013.683.200</b>		
X	XX				<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>												
X	XX	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah											
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan			100%								

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	100%	485.567.500	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Penunjang	13 jenis	485.567.500	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	100%	196.103.700	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Penunjang	13 jenis	196.103.700	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	291.687.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	45 kali	291.687.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	100%	2.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang representatif	1 unit	2.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	100%	22.575.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	6 unit	22.575.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	100%	15.750.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor dalam kondisi baik	5 jenis	15.750.000	
<b>4</b>					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>1.726.608.000</b>				<b>1.726.608.000</b>	
<b>4</b>	<b>01</b>				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	IKM di bidang administrasi umum		84,74%						
4	01	04	2,02		Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi		Sedang (skor 28,1-37)						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	04	2,02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Besaran dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sekretariat Daerah	100%	414.400.000	Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Besaran dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	29 OPD	159.400.000	
										Kegiatan Standarisasi Penataan Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang penataan jabatannya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku	29 OPD	255.000.000	
4	01	04	2,02	02	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya bernilai BB	Sekretariat Daerah	100%	513.150.000	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 80% sesuai target	8 OPD	70.000.000	
										Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB (>70-80)	29 OPD	235.000.000	
										Kegiatan Peningkatan Budaya Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) Aktif	13 KBK	208.150.000	
4	01	04	2,02	03	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	2,7	799.058.000	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang kinerja pelayanan publiknya bernilai B	5 unit	692.194.000	
										Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	Nilai evaluasi administrasi ketatalaksanaan	66,5	106.864.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>													
<b>X</b>					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
X	XX				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>2.880.326.940</b>	-	-	<b>2.880.326.940</b>		
X	XX	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							
X	XX	01	2,01		KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%						
X	XX	01	2,01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	6 dokumen	33.252.000,00	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan	5 Dokumen	33.252.000,00
X	XX	01	2,02		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%					
X	XX	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	100%	1.209.235.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang dan Jasa Kantor	6 Paket	1.209.235.000,00
X	XX	01	2,03		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%					
X	XX	01	2,03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	100%	350.994.780,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang dan Jasa Kantor	6 Paket	350.994.780,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2,03	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	100%	155.140.000,00	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Tahunan	155.140.000,00	
X	XX	01	2,03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	100%	82.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	1 Gedung	82.000.000,00	
X	XX	01	2,03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	100%	24.205.600,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	7 Unit	24.205.600,00	
X	XX	01	2,03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	100%	20.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana/Prasarana Kantor Yang Dipelihara	31 Unit	20.000.000,00	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>									
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	2,02		KEGIATAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya > 79% dari target		100%						
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	2 Dokumen	289.630.000,00	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standar Kegiatan Konstruksi	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	222.966.000,00	
										Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	66.664.000,00	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	12 Dokumen	140.903.000,00	Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen/laporan	12 Dokumen	140.903.000,00	



1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	03	2,03		KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang & Jasa > 79% dari target		100%						
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah personil perangkat daerah yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	130 Orang	221.022.560,00	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa	170 Orang	221.022.560,00	
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai target	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	120 Paket	353.944.000,00	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang	160 Paket	353.944.000,00	
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>														
X					RUTIN PERANGKAT DAERAH									
X	XX				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%						
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sekretariat DPRD Kota Madiun	6 dokumen	26.031.500	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	100%	26.031.500	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah		12 dokumen	15.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	100%	15.000.000	
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah		2 dokumen	15.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	100%	15.000.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%						
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Sekretariat DPRD Kota Madiun	100%	14.988.095.000	BTL		100%	14.988.095.000	
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah		13 dokumen	15.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	100%	15.000.000	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Sekretariat DPRD Kota Madiun	100%	3.167.023.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	'13 paket	3.167.023.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	1.195.846.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	100%	3.395.846.000	
X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/ operasional	Kota Madiun	100%	80.000.000	Kegiatan Pengadaan Saras Kantor			351.927.300	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	2 4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Kota Madiun	100%	271.927.300	Kegiatan Pengadaan Saras Kantor				
X	XX	01	2.03	2 8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Kota Madiun	100%	1.230.702.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	persentase terwujudnya	2 gedung	1.230.702.000	
X	XX	01	2.03	3 0	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Kota Madiun	100%	374.642.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	40 unit	374.642.000	
X	XX	01	2.03	3 4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Kota Madiun	100%	315.150.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	15 jenis	315.150.000	
X	XX	01	2.03	3 8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang representatif	Kota Madiun	100%	730.702.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	1 paket		
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai		100%						
X	XX	01	2.04	0 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Madiun	100%	94.047.456	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	persentase penerimaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	394.047.456	
X	XX	01	2.04	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham		100%	5.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	13 paket		
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak-hak Dewan</b>								
4	02	02	2.01		Layanan Administrasi DPRD									
4	02	02	2.01	0 2	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah dokumen notulensi hasil rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun	Kota Madiun	45 Dokumen	1.558.982.504	Keg rapat-rapat paripurna/Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat			581.095.900	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02	02	2,01	03	Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD	jumlah kebutuhan fraksi yang dipenuhi	Kota Madiun	3 jenis	389.745.626	Kegiatan Rapat-rapat AKD				
4	02	02	2,02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase pelayanan terhadap hak keuangan DPRD		100%						
4	02	02	2,02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Terpenuhinya hak keuangan DPRD	Kota Madiun	12 bulan	12.738.095.000					
4	02	02	2,02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pakaian dinas dan atribut yang dicukupi	Kota Madiun	5 jenis	300.000.000	Pengadaan pakaian Dinas	persentase penerimaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	394.047.456	
4	02	02	2,02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	layanan kesehatan DPRD	Kota Madiun	1 kali	150.000.000	BTL				
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Layanan Perundang-Undangan</b>								
4	02	03	2,01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD		100%						
4	02	03	2,01	02	Pembahasan Rancangan Perda	jumlah raperda yang akan dibahas	Kota Madiun	10 raperda	4.276.241.500	Kegiatan Pembahasan Raperda	jumlah dokumen materi raperda DPRD yang disiapkan dalam pembahasan		4.276.241.500	
4	02	03	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase anggota dewan yang setuju dengan hasil pembahasan								
4	02	03	2,02	03	Pembahasan APBD	Pembahasan yang sesuai jadwal/tepat waktu	Kota Madiun	4 dokumen	1.753.855.317	Kegiatan Rapat-rapat AKD	Jumlah Dokumen Notulensi hasil Rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun	45 dokumen	3.897.456.260	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02	03	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan		100%					
4	02	03	2,03	06	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	jumlah dokumen notulensi hasil rapat pembahasan tindak lanjut atas LHP BPK	Kota Madiun	5 dokumen	232.438.360	Kegiatan Rapat-rapat AKD		Jumlah Dokumen Notulensi hasil Rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun	
4	02	03	2,03	07	Pengawasan penggunaan anggaran	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang Tepat Waktu	Kota Madiun	2 dokumen	348.657.540	Kegiatan Rapat-rapat AKD		Jumlah Dokumen Notulensi hasil Rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun	
4	02	03	2,04		Peningatan Kapasitas DPRD	persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD		100%					
4	02	03	2,04	02	Bimbingan Teknis DPRD	anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	Luar Daerah	150 orang	3.266.085.900	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti peningkatan kapasitas	150 Orang 3.266.085.900
4	02	03	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Kota Madiun	50 acara	1.853.819.800	Kegiatan fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD		jumlah informasi kegiatan DPRD yang disusun dan dipublikasikan	50 acara 1.853.819.800
4	02	03	2,04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	tersusunnya Program kerja DPRD tepat waktu	Kota Madiun	1 dokumen	194.872.813	Kegiatan Rapat-rapat AKD		Jumlah Dokumen Notulensi hasil Rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun	45 dokumen
4	02	03	2,05		Penyerapan dan Penghimpuna Aspirasi Masyarakat	jumlah dokumen Serap aspirasi		3 dokumen					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02	03	2,05	03	Pelaksanaan Reses	jumlah pelaksanaan kegiatan reses	Kota Madiun	3 Kali	864.420.000	Kegiatan Reses	jumlah dokumen laporan hasil reses anggota DPRD yang disusun	3 dokumen	864.420.000	
4	02	03	2,08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100%						
4	02	03	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Luar Daerah	180 kali	7.319.469.700	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD/Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Keluar daerah	jumlah lokasi kunjungan kerja anggota DPRD yang terfasilitasi	40 instansi	5.519.469.700	
4	02	03	2,08	03	Pelaksanaan Undangan DPRD	jumlah undangan yang dihadiri		50 kali	400.000.000	Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Keluar daerah				
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>														
<b>X</b>					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>				<b>11.122.421.100</b>		-	-	-	<b>11.122.421.100</b>
<b>X</b>	<b>XX</b>				<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
X	XX	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun		<b>7.593.926.500</b>					
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Kota Madiun	100%	85.000.000				85.000.000	
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Madiun	6 dokumen	85.000.000	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	12	85.000.000	-
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Kota Madiun	12 dokumen	10.000.000	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	12		
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Kota Madiun	2 dokumen	10.000.000	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	12		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Kota Madiun	100%	6.024.926.500				6.024.926.500	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Kota Madiun	100%	6.024.926.500	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	100%	6.024.926.500	
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Kota Madiun	13 dokumen	129.926.500	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	12		
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Kota Madiun	100%	1.469.000.000				1.469.000.000	
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Kota Madiun	100%	771.000.000	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	100%	771.000.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Kota Madiun	100%	401.000.000	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas	100%	401.000.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Kota Madiun	100%	100.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran	100%	100.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Kota Madiun	100%	105.000.000	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Persentase kantor dalam keadaan baik	100%	105.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Kota Madiun	100%	32.000.000	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Persentase kendaraan dinas dalam keadaan baik	100%	32.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Kota Madiun	100%	60.000.000	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Persentase barang inventaris kantor dalam keadaan baik	100%	60.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	3 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang representatif		100%	80.000.000	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Persentase kantor dalam keadaan baik	100%		
X	XX	01	2.04		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai		100%	9.000.000					
X	XX	01	2.04	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	persentase peserta yang paham		100%	9.000.000	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	100%		
<b>5</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>5</b>	<b>05</b>				<b>PERENCANAAN</b>				<b>3.543.494.600</b>					
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaannya sesuai ketentuan</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>100%</b>	<b>1.446.000.000</b>					
5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	tersusunnya dokumen sinergitas hasil verifikasi dokumen-dokumen perencanaan	Kota Madiun	1 dok	1.000.750.000					
5	01	02	2.01	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi tingkat Kota	Kota Madiun	100%	375.000.000	kegiatan perencanaan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen (dokumen)	7	1.000.750.000	
5	01	02	2.01	0 3	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	terlaksananya pelaksanaan musrenbang kota	Kota Madiun	1 kali	220.000.000	kegiatan perencanaan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen (dokumen)	7		
5	01	02	2.01	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	terlaksananya pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Madiun	1 kali	175.000.000	kegiatan perencanaan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen (dokumen)	7		



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhiya kebutuhan data dan informasi	Kota Madiun	100%	125.000.000	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Sistim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (Aplikasi)	1	125.000.000	-
5	01	02	2.01	08	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhiya kebutuhan keamanan data dan informasi	Kota Madiun	100%	105.750.000	kegiatan perencanaan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen (dokumen)	7		
5	01	02	2.02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kota Madiun	1 dok	97.000.000					
5	01	02	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	terpenuhiya kebutuhan koordinasi penyusunan pagu indikatif tingkat Kota	Kota Madiun	100%	97.000.000	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Sistim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (Aplikasi)	1		
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kota Madiun	100%	348.250.000					
5	01	02	2.03	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	tersusunnya dokumen monitoring program/keg SPM	Kota Madiun	2 dok semester	95.750.000	kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	Jumlah Dokumen (dokumen)	6	320.250.000	
5	01	02	2.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen evaluasi program/keg tingkat kota	Kota Madiun	4 dokumen triwulan 2 dokumen semester	252.500.000	kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	Jumlah Dokumen (dokumen)	6		
5	01	03			<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>100%</b>	<b>451.000.000</b>					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01	03	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Kota Madiun	1 dokumen	40.000.000					
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Kota Madiun	100%	15.000.000	Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen (dokumen)	1	451.000.000	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan tingkat Kota	Kota Madiun	12 dokumen hasil monitoring dan 2 dok evaluasi	25.000.000	Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen (dokumen)	1		
5	01	03	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Kota Madiun	1 dokumen	411.000.000					
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Kota Madiun	100% (seminar)	269.850.000	Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen (dokumen)	1		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia tingkat Kota	Kota Madiun	12 dokumen hasil monitoring dan 2 dok evaluasi	141.150.000	Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen (dokumen)	1		
5	01	04			<b>PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>100%</b>	<b>242.074.000</b>					
5	01	04	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Kota Madiun	1 dokumen	242.074.000					
5	01	04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi bPerencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Kota Madiun	100%	47.237.000	Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen (dokumen)	2	242.074.000	
5	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Kesejahteraan Masyarakat tingkat Kota	Kota Madiun	12 dokumen hasil monitoring dan 2 dok evaluasi	194.837.000	Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen (dokumen)	2		
5	01	05			<b>PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>	<b>Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>100%</b>	<b>536.000.000</b>					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01	05	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kota Madiun	1 dokumen	120.000.000					
5	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	tersusunnya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Bidang Sumber Daya Alam	Kota Madiun	2 dokumen hasil monitoring dan 1 dok evaluasi	120.000.000	Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen (dokumen)	1	120.000.000	
5	01	05	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Kota Madiun	1 dokumen	201.000.000					
5	01	05	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Kota Madiun	100%	85.000.000	Kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan	Jumlah Dokumen (dokumen)	2	416.000.000	
5	01	05	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	tersusunnya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Kota Madiun	2 dokumen hasil monitoring dan 1 dok evaluasi	116.000.000	Kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan	Jumlah Dokumen (dokumen)	2		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01	05	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bdadng Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bdadng Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Kota Madiun		215.000.000					
5	01	05	2.03	0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan.	tersusunnya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan okumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan.	Kota Madiun	2 dokumen hasil monitor ing dan 1 dok evaluasi	215.000.000	Kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan	Jumlah Dokumen (dokumen)	2		
5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>									
5	05				<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang dapat dimanfaatkan</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>100%</b>	<b>868.420.600</b>					
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersusunnya dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Madiun	1 dok	489.570.600					
5	05	02	2.01	0 2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.	Tersusunnya dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.	Kota Madiun	1 dok	261.204.100	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen (dokumen)	3	489.570.600	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	05	02	2.01	1 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terbangunnya aplikasi Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Madiun	1 aplikasi	228.366.500	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen (dokumen)	3		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Madiun	1 dok	378.850.000					
5	05	02	2.04	0 1	Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	tersusunnya dokumen pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Madiun	1 dok (seminar)	378.850.000	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana	Jumlah Dokumen (dokumen)	3	378.850.000	
<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>														
<b>X</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
X	<b>XX</b>				<b>KEUANGAN</b>									
X	XX	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			<b>51.363.835.046</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan/ laporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	
X	XX	01	2.01		PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%	20.000.000					
X	XX	01	2.01	0 2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKAD	6 dokumen	20.000.000	Kegiatan penyusunan perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ihtisar realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	8 Dokumen	20.000.000	
X	XX	01	1,02		ADMINISTRASI KEUANGAN	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%	32.990.785.046	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	51.151.835.046	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	BPKAD	100%	32.990.785.046	Gaji dan Tunjangan	Terpenuhi kebutuhan Gaji dan Tunjangan	35 orang	32.990.785.046	
X	XX	01	1,03		ADMINISTRASI UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%	18.353.050.000					
X	XX	01	1,03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	BPKAD	100%	17.761.050.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	7 jenis	17.761.050.000	
X	XX	01	1,03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	400.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	103 kali	400.000.000	
X	XX	01	1,03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	BPKAD	100%	55.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah sarana dan prasarana	30 jenis	55.000.000	
X	XX	01	1,03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	BPKAD	100%	50.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	1 gedung	50.000.000	
X	XX	01	1,03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	BPKAD	100%	87.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Peralatan	12 jenis	87.000.000	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>realisasi kinerja yang memenuhi target</b>		<b>100%</b>	<b>2.659.921.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH</b>	<b>Pengesahan APBD tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1.142.592.000</b>	
5	02	02	2,01		koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu		Tepat waktu	1.142.592.000					
5	02	02	2,01	01	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang disusun	BPKAD	2 dokumen	100.000.000	Kegiatan Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	5 fitur	314.999.000	
5	02	02	2,01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang disusun	BPKAD	2 dokumen	75.000.000					
5	02	02	2,01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah RKA yang terfasilitasi	BPKAD	5 fitur	139.999.000					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	02	2,01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA yang terfasilitasi	BPKAD	2 dokumen	68.529.000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Jumlah DPA yang terfasilitasi	2 dokumen	68.529.000	
5	02	02	2,01	05	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang disusun	BPKAD	2 dokumen	454.414.000	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah APBD dan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen yang disusun	2 dokumen	454.414.000	
5	02	02	2,01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	BPKAD	2 dokumen	304.650.000	Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus	Jumlah Dokumen yang disusun	2 dokumen	304.650.000	
5	02	02	2,02		koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan		100%	250.000.000					
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kasda	BPKAD	55 dokumen	130.000.000	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/Kas Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kasda	55 dokumen	130.000.000	
5	02	01	2,02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas	BPKAD	3 jenis dokumen	120.000.000	Kegiatan Penyusunan dan penerbitan SPD dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas	3 jenis dokumen	120.000.000	
5	02	02	2,03		koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	permintaan laporan keuangan yang terfasilitasi		Tepat waktu	1.267.329.000					
5	02	02	2,03	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Produk Hukum	BPKAD	2 Produk Hukum	280.000.000	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Produk Hukum	2 Produk Hukum	280.000.000	
5	02	02	2,03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	BPKAD	2 Buku	40.000.000	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 Buku	40.000.000	
5	02	02	2,03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen	BPKAD	3 Dokumen	100.000.000	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah dokumen	3 Dokumen	100.000.000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	02	2,03	1 2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Sosialisasi dan pendampingan OPD	BPKAD	500 orang/ 30 pen damping an	847.329.000	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Sosialisasi	500 orang	228.129.000	
										Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pendampingan	20 Pendamping an	619.200.000	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD</b>		<b>100%</b>	<b>5.244.980.000</b>					
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		100%	5.244.980.000					
5	02	03	2.01	0 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	BPKAD	5 dokumen	250.000.000	Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	5 dokumen	250.000.000	
5	02	03	2.01	0 7	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Daerah yang diasuransikan	BPKAD	2 jenis aset ( gedung dan Kendaraan Dinas) / 6 tanah/bangunan	4.944.980.000	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah Kota Madiun	Jumlah Aset Daerah yang diasuransikan	2 jenis aset ( gedung dan Kendaraan Dinas)	3.000.000.000	
										Kegiatan Optimalisasi, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	6 tanah / bangunan	1.944.980.000	
5	02	03	2.01	1 1	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	jenis dan tipe barang yang sudah terstandart	dalam dan luar kota	18 buku	50.000.000	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dan Realisasi Belanja Modal	Jumlah kegiatan Pemerintah Kota	18 buku	50.000.000	
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>X</b>					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun							
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	7.500.000			100%	2.500.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	6 dokumen	2.500.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	7 Dokumen	2.500.000	
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	12 dokumen	3.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	7 Dokumen		
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	2 dokumen	2.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	7 Dokumen		
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	8.440.682.000			100%	8.440.682.000	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	8.440.682.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	38 Orang	8.440.682.000	
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	13 dokumen	3.300.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	7 Dokumen		
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	1.521.209.000			100%	1.521.209.000	
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	715.724.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	8 Jenis	715.724.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	88.465.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 Kali	88.465.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	557.520.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Jenis	557.520.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	15.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	1 Unit	15.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	44.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	44.500.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	100.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	7 Jenis	100.000.000	
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	91.000.000					
X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	88.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	38 Orang		
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	persentase peserta yang paham	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	100%	3.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	38 Orang		
<b>5</b>					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>5</b>	<b>02</b>				<b>KEUANGAN</b>									
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Pertumbuhan Pajak Asli Daerah</b>		<b>1,5%</b>						
5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Madiun	1,5%	980.855.000			1,5%	980.855.000	
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan Intensifikasi	Kota Madiun	1 Dokumen	610.000.000	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen	550.000.000	
										Kegiatan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Berestasi dan Gebyar Undian PBB	Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1,5%	60.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	1 Dokumen	46.800.000	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT	Jumlah Dokumen Evaluasi Aplikasi Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah	1 Dokumen	46.800.000	
5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Inovasi Berbasis IT	Kota Madiun	1 Aplikasi	150.000.000	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Aplikasi Yang di Kembangkan	1 Aplikasi	150.000.000	
5	02	04	2.02	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah Konsultasi	Kota Madiun	2.500 WP	10.750.000	Kegiatan Monitoring Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan BPHTB	Jumlah Wajib Pajak Yang Diberikan Konsultasi dan Pendampingan	2.500 WP	10.750.000	
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	1 Dokumen	36.200.000	Kegiatan Pemutakiran Basis Data Obyek Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Pemutakiran Basis Data	1 Dokumen	36.200.000	
5	02	04	2.02	10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Peajakan Daerah dan Petugas Pungut PBB	Kota Madiun	20 WP	34.200.000	Kegiatan Verifikasi Data Piutang Pajak PBB	Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	100%	-	
										Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1,5%	34.200.000	
5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	1 Dokumen	92.905.000	Kegiatan Monitoring dan Pelaporan	Prosentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	100%	-	
										Kegiatan Rekonsiliasi dan Pembinaan Petugas Pungut	Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1,5%	82.105.000	
										Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Piutang Pajak Non PBB	Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1,5%	10.800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>													
<b>X</b>					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>								
<b>X</b>	<b>XX</b>				<b>KEPEGAWAIAN</b>								
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%					
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BKD Kota Madiun	6 dokumen	72.162.576	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	6 dokumen	72.162.576
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	BKD Kota Madiun	100%					
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	BKD Kota Madiun	100%	4.100.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	15 Jenis	4.100.000.000
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	BKD Kota Madiun	100%					
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	BKD Kota Madiun	100%	900.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	15 Jenis	900.000.000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Luar Daerah	100%	700.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	150 Kali	700.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	BKD Kota Madiun	100%	290.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasana Kantor	4 Jenis	290.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	BKD Kota Madiun	100%	155.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	2 gedung	25.000.000	
						persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan		100%		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Diklat	Jumlah Acara	100 Acara	130.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	BKD Kota Madiun	100%	22.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	20 Kendaraan	22.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang representatif	BKD Kota Madiun	100%	30.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasana Kantor	9 Jenis	30.000.000	
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	BKD Kota Madiun	100%	1.225.000.000	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	1 Gedung/ Bangunan	1.225.000.000	Mushola BKD dan atap Gedung Diklat
<b>5</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>5</b>	<b>3</b>				<b>KEPEGAWAIAN</b>									
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	IKM Perangkat Daerah	<b>BKD Kota Madiun</b>	<b>75</b>						
5	03	02	2.01		Pengelolaan Data dan Infromasi ASN	Persentase updating data dan informasi kepegawaian sesuai SOP	BKD Kota Madiun	100%		Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP			
5	03	02	2.01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Dipupdate	BKD Kota Madiun	3451 dokumen	357.787.200	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diupdate	3451 dokumen	357.787.200	
5	03	02	2.02		Administrasi Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	BKD Kota Madiun	100%						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	03	02	2,02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah formasi	BKD Kota Madiun	300 Formasi	1.104.801.560	Kegiatan Pengadaan ASN	Jumlah peserta	4000 Peserta	1.009.326.560		
										Kegiatan Administrasi Calon ASN	Jumlah CPNS	300 PNS	95.475.000		
5	03	02	2,02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan	Jumlah penempatan PNS	BKD Kota Madiun	209 PNS	317.978.080	Kegiatan Penempatan PNS	Jumlah penempatan PNS	209 PNS	317.978.080		
5	03	02	2,02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	BKD Kota Madiun	225 PNS	53.940.000	Kegiatan Administrasi Kenaikan Pangkat, Gaji Berkaca dan Pensiun PNS	Jumlah SK yang diterbitkan	2142 Dokumen	107.880.000		
5	03	02	2,02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	BKD Kota Madiun	2142 Dokumen	53.940.000						
5	03	02	2,03		Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase ASN yang meningkat Kapasitasnya	BKD Kota Madiun	100%							
5	3	2	2,03	01	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah peserta	BKD Kota Madiun	60 Peserta	119.600.000	Kegiatan Bimtek / Sosialisasi / Workshop	Jumlah Peserta	100 Peserta	119.600.000		
5	3	2	2,03	03	Pengembangan Assessment Center	Jumlah peserta	BKD Kota Madiun	60 PNS	338.250.000	Kegiatan Assesment Pegawai	Jumlah Peserta	60 PNS	338.250.000		
5	03	02	2,05		Pembinaan ASN	Prosentase terselesaikannya permasalahan Kepegawaian	BKD Kota Madiun	100%							
5	03	02	2,05	03	Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Dokumen	BKD Kota Madiun	3991 dokumen	69.500.000	Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Masalah Kepegawaian	jumlah pembinaan/ permasalahan	40 PNS	60.000.000		
										Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase terselesaikannya Administrasi Kepegawaian	93%	9.500.000		
										Kegiatan Pemberian Penghargaan Satya Lancana	Jumlah PNS	100			
<b>5</b>	<b>04</b>				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>										
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi</b>	<b>BKD Kota Madiun</b>	<b>100%</b>							
5	04	02	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Teknis Aparatur	BKD Kota Madiun	100%							

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	04	02	2,01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Pejabat Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta	BKD Kota Madiun	100 Peserta	1.441.015.204	Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta	100 Peserta	1.441.015.204	
5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Managerial dan Fungsional Aparatur	BKD Kota Madiun	90%						
5	04	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta	BKD Kota Madiun	380 PNS	3.803.375.000	Kegiatan Diklat Kepemimpinan	Jumlah Peserta	54 PNS	1.450.000.000	
										Kegiatan Pembekalan CPNS	Jumlah Peserta	200 PNS	74.575.000	
										Kegiatan Latihan Dasar CPNS	Jumlah Peserta	163 ASN	2.278.800.000	
<b>INSPEKTORAT</b>														
<b>X</b>					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>				<b>7.006.328.000</b>					
<b>X</b>	<b>XX</b>				<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			<b>7.006.328.000</b>					
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%	97.353.000					



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Inspektorat Kota Madiun	6 dokumen	97.353.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/ pelaporan yang disusun tepat waktu	10 dokumen	97.353.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%	5.761.191.000					
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Inspektorat Kota Madiun	100%	5.761.191.000	Belanja Tidak Langsung	jumlah pegawai ASN	40 orang	5.761.191.000	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%	1.147.784.000					
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	Inspektorat Kota Madiun	100%	515.912.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	18 jenis	515.912.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	491.980.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	'65 kali	491.980.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Inspektorat Kota Madiun	100%	75.000.000	Kegiatan Pengadaan dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi	'2 jenis	75.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Inspektorat Kota Madiun	100%	5.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	'1 paket	5.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/ operasional yang layak digunakan	Inspektorat Kota Madiun	100%	24.892.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	'1 unit	24.892.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Inspektorat Kota Madiun	100%	35.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	'5 jenis	35.000.000	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6					<b>UNSUR PENGAWASAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>2.510.176.000</b>					
6	01				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									
6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3</b>		<b>25%</b>	<b>2.503.576.000</b>					
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3		25%	2.503.576.000					
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen hasil audit	Inspektorat Kota Madiun	18 dokumen	512.594.000	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah dokumen hasil audit	18 dokumen	290.169.000	
										Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas bersertifikat	'25 orang	222.425.000	
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen hasil reviu	Inspektorat Kota Madiun	8 dokumen	486.582.000	Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil reviu	8 dokumen	486.582.000	
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan kegiatan	Inspektorat Kota Madiun	9 dokumen	951.374.000	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan Pengendalian Gratifikasi	4 dokumen	271.514.000	
										Kegiatan Optimalisasi Saber Pungli	Jumlah Laporan	1 dokumen	679.860.000	
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen hasil evaluasi	Inspektorat Kota Madiun	4 dokumen	553.026.000	Kegiatan Evaluasi SPIP Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi SPIP	34 laporan	45.200.000	
										Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi	4 dokumen	471.692.000	
										Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta pembinaan	'150 orang	36.134.000	
6	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>6.600.000</b>					

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi		100%	6.600.000					
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Inspektorat Kota Madiun	2 dokumen	6.600.000	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sisdur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 dokumen	6.600.000
<b>KECAMATAN KARTOHARJO</b>													
<b>X</b>					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>								
<b>X</b>	<b>XX</b>				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100%					
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Kartoharjo	6 dokumen	62.964.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	12 dokumen	30.273.600
										Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah Dokumen	1 dokumen	9.807.120
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Kecamatan Kartoharjo	12 dokumen	2.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	12 dokumen	
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Kecamatan Kartoharjo	2 dokumen	2.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	12 dokumen	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.02		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%						
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Kecamatan Kartoharjo	100%	8.815.512.700	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	77 orang	8.815.512.700	
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Kecamatan Kartoharjo	13 dokumen	2.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	12 dokumen		
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Kecamatan Kartoharjo	100%	1.000.968.980	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	9 jenis	1.171.968.980	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Kecamatan Kartoharjo dan luar daerah	100%	138.900.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	16 kali	138.900.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Kecamatan Kartoharjo	100%	71.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	9 jenis	1.171.968.980	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Kecamatan Kartoharjo	100%	53.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	1 gedung	53.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/ operasional yang layak digunakan	Kecamatan Kartoharjo	100%	35.251.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	16 unit	35.251.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Kecamatan Kartoharjo	100%	34.960.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	3 jenis	34.960.000	
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang representatif	Kecamatan Kartoharjo	100%	100.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	9 jenis	1.171.968.980	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai		100%						
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	persentase peserta yang paham	Kecamatan Kartoharjo	100%	7.200.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	9 jenis		
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>KECAMATAN</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pendelegasian wewenang sesuai ketentuan	Kecamatan Kartoharjo	100%						
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Kecamatan Kartoharjo	100%		Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan			
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Kelurahan	100%	5.023.796.960	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi		543.174.800	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi		630.448.690	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pilangbango	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi		530.965.340	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi		581.024.800	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi		626.494.510	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi		473.620.520	
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Tawangrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi		504.396.520	
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi		529.547.240	
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi		604.124.540	
7	01	02	2,03		<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti		100%					
7	01	02	2,03	01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti		100%	62.205.440				
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD</b>							

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang beartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang mendapat klasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Kartoharjo	10%	250.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan Musrenbang Kecamatan Kartoharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang kota	10%	250.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	Kelurahan	27 paket	1.896.720.000	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kartoharjo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	3 paket	211.200.000	
										Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klegen	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	3 paket	211.200.000	
										Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukosari	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	3 paket	211.200.000	
										Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangrejo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	3 paket	209.200.000	
										Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejomulyo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	3 paket	211.200.000	
										Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigoro	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	3 paket	209.200.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro-oro Ombo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	3 paket	211.200.000	
										Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilangbango	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	3 paket	211.120.000	
										Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	3 paket	211.200.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	100%	1.253.280.000	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	138.800.000	
										Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klegen	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	138.800.000	
										Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukosari	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	138.800.000	
										Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	140.800.000	
										Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	138.800.000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigoro	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	140.800.000	
										Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Ombo	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	138.800.000	
										Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilangbango	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	138.880.000	
										Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelun	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	138.800.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kecamatan Kartoharjo</b>							
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan Kartoharjo	100%		Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Kartoharjo	100%	66.150.000	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan, pemberdayaan	9 kegiatan	66.150.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											masyarakat,pe mbangunan, kesejahteraan sosial dan ketentrman dan ketertiban umum			
7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		100%						
7	01	04	2.01	01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	30.152.320	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,pe mbangunan, kesejahteraan sosial dan ketentrman dan ketertiban umum	1 kegiatan	30.152.320	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan</b>								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Kecamatan Kartoharjo							
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Sosialisasi	Kecamatan Kartoharjo	100%	33.750.000	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,pe mbangunan,	1 kegiatan	33.750.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Bhinneka Tunggal Ika Serta						kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum			
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	Kecamatan Kartoharjo	100%	48.835.280	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum	6 kegiatan	48.835.280	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan		2 dokumen	15.000.000	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	22.883.280	
<b>KECAMATAN MANGUHARJO</b>														
<b>X</b>					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>				<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kecamatan Manguharjo							
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Kecamatan Manguharjo							

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Manguharjo	6 dokumen	110.263.320	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	12 dokumen	43.120.800	
											Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah dokumen	1 dokumen	29.192.400
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Kecamatan Manguharjo	12 dokumen	2.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	12 dokumen		
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Kecamatan Manguharjo	2 dokumen	2.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	12 dokumen		
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%						
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Kecamatan Manguharjo	100%	9.477.112.766	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	81 orang Kecamatan dan kelurahan Termasuk P. Mujiono Lurah Dempelan	9.477.112.766	
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Kecamatan Manguharjo	13 dokumen	2.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	12 dokumen		
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Kecamatan Manguharjo	100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Kecamatan Manguharjo	100%	1.110.612.120	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	21 jenis	1.110.612.120	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	143.751.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 kali, 2.337 org	143.751.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Kecamatan Manguharjo	100%	50.000.000	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana		50.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Kecamatan Manguharjo	100%	71.298.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	1 gedung	71.298.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/ operasional yang layak digunakan	Kecamatan Manguharjo	100%	59.559.200	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	16 Unit	59.559.200	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Kecamatan Manguharjo	100%	45.300.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	1 Paket	45.300.000	
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai		100%						
	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	persentase peserta yang paham	Kecamatan Manguharjo	100%	7.200.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	21 jenis		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>7</b>					<b>KECAMATAN</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pendelegasian wewenang sesuai ketentuan</b>	<b>Kecamatan Manguharjo</b>	<b>100%</b>						
7	01	03	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Kecamatan Manguharjo	100%		Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%		
7	01	03	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Kecamatan Manguharjo	100%	5.402.720.760	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100%	606.063.200	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											di kelurahan Madiun Lor sesuai ketentuan			
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan	100%	634.835.390	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul sesuai ketentuan	100%	673.326.140	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Lor sesuai ketentuan	100%	751.035.280	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong dan	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Ngegong sesuai ketentuan	100%	496.325.440	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Pangongangan sesuai ketentuan	100%	515.309.650	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Patihan sesuai ketentuan	100%	523.046.940	
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Sogaten sesuai ketentuan	100%	564.459.440	
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Winongo sesuai ketentuan	100%	638.319.280	
7	01	03	2,03		<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti		100%					
7	01	03	2,03	01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti		<b>100%</b>	62.205.440				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase usulan musrenbang manguharjo yang diprioritaskan dalam RKPD</b>	<b>Kecamatan Manguharjo</b>						
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang bearticipasi dalam kegiatan	Kecamatan Manguharjo			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang mendapat klasifikasi		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						pemberdayaan masyarakat					swasembada di Kecamatan Manguharjo			
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Kecamatan Manguharjo	10%	294.274.240	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan Musrenbang Kecamatan Manguharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang kota	10%	294.274.240	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	9 Kelurahan	27 paket	1.810.000.000	Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	( 4 Unit )	150.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	( 4 Unit )	250.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	( 4 Unit )	250.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Nambangan Lor	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	( 4 Unit )	250.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Ngegong	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	( 4 Unit )	150.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	( 4 Unit )	110.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	( 4 Unit )	150.000.000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dan Prasarana Kelurahan Patihan				
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	( 4 Unit )	250.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	( 4 Unit )	250.000.000	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	9 Kelurahan	100%	1.340.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	40%	200.000.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	40%	100.000.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	45%	100.000.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	30%	100.000.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngegong	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	30%	200.000.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangongangan	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi	35%	240.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											dalam Kegiatan Pemberdayaan			
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patihan	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	30%	200.000.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sogaten	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	35%	100.000.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Winongo	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	40%	100.000.000	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kecamatan Manguharjo</b>							
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan Manguharjo	100%		Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%		
7	01	04	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Manguharjo	100%	71.975.000	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	71.975.000	

1				2		3	4	5	6		7	8	9	10	11
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Manguharjo	100%							
7	01	04	2,02	1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Manguharjo	100%	77.600.000	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%	77.600.000		
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan									
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti		100%		Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%			
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945	Jumlah Sosialisasi	Kecamatan Manguharjo	100%	37.432.414	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%	37.432.414		
7	01	05	2,01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	Kecamatan Manguharjo	100%	55.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%	55.000.000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Manguharjo	2 dokumen	15.000.000	Kegiatan Penyusunan Buku Profil kelurahan dan Monografi kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	2 dokumen	37.950.120	
<b>KECAMATAN TAMAN</b>														
<b>X</b>					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>				<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kecamatan Taman							
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Kecamatan Taman							
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Taman	6 dokumen	97.079.040	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	12 dokumen	41.395.968	
										Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah dokumen	1 dokumen	27.841.536	
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Kecamatan Taman	12 dokumen	14.741.880	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	12 dokumen		
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Kecamatan Taman	2 dokumen	14.741.880	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	12 dokumen		
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Kecamatan Taman	100%						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Kecamatan Taman	100%	9.225.821.629	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	76 orang	9.225.821.629	
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Kecamatan Taman	13 dokumen	1.500.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	12 dokumen		
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Kecamatan Taman	100%	881.186.404	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	10 paket	881.186.404	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	luar daerah	100%	97.793.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35 kali	97.793.000	
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Kecamatan Taman	100%	35.000.000					
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Kecamatan Taman	100%	15.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	1 gedung	15.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Kecamatan Taman	100%	48.448.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	16 Unit	48.448.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Kecamatan Taman	100%	36.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	1 Paket	36.500.000	
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Kecamatan Taman	100%						
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	persentase peserta yang paham	Kecamatan Taman	100%	4.600.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	10 paket		

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
<b>7</b>				<b>KECAMATAN</b>										
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pendelegasian wewenang sesuai ketentuan</b>	<b>Kecamatan Taman</b>	<b>100%</b>						
7	01	03	2,02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Kecamatan Taman	100%		Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%		
7	01	03	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Kecamatan Taman	100%	4.582.664.380	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Mojorejo sesuai ketentuan	100%	569.186.640	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Pandean sesuai ketentuan	100%	544.209.680	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Banjarejo sesuai ketentuan	100%	482.411.040	
										Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Kuncen sesuai ketentuan	100%	352.108.420	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manisrejo sesuai ketentuan	100%	611.275.560	
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Kejuron sesuai ketentuan	100%	530.256.040	
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Josenan sesuai ketentuan	100%	463.824.560	
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Demangan sesuai ketentuan	100%	468.208.400	
									Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Taman sesuai ketentuan	100%	561.184.040	
7	01	03	2,03		<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti		100%					

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	03	2,03	01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti		100%	57.777.840					
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase usulan musrenbang Kec. Taman yang diprioritaskan dalam RKPD</b>	<b>Kecamatan Taman</b>	<b>12%</b>						
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang beartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Taman			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang mendapat klasifikasi swasembada di Kecamatan Taman			
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang Taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Kecamatan Taman	10%	206.714.846	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan Musrenbang Kecamatan Taman yang diprioritaskan dalam Musrenbang kota	10%	206.714.846	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi	9 Kelurahan	27 paket	900.000.000	Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	2 unit	100.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	2 unit	100.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Banjarejo	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	2 unit	100.000.000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Kuncen	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	2 unit	100.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Manisrejo	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	2 unit	100.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	2 unit	100.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	2 unit	100.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	2 unit	100.000.000	
										Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman	Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	2 unit	100.000.000	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	9 Kelurahan	100%	2.276.469.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojorejo	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	252.941.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	252.941.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarejo	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	252.941.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kuncen	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	252.941.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manisrejo	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	252.941.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kejuron	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	252.941.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Josenan	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	252.941.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	252.941.000	
										Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taman	Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	252.941.000	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kecamatan Taman</b>	<b>100%</b>						

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti		100%					
7	01	04	2,02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Taman	100%	40.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%	40.000.000
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Taman	100%					
7	01	04	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Taman	100%	30.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%	30.000.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan	Kecamatan Manguharjo	100%					
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti				Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945	Jumlah Sosialisasi	Kecamatan Manguharjo	100%	24.401.296	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%	24.401.296	
7	01	05	2,01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	Kecamatan Manguharjo	100%	30.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%	30.000.000	
7	01	05	2,01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Manguharjo	2 dokumen	25.812.960	Kegiatan Penyusunan Buku Profil kelurahan dan Monografi kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	2 dokumen	27.841.536	

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

<b>X</b>					<b>RUTIN PERANGKAT DAERAH</b>									
<b>X</b>	<b>XX</b>				<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
X	XX	<b>01</b>			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Bakesbang pol							
X	XX	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Bakesbang pol	100%						
X	XX	01	2,01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Bakesbang pol	6 dokumen	92.392.640	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	12 dokumen	92.392.640	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Bakesbang pol	100%						
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Bakesbang pol	100%	2.886.016.714	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	28 orang	2.886.016.714	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Bakesbang pol	100%						
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Bakesbang pol	100%	565.411.625	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	565.411.625	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Bakesbang pol	100%	120.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 kali	120.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Bakesbang pol	100%	7.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	1 gedung	7.500.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Bakesbang pol	100%	24.892.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	23 unit	24.892.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Bakesbang pol	100%	35.000.000	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	7 jenis	35.000.000	
<b>8</b>					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>8</b>	<b>01</b>				<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		Bakesbang pol			<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI DAN HAM serta PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL</b>				

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	02	2.0 1		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		Bakesbang pol						
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	* Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila * Lomba pidato Bung Karno * Revitalisasi Pancasila (Rumah Bersama)	Bakesbang pol	810 orang	319.318.052	Kegiatan Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta Pengembangan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM	Jumlah peserta sosialisasi, lomba pidato dan cerdas cermat	1020 orang	319.318.052
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Konflik horisontal di dalam masyarakat</b>	Bakesbang pol	<b>0 konflik</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI DAN HAM serta PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>0 konflik</b>	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	Bakesbang pol						
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	* Tim Kewaspadaan Dini * Jumlah peserta sosialisasi	Bakesbang pol	200 orang	123.495.168	Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial	Jumlah peserta	200 orang	1.323.495.168

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Prosentase pemahaman masyarakat dibidang politik</b>	Bakesbang pol	<b>80%</b>		<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN ORKEMAS</b>				
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	Bakesbang pol	80%						
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	* Jumlah peserta pembinaan * Narsum dari Pusat/Propinsi Jatim	Bakesbang pol	100 orang	171.840.000	Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Jumlah peserta pembinaan	100 orang	231.840.000	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	* Jumlah peserta pengelolaan keuangan Paol	Bakesbang pol	22 orang	25.000.000	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Paol	Jumlah peserta pengelolaan keuangan Paol	22 orang	725.062.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Prosentase Orkemas</b>	Bakesbang pol	<b>73</b>		<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN ORKEMAS</b>				
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orkemas yang aktif	Bakesbang pol	100 orkemas						
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	* Jumlah peserta fasilitasi	Bakesbang pol	100 orang	74.985.000	Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Fasilitasi Orkemas	Jumlah peserta	100 orang	222.985.000	
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Prosentase koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	Bakesbang pol	<b>100%</b>		<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>				
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah koordinasi	Bakesbang pol	3 kali						
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	* Jumlah peserta pembinaan	Bakesbang pol	200 orang	153.480.304	Kegiatan Peningkatan Toleransi kerukunan beragama	Jumlah peserta pembinaan	200 orang	353.830.304	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	* Jumlah peserta pembinaan	Bakesbang pol	475 orang	154.3 62.219	Kegiatan Pembinaan Penganut Kepercayaan dan Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta	475 orang	154.362.219	

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001